



PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG **RENCANA PEMBANGUNAN**
JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD 2025-2029



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH **2025**



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 – 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh).
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi

adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Riau untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan visi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN, dan RTRW dengan memperhatikan RPJMD Provinsi.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika berikut:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	: Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV	: Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB V	: Penutup

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui penyusunan RKPD setiap 1 (satu) tahun.

- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Agustus 2025

WALI KOTA PEKANBARU,

AGUNG NUGROHO



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ZULHELMI ARIFIN



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 NOMOR 2

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU NOMOR
URUT PERDA (1.38.A/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi Ketentuan Umum, RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup serta dokumen RPJMD. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru Tahun 2025 – 2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, visi, misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Pekanbaru;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah Kota Pekanbaru beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Pekanbaru;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang ada di perbatasan Kota Pekanbaru;
4. Menyesuaikan proses penyusunan dan sistematika dokumen RPJMD Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025;
5. Merumuskan fokus pembangunan pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekanbaru pada tiap pentahapan pembangunannya berdasarkan evaluasi pencapaian rencana jangka panjang dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekanbaru;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

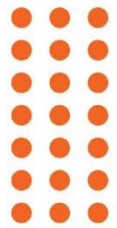
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR



PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENEGAH DAERAH
KOTA PEKANBARU
2025-2029



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH **2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin,

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan izin-Nya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama Tim Penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 merupakan penyempurnaan dari dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 serta mengelaborasi dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada Serentak secara Nasional Tahun 2024.

Secara substansi rancangan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta memperhatikan RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu terlaksananya penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029, kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan selama lima tahun ke depan. Besar harapan kami, dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	5
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI	3
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	3
2.1.1. Posisi Dan Peran Strategis Daerah	3
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	17
2.1.3. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan.....	19
2.1.4. Berketahaan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan	21
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas.....	29
2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim.....	34
2.1.7. Aspek Demografi.....	43
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	50
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	50
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua.....	61
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata	66
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif	72
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	75
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	80
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH	85



2.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	85
2.3.2.	IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	86
2.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	91
2.3.4.	Transformasi Digital.....	92
2.3.5.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	94
2.3.6.	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	96
2.3.7.	Stabilitas Ekonomi Makro.....	102
2.4.	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	105
2.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif	105
2.4.2.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial.....	109
2.4.3.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan berdaya Gentar Kawasan	112
2.4.4.	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah.....	113
2.4.5.	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	210
2.5.	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	235
2.5.1.	Permasalahan Daerah.....	236
2.5.2.	Isu Strategis Daerah	254
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	271
3.1.	VISI DAN MISI	271
3.1.1.	Visi.....	271
3.1.2.	Misi	272
3.2.	TUJUAN DAN SASARAN	278
3.3.	STRATEGI, DAN PROGRAM PRIORITAS	285
3.3.1.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	285
3.3.2.	Arah Kebijakan Wilayah	302
3.4.	Program Prioritas Kota Pekanbaru	314
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	339
4.1.	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	339





4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	368
BAB V PENUTUP	381
5.1. KESIMPULAN.....	383
5.2. KAIDAH PELAKSANAAN	384
5.3. PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN	384
5.4. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	385
5.5. MANAJEMEN RESIKO	386



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2024	3
Tabel II.2. Luas Kelas Kemiringan Lereng Kota Pekanbaru.....	5
Tabel II.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	9
Tabel II.4. Suhu Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 (OC).....	10
Tabel II.5. Rata-Rata Kelembaban Kota Pekanbaru 2020-2024 (%).....	11
Tabel II.6. Kecepatan, Arah Angin Dan Tekanan Angin Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	11
Tabel II.7. Konsumsi Listrik Per Kapita (KWh/kapita/tahun 2020- 2024	25
Tabel II.8. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024	26
Tabel II.9. Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun2020- 2024 (%).....	32
Tabel II.10. Indikator Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024.....	33
Tabel II.11. Persentase Cakupan Area Persampahan Tahun 2020 -2024	34
Tabel II.12. Tabel Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2024.....	37
Tabel II.13. Titik-titik Genangan dan Lokasi Banjir di Kota Pekanbaru	39
Tabel II.14. Kejadian Kebakaran Lahan per Wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023	41
Tabel II.15. Kejadian Bencana di Kota Pekanbaru Tahun 2023.....	42
Tabel II.16. Resiliensi terhadap perubahan iklim di Provinsi Riau Tahun 2020-2024	43
Tabel II.17 Proyeksi Jumlah Penduduk, Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Proporsi Penduduk Usia Lanjut serta Angka Ketergantungan Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029	44
Tabel II.17. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024.....	47
Tabel II.18. Sebaran Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024	48
Tabel II.19. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun Tahun 2020-2024.....	49



Tabel II.20.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekanbaru (persen), 2020–2024.....	51
Tabel II.21.	Kondisi Kemiskinan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024	52
Tabel II.22.	Capaian indikator IPBK (Indikator Pembangunan Berwawasan Kependudukan).....	59
Tabel II.23.	Indikator Keluarga Sehat Kota Pekanbaru 2020–2024	64
Tabel II.24.	Indeks Literasi Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024	71
Tabel II.25.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	73
Tabel II.26.	Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024..	75
Tabel II.27.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	76
Tabel II.28.	Lembaga Seni Budaya Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	76
Tabel II.29.	Data Fasilitas Olahraga di Kota Pekanbaru Tahun	76
Tabel II.30.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024	84
Tabel II.31.	Angka Rasio Ketergantungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024.....	85
Tabel II.32.	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Pekanbaru miliar rupiah) Tahun 2020-2024	86
Tabel II.33.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Pekanbaru (miliar rupiah) Tahun 2020-2024	87
Tabel II.34.	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024	93
Tabel II.35.	PMTB, PDRB dan Persentase PMBTB Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	94
Tabel II.36.	Persentase Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	95
Tabel II.37.	Produksi Listrik di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024 (Kwh)	97
Tabel II.38.	Kondisi Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023 (km)	98
Tabel II.39.	Perkembangan Jumlah Penumpang, Bagasi dan Barang Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2019-2024	99
Tabel II.40.	Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur yang Tersedia di Kota Pekanbaru	100
Tabel II.41.	Angka Kriminalitas Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024.....	101





Tabel II.42.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023	101
Tabel II.43.	Rasio Pajak daerah Terhadap PDRB Kota Pekanbaru 2020-2024	102
Tabel II.44.	Indeks Reformasi Hukum Kota Pekanbaru 2020-2024	105
Tabel II.45.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pekanbaru dan Provinsi Riau 2020-2024	106
Tabel II.46.	Pelayanan Publik Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau 2020-2024	107
Tabel II.47.	Indeks Integritas Nasional dan Provinsi Riau 2020-2024	108
Tabel II.48.	Indeks Survei Integritas Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2024	108
Tabel II.49.	Persentase Penegakan Perda Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau 2020-2024	110
Tabel II.50.	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023	111
Tabel II.51.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, Kota Pekanbaru Tahun 2021–2024	112
Tabel II.52.	Laporan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan Tahun 2020-2024	112
Tabel II.53.	Indeks Daya Saing Daerah Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau 2020-2024	113
Tabel II.54.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTS Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024	114
Tabel II.55.	Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTS Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024	114
Tabel II.56.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024	115
Tabel II.57.	Jumlah Data Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024	115
Tabel II.58.	Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024	116
Tabel II.59.	Akreditasi Lembaga Pendidikan Kota Pekanbaru 2021-2024	117
Tabel II.60.	Rasio Guru/Murid PAUD SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	117
Tabel II.61.	Capaian SPM Kota 2021-2024	118
Tabel II.62.	Jumlah kematian Ibu, Bayi dan Balita di Kota Pekanbaru tahun 2020 - 2024	119
Tabel II.63.	Angka Cure Rate, Complete Rate, Succes Rate dan Jumlah Kematian TB Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024	121





Tabel II.64.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024.....	123
Tabel II.65.	Tugas Posyandu Berdasarkan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal .	123
Tabel II.66.	Jumlah Tenaga Medis Menurut Unit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024.....	124
Tabel II.67.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Kesehatan	125
Tabel II.68.	Indeks Aksesibilitas Berdasarkan Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2022- 2024	127
Tabel II.69.	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	127
Tabel II.70.	Kondisi Kemantapan Jalan Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024.....	128
Tabel II.71.	Kinerja Penyaluran Air Bersih melalui PDAM	129
Tabel II.72.	Jumlah Pelanggan dan Persentase Rumah Tangga yang terlayani PDAM	130
Tabel II.73.	Data Cakupan Akses Air Bersih dengan Sistem Bukan Perpipaan Tahun 2020 -2024	131
Tabel II.74.	Data Cakupan Akses Air Limbah Domestik Tahun 2020 -2024.....	131
Tabel II.75.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman di Kota Pekanbaru Tahun 2024 .	132
Tabel II.76.	Luas RTH Publik Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024	133
Tabel II.77.	Layanan SPM Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru Tahun 2024	134
Tabel II.78.	Data Cakupan Akses Rumah Layak Huni Tahun 2020 -2024.....	135
Tabel II.79.	Pengurangan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru Tahun 2024	135
Tabel II.80.	Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru Tahun 2024 .	136
Tabel II.81.	Perkembangan Indikator Bidang PSU Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024	138
Tabel II.82.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024	138
Tabel II.83.	Laporan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2024	139
Tabel II.84.	Cakupan Petugas Linmas Kota Pekanbaru 2024	140
Tabel II.85.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di Kota Pekanbaru 2024	140
Tabel II.86.	Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 -2024	141
Tabel II.87.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2024	142
Tabel II.88.	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024.....	143





Tabel II.89.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Tahun 2021-2024	144
Tabel II.90.	Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024.....	145
Tabel II.91.	Data PSKS di Kota Pekanbaru Tahun 2024.....	146
Tabel II.92.	Data system layanan rujukan terpadu di kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	147
Tabel II.93.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Sosial.....	148
Tabel II.94.	Kondisi ketenagakerjaan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024.....	149
Tabel II.95.	Pengangguran Terbuka Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024	149
Tabel II.96.	Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perjanjian Bersama dan Anjuran Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024.....	150
Tabel II.97.	Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Kota Pekanbaru Tahun 2021 -2024	150
Tabel II.98.	Tenaga Kerja yang Terdaftar Ikut Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024	151
Tabel II.99.	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dari Tahun 2020 -2024	152
Tabel II.100.	Jumlah Cakupan Perempuan di Legislatif I kota pekanbaru dari tahun 2020 -2024	152
Tabel II.101.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kota Pekanbaru 2020 -2024	153
Tabel II.102.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita tahun 2020 – 2024.....	154
Tabel II.103.	Indikator Komponen FSVA Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2024	155
Tabel II.104.	Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	156
Tabel II.105.	Dokumen Lingkungan yang Telah Dinilai oleh DLHK Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2024	156
Tabel II.106.	Izin Pembuangan Air Limbah Rumah Sakit yang Telah Diterbitkan Tahun 2020 -2024	157
Tabel II.107.	Data Izin Pembuangan Air Limbah yang Telah Diterbitkan Tahun 2020 -2024.....	157
Tabel II.108.	Nilai Indeks Pencemaran (IP) dan Status Perairan Sungai Siak Ruas Pekanbaru Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2020 -2024	158
Tabel II.109.	Nilai Indeks Pencemaran dan Status Perairan Anak Sungai Siak Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2020 -2024	158
Tabel II.110.	Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024.....	159





Tabel II.111.	Indikator Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024	159
Tabel II.112.	Cakupan Penerbitan/Perekaman KTP di Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2024	160
Tabel II.113.	Data Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2020 – 2024 di Kota Pekanbaru	161
Tabel II.114.	Data Rasio Pasangan Berakta Nikah Tahun 2020 – 2024 di Kota Pekanbaru	161
Tabel II.115.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Penduduk Tahun 2020-2024....	162
Tabel II.116.	Data Indeks Pembangunan Kelurahan Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2024	164
Tabel II.117.	Angka TFR Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024.....	165
Tabel II.118.	Jumlah Peserta KB Aktif Kota Pekanbaru Bulan Desember 2024	165
Tabel II.119.	Data Angkutan Umum Transportasi Darat Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	167
Tabel II.120.	Trayek dan Kode Trayek Trans Metro Pekanbaru 2024.....	167
Tabel II.121.	Lokasi Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru.....	168
Tabel II.122.	Jumlah Halte di Kota Pekanbaru tahun 2024	169
Tabel II.123.	Jumlah Unit Pemasangan Rambu-rambu di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	170
Tabel II.124.	Jumlah Penumpang dan Barang yang Berangkat dan Datang di Kota Pekanbaru 2020 -2024	170
Tabel II.125.	Jumlah kendaraan yang telah melaksanakan uji berkala pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2024,.....	172
Tabel II.126.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024.....	174
Tabel II.127.	Kebutuhan Sarana dan Prasarana TIK untuk OPD	174
Tabel II.128.	Kebutuhan SDM Dinas Kominfo Kota Pekanbaru Tahun 2024	177
Tabel II.129.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon dan PC/Komputer di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024.....	178
Tabel II.130.	Persentase Penduduk yang Mengakses Internet di Kota Pekanbaru 2020-2024	178
Tabel II.131.	Data Kerjasama Media Kota Pekanbaru Tahun 2024.....	179
Tabel II.132.	Cakupan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024	180
Tabel II.133.	Jumlah Koperasi Aktif di Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024.....	180

Tabel II.134. Data Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	180
Tabel II.135. Data Koperasi Berdasarkan Kesehatan KSP/USP Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024	181
Tabel II.136. Persentase UKM Non BPR/LKM, BPR/LKM dan UMKM Aktif di Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024.....	181
Tabel II.137. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2020 -2024.....	183
Tabel II.138. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024	184
Tabel II.139. Data Prestasi Olahraga Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024.....	185
Tabel II.140. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021	185
Tabel II.141. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2022	186
Tabel II.142. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021	186
Tabel II.143. Ketersediaan Data Statistik Sektor Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024	187
Tabel II.144. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2020 -2024.....	188
Tabel II.145. Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Pekanbaru	189
Tabel II.146. Pelaksanaan Kinerja Bidang Kebudayaan Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024	190
Tabel II.147. Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Indikator Perpustakaan Lainnya Tahun 2020 -2024.....	191
Tabel II.148. Indikator Kearsipan Tahun 2020 -2024	195
Tabel II.149. Jumlah Produksi Perikanan di Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024...	196
Tabel II.150. Angka Konsumsi Ikan di Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2024	197
Tabel II.151. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Setiap Bulannya Tahun 2020 – 2024.....	198
Tabel II.152. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara yang Masuk ke Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	199
Tabel II.153. Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024.....	200
Tabel II.154. Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024	200
Tabel II.155. Jumlah Populasi Ternak Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024.....	202

Tabel II.156. Jumlah Produksi Hasil Peternakan Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024	202
Tabel II.157. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024	203
Tabel II.158. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024.	204
Tabel II.159. Nilai Ekspor Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024.....	204
Tabel II.160. Nilai Impor Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2024	205
Tabel II.161. Jenis, kondisi, dan Pengelola pasar yang ada di Kota Pekanbaru	205
Tabel II.162. Rekap Data Pedagang Pasar Rakyat Kota Pekanbaru	206
Tabel II.163. Konsistensi dan Kesesuaian Dokumen Perencanaan Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024.....	206
Tabel II.164. Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024	207
Tabel II.165. Persentase Belanja Pendidikan Terhadap APBD Kota Pekanbaru	207
Tabel II.166. Persentase Belanja Kesehatan Terhadap APBD Kota Pekanbaru.....	207
Tabel II.167. Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru.....	208
Tabel II.168. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024	209
Tabel II.169. Indikator Kinerja Pengawasan Kota Pekanbaru Tahun 2022 – 2024	210
Tabel II.170. Realisasi APBD Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	212
Tabel II.171. Neraca Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	218
Tabel II.172. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024	219
Tabel II.173. Proporsi Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024.....	222
Tabel II.174. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024	224
Tabel II.175. Defisit Riil Anggaran Kota Pekanbaru 2020-2024.....	226
Tabel II.176. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024	226
Tabel II.177. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024	228
Tabel II.178. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pekanbaru Tahun 2019- 2023	228
Tabel II.179. Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Pekanbaru Tahun 2026-2030...	231
Tabel II.180. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2025-2030	233



Tabel II.181.	Akar Masalah, Masalah dan Masalah Pokok Pembangunan Kota Pekanbaru	248
Tabel II.182.	Isu Strategis Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	259
Tabel II.183.	Isu Strategis Kota Pekanbaru	267
Tabel III.1.	Penyusunan Penjelasan Visi Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029	271
Tabel III.2.	Penyelarasan antara Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029	272
Tabel III.3.	Keselarasan Misi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029	277
Tabel III.4.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029	280
Tabel III.5.	Perumusan Arah Kebijakan Kota Pekanbaru	287
Tabel III.6.	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekanbaru 2025-2029.....	290
Tabel III.7.	Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi Pengembangan Daerah Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ...	302
Tabel III.8.	Pola Ruang Wilayah Kota Pekanbaru	307
Tabel III.9.	Merumuskan Program Prioritas Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029.	315
Tabel III.10.	Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru.....	335
Tabel IV.1.	Program Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2026-2030	340
Tabel IV.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029	370
Tabel IV.3.	Indikator Kinerja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029	371
Tabel IV.4.	Indikator Kinerja Kunci Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029.....	377



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Pendekatan Penyusunan RJPMD Tahun 2025-2029.....	2
Gambar I.2. Sinergi Antar Dokumen Perencanaan	6
Gambar II.1. Peta Administrasi Kota Pekanbaru	5
Gambar II.2. Peta Topografi Kota Pekanbaru.....	7
Gambar II.3. Peta Kelerengan Kota Pekanbaru.....	8
Gambar II.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kota Pekanbaru	20
Gambar II.5. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Pekanbaru	21
Gambar II.6. Peta Titik Banjir dan Sungai Kota Pekanbaru	40
Gambar II.7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Pekanbaru Tahun 2020 dan 2024.....	49
Gambar III.1. Pentahapan pembangunan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2026-2030	285
Gambar III.2. Arah Pembangunan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dalam RPJMN Tahun 2025 -2029	302
Gambar III.3. Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Riau	304
Gambar III.4. Peta Wilayah Pengembangan Kampar, Pekanbaru, Pelalawan, Siak, dan Kepulauan Meranti (WP Pilar MERANTI).....	305
Gambar III.5. Peta Kawasan Meranti Pandak	309
Gambar III.6. Peta Kawasan Bandar Raya Payung Sekaki.....	310
Gambar III.7. Peta Kawasan Komersial Hijau (Setia Maharaja)	311
Gambar III.8. Peta Kawasan Industri Tenayan (KIT)	312
Gambar III.9. Peluang Investasi Kawasan Bandar Khayangan.....	314

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik II.1. Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW Kota Pekanbaru	13
Grafik II.2. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024	22
Grafik II.3. Perkembangan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024 (%).....	23
Grafik II.4. Indeks Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2024	23
Grafik II.5. Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 (%)	24
Grafik II.6. Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	25
Grafik II.7. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024 (%)	27
Grafik II.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2019-2024	30
Grafik II.9. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024 (%)	32
Grafik II.10. Indeks Risiko Bencana Kota Pekanbaru dan Provinsi Tahun 2020-2024	36
Grafik II.11. Rasio Jiwa Penduduk yang Terpapar dan Tidak Terpapar Menurut Jenis Bencana Kota Pekanbaru Tahun 2024.....	38
Grafik II.12. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025-2029 (ribu jiwa).....	45
Grafik II.13. Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 (%)	46
Grafik II.14. Piramida Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Usia Tahun 2029.....	46
Grafik II.15. Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2020-2024	50
Grafik II.16. PDRB per Kapita Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 (Ribu Rupiah).....	54
Grafik II.17. Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024	55
Grafik II.18. Posisi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024.....	56
Grafik II.19. Perkembangan Gini Ratio Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024.....	57



Grafik II.20.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	58
Grafik II.21.	Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024.....	59
Grafik II.22.	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024.....	60
Grafik II.23.	Posisi Capaian Pengeluaran Riil per Kapita (Rp 000/Kapita/Bulan) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024	61
Grafik II.24.	Perkembangan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 (Tahun).....	61
Grafik II.25.	Posisi Capaian Usia Harapan Hidup (Tahun) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024.....	62
Grafik II.26.	Prevalensi Stunting Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Nasional 2019-2024	65
Grafik II.27.	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024.....	66
Grafik II.28.	Posisi Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024	67
Grafik II.29.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024	68
Grafik II.30.	Posisi Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024.....	68
Grafik II.31.	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau Tahun 2024	69
Grafik II.32.	Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Sosial di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	74
Grafik II.33.	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2023	80
Grafik II.34.	Capaian Kualitas Pembangunan Keluarga Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2024.....	81
Grafik II.35.	Perkembangan IKG Kota Pekanbaru 2020 – 2024.....	82
Grafik II.36.	Perkembangan IKG Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau	82
Grafik II.37.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau	83
Grafik II.38.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024	84
Grafik II.39.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 (%)	89





Grafik II.40.	Posisi Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024	90
Grafik II.41.	Indeks Inovasi Daerah Kota Pekanbaru tahun 2020-2024	90
Grafik II.42.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024	96
Grafik II.43.	Tingkat Inflasi Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	104
Grafik II.44.	Prevalensi Stunting Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Nasional 2019-2024	120
<i>Grafik II.45.</i>	Skor Pola Pangan Harapan Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024.....	153
Grafik II.46.	Rekapitulasi Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	173
Grafik II.47.	Tingkat Kegemaran Membaca Kota Pekanbaru Tahun 2019- 2024..	192
Grafik II.48.	Nilai LAKE Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024	196





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, dengan tetap berpegang pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, pemerintah daerah berperan dalam menyelenggarakan pembangunan secara efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah tidak hanya bertujuan untuk menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.

Pembangunan daerah sendiri merupakan implementasi dari pelimpahan urusan pemerintahan ke daerah yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Melalui pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, daerah diharapkan mampu meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, termasuk daya saing daerah, dalam kerangka NKRI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memiliki tanggung jawab untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah selama periode lima tahun masa kepemimpinan. Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Pekanbaru diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2025-2029. Periode Pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknnya Walikota Kota Pekanbaru H. Agung Nugroho, S.E, M.M dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru H. Markarius Anwar, S.T., M.Arch. pada tanggal 20 Februari 2025. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban Menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan Rancangan RPJMD dilakukan dengan cara memperhatikan Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Tahun 2025-2045 dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru meliputi 6 (enam) tahapan, yaitu: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

RPJMD Kota Pekanbaru disusun melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, agar sumber daya daerah dapat dimanfaatkan dan dialokasikan secara optimal dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah yang baik harus transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya Pasal 7 dan Pasal 9, proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendekatan yang bersifat Teknokratik, Partisipatif, Politis dan Top-down dan Bottom-up. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pendekatan yang digunakan juga harus tematik, holistik, integratif, dan spasial. Pendekatan-pendekatan ini diilustrasikan secara lebih jelas dalam infografis berikut.



Sumber : Permendagri No. 86/2017

Gambar I.1. Pendekatan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

Penyusunan Rancangan RPJMD Pekanbaru 2025–2029 merupakan langkah awal penting dalam mewujudkan visi jangka panjang RPJPD 2025–2045: “Kota Agamis, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan” Proses ini melibatkan perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Penyusunan dilakukan secara sinergis dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sesuai amanat Permendagri No. 86/2017 dan Permendagri No. 7/2018, RPJMD wajib memuat KLHS untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 59/2017.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memegang peranan yang sangat strategis dalam memastikan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2025–2029 disusun secara berkelanjutan, holistik, dan ramah lingkungan. KLHS tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluatif, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan yang bersifat antisipatif dalam mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan sejak tahap perumusan kebijakan. Dengan demikian, penyusunan RPJMD harus mengintegrasikan hasil-hasil analisis dalam dokumen KLHS, terutama pada bagian arah kebijakan, strategi pembangunan, dan program prioritas. Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan ini menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antara RPJMD dan KLHS bukan hanya sebuah kewajiban normatif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah yang inklusif dan berwawasan lingkungan, sejalan dengan komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan dokumen Rancangan RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025-2045.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

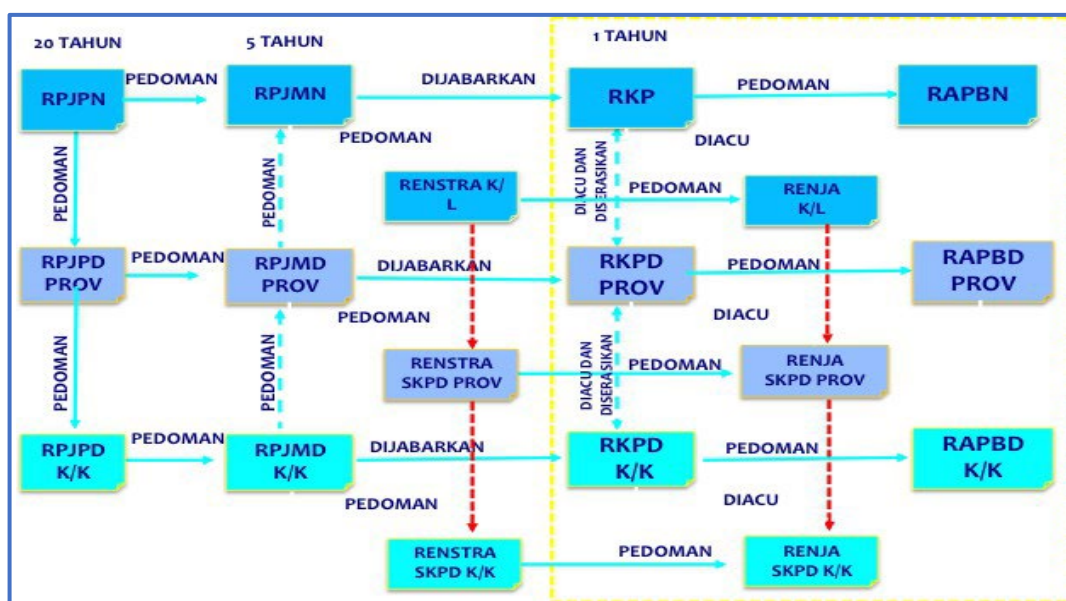
Penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025–2029 mengacu pada RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2025–2045, RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020–2040, serta RPJMN Tahun 2025–2029. Selaras dengan itu, RPJMD Kota Pekanbaru juga

disinergikan dengan RPJMD Provinsi Riau yang disusun secara simultan agar tercipta keselarasan arah pembangunan daerah dengan provinsi maupun nasional.

Selain mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen pendukung lainnya, seperti KLHS RPJMD, Rancangan Teknokratik, hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, serta dokumen sektoral terkait. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika pembangunan sebelumnya maupun kebutuhan sektoral yang ada.

RPJMD kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yang dijabarkan lebih rinci ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga subkegiatan dengan target kinerja dan pendanaan tahunan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah secara makro melalui RPJMD dengan perencanaan operasional perangkat daerah melalui Renstra. RPJMD juga berfungsi sebagai acuan penyusunan manajemen risiko di tingkat kota, sementara Renstra menjadi dasar dalam manajemen risiko pada masing-masing perangkat daerah.

Lebih lanjut, kebijakan perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk berbasis bukti (evidence-based policy) dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi dari seluruh unsur kelembagaan iptek, sumber daya iptek, dan jejaring iptek yang dibangun oleh pemerintah daerah. Pendekatan ini dituangkan ke dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID) yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif. Melalui RIPJPID, peran iptek, riset, dan inovasi dioptimalkan guna menjawab berbagai permasalahan prioritas pembangunan daerah secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Secara diagramatis sinergi antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :



Gambar 1.2. Sinergi Antar Dokumen Perencanaan

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan melalui strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif dan integratif.

Adapun tujuan dari disusunnya RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
3. Menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dijabarkan melalui strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2045 dan RTRW Kota Pekanbaru.
4. Menetapkan berbagai program prioritas dan pagu indikatif serta target indikator kinerja program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan perodesasi Tahun 2025-2029.
5. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau Indikator Kinerja Kunci, sebagai acuan penilaian keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2025-2029.
6. Pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025-2029.
7. Acuan bagi seluruh para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematikan penulisan RPJMD Kota Pekanbaru telah mempedomani Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen



1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

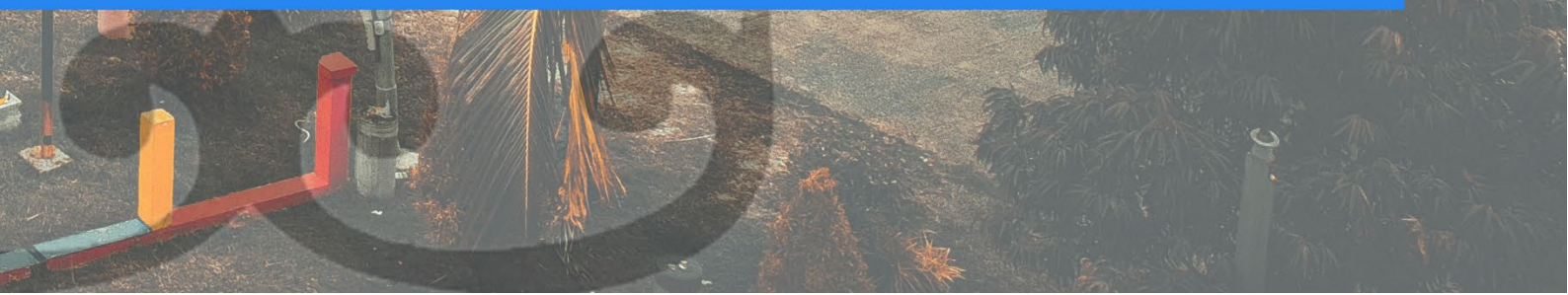
BAB V. PENUTUP





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Posisi Dan Peran Strategis Daerah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau dengan luas wilayah 632,26 Km² dan terletak di antara 101014' – 101034' BT dan 0025' – 0045' LU, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Pekanbaru memiliki lokasi yang strategis karena berada di Jantung Pulau Sumatera dan dilalui oleh ruas jalan Lintas Timur Sumatera. Berada di tengah pulau Sumatera menjadikan Kota Pekanbaru potensial sebagai kota penghubung (interconnecting) antar kota di pulau Sumatera. Selain itu kedekatan jarak dengan negara tetangga memberikan peluang besar bagi Kota Pekanbaru untuk berperan sebagai akses pintu gerbang Indonesia Bagian Barat menuju negara-negara Asean.

Kota Pekanbaru secara administratif sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 terdiri dari 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Mengalami peningkatan jumlah kecamatan dari 12 kecamatan sebelumnya menjadi 15 kecamatan sesuai tuntutan perkembangan serta guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Secara detail terkait kecamatan, kelurahan beserta luasannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total (Km ²)
1	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	35,55
2	Tuahmadani	Tuahmadani	29,84
3	Binawidya	Simpang Baru	36,59
4	Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05
5	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74
6	Tenayan Raya	Sialang Sakti	114,4

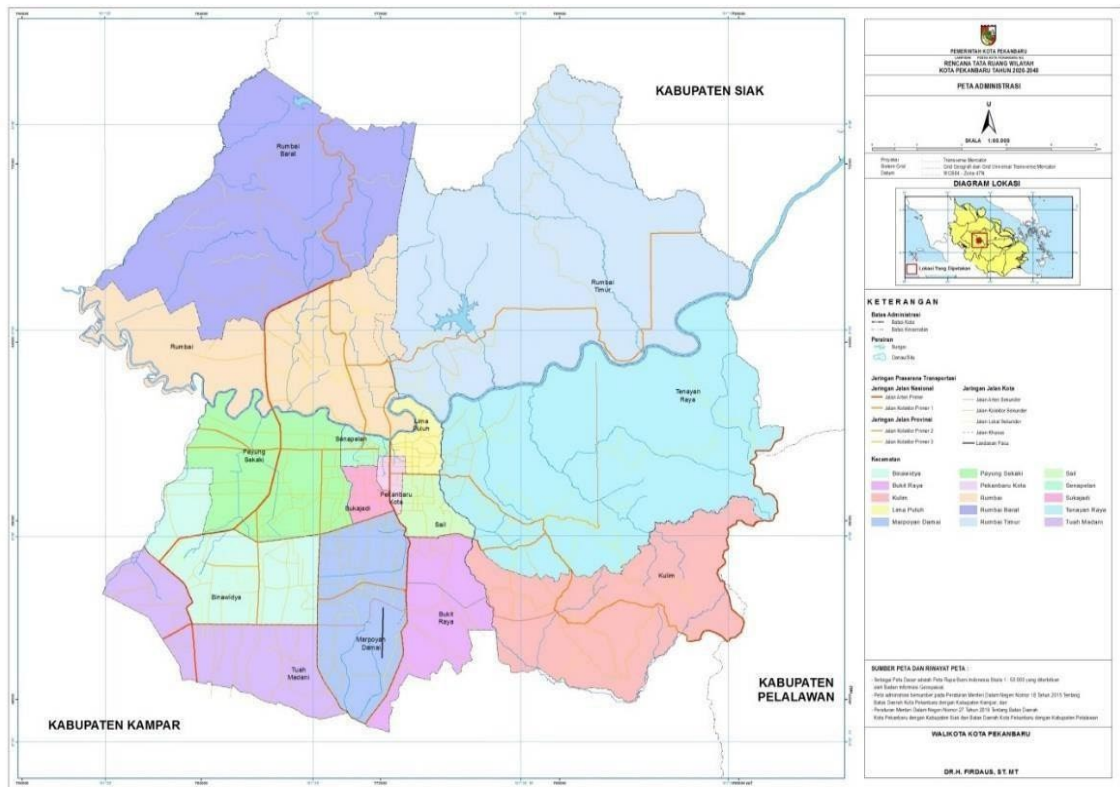
No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total (Km ²)
7	Kulim	Mentangor	56,87
8	Limapuluh	Rintis	4,04
9	Sail	Cinta Raja	3,26
10	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26
11	Sukajadi	Pulau Karam	3,76
12	Senapelan	Kampung Bandar	6,65
13	Rumbai	Meranti Pandak	61,86
14	Rumbai Barat	Maharani	86,01
15	Rumbai Timur	Limbungan	138,31
Kota Pekanbaru			632,26

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2025

Dari data tersebut terlihat bahwa Kecamatan dengan luas wilayah terluas di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Rumbai Timur seluas 138,31 km² atau 21,87 % dari luas wilayah Kota pekanbaru dengan memiliki 5 kelurahan, terhubung dengan pusat kota melalui 4 jembatan yang membelah sungai siak sebagai akses utama masyarakat Rumbai Timur menuju pusat kota. Kecamatan dengan luas wilayah terluas kedua yaitu Kecamatan Tenayan Raya seluas 114,4 km² atau 18,05 % dari luas wilayah Kota Pekanbaru dengan memiliki 8 Kelurahan, kecamatan ini merupakan wilayah cepat berkembang yang merupakan pusat pemerintahan Kota Pekabaru dan diperuntukan untuk kawasan industri. Sedangkan Kecamatan dengan luasan yang paling rendah adalah Kecamatan Pekanbaru Kota seluas 2,26 km² atau 0,35 % dari luas wilayah Kota Pekanbaru dengan memiliki 6 kelurahan. Meskipun kecamatan Pekanbaru Kota tidak lagi menjadi pusat pemerintahan Kota Pekanbaru, namun masih menjadi pusat pemerintahan untuk Provinsi Riau dan pusat perdagangan dan jasa, sehingga perkembangan wilayah cukup pesat dan berkembang.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Adapun Wilayah Administrasi Kota Pekanbaru secara spasial dapat terlihat pada Peta administrasi sebagai berikut.



Sumber: Perda No. 7 tentang RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2040

Gambar II.1. Peta Administrasi Kota Pekanbaru

3. Topografi

Sebagian besar areal Kota Pekanbaru umumnya mempunyai kelas lereng datar dengan luas 38.624 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) kelas kemiringan lereng yaitu kemiringan lerengnya 0–2 persen dengan luas 27.818 Ha dan sekitar 10.806 Ha kemiringan lereng 2–8 persen yang sesuai untuk pengembangan pembangunan kota. Kemiringan 0–2 persen ini terletak di daerah bagian Selatan, sedangkan kemiringan lereng 2–8 persen terletak menyebar di bagian Tenggara Kota Pekanbaru dan sebagian lagi di daerah Utara.

Sementara itu pada kemiringan lahan dengan kelas kelerengan 26–40 persen yang merupakan daerah agak curam mempunyai luasan terkecil yaitu hanya berkisar 4,61% atau sebesar 2.917 Ha dan terletak di bagian Utara dan Tenggara Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Rumbai Barat dan Kecamatan Tenayan Raya. Morfologi lahan agak curam umumnya cenderung memiliki pemanfaatan yang terbatas terutama untuk kegiatan terbangun, oleh karena itu pengembangan pada areal ini diarahkan pada peruntukan kawasan konservasi. Adapun kondisi kemiringan lahan Kota Pekanbaru secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.2. Luas Kelas Kemiringan Lereng Kota Pekanbaru

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Datar 0-2 %	27.818	44
2	Agak Landai 2-15 %	10.806	17,09

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
3	Landai 15-40%	13.405	21,2
4	Sangat Landai	8.280	13,1
5	Agak Curam	2.917	4,61
Total		63.226	100

Sumber: RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Mengacu pada Perda Nomor 7 tentang RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 dengan memperhatikan kondisi topografi tersebut maka pengembangan wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kemiringan 0–2 persen (datar), lahan pada interval ini masuk dalam klasifikasi sangat layak bagi pengembangan semua kegiatan budidaya karena kondisi permukaan tanah yang datar. Wilayah dengan kemiringan ini memanjang dari Barat ke Timur di sepanjang Sungai Siak yang mencakup dan Kecamatan Payung Sekaki, Tampan (Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani), Marpoyan Damai, Bukit Raya, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Lima Puluh, dan sebagian Kecamatan Rumbai, sebagian Rumbai Pesisir (Kecamatan Rumbai Barat dan Rumbai Timur), serta sebagian Tenayan Raya (Kecamatan Tenayan Raya dan Kulim).
2. Kemiringan 2–15 persen (datar s/d landai), memiliki kelayakan fisik bagi pengembangan kegiatan budidaya. Wilayah yang tercakup kedalamnya adalah sebagian di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir (Kecamatan Rumbai Barat dan Rumbai Timur), Tenayan Raya (Kecamatan Tenayan Raya dan Kulim) dan Bukit Raya.
3. Lahan dengan kemiringan 15–40 persen (agak landai s/d agak curam), pemanfaatan lahan pada interval ini masih memungkinkan bagi pengembangan kegiatan budidaya terbangun secara terbatas, yang meliputi Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir (Kecamatan Rumbai Barat dan Rumbai Timur), dan Tenayan Raya (Kecamatan Tenayan Raya dan Kulim) seluas 2.917 Hektar (4,61 persen)

Mencermati kondisi topografi tersebut maka pengembangan fisik di Kota Pekanbaru secara umum tidak menghadapi kendala morfologi lahan, dimana pengembangan fisik kawasan sebagai kawasan permukiman dapat dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru sesuai kebutuhan dan tata ruang yang ada. Sedangkan untuk ketinggian 26–40 persen, sangat sesuai bagi pengembangan kawasan konservasi tepatnya di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir (Kecamatan Rumbai Barat dan Rumbai Timur) dan Tenayan Raya (Kecamatan Tenayan Raya dan Kulim). Adapun peta topografi dan peta kemiringan lereng dapat dilihat pada gambar berikut:

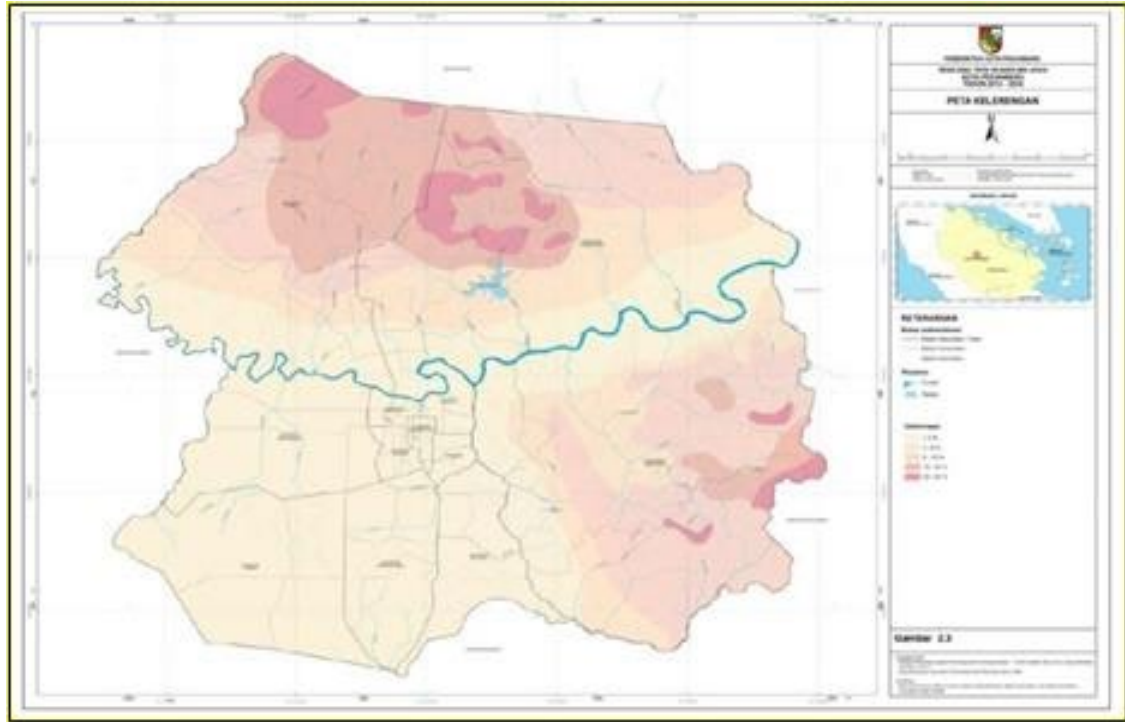


Sumber: Perda Nomor 7 tentang RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

Gambar II.2. Peta Topografi Kota Pekanbaru

Mempedomani peta topografi tersebut dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru terletak pada bagian ketinggian 10–50 meter di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25- 50 meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama dibagian utara kota, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir (Kecamatan Rumbai Barat dan Rumbai Timur) dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.

Sementara itu bila kita memperhatikan tingkat kelerengan (Lihat Gambar 2.3.), maka sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (44 persen) mempunyai tingkat kemiringan antara 0-2 persen atau relatif datar. Wilayah kota yang agak landai hanya sekitar 17 persen, landai (21 persen), dan sangat landai (13 persen), sedangkan yang relatif curam hanya sekitar 4-5 persen yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir (Kecamatan Rumbai Barat dan Rumbai Timur).



Sumber: Perda Nomor 7 tentang RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

Gambar II.3. Peta Kelerenghan Kota Pekanbaru

4. Geologi

Berpedoman pada peta geologi Lembar Pekanbaru dan sekitarnya dengan skala 1:250.000 (M.C.G. Clarke dkk,1982.), struktur geologi yang terdapat di Kota Pekanbaru terdiri dari sesar mendatar dengan arah umum Barat Laut–Tenggara, lipatan Sinklin dan Antiklin dengan arah penunjaman berarah relatif Timur Laut–Barat Daya. Struktur–struktur geologi tersebut masuk dalam sistem patahan Sumatera, sementara itu sesar–sesar mendatar ini termasuk dalam sistem patahan Semangko yang diperkirakan terbentuk pada Kala Miosen Tengah.

Struktur geologi dengan skala regional misalnya Sesar Semangko yang relatif kearah Barat Laut–Tenggara atau relatif searah dengan Pulau Sumatera dapat berfungsi sebagai pemicu terjadinya gempa di sepanjang/ disekitar zona sesar tersebut.

Kota Pekanbaru secara umum terbentuk dari batuan sedimen berumur Plistosen– Holosen, serta endapan aluvium yang proses pengendapannya masih berlangsung hingga sekarang. Secara Lithostratigrafi tidak resmi batuan penyusun daerah perencanaan dapat dipisahkan menjadi 4 (empat) satuan batuan sebagai berikut:

a. Satuan Batu Lumpur (Tup)

Tersusun dari batu lumpur, mengandung karbonan, lignit, sedikit batu lanau dan batu pasir, yang tersebar luas di bagian Utara dan membentuk daerah yang relatif datar hingga berbukit landai, seluas lebih kurang 30 persen dari luas daerah

perencanaan. Ciri-ciri satuan tufa ini adalah kandungan batu lumpur yang dominan. Satuan batuan ini termasuk dalam Formasi Petani yang terendapkan pada Kala Pliosen Awal-Tengah.

b. Satuan Pasir (Qpmi)

Tersusun dari kerikil, kerakal, pasir dan lempung yang tersebar di bagian Utara dan Selatan seluas lebih kurang 35 persen dari luas daerah perencanaan, membentuk perbukitan landai sampai agak terjal. Satuan batuan ini termasuk dalam Formasi Minas yang terbentuk pada Kala Plistosen.

c. Satuan Aluvium Tua (Qp)

Satuan batuan ini penyebarannya relatif hampir sama dengan satuan batuan lempung tufan (Qpke) tersusun oleh kerikil, pasir, lempung, sisa-sisa tumbuhan dan rawa gambut dan tersebar di bagian Utara, Selatan dan Barat kurang dari 10 persen dari luas daerah perencanaan, dan merupakan batuan endapan lepas yang membentuk pedataran yang luas. Batuannya berwarna abu-abu kehitaman, satuan batuan ini terbentuk pada Kala Plistosen Akhir.

d. Satuan Aluvium Muda (Qh)

Sebaran satuan ini meliputi sepanjang Sungai Siak dan anak-anak sungainya, dengan luas sebaran kurang dari 5 persen dari luas daerah perencanaan. Litologinya terdiri dari lempung, pasir dan kerikil serta endapan sungai atau rawa lainnya dengan ketebalan mencapai 4 m. Proses pengendapannya masih berlangsung hingga kini.

5. Klimatologi

Klimatologi merupakan studi ilmiah yang mendalam tentang karakteristik iklim, termasuk pola, variabilitas, dan tren perubahan jangka panjang fenomena atmosfer seperti suhu, presipitasi, kelembaban, dan angin di suatu wilayah atau skala global. Disiplin ini mencakup analisis data statistik, pemodelan, dan interpretasi untuk memahami dinamika kompleks antara atmosfer, lautan, daratan, dan biosfer serta dampaknya terhadap kehidupan manusia dan ekosistem.

1. Curah Hujan

Dalam rentang tahun 2020–2024, hari hujan Kota Pekanbaru terjadi di setiap bulan dengan frekuensi yang berfluktuatif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4. Curah hujan tinggi secara rerata dalam 5 (lima) tahun terlihat banyak terjadi di bulan Oktober sd Januari dan terendah berada pada kisaran bulan Juli. Selama 5 tahun terakhir rata-rata hari hujan dan curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2022.

Tabel II.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Bulan	2020		2021		2022		2023		2024	
	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH
Jan	18	162	21	326,1	16	299	15	184	19	286
Feb	14	30	14	96,9	20	291	12	271	23	307

Bulan	2020		2021		2022		2023		2024	
	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH
Mar	19	97	18	357,2	18	214	12	251	20	183
Apr	20	342	20	409,9	24	417	15	176	22	287
Mei	17	246	22	256,8	16	295	122	193	18	378
Jun	14	197	14	207	18	268	12	201	16	355
Jul	19	109	8	91,3	17	285	8	94	12	51
Agt	16	198	20	199,1	16	184	12	184	20	160
Sep	21	54	18	310,8	17	179	7	205	21	79
Okt	23	195	22	343,2	26	473	12	154	16	207
Nov	23	433	18	342,4	23	190	19	385	24	476
Des	23	105	22	206,3	24	343	24	508	19	268
Rerata Tahun	19	181	18	262	20	287	13	233	19	253

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2025

2. Suhu

Sementara itu keadaan suhu di Kota Pekanbaru selama periode 2020-2024 mencapai suhu tertinggi di bulan Agustus tahun 2023 yang mencapai 41,00C dan terendah pada bulan Juni dan Juli tahun 2021 dan Desember tahun 2022 dengan suhu mencapai 20,40C (Lihat Tabel). Bila mencermati rerata suhu maksimal di tahun 2024 maka telah terjadi penurunan rerata suhu maksimal ditahun sebelumnya yang sempat mencapai 35,03 OC pada tahun 2020. Namun demikian perlu diperhatikan juga meski rerata suhu maksimal mengalami penurunan akan tetapi rerata suhu minimal di tahun 2024 mengalami kenaikan mencapai 24,1 OC dari sebelumnya yang hanya mencapai 23,51 OC pada tahun 2023.

Tabel II.4. Suhu Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 (OC)

Bulan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min
Januari	33,8	27,2	33	22,2	34,2	21,6	30,7	22,9	30,9	23,8
Februari	34,5	27,3	35	21,5	35	21,8	31,7	22,9	32,2	24,2
Maret	35,5	27,8	35,5	21,4	35,5	22,4	31,3	23,2	33	24,4
April	36	27,8	34,8	22,2	35,9	21,9	33,2	23,5	33,5	24,5
Mei	36	28	34,8	22,9	35,3	21,8	33,6	23,8	32,7	24,5
Juni	34,5	27,3	35,1	21	34,2	22	33,1	23,7	32,6	23,9
Juli	34,6	26,9	35,1	21	34,2	21,2	33	23,7	33	23,9
Agustus	36	27,6	35	21,8	34,2	22	41	23,5	32,2	24
September	34,6	26,7	34,5	21,3	33,6	22	33	23,7	32,1	23,8
Oktober	35,6	27,3	35,6	22,4	34,5	22	32,7	23,7	33,6	24
November	34,5	26,7	34,8	22,6	33,8	22,2	32,3	23,6	30,8	23,8
Desember	34,7	26,8	34,5	21,4	33	21	26,5	23,9	30,9	23,8
Rerata	35,03	27,28	34,81	21,81	34,45	21,83	32,68	23,51	32,3	24,1

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2025

3. Kelembaban

Suhu udara, curah hujan dan jumlah hari hujan berkait erat dengan tingkat kelembaban. Jika mencermati dalam rentang tahun 2020–2024 kelembaban udara di Kota Pekanbaru berkisar antara 76% - 91%, tingkat kelembaban terendah (76%) dalam periode dimaksud terjadi pada bulan Juli tahun 2021 sementara tertinggi (91%) terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dan bulan Januari, November dan Desember pada tahun 2024 (Lihat Tabel). Tingkat kelembaban rendah umumnya terjadi pada musim kemarau ditandai dengan rendahnya hari hujan dan curah hujan. Tingkat kelembaban tinggi umumnya terjadi pada musim hujan.

Tabel II.5. Rata-Rata Kelembaban Kota Pekanbaru 2020-2024 (%)

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	86	83	85	88	91
Februari	79	77	82	85	88
Maret	79	81	84	87	86
April	83	79	86	86	87
Mei	80	83	79	84	90
Juni	81	78	82	82	87
Juli	81	76	83	79	78
Agustus	77	80	85	83	81
September	81	81	84	82	79
Oktober	79	78	86	86	81
November	84	82	86	88	91
Desember	81	85	88	91	91

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2025

4. Kecepatan dan Arah Angin

Dalam rentang waktu tahun 2020-2024 kecepatan angin di Kota Pekanbaru berkisar antara 5 - 7 m/detik dengan arah angin yang bervariasi, antara utara, timur, selatan dan barat dengan tekanan berkisar antara 1.006,0 – 1.011,4 mb dengan rincian terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.6. Kecepatan, Arah Angin Dan Tekanan Angin Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Bulan	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	P	WV	P	WV	P	WV	P	WV	P	WV
Jan	7 /NW	1.010,00	7 /NW	1.009,40	7 /NW	1.010,10	6/NW	1.009,80	6	1.010,7
Feb	6/ NE	1.011,00	6/ NE	1.010,10	6/ NE	1.008,80	6/NE	1.009,70	6	1.011,4
Mar	6/VRB	1.009,80	6/ VRB	1.009,40	6/ NW	1.008,50	6/E	1.010,30	5	1.010,1
April	6/ S	1.010,00	6/ NW	1.009,80	6/ NW	1.008,70	6/NW	1.008,90	6	1.008,1
Mei	6/ S	1.008,70	7/ S	1.008,40	6/ S	1.008,10	6/S	1.009,60	6	1.008,1
Juni	7/ S	1.009,10	6/ S	1.009,70	6/ S	1.008,60	6/S	1.009,40	6	1.009,6
Juli	7/ S	1.008,50	7/ S	1.009,30	6/ S	1.007,80	6/S	1.009,80	6	1.009,2
Agst	7/ NW	1.008,90	7/S	1.010,00	6/S	1.008,50	6/S	1.010,60	6	1.009,9

Bulan	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	P	WV	P	WV	P	WV	P	WV	P	WV
Sept	7/ S	1.009,30	7/ NW	1.009,40	6/ S	1.009,60	7/S	1.010,00	6	1.006,0
Okt	6/ S	1.008,60	6/ NW	1.009,20	6/ NW	1.009,60	6/VRB	1.011,20	6	1.010,0
Nov	6/ NW	1.009,30	6/ NW	1.008,20	6/ NW	1.009,00	5/VRB	1.009,80	6	1.010,9
Des	6/ N	1.008,90	6/ N	1.010,00	6/ NW	1.008,60	5/NW	1.010,00	6	1.010,9

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2025

WV = Wind Velocity, Kecepatan Angin (m/sec)

P = Pressure, Tekanan (mb)

N = North NE = North East

S = South

NW = North West

E = East

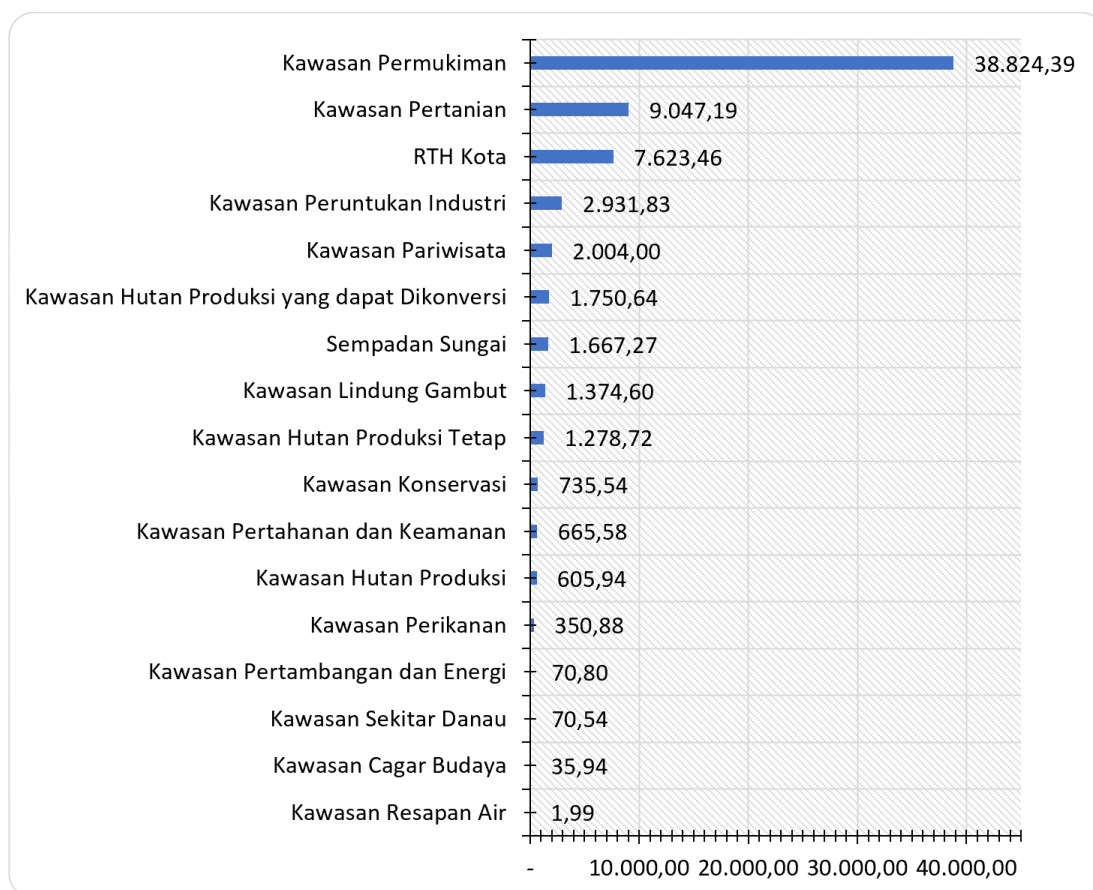
VRB = Variable

W = West

6. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kota Pekanbaru sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2020-2040 meliputi kawasan peruntukan lindung terdiri dari (a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; (b) kawasan perlindungan setempat; (c) kawasan konservasi; (d) kawasan cagar budaya; dan (e) kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota. Selain itu pemanfaatan ruang kawasan peruntukan budidaya yang terdiri dari (a) kawasan hutan produksi; (b) kawasan pertanian; (c) kawasan pertambangan dan energi; (d) kawasan perikanan; (e) kawasan peruntukan industri; (f) kawasan pariwisata; (g) kawasan permukiman; dan (h) kawasan pertahanan dan keamanan.

Dimana sesuai RTRW Kota Pekanbaru pemanfaatan ruang kota didominasi oleh kawasan permukiman yaitu dengan luas 38.824,39 ha, kawasan pertanian dengan luas 9.047,19 ha dan kawasan RTH Kota Pekanbaru dengan luas 7.623,46 Ha. Adapun kawasan konservasi hanya seluas 735,54 Ha. Pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2040 secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

Grafik II.1. Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW Kota Pekanbaru

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan kewenangan untuk dikembangkan dan didorong pembangunannya, wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting dalam lingkup Kota Pekanbaru terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan ditetapkan sebagai kawasan strategis Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis dalam RTRW Kota Pekanbaru 2020–2040, berikut ini adalah uraian potensi kawasan strategis:

A. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan (KSK)

Kawasan strategis Kota Pekanbaru dikembangkan untuk memperkuat posisi kota sebagai pusat pertumbuhan regional. Kawasan Meranti Pandak yang terletak di Kecamatan Rumbai diarahkan sebagai koridor pertumbuhan baru dan zona ekonomi hijau, yang berfungsi untuk mendukung distribusi aktivitas ekonomi ke wilayah utara kota. Pengembangan kawasan ini diproyeksikan akan mendukung pembentukan konektivitas antarwilayah, memperkuat investasi dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya, Kawasan Bandar Raya Payung Sekaki berperan sebagai simpul logistik dan perdagangan regional. Posisi strategis kawasan ini berada di jalur distribusi utama menuju Dumai, Kampar, dan Pelalawan, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang.

Pengembangan kawasan ini didorong dengan pembangunan infrastruktur jalan dan terminal pengangkutan skala besar.

Kawasan Komersial Setia Maharaja di Kecamatan Bukit Raya difungsikan sebagai pusat jasa dan bisnis terpadu. Kawasan ini diarahkan untuk mendukung sektor jasa keuangan, perbankan, kesehatan, dan pusat perdagangan modern. Infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan kolektor, drainase, dan utilitas telah disiapkan untuk memperkuat daya saing kawasan tersebut.

Kawasan Kota Lama Senapelan difokuskan sebagai kawasan pelestarian budaya dan wisata sejarah. Wilayah ini menyimpan nilai historis sebagai cikal bakal perkembangan Kota Pekanbaru. Penataan ulang bangunan cagar budaya, pengembangan jalur pedestrian, dan penguatan atraksi wisata berbasis budaya Melayu merupakan bagian dari strategi revitalisasi kawasan. Selain itu, Danau Bandar Khayangan di Rumbai Timur diarahkan sebagai kawasan ekowisata dan konservasi yang menyatu dengan nilai-nilai keberlanjutan kota.

B. Pengembangan Kawasan Industri dan Energi

Pengembangan kawasan industri Pekanbaru terfokus pada Kawasan Industri Tenayan. Kawasan ini merupakan kawasan prioritas nasional yang diarahkan untuk mendukung industrialisasi berbasis sumber daya lokal. Dukungan infrastruktur meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tenayan dan pembangkit berbahan gas, serta jaringan transmisi SUTET, SKTT, dan Gardu Induk di beberapa titik seperti Bina Widya dan Teluk Lembu.

Kawasan Industri Tenayan dikembangkan dengan pendekatan berwawasan lingkungan, mendorong masuknya industri hijau dan rendah karbon. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui RTRW menetapkan kawasan ini sebagai sentra pengembangan industri logistik, manufaktur, dan energi, yang diharapkan dapat menciptakan efek ganda bagi ekonomi lokal dan regional.

Dukungan dari sektor energi diarahkan pada perluasan jaringan transmisi listrik dan pembangunan Gardu Induk baru yang dapat menjamin stabilitas pasokan energi bagi kawasan industri dan permukiman. Salah satu pengembangan strategis adalah Gardu Induk New Garuda Sakti yang berfungsi sebagai penguat distribusi energi dari pusat ke wilayah utara dan barat kota.

Keberadaan Kawasan Industri Tenayan juga menjadi kunci dalam penyediaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas sektor industri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, investor swasta, dan lembaga keuangan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengembangan kawasan ini.

C. Pengembangan Kawasan Pertanian dan Perikanan

Meskipun secara umum Kota Pekanbaru didominasi oleh kawasan perkotaan, namun beberapa kecamatan masih memiliki potensi signifikan untuk pertanian dan

perikanan. Di Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat, dan Tuah Madani, masih ditemukan lahan-lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman hortikultura dan pangan lokal. Pengembangan ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan kota melalui pola pertanian kota (urban farming) yang terintegrasi dengan permukiman. Kawasan perikanan budidaya seluas 350,88 hektare yang tersebar di Kecamatan Rumbai Timur dan Kulim menjadi salah satu fokus pembangunan subsektor perikanan. Budidaya ikan air tawar dengan sistem kolam dan keramba telah berkembang, dan diarahkan untuk meningkatkan pasokan protein hewani lokal. Sarana produksi seperti benih, pakan, dan sarana pertanian menjadi aspek krusial dalam penguatan sektor ini.

Program pemberdayaan petani dan nelayan lokal digalakkan melalui pelatihan, subsidi input, serta kolaborasi antara kelompok tani, BUMDes, dan pelaku usaha agribisnis. Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan akan memperkuat daya saing lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar kota.

Penguatan institusi seperti Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sentra perikanan terpadu akan terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pendampingan teknis kepada petani dan nelayan di Pekanbaru.

D. Pengembangan Kawasan Lindung dan RTH

Kawasan lindung di Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa zona ekologis penting yang menjadi penopang keseimbangan lingkungan kota. Di antaranya adalah kawasan gambut seluas 1.374,60 Ha yang tersebar di wilayah Rumbai dan Payung Sekaki. Kawasan ini memiliki fungsi ekologis sebagai penyimpan karbon dan pengendali air tanah yang penting untuk mengatasi banjir dan kekeringan.

Selain itu, kawasan sempadan sungai seluas 1.667,27 Ha ditetapkan sebagai zona perlindungan air dan ruang terbuka alami. Rehabilitasi vegetasi, pembangunan jalur inspeksi, dan zona tangkapan air menjadi bagian dari strategi pengelolaan kawasan sempadan sungai tersebut. Kawasan ini juga menjadi koridor keanekaragaman hayati yang mendukung flora dan fauna lokal.

Tahura Sultan Syarif Hasyim seluas 735,54 Ha berada di wilayah Rumbai Barat dan menjadi kawasan konservasi alam strategis. Kawasan ini berperan dalam pelestarian ekosistem hutan sekunder dan habitat satwa liar, serta sebagai lokasi pendidikan lingkungan dan wisata alam berbasis konservasi.

Pemerintah Kota juga menargetkan pencapaian RTH publik dan privat sebesar 30% dari luas wilayah kota, atau sekitar 1.623,46 Ha. Upaya ini dilakukan melalui penambahan taman kota, jalur hijau jalan, dan taman lingkungan yang tersebar di seluruh kecamatan. Optimalisasi RTH menjadi indikator penting dalam meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup kota.

E. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kota Pekanbaru memiliki potensi pariwisata yang terus berkembang seiring meningkatnya minat wisatawan terhadap destinasi berbasis budaya Melayu dan alam terbuka. Salah satu kawasan andalan adalah Kampung Wisata Okura yang berada di Kecamatan Rumbai Timur. Kawasan ini memiliki karakter khas kampung nelayan Melayu dengan atraksi budaya dan kerajinan lokal, serta aktivitas wisata sungai seperti dayung dan memancing.

Danau Bandar Khayangan di wilayah yang sama menjadi destinasi wisata air yang populer. Lokasi ini selain berfungsi sebagai kawasan konservasi dan pengendali banjir, juga telah dikembangkan sebagai ruang terbuka rekreatif dengan fasilitas jogging track, dermaga, dan wahana air. Ke depannya, integrasi pengelolaan antara pemerintah dan komunitas lokal diharapkan mendorong destinasi ini menjadi ikon ekowisata Pekanbaru.

Taman Wisata Alam Mayang menjadi tempat wisata keluarga yang strategis dan mudah diakses dari pusat kota. Dengan fasilitas edukatif, taman bermain, dan kegiatan alam terbuka, kawasan ini diarahkan sebagai ruang wisata edukatif untuk anak-anak dan keluarga.

Kawasan Kota Lama Senapelan tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian sejarah tetapi juga sebagai destinasi wisata heritage yang mengangkat nilai budaya lokal. Melalui revitalisasi bangunan bersejarah dan penyelenggaraan event budaya, kawasan ini berperan penting dalam memperkuat identitas kota sebagai pusat kebudayaan Melayu.

F. Pengembangan Kawasan Budidaya dan Permukiman

Kawasan budidaya dan permukiman di Kota Pekanbaru diarahkan untuk mendukung pertumbuhan penduduk, pemerataan pembangunan, serta efisiensi pemanfaatan ruang. Kawasan permukiman mencakup luasan sekitar 38.824,39 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan dengan intensitas tinggi di wilayah Tuah Madani, Kulim, dan Tenayan Raya. Pembangunan kawasan permukiman dilakukan melalui pengembangan hunian terjangkau, penyediaan rumah susun, dan perumahan berbasis komunitas.

Kawasan perdagangan dan jasa mencakup luasan 8.639,53 Ha, berfokus pada penguatan subpusat ekonomi seperti di Payung Sekaki, Bukit Raya, dan Bina Widya. Penataan kawasan ini diarahkan untuk mendukung UMKM, pasar rakyat, dan pusat distribusi barang. Kemudahan akses dan koneksi antarkawasan menjadi indikator utama dalam penataan zonasi kawasan jasa dan perdagangan.

Perkebunan rakyat dengan luas 7.654,49 Ha masih menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat, terutama di wilayah pinggiran kota. Komoditas utama seperti kelapa sawit dan karet tetap dipertahankan dan ditingkatkan produktivitasnya melalui kemitraan dengan koperasi dan perusahaan inti.

Pemerintah Kota juga mendorong peningkatan kualitas permukiman melalui program penataan kawasan kumuh, optimalisasi ruang terbuka lingkungan, serta pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi. Keterpaduan antara perumahan, fasilitas sosial, dan ruang usaha menjadi prinsip dasar dalam pembangunan kawasan budidaya.

G. Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Transportasi

Pengembangan infrastruktur dan transportasi di Kota Pekanbaru difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah dan dukungan terhadap mobilitas masyarakat dan barang. Salah satu proyek strategis adalah pembangunan jalan lingkar luar yang menghubungkan kecamatan Rumbai Barat, Tenayan Raya, dan Kulim, serta konektivitas ke jalan tol Pekanbaru–Dumai, Pekanbaru–Rengat, dan Pekanbaru–Sumatera Barat.

Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki dan Terminal Tipe C di Kulim, Tuah Madani, dan Rumbai diarahkan sebagai simpul transportasi antarwilayah. Selain itu, pembangunan Jembatan Siak V dan VI akan memperkuat akses antar wilayah barat dan timur kota. Sistem transportasi massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) terus dikembangkan dengan jaringan yang menjangkau seluruh kecamatan.

Bandara Sultan Syarif Kasim II ditingkatkan statusnya menjadi bandara internasional dengan perluasan terminal dan peningkatan fasilitas pelayanan. Bandara ini menjadi simpul transportasi udara utama di Riau dan mendukung konektivitas nasional dan internasional Pekanbaru.

Dalam jangka panjang, pengembangan jaringan kereta api regional seperti jalur Pekanbaru–Rengat dan Pekanbaru–Perawang juga dipersiapkan sebagai bagian dari sistem transportasi masa depan. Penguatan infrastruktur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi logistik, dan menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat konektivitas regional Sumatera.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Pekanbaru memiliki beragam potensi sumber daya alam yang menjadi penopang ketahanan pangan sekaligus perekonomian daerah. Pada sektor hortikultura, komoditas sayuran seperti bayam, kangkung, kacang panjang, ketimun, petsai atau sawi, serta semangka menjadi hasil utama yang tersebar di beberapa kecamatan. Marpoyan Damai tercatat sebagai sentra penghasil bayam dan kangkung, Rumbai menjadi wilayah yang unggul dalam produksi kacang panjang dan ketimun, sementara Binawidya dikenal sebagai pusat pengembangan semangka, dan Tuahmadani menjadi basis produksi petsai atau sawi. Selain itu, produksi buah-buahan juga memberikan kontribusi penting, antara lain pisang, pepaya, rambutan, dan lengkeng. Rumbai Barat dikenal sebagai wilayah penghasil utama pisang dan pepaya,

sedangkan Tenayan Raya menjadi sentra produksi rambutan yang berpotensi untuk terus dikembangkan.

Pada subsektor perkebunan, komoditas kelapa sawit, karet, kelapa, dan kakao menjadi basis penggerak ekonomi. Kelapa sawit merupakan komoditas terbesar dengan areal yang mendominasi lebih dari sembilan puluh persen dari total perkebunan dan menghasilkan produksi yang sangat tinggi, terutama di wilayah Rumbai Timur yang menjadi kawasan dengan areal terluas. Komoditas karet menempati posisi kedua dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Kulim dan Tenayan Raya. Sementara itu, kakao memiliki luas areal paling kecil dan saat ini hanya ditemukan dalam skala terbatas di Kecamatan Sail.

Kota Pekanbaru juga memiliki kawasan kehutanan dan perairan dengan luasan yang cukup signifikan. Rumbai Timur menjadi wilayah dengan kawasan hutan terluas, disusul Tenayan Raya dan Rumbai Barat. Fungsi kawasan hutan tersebut sebagian besar berupa hutan produksi dan area penggunaan lain yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun kecamatan seperti Pekanbaru Kota, Sukajadi, dan Senapelan tidak memiliki kawasan hutan, sehingga aktivitas ekonominya lebih dominan di sektor perdagangan dan jasa.

Pada sektor peternakan, Kota Pekanbaru memiliki populasi ternak besar seperti babi, sapi potong, dan kambing, di mana Rumbai Barat dan Rumbai Timur menjadi sentra pengembangan babi, sementara sapi potong dan kambing tersebar di beberapa wilayah lain. Untuk unggas, ayam pedaging menjadi komoditas yang paling dominan dengan populasi yang sangat besar dan terkonsentrasi di Kecamatan Rumbai Barat. Selain itu, populasi itik juga banyak dijumpai di wilayah Payung Sekaki dan Tenayan Raya, sehingga memperkuat potensi pasokan pangan hewani bagi masyarakat kota.

Sektor perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup berarti, baik dari perairan umum maupun dari kegiatan budidaya. Perairan umum menghasilkan berbagai jenis ikan yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan Rumbai Timur mencatat produksi tertinggi, termasuk ikan baung dan udang galah. Alat tangkap yang digunakan masyarakat didominasi oleh jaring insang dan pancing yang memberikan hasil tangkapan cukup signifikan. Selain itu, kegiatan budidaya ikan air tawar juga berkembang pesat, terutama untuk komoditas lele dan patin. Wilayah Rumbai Barat dan Tenayan Raya menjadi pusat budidaya kolam dengan jumlah rumah tangga pembudidaya yang cukup besar, meskipun sebagian besar masih dalam skala kecil.

Potensi sumber daya alam ini membuka peluang pengembangan lebih lanjut. Optimalisasi lahan marjinal dapat diarahkan untuk hortikultura dan buah-buahan, termasuk pengembangan komoditas biofarmaka seperti jahe dan lengkuas. Pada sektor perkebunan, peningkatan produktivitas kelapa sawit dapat dilakukan melalui

intensifikasi dan diversifikasi produk olahan. Sementara itu, pada subsektor peternakan, integrasi ternak dengan pertanian dapat mendorong terbentuknya ekonomi sirkular. Pada sektor perikanan, penguatan budidaya berbasis teknologi di wilayah Rumbai Barat dan Tenayan Raya menjadi strategi penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain alih fungsi lahan pertanian akibat pesatnya perkembangan kawasan urban, ketergantungan pada impor pakan ternak yang dapat memengaruhi keberlanjutan peternakan, serta keterbatasan inovasi pengolahan hasil perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.1.3. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

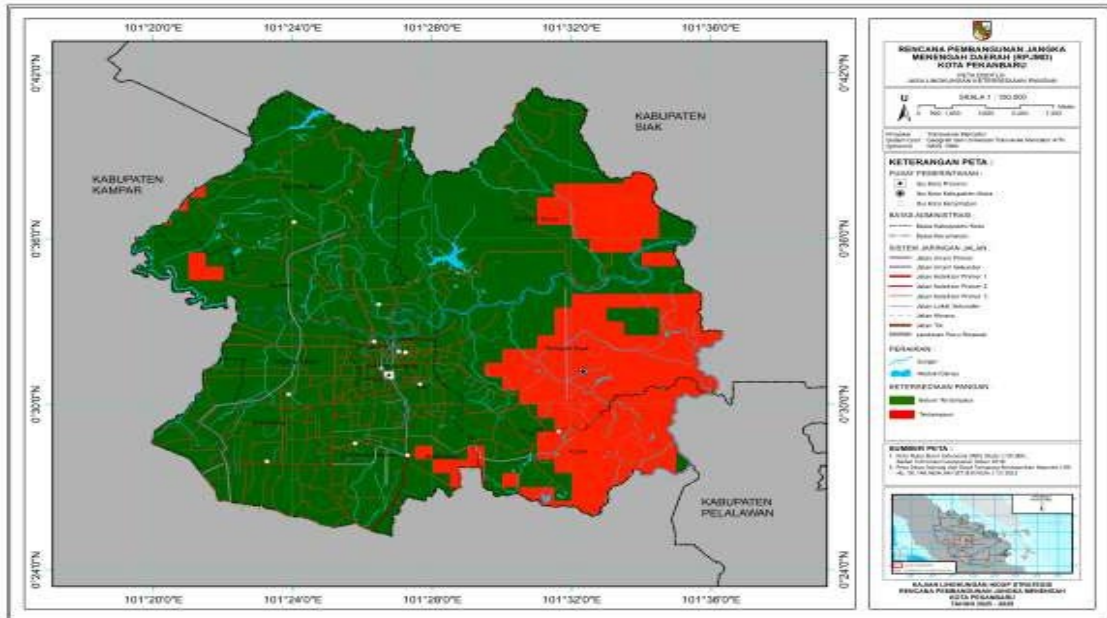
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan untuk menopang keberlangsungan hidup manusia, makhluk hidup lain, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Adapun daya tampung lingkungan adalah kapasitas lingkungan dalam menyerap zat, energi, maupun unsur lain yang masuk ke dalamnya tanpa menimbulkan gangguan pada fungsi ekologis.

Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagai metode standar dalam pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Metode ini dipilih karena lebih praktis dan aplikatif, serta dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai tahapan perencanaan pembangunan wilayah a) jasa ekosistem penyediaan pangan, b) jasa ekosistem penyediaan air bersih. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan agar pembangunan yang dilaksanakan tetap berada dalam batas kemampuan lingkungan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

2.1.3.1. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Berdasarkan hasil pemetaan, total luas wilayah Kota Pekanbaru mencapai **63.899,60 hektar**, dengan distribusi kategori daya dukung dan daya tampung pangan yang bervariasi. Sebagian besar wilayah, yakni seluas **49.981,07 hektar** atau setara **78,22%**, dikategorikan sebagai belum terlampaui, yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut masih memiliki kapasitas ekologis yang mencukupi untuk menunjang penyediaan pangan secara berkelanjutan. Hal ini mencerminkan keberadaan lahan-lahan potensial yang masih mendukung produksi pangan tanpa menimbulkan

degradasi lingkungan yang berarti. Sementara itu, sebesar **21,78%** wilayah atau seluas **13.918,53 hektar** tercatat dalam kategori **terlampau**, menandakan bahwa pada bagian wilayah tersebut telah terjadi tekanan terhadap kemampuan ekosistem dalam menyediakan pangan, baik akibat konversi lahan, degradasi tanah, maupun peningkatan permintaan yang tidak seimbang dengan kapasitas daya dukung. Peta distribusi spasial kondisi ini dapat dilihat pada gambar dibawah:

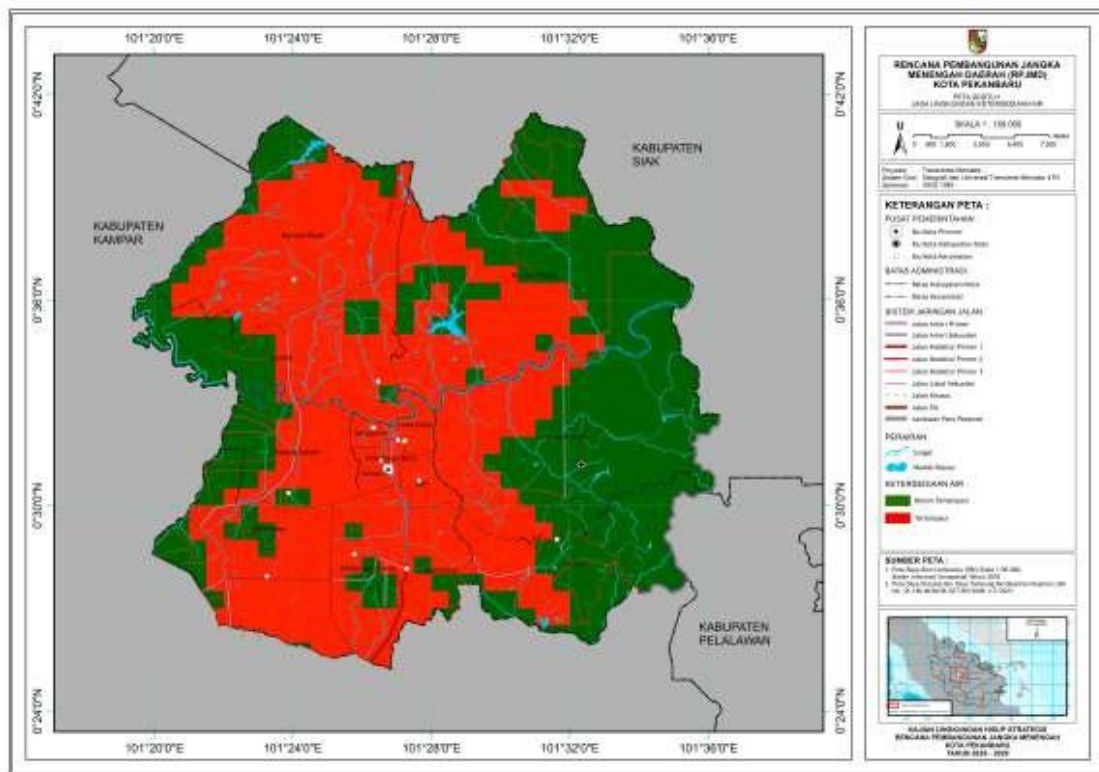


Sumber: KLHS RPJMD Kota Pekanbaru, 2025-2029

Gambar II.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kota Pekanbaru

2.1.3.2. Jasa Ekosistem Penyedia Air

Dalam aspek penyediaan air, wilayah Kota Pekanbaru juga menunjukkan kondisi yang beragam. Dari total luasan yang sama, tercatat bahwa **28.193,73 hektar** atau **44,12%** wilayah masih berada pada kategori **belum terlampau**, yang berarti ketersediaan air di kawasan tersebut masih mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun demikian, lebih dari setengah wilayah, yaitu **35.705,86 hektar** atau **55,88%**, telah masuk dalam kategori **terlampau**, mengindikasikan bahwa permintaan air telah melebihi kapasitas pasokan yang dapat disediakan secara alami oleh lingkungan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh tingginya tekanan dari sektor domestik, industri, dan perubahan penggunaan lahan, seperti alih fungsi kawasan resapan air menjadi area terbangun. Dengan demikian, wilayah-wilayah yang telah terlampau ini perlu menjadi fokus prioritas dalam pengelolaan sumber daya air, melalui pendekatan konservasi, efisiensi, serta peningkatan kualitas infrastruktur air bersih. Peta visualisasi kondisi ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: KLHS RPJMD Kota Pekanbaru, 2025-2029

Gambar II.5. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Pekanbaru

2.1.4. Berketahaan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan

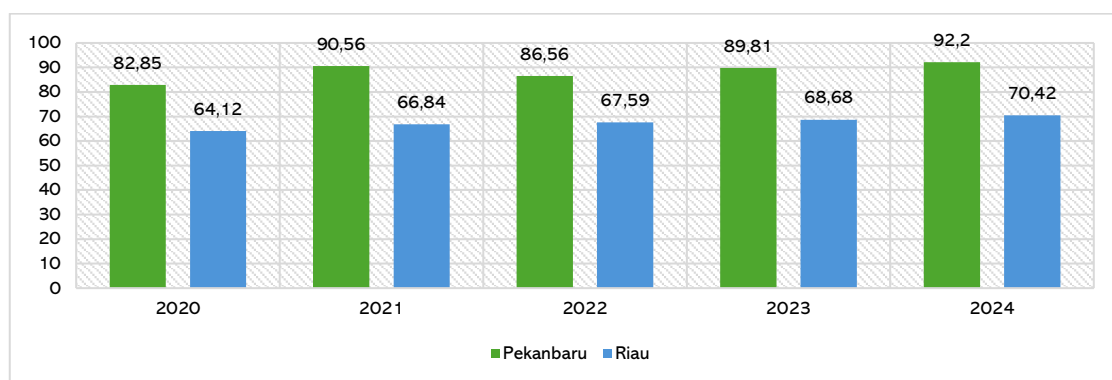
Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan pilar fundamental dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga kualitas hidup masyarakat Kota Pekanbaru. Ketersediaan energi listrik yang merata dan handal sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Di sisi lain, akses terhadap air bersih yang memadai menjadi faktor krusial bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan aktivitas pertanian, industri, serta sektor jasa. Sementara itu, kemandirian pangan tidak hanya mencerminkan kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat melalui produksi lokal, tetapi juga menjadi indikator strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi kota.

Oleh karena itu, penilaian terhadap kondisi ketahanan energi, air, dan pangan di Kota Pekanbaru dilakukan secara terpadu melalui berbagai indikator utama, seperti Indeks Konsumsi Listrik Per Kapita, Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, dan proporsi Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak. Pendekatan integratif ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang perlu direspons secara cepat dan tepat. Dengan melakukan

pemetaan kondisi dan capaian ketahanan energi, air, dan pangan secara menyeluruh, dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD Kota Pekanbaru diharapkan dapat merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis data dalam rangka memperkuat kemandirian, daya saing, serta ketahanan wilayah secara berkelanjutan.

2.1.4.1. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan yang mencukupi, namun juga menjamin akses, distribusi, serta konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan aman bagi masyarakat. Kota Pekanbaru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian pangan wilayah perkotaan:

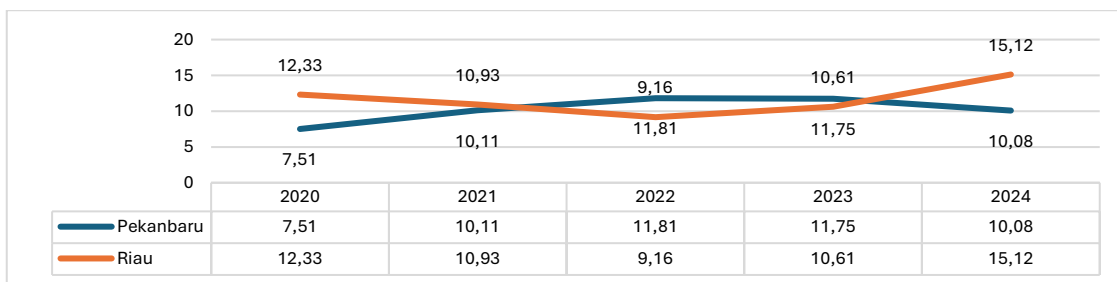


Sumber: Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Grafik II.2. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Grafik menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024, nilai IKP Kota Pekanbaru mengalami tren fluktuatif namun berada jauh di atas rata-rata Provinsi Riau. Pada tahun 2020 IKP Pekanbaru tercatat sebesar 82,85, kemudian meningkat signifikan menjadi 90,56 pada 2021. Meski mengalami penurunan pada 2022 menjadi 86,56, capaian IKP kembali menguat menjadi 89,81 (2023) dan mencapai puncaknya pada 2024 di angka 92,2. Dibandingkan dengan Provinsi Riau yang berada pada angka 70,42 di tahun 2024, Pekanbaru konsisten mempertahankan posisinya dalam kelompok tertinggi (kategori sangat baik) menurut klasifikasi nasional.

Tren ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan program ketahanan pangan kota yang adaptif dan berkelanjutan, termasuk keberhasilan dalam penguatan aksesibilitas pangan, diversifikasi pangan lokal, serta dukungan distribusi pangan yang efisien di wilayah perkotaan. Peningkatan ini juga menandakan kapasitas kelembagaan pangan Kota Pekanbaru yang cukup kuat dalam mengatasi tantangan kerawanan pangan struktural.

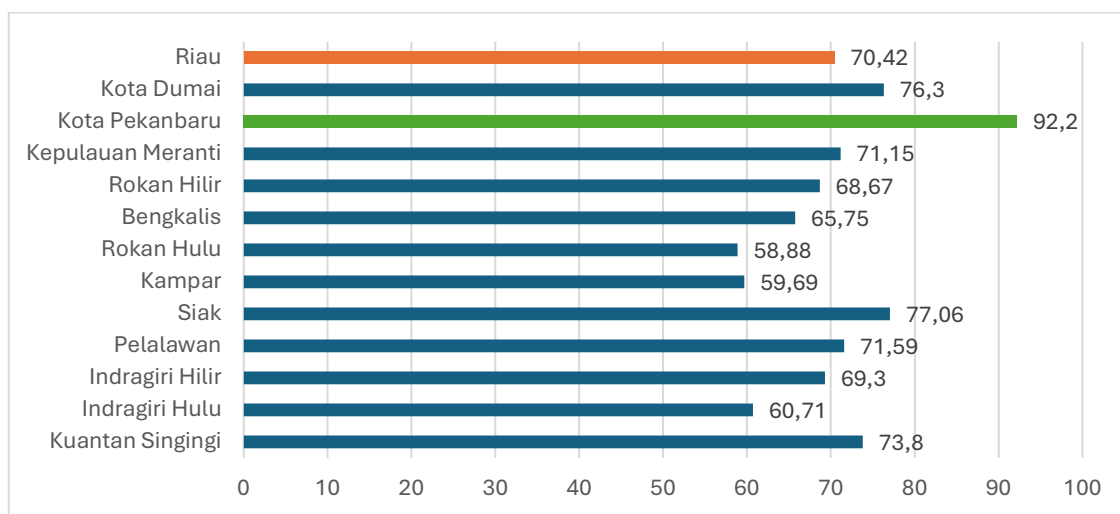


Sumber, Badan Pusat Statistik 2025

Grafik II.3. Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024 (%)

Grafik ini mengilustrasikan persentase penduduk yang belum memenuhi kecukupan konsumsi pangan. Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan positif dari sisi konsumsi pangan antara tahun 2020–2023, dengan penurunan prevalensi dari 7,51% (2020) ke titik terendah 11,75% (2023). Namun pada 2024 terjadi kenaikan menjadi 10,08%.

Meski ada kenaikan di 2024, Pekanbaru tetap berada di bawah angka provinsi yang mencapai 15,12%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan konsumsi pangan melalui edukasi, penyediaan pangan bergizi, dan peningkatan akses pangan rumah tangga telah berdampak, meskipun belum sepenuhnya stabil. Kenaikan di tahun 2024 dapat dikaitkan dengan dampak makro seperti inflasi pangan, gangguan pasokan, atau perluasan cakupan pendataan.



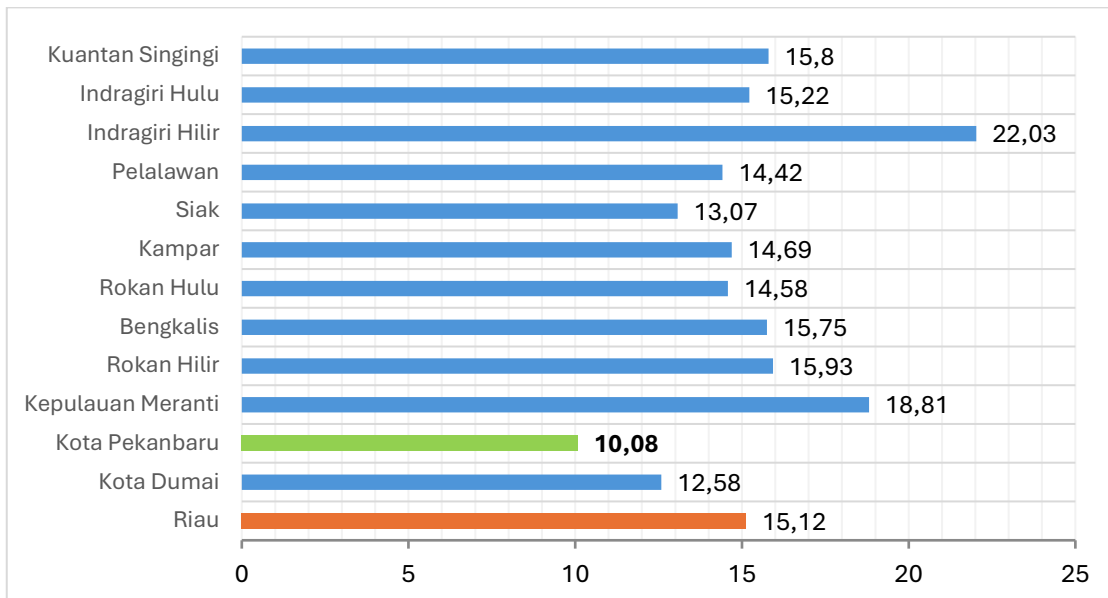
Sumber: Badan Pangan Nasional 2025

Grafik II.4. Indeks Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2024

Dalam konteks regional, Kota Pekanbaru menempati posisi tertinggi dalam capaian IKP 2024 dengan skor 92,2. Capaian ini jauh melampaui rata-rata provinsi (70,42) dan bahkan lebih tinggi dari daerah seperti Siak (77,06), Kuantan Singingi (73,8), serta Dumai (76,3). Ini mengindikasikan bahwa Pekanbaru bukan hanya unggul dalam hal akses dan distribusi, tetapi juga dalam manajemen risiko kerawanan pangan dan efektivitas kelembagaan pangan daerah.

2.1.4.2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Dominasi Pekanbaru dalam IKP regional juga menunjukkan bahwa kota ini memiliki struktur ketahanan pangan yang lebih mapan dibandingkan kabupaten/kota lain. Hal ini tak terlepas dari peran Pekanbaru sebagai pusat logistik, perdagangan, serta kebijakan publik yang mendukung intervensi ketahanan pangan secara sistemik.



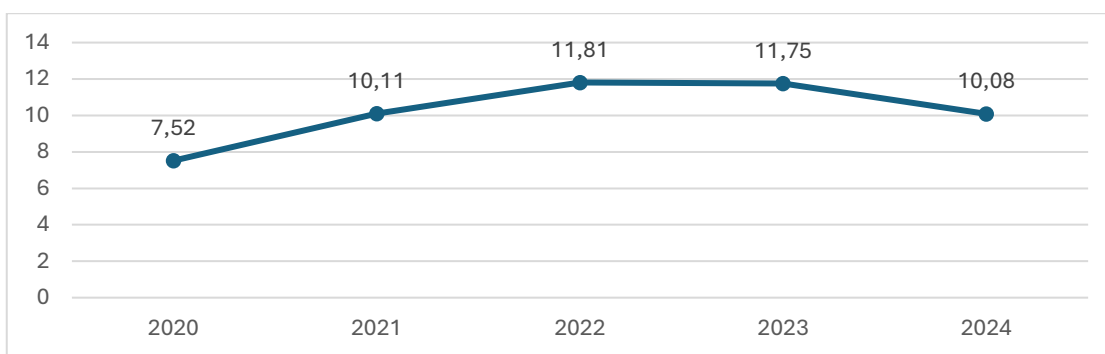
Sumber, Badan Pusat Statistik 2025

Grafik II.5. Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 (%)

Pekanbaru juga mencatatkan capaian baik dalam indikator konsumsi pangan, dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi sebesar 11,81%, menjadikannya salah satu dari tiga kota/kabupaten dengan capaian terbaik di bawah Dumai (12,58%) dan di atas Kuantan Singingi (15,8%).

Jika dibandingkan dengan kabupaten seperti Indragiri Hilir (22,03%) dan Kepulauan Meranti (18,81%), maka Pekanbaru memiliki keunggulan signifikan dalam menjaga konsumsi pangan warganya. Hal ini memperkuat argumen bahwa Pekanbaru tidak hanya unggul dalam aspek ketersediaan dan distribusi, namun juga dalam akses dan utilisasi pangan oleh rumah tangga.

Capaian ini harus dijaga dengan memperkuat kebijakan distribusi pangan murah, peningkatan literasi gizi masyarakat, serta integrasi program pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses air bersih sebagai penunjang konsumsi pangan sehat.



Grafik II.6. Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

2.1.4.3. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita Kota Pekanbaru dalam periode 2020–2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada dua tahun terakhir. Pada 2020, konsumsi listrik per kapita tercatat sebesar 216,11 kWh, kemudian turun signifikan pada 2021 menjadi 136,69 kWh. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan pemulihan masing-masing sebesar 159,84 kWh dan 179,29 kWh per kapita, seiring dengan meningkatnya produksi listrik dan aktivitas masyarakat pasca-pandemi. Namun, pada 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 134,21 kWh, meskipun jumlah penduduk meningkat dari 1.123.348 jiwa pada 2023 menjadi 1.167.599 jiwa pada 2024, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk.

Tabel II.7. Konsumsi Listrik Per Kapita (KWh/kapita/tahun 2020- 2024

Tahun	Total Produksi Listrik (kWh)	Jumlah Penduduk	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)
2020	212.508.291	983.356	-
2021	135.954.020	994.585	1.606,64
2022	161.048.064	1.007.540	1.641,39
2023	201.404.647	1.123.348	1.566,16
2024	156.705.501	1.167.599	0

Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2025

Ketersediaan energi listrik yang stabil memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan air, kemandirian pangan, serta keberlangsungan layanan publik dan aktivitas ekonomi. Operasional instalasi pengolahan air, distribusi PDAM, penyimpanan hasil pertanian, infrastruktur digital, mobilitas masyarakat, serta kawasan industri dan perkantoran sangat bergantung pada keberlanjutan pasokan listrik. Penurunan konsumsi listrik per kapita yang berkelanjutan dapat berdampak pada terganggunya layanan publik, berkurangnya produktivitas pelaku usaha, dan melemahnya daya saing Kota Pekanbaru di tingkat regional.

Tabel II.8. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Produksi Listrik (Kwh)	212.508.291	135.954.020	161.048.064	201.404.647	156.705.501
Total Jenis Pelanggan Listrik (orang)	449.240	420.202	485.736	503.664	447.458
Jumlah Pelanggan berasal dari Rumah Tangga (orang)	497.728	497.728	497.728	392.403	406.845
Penggunaan Utilization berasal dari Rumah Tangga (Kwh)	75.292.023	70.506.845	76.645.371	96.965.323	77.565.726
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	35,43	51,86	47,59	48,14	49,50
Persentase Jenis Pelanggan berasal dari Rumah Tangga (%)	87,48	86,70	87,36	88,01	86,83
Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)	-	1.606,64	1.641,39	1.566,16	0
Jumlah Penduduk	983.356	994.585	1.007.540	1.123.348	1.167.599
Indeks Konsumsi Listrik Per Kapita (KWh/kapita/tahun)	473,04	323,54	331,55	179,29	134,21

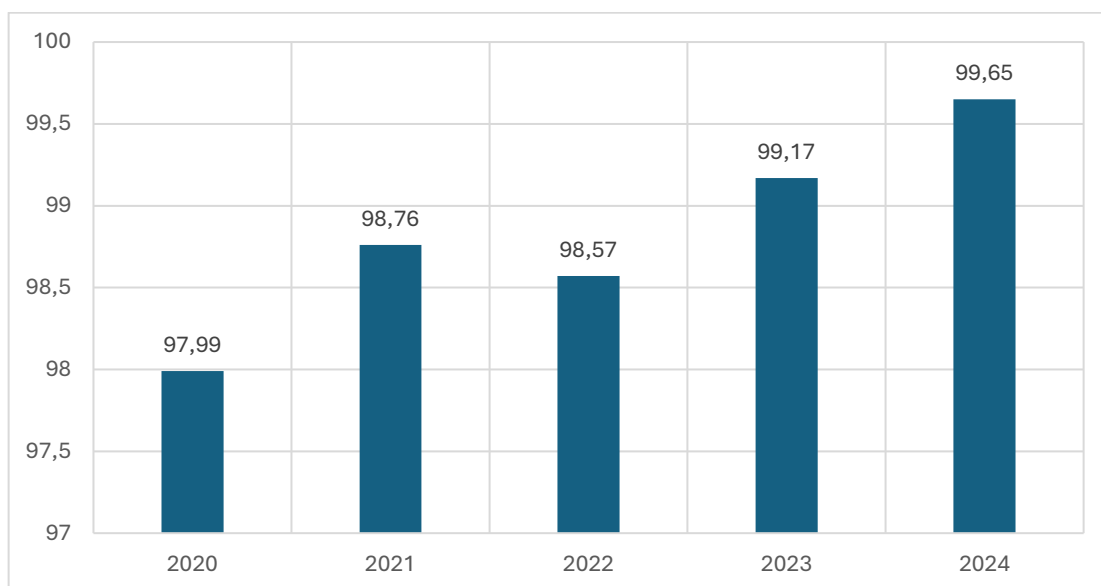
Sumber : LKIP ESDM Provinsi Riau dan BPS Kota Pekanbaru, 2025

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu menetapkan langkah strategis untuk meningkatkan keandalan dan cakupan sistem kelistrikan. Upaya yang perlu dilakukan meliputi penguatan infrastruktur energi, pemanfaatan energi terbarukan, peningkatan kerja sama lintas sektor, serta kampanye edukasi publik untuk mendorong pola konsumsi energi yang efisien dan bertanggung jawab. Perencanaan berbasis data dan proyeksi kebutuhan energi jangka menengah-panjang harus menjadi prioritas agar ketahanan energi kota tetap terjaga di tengah pertumbuhan penduduk dan dinamika ekonomi, sekaligus memastikan bahwa sektor rumah tangga, industri, perdagangan, dan jasa memperoleh pasokan listrik yang memadai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.1.4.4. Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Layak

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum layak di Provinsi Riau menunjukkan tren positif baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota selama periode 2020–2024. Secara provinsi, capaian meningkat dari 88,25% pada 2020

menjadi 92,24% pada 2024, mencerminkan adanya perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas pelayanan, serta upaya perluasan jangkauan layanan air minum di seluruh wilayah. Meskipun sempat terjadi fluktuasi ringan pada beberapa tahun, tren keseluruhan tetap mengarah pada peningkatan.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau, 2025

Grafik II.7. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024 (%)

Pada tingkat kabupaten/kota, capaian akses air minum layak bervariasi. Pekanbaru mencatat persentase tertinggi secara konsisten, dari 97,99% pada 2020 menjadi 99,65% pada 2024, diikuti oleh Bengkalis (95,72%), Kampar (96,00%), dan Kepulauan Meranti (93,44%) pada 2024. Beberapa daerah seperti Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Pelalawan menunjukkan capaian di bawah rata-rata provinsi, masing-masing dengan 86,73%, 77,63%, dan 83,26% pada 2024, meskipun tren jangka panjangnya tetap meningkat dibanding tahun-tahun awal. Fluktuasi tahunan terlihat pada Kuantan Singingi dan Pelalawan yang sempat mengalami penurunan pada 2022–2023 sebelum kembali naik pada 2024, mengindikasikan adanya faktor musiman atau kendala teknis dalam distribusi air.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun target peningkatan akses air minum layak di tingkat provinsi telah menunjukkan kemajuan, kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan. Daerah dengan capaian di bawah rata-rata memerlukan perhatian khusus melalui intervensi berbasis wilayah yang mencakup perbaikan jaringan distribusi, pengelolaan sumber air baku, serta peningkatan kapasitas pelayanan PDAM atau sistem penyediaan air minum setempat. Pendekatan ini akan memastikan pemerataan akses air minum layak, mendukung pencapaian target RPJMD, dan memperkuat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.4.5. Berketahanan Air

Ketahanan air di Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh dinamika hidrologis wilayah, morfologi topografi, karakteristik tanah, perubahan tutupan lahan, serta fluktuasi iklim, khususnya curah hujan. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Provinsi Riau, ketahanan air menjadi salah satu tantangan strategis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan, pengurangan risiko bencana hidrometeorologi, serta pemenuhan hak dasar masyarakat atas air bersih.

Air Permukaan dan Sistem Aliran Sungai

Wilayah aliran sungai utama Kota Pekanbaru dikuasai oleh Sungai Siak, yang berperan sebagai sistem utama drainase dan distribusi air permukaan. Sungai ini memiliki lebar rata-rata 96 meter dan kedalaman hingga 8 meter, serta dipengaruhi oleh pasang surut laut. Kecepatan alirannya yang rendah (0,75 liter/detik) menjadikan Sungai Siak rentan terhadap sedimentasi dan fluktuasi muka air, terutama saat curah hujan tinggi di hulu atau ketika air laut pasang. Anak-anak sungai seperti Senapelan, Sail, dan Sago memainkan peran penting sebagai penyalur limpasan dari kawasan urban dan pusat ekonomi kota. Namun, saluran-saluran ini telah mengalami degradasi fisik, penyempitan, dan pencemaran akibat pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan serta alih fungsi lahan secara masif di zona sempadan.

Secara spasial, kawasan rawa di utara Sungai Siak yang semula berperan sebagai sistem retensi air alami (natural retention pond) kini menyusut drastis karena ekspansi permukiman dan kawasan industri. Fragmentasi lahan basah ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas penyerapan limpasan air, meningkatnya frekuensi banjir lokal, dan penurunan kualitas air permukaan. Di sisi lain, absennya sistem monitoring kualitas air yang berkelanjutan menyulitkan pemerintah daerah dalam mendeteksi penurunan kapasitas ekosistem sungai.

1. Drainase Perkotaan dan Kerentanan Banjir

Sistem drainase Kota Pekanbaru sebagian besar masih bersifat pasif dan bergantung pada kemiringan alami wilayah. Dengan topografi yang relatif datar (5–50 mdpl) dan lereng rata-rata <2%, distribusi aliran limpasan sangat bergantung pada kelancaran jaringan drainase mikro dan keberadaan ruang terbuka hijau. Permasalahan utama drainase terletak pada minimnya integrasi jaringan antara saluran primer, sekunder, dan tersier, serta buruknya pemeliharaan akibat sedimentasi, penumpukan sampah, dan pembangunan ilegal yang mengganggu jalur aliran air.

Banjir dan genangan kronis terjadi hampir setiap tahun pada lokasi-lokasi rendah seperti Jalan Yos Sudarso, Payung Sekaki, Rumbai Pesisir (Kecamatan Rumbai Barat dan Rumbai Timur), serta permukiman padat penduduk yang beririsan dengan sempadan sungai. Sistem drainase gravitasi tidak mampu mengalirkan air secara cepat, terlebih saat pasang laut terjadi bersamaan dengan curah hujan tinggi.

Ketidakterpaduan antara tata ruang, perizinan pembangunan, dan mitigasi risiko banjir memperburuk kondisi ini. Ketiadaan sistem drainase berbasis pompa dan minimnya kawasan tampungan air perkotaan semakin menambah beban infrastruktur eksisting.

2. Curah Hujan dan Hari Hujan

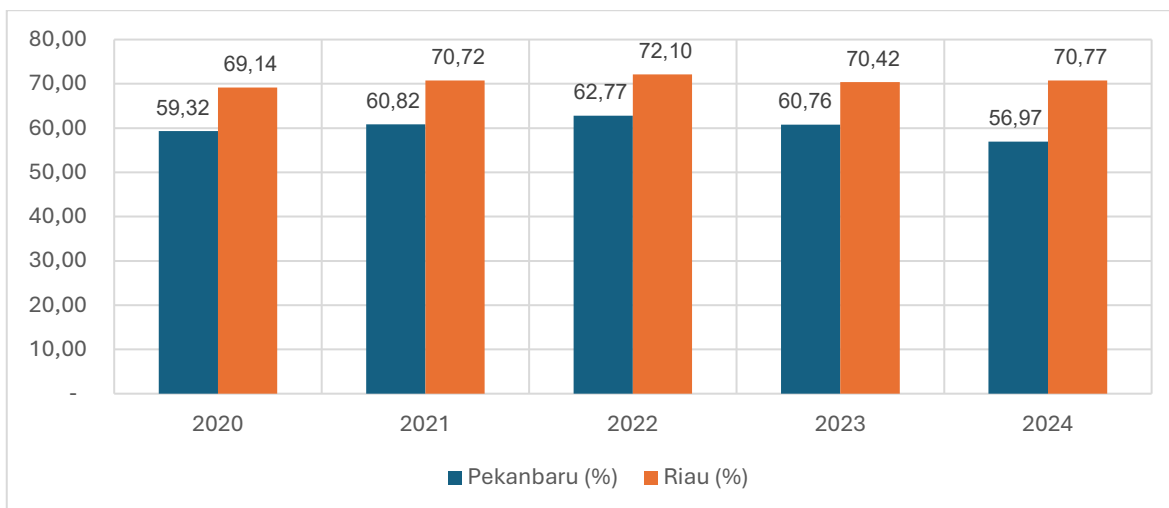
Data klimatologis lima tahun terakhir menunjukkan adanya tren ketidakpastian iklim yang semakin menguat. Rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 233 mm hingga 287 mm, namun intensitas dan distribusi bulanannya semakin tidak merata. Tahun 2022 mencatat hari hujan tertinggi, sementara tahun 2023 mengalami anomali penurunan hari hujan menjadi rata-rata 13 hari per bulan. Pola hujan intensif dalam waktu singkat telah memicu banjir bandang lokal, sedangkan musim kering yang memanjang memperbesar risiko kekeringan di sumber air skala mikro.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hidrologi Pekanbaru berada dalam tekanan perubahan iklim. Perubahan pola hujan tidak hanya mempengaruhi volume air permukaan, tetapi juga menurunkan efektivitas sistem drainase eksisting. Ketidaksesuaian kapasitas saluran dengan beban limpasan saat hujan ekstrem mempercepat terjadinya bencana hidrometeorologis di wilayah perkotaan.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai bahan informasi dalam menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH dapat mencakup berbagai aspek lingkungan, seperti kualitas air, udara, dan tutupan hutan, serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi lingkungan. IKLH juga dapat menjadi alat penggerak bagi pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan kebijakan lingkungan. Capaian kinerja lingkungan yang diukur melalui indikator IKLH Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau tahun 2020-2024, disajikan pada grafik dibawah ini:



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2025

Grafik II.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Berdasarkan grafik di atas, terjadi pergerakan IKLH Kota Pekanbaru selama periode 2020–2024 yang menunjukkan dinamika kualitas lingkungan di kota ini. Pada tahun 2020, IKLH Kota Pekanbaru tercatat sebesar 59,32. Angka ini menunjukkan kondisi lingkungan yang masih perlu mendapat perhatian serius. Dalam beberapa tahun berikutnya, IKLH sempat menunjukkan tren meningkat, mencerminkan adanya perbaikan di beberapa aspek pengelolaan lingkungan. Namun, pada dua tahun terakhir, terjadi penurunan nilai IKLH, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 56,97, atau turun dibandingkan capaian awal tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum cukup untuk menjaga kesinambungan perbaikan kualitas lingkungan.

Penurunan IKLH pada dua tahun terakhir tersebut disebabkan oleh penurunan Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan. Pada Tahun 2023, Indeks Kualitas Udara sebesar 89,03 menurun pada tahun 2024 menjadi 81,42 dikarenakan adanya kejadian kebakaran lahan di Riau seluas 1.653 hektare sehingga mempengaruhi kualitas udara di Kota Pekanbaru. beberapa faktor, seperti peningkatan emisi pencemar udara, degradasi kualitas air permukaan, dan berkurangnya ruang terbuka hijau akibat tekanan pembangunan yang tidak terkontrol. Selain itu, kemungkinan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan industri dan permukiman juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan.

Jika dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi, IKLH Kota Pekanbaru masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau, yang mencapai 70,42 pada tahun 2023. Untuk konteks provinsi, IKLH Riau menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 62,47 pada tahun 2019 menjadi 72,1 pada tahun 2022, meskipun kemudian sedikit menurun pada tahun 2023. Capaian ini mengindikasikan bahwa

upaya pengelolaan lingkungan di tingkat provinsi cenderung lebih konsisten dibandingkan dengan Kota Pekanbaru.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam kualitas lingkungan di Pekanbaru, namun upaya yang telah dilakukan masih belum cukup untuk mengejar target optimal, serta masih terdapat kesenjangan capaian antara Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Hal ini menandakan perlunya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Penguatan perencanaan dan pengawasan lingkungan pada sektor industri, pemukiman, dan transportasi.
- b. Peningkatan kapasitas sistem pengelolaan limbah dan sampah.
- c. Revitalisasi ruang terbuka hijau serta konservasi kawasan-kawasan alami.
- d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kualitas data lingkungan.

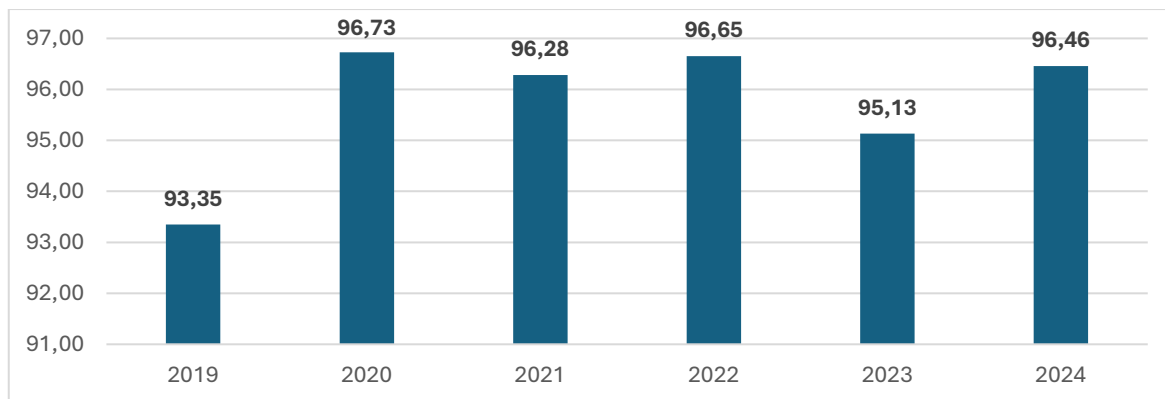
Secara keseluruhan, capaian IKLH Kota Pekanbaru pada periode 2020–2024 menjadi catatan penting dalam penyusunan perencanaan jangka menengah ke depan. Meskipun ada indikasi perbaikan pada awal periode, penurunan dalam dua tahun terakhir harus menjadi perhatian utama, dan memerlukan intervensi yang lebih terarah agar tren positif dapat dipulihkan dan ditingkatkan secara berkelanjutan menuju tahun 2025 dan seterusnya.

Berdasarkan gambar diatas terdapat peningkatan IKLH Kota Pekanbaru dari 59,32 pada tahun 2020 menjadi 56,97 pada tahun 2024. Selama periode 2020 - 2025, IKLH Kota Pekanbaru menunjukkan trend meningkat namun dua tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan IKLH Kota Pekanbaru Meskipun terjadi peningkatan, capaian IKLH Kota Pekanbaru masih berada di bawah Provinsi Riau yang mencapai 70,42 pada tahun 2023. Namun demikian, Provinsi Riau sendiri juga mengalami peningkatan IKLH dari 62,47 pada tahun 2019 menjadi 72,1 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 IKLH Provinsi Riau turun menjadi 70,42. Peningkatan IKLH di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya perbaikan pada kualitas lingkungan hidup di kota tersebut, namun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang lebih tinggi.

2.1.5.2. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman/Layak

Persentase rumah tangga di Kota Pekanbaru yang memiliki akses sanitasi aman/layak pada periode 2019–2024 menunjukkan tren yang relatif baik dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019, capaian berada di angka 93,35 persen, meningkat

signifikan menjadi 96,73 persen pada 2020. Pada 2021 terjadi sedikit penurunan ke angka 96,28 persen, namun kembali naik menjadi 96,65 persen di tahun 2022. Tahun 2023 mengalami penurunan ke 95,13 persen, sebelum kembali meningkat ke 96,46 persen pada 2024. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa akses sanitasi di Pekanbaru berada pada kategori tinggi dan relatif stabil selama enam tahun terakhir.



Sumber : BPS Provinsi Riau, 2024

Grafik II.9. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024 (%)

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau pada periode 2020–2024, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai tetap menempati posisi teratas dengan capaian akses sanitasi aman/layak di atas 90 persen setiap tahunnya. Dumai bahkan mencatat peningkatan signifikan hingga mencapai 97,98 persen pada 2024.

Beberapa kabupaten seperti Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, dan Bengkalis menunjukkan capaian yang cukup tinggi, berada di kisaran 80–90 persen, meskipun terdapat fluktuasi antar tahun. Siak dan Bengkalis secara konsisten mencatat angka di atas 90 persen pada beberapa tahun, menandakan performa yang kuat dalam penyediaan akses sanitasi.

Sementara itu, Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti masih mencatat persentase terendah di provinsi, dengan capaian di bawah 61 persen sepanjang periode. Meski demikian, keduanya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya perbaikan bertahap dalam akses sanitasi di wilayah tersebut.

Tabel II.9. Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020- 2024 (%)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kuantan Singingi	82,81	87,98	86,98	85,36	86,86
2	Indragiri Hulu	84,16	82,82	84,63	85,43	86,09
3	Indragiri Hilir	59,33	49,46	56,32	57,13	60,86
4	Pelalawan	89,18	81,13	83,77	85,30	85,70
5	Siak	90,51	95,41	93,51	91,15	93,32

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kampar	89,47	89,62	82,97	86,40	87,82
7	Rokan Hulu	81,44	88,85	90,10	89,49	90,64
8	Bengkalis	89,67	90,34	86,99	91,11	92,63
9	Rokan Hilir	74,75	73,94	81,15	79,71	80,76
10	Kepulauan Meranti	57,43	55,98	57,03	57,67	61,31
11	Pekanbaru	96,73	96,28	96,65	95,13	96,46
12	Dumai	95,38	97,03	91,44	95,50	97,98
	Provinsi Riau	83,99	83,64	84,06	84,58	86,32

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025.

Secara rata-rata provinsi, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak meningkat dari 80,04 persen pada 2019 menjadi 84,58 persen pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di berbagai wilayah di Riau, walaupun masih terdapat kesenjangan capaian antar kabupaten/kota yang perlu diatasi untuk mencapai pemerataan akses sanitasi layak di seluruh daerah.

2.1.5.3. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sampah di wilayah tertentu, timbulan sampah di Kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu meningkat ini dikarenakan jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya. Selengkapanya mengenai kinerja pengelolaan persampahan Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.10. Indikator Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan sampah yang ditangani	Ton	283.518	353.133	356.503	330.977	369.019
Jumlah Sampah yang terkurang melalui 3Ri	Ton	64.102	63.528	65.560	16.041,51	11.970,19
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	22,61	17,99	18,39	16,52	3,24

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2025

Timbulan sampah yang ditangani di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah yang berhasil ditangani sebesar 283.518 ton dan meningkat menjadi 356.503 ton pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 330.977 ton. Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 369.019 Ton timbulan sampah yang sudah ditangani. Penambahan timbulan sampah ini umumnya sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi kota.

Sementara itu, pengurangan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menunjukkan tren penurunan. Jika pada tahun 2020 jumlah sampah yang

berhasil dikurangi mencapai 64.102 ton atau 22,61 persen dari total timbulan, maka pada tahun 2023 jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 16.041,51 ton atau 16,52 persen.

2.1.5.4. Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Berdasarkan data pada Tabel II.86 Persentase Cakupan Area Persampahan Tahun 2020–2024, Kota Pekanbaru menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. Pada tahun 2020, cakupan layanan sudah mencapai 67,77%, lalu mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai 100%. Capaian 100% ini berhasil dipertahankan secara konsisten selama periode 2021–2024, menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga di Pekanbaru telah terlayani secara penuh dalam pengumpulan sampah.

Tabel II.11. Persentase Cakupan Area Persampahan Tahun 2020 -2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kuantan Singingi	37,01	60,00	60,00	60,00	60,00
2	Indragiri Hulu	56,02	42,86	42,86	42,86	42,86
3	Indragiri Hilir	21,99	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Pelalawan	29,40	41,70	41,70	41,67	41,67
5	Siak	73,53	78,57	78,57	78,57	78,57
6	Kampar	17,63	30,00	30,00	33,33	33,33
7	Rokan Hulu	19,15	25,00	25,00	25,00	25,00
8	Bengkalis	68,12	90,90	90,90	90,91	90,91
9	Rokan Hilir	29,66	33,30	33,30	33,33	33,33
10	Kepulauan Meranti	15,00	15,00	15,00	22,22	22,22
11	Pekanbaru	67,77	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Dumai	90,32	83,10	83,10	57,14	57,14
	Provinsi Riau	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025

Kinerja ini menandakan adanya efektivitas pengelolaan persampahan di Pekanbaru, baik dari segi kapasitas armada, sistem distribusi layanan, maupun partisipasi masyarakat dalam program kebersihan. Selain itu, pencapaian ini mengindikasikan keberhasilan program dan kebijakan daerah yang berfokus pada pemerataan akses layanan kebersihan hingga menjangkau seluruh wilayah kota. Meskipun demikian, mempertahankan cakupan 100% juga memerlukan pengawasan berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, dan adaptasi terhadap pertumbuhan penduduk agar pelayanan tetap optimal di masa mendatang.

2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana di Kota Pekanbaru mencerminkan kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem perkotaan dalam bertahan dan pulih dari peristiwa ekstrem maupun perubahan lingkungan yang signifikan. Sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Riau, upaya peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi menjadi fokus strategis dalam kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari risiko bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Kota Pekanbaru terus mengembangkan sistem peringatan dini, penguatan infrastruktur adaptif, serta edukasi kebencanaan berbasis komunitas untuk membangun ketangguhan wilayah dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi, banjir, kebakaran lahan, dan dampak perubahan iklim.

2.1.6.1. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Kota Pekanbaru setiap tahunnya secara konsisten memfokuskan inventarisasi dan pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK) pada empat sektor utama dari lima sektor strategis, yaitu sektor energi, pertanian, kehutanan, dan limbah. Berdasarkan data Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) tahun 2021, total emisi GRK Kota Pekanbaru tercatat sebesar 36.350,61 Gg CO₂ ekuivalen.

Dari total emisi tersebut, sektor energi tercatat sebagai kontributor utama, dengan emisi sebesar 30.546,31 Gg CO₂ eq per tahun, atau setara dengan 84,03% dari total emisi GRK. Dominasi sektor energi ini mencerminkan tingginya konsumsi energi di kawasan urban dan padat aktivitas seperti Pekanbaru, termasuk dari sektor transportasi, industri, dan konsumsi listrik rumah tangga.

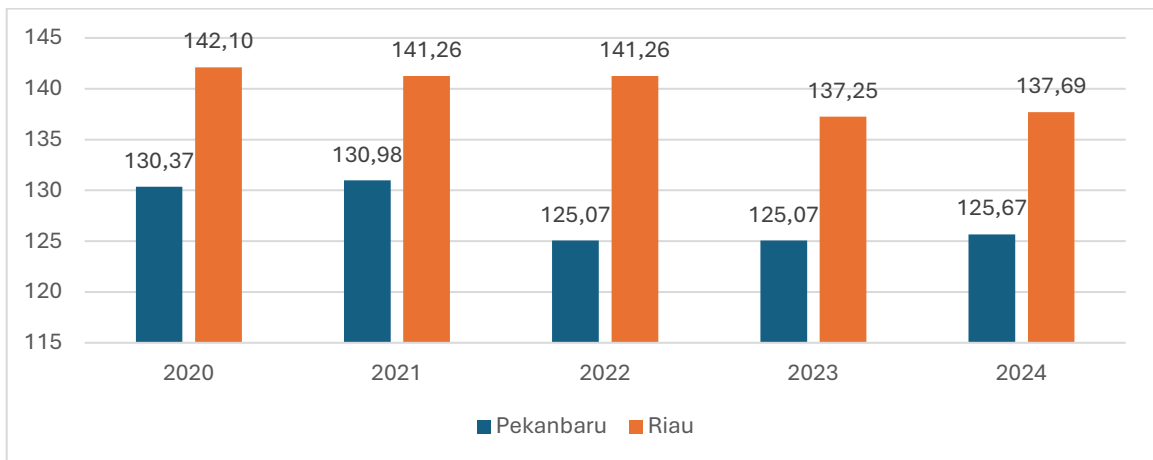
Sektor terbesar berikutnya adalah sektor kehutanan, yang menyumbang 5.443,93 Gg CO₂ eq per tahun atau sekitar 14,98% dari total emisi. Emisi dari sektor ini umumnya berasal dari perubahan tutupan lahan dan degradasi vegetasi, termasuk akibat alih fungsi lahan, kebakaran hutan, serta konversi kawasan lindung menjadi permukiman atau infrastruktur.

Sementara itu, sektor pertanian berkontribusi sebesar 130,87 Gg CO₂ eq per tahun, dengan proporsi relatif kecil yakni 0,36% dari total emisi. Emisi sektor ini utamanya bersumber dari aktivitas pertanian sawah, peternakan, dan penggunaan pupuk berbasis nitrogen. Adapun sektor limbah, termasuk limbah domestik dan industri, tercatat menghasilkan emisi sebesar 229,49 Gg CO₂ eq per tahun atau sekitar 0,63% dari keseluruhan emisi.

Dominasi emisi dari sektor energi menegaskan perlunya strategi mitigasi yang berfokus pada efisiensi energi, pengembangan transportasi rendah karbon, serta penggunaan energi terbarukan. Di sisi lain, sektor kehutanan memerlukan upaya rehabilitasi lahan, perlindungan kawasan hijau, dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan untuk menekan kontribusi emisinya.

2.1.6.2. Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Paparan Penduduk

Indeks Risiko Bencana adalah sebuah indeks yang mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Indeks ini terdiri dari tiga komponen, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Kerentanan adalah kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sedangkan kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Indeks risiko bencana Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau tahun 2020-2023, disajikan pada grafik dibawah ini:



Sumber: BNPB Tahun 2024

Grafik II.10. Indeks Risiko Bencana Kota Pekanbaru dan Provinsi Tahun 2020-2024

Indeks Risiko Bencana Kota Pekanbaru masuk kategori sedang dengan trend fluktuasi menurun selama periode 2020-2023 yang dominasi oleh bencana banjir. Pada tahun 2020 indeks risiko bencana Kota Pekanbaru sebesar 130,37, menjadi 130,98 pada tahun 2021, dan turun hingga tahun 2023 menjadi 125,07. Indeks risiko bencana Kota Pekanbaru masih dibawah rata-rata capaian indeks resiko bencana Provinsi Riau yaitu 137,25 tahun 2023.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dari BNPB, Kota Pekanbaru mengalami tren penurunan risiko bencana secara perlahan namun konsisten dalam rentang waktu satu dekade terakhir. Pada tahun 2015 hingga 2020, nilai IRBI tercatat konstan sebesar 132,40, sebelum menurun bertahap menjadi 131,79 pada tahun 2021, 131,55 pada 2022, 129,60 pada 2023, dan 128,42 pada 2024. Nilai ini menempatkan Kota Pekanbaru dalam kategori risiko sedang, dan menjadikannya salah satu dari sedikit wilayah perkotaan di Provinsi Riau yang menunjukkan arah perbaikan resiliensi bencana secara kuantitatif.

Penurunan nilai IRBI tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas adaptif dan responsif daerah dalam mengelola risiko kebencanaan, baik melalui pembangunan infrastruktur resiliensi, penyusunan dokumen kebijakan kebencanaan seperti rencana kontinjensi, hingga upaya edukasi masyarakat secara masif. Meskipun demikian, angka IRBI yang masih berada di atas 120 mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko masih harus ditingkatkan, khususnya pada aspek penguatan sistem peringatan dini, penataan ruang berbasis risiko, dan peningkatan anggaran mitigasi bencana.

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru berada dalam kelompok risiko sedang dengan nilai IRBI 128,42. Nilai ini lebih baik dibandingkan wilayah seperti Rokan Hilir (162,80), Indragiri Hilir (168,40), atau Pelalawan (152,91) yang tergolong dalam kategori risiko tinggi. Kota Pekanbaru memiliki skor yang hampir setara dengan Kuantan Singingi (131,20) dan lebih baik dari Kampar (141,74), Bengkalis (137,73), serta Rokan Hulu (155,20).

Data ini menempatkan Pekanbaru sebagai salah satu kota dengan sistem pengelolaan risiko yang cukup baik, namun tetap memerlukan perhatian intensif terhadap dinamika perkotaan seperti alih fungsi lahan, kepadatan penduduk, dan drainase yang rentan terhadap banjir. Perbandingan ini juga menjadi bukti bahwa risiko bencana tidak hanya bergantung pada frekuensi kejadian, tetapi juga pada kerentanan sosial dan kapasitas mitigasi di masing-masing daerah.

Tabel II.12. Tabel Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2024

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
1	Indragiri Hilir	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	Tinggi
2	Rokan Hilir	167,20	167,20	167,20	167,20	167,20	167,20	167,20	167,20	167,20	167,20	Tinggi
3	Rokan Hulu	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	Tinggi
4	Pelalawan	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	151,41	152,91	Tinggi
5	Kepulauan Meranti	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	146,91	147,12	Tinggi
6	Kampar	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	139,93	148,53	136,81	141,74	Sedang
7	Bengkalis	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	140,37	128,86	134,65	137,73	Sedang
8	Kuantan Singingi	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20	Sedang
9	Kota Pekanbaru	132,40	132,40	132,40	132,40	132,40	132,40	130,37	130,98	125,07	125,67	Sedang
10	Indragiri Hulu	132,40	132,40	132,40	132,40	132,40	132,40	132,40	127,24	122,06	124,65	Sedang
11	Siak	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	143,11	131,49	120,90	111,82	Sedang
12	Kota Dumai	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	106,60	98,91	Sedang

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

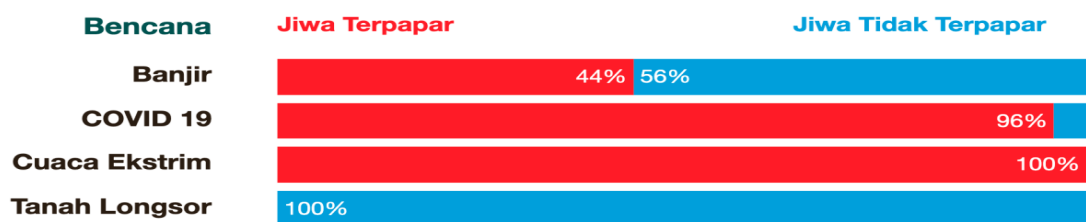
Sumber: Buku IRBI, 2024

Analisis paparan penduduk terhadap jenis bencana di Kota Pekanbaru mengungkapkan fakta penting yang harus menjadi fokus intervensi kebijakan. Cuaca ekstrem tercatat sebagai ancaman utama, dengan 100% penduduk terpapar,

menandakan seluruh populasi berada dalam potensi risiko terhadap kejadian seperti angin kencang, gelombang panas, atau hujan intensitas tinggi. Hal ini sejalan dengan kondisi iklim tropis Pekanbaru yang makin terpengaruh oleh variabilitas cuaca global dan perubahan iklim.

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang luas, dengan tingkat paparan penduduk mencapai 96%, menunjukkan adanya kerentanan sistemik terhadap penyebaran penyakit menular. Sementara itu, banjir menjadi bencana hidrometeorologis utama dengan 44% penduduk terpapar, yang menggambarkan titik-titik rawan genangan dan banjir musiman akibat kapasitas drainase yang belum optimal serta perubahan tutupan lahan.

Menariknya, seluruh penduduk Kota Pekanbaru tercatat tidak terpapar terhadap bencana tanah longsor, yang mengindikasikan bahwa secara geologis dan topografis, wilayah ini relatif aman dari kejadian gerakan tanah. Namun, status ini harus dijaga melalui pengendalian pembangunan di kawasan berlereng dan konservasi kawasan lindung di bagian utara kota seperti Rumbai dan Tenayan Raya.



Sumber, InaRISK, 2024

Grafik II.11. Rasio Jiwa Penduduk yang Terpapar dan Tidak Terpapar Menurut Jenis Bencana Kota Pekanbaru Tahun 2024

Secara keseluruhan, data IRBI dan tingkat paparan penduduk menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru telah menunjukkan kinerja mitigasi risiko bencana yang cukup baik, namun menghadapi tantangan serius terhadap dampak iklim ekstrem dan banjir.

A. Wilayah Rawan Bencana Banjir/Genangan

Kota Pekanbaru memiliki 18 (delapan belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara ke Sungai Siak, diantaranya:

1. Wilayah Utara Sungai Siak, muara di Sungai Siak: Takuana, Umban, Meranti, Limbungan, Ukai, Lukud.
2. Selatan Sungai Siak, muara di Sungai Siak: Sibam, Air Hitam, Pembangunan, Senapelan, Sago, Limau, Sail, Tenayan, Pendanau
3. Selatan Sungai Siak, muara di Sungai Kampar: Tarai, Cipta Karya, Kelulut

Wilayah yang terletak di tepian Sungai Siak dan anak sungai Siak merupakan kawasan yang berpotensi banjir dan genangan. Secara topografi kawasan ini terletak pada daerah yang relatif rendah dengan ketinggian elevasi antara 1,50 sampai 2,50

meter di atas permukaan air laut dan setiap musim hujan sering mengalami banjir yang disebabkan oleh:

1. Meluapnya Sungai Siak;
2. Tingginya curah hujan, terutama di bagian hulu; dan
3. Pengaruh pasang dari laut

Disamping masalah tersebut, anak sungai dan saluran drainase dalam kota yang mengalir ke Sungai Siak sering tidak lancar dan berpotensi terjadinya genangan lokal dan banjir di beberapa lokasi. Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru Tahun 2020, terdapat 121 Titik Banjir / Genangan di Kota Pekanbaru, dengan luas genangan sebesar 294,36 Ha.

Kondisi yang dijelaskan diatas, mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat di daerah perkotaan, khususnya di musim penghujan. Secara umum penyebab munculnya genangan/ banjir di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Perilaku pengembang ruko/perkantoran yang menutupi drainase tanpa memperhatikan kaidah teknis sehingga ketika hujan, air dari halaman ruko/perkantoran tersebut tidak masuk ke drainase malah terperangkap di badan jalan.
2. Banyaknya sampah dan sedimentasi di dalam drainase akibat perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam drainase sehingga menghambat aliran air.
3. Alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun disebabkan pertumbuhan pemukiman dan pembangunan Kota yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan.
4. Belum terintegrasinya drainase di beberapa titik di Kota Pekanbaru serta rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana prasarana pengendali banjir untuk mengantarkan air permukaan di kawasan terbangun ke pembuangan akhir (badan air penerima).

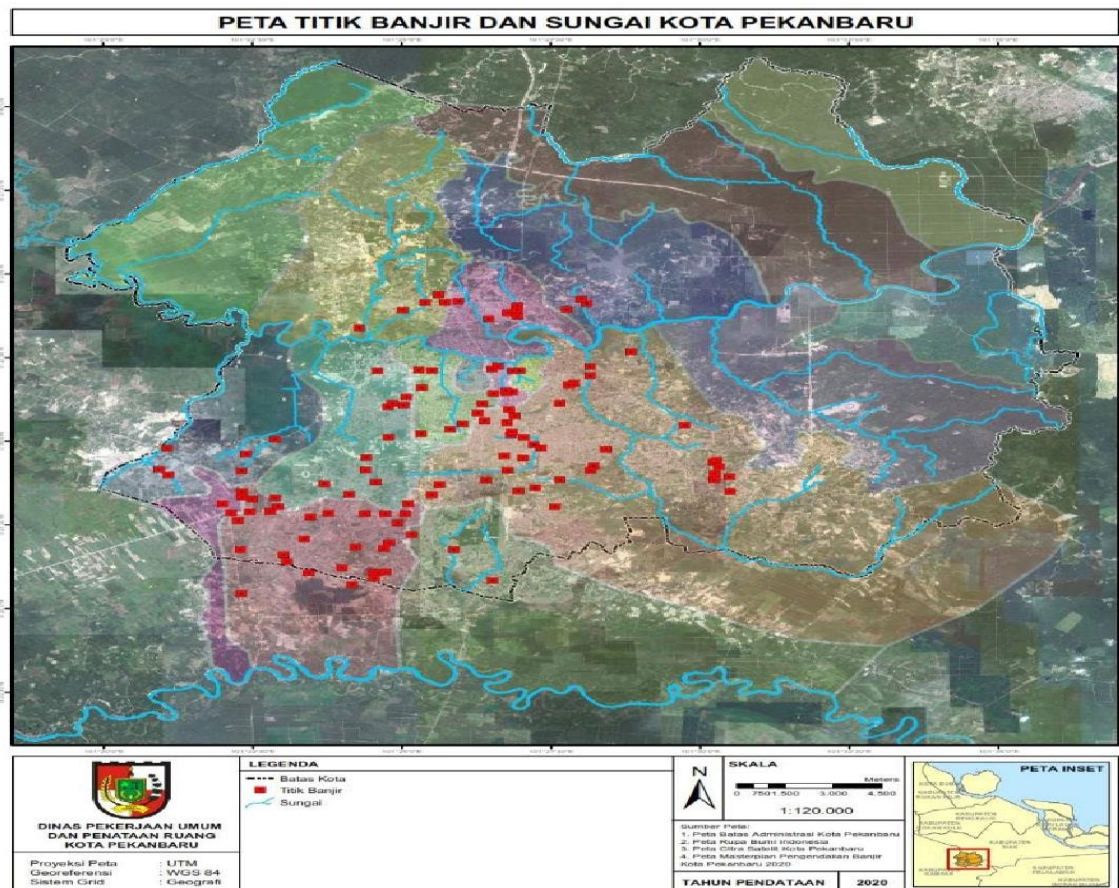
Tabel II.13. Titik-titik Genangan dan Lokasi Banjir di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Luas banjir (Ha)
1	Bina Widya	23	49,94
2	Bukit Raya	5	5,92
3	Kulim	4	4,94
4	Lima Puluh	4	2,88
5	Marpoyan Dama	17	42,14
6	Payung Sekaki	11	24,54
7	Pekanbaru Kota	5	2,43
8	Rumbai	10	24,11
9	Rumbai Timur	6	43,38

No	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Luas banjir (Ha)
10	Sail	1	0,69
11	Senapelan	2	5,07
12	Sukajadi	7	14,22
13	Tenayan Raya	7	4,85
14	Tuah Madani	17	67,76
15	Pekanbaru, Kampar	2	1,50
Total		121	294,36

Sumber: Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas terdapat 121 titik banjir dengan luasan banjir 294,36 Ha yang terjadi pada sistem drainase Kota Pekanbaru. Dari 15 kecamatan yang luasan banjir terbesar terdapat di Kecamatan Tuah Madani dengan luasan 67,76 Ha dan 17 titik banjir. Adapun saluran drainase di Kota Pekanbaru meliputi saluran primer dengan panjang 163,8 Km dan saluran sekunder dengan panjang 172,3 Km.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2023

Gambar II.6. Peta Titik Banjir dan Sungai Kota Pekanbaru

B. Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kota Pekanbaru disamping rentan terhadap bencana banjir di musim hujan, namun juga rentan terhadap bencana kekeringan di musim kemarau, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karlhut). Jenis tanah yang ada di Kota Pekanbaru terdapat jenis tanah organosol. Tanah Organosol merupakan tanah

organik yang berasal dari gambut dan rawa, selain jenis tanah lahan kebun juga merupakan salah satu penyebab rawan kebakaran hutan dan lahan.

Khusus pada bencana Karlahut di Kota Pekanbaru, kejadian bencana hanya melanda kebakaran lahan, persisnya pada lahan gambut yang mendominasi 60 % lahan yang ada di Kota Pekanbaru, sedangkan bencana kebakaran selama ini belum pernah melanda hutan yang ada di Kota Pekanbaru. Tingginya frekuensi dan intensitas bencana kebakaran lahan sebagai akibat:

1. Belum optimalnya dukungan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
2. Perilaku masyarakat yang masih belum memperhatikan lingkungan
3. Masih adanya masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar
4. Pemanasan global, perubahan iklim dan cuaca ekstrem telah mempengaruhi dampak bencana,
5. Kemampuan mitigasi bencana secara umum masih belum memadai, baik mitigasi struktural maupun non struktural.
6. Belum adanya Kajian Risiko Bencana (KRB) dan peta rawan bencana

Menurut Indeks Risiko Bencana 2020-2024 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Pekanbaru Tahun 2021 adalah 34,16 dengan kelas risiko Tinggi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, sejak awal Januari 2023, kasus Karhutla di Riau sudah mencapai 2.632 hektar, dengan wilayahnya sebagian besar di kawasan pesisir, kebakaran lahan / hutan di Kota Pekanbaru sebesar 28,46 hektar.

Data BPBD Kota Pekanbaru mencatat 70 kejadian kebakaran lahan pada tahun 2024 dengan total luas terbakar sebesar 58,72 hektar, mengalami peningkatan dibandingkan 2023 yang mencatat 47 kejadian dengan luas 28,46 hektar. Secara keseluruhan, jumlah kejadian kebakaran lahan di Pekanbaru selama 2020-2024 adalah 337 kejadian dengan total luas 277,3 hektar.

Tabel II.14. Kejadian Kebakaran Lahan per Wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		K	Luas (Ha)	K	Luas (Ha)	K	Luas (Ha)	)	Luas (Ha)	K	Luas (Ha)
1	Tenayan Raya	11	9,0753	8	17,2015	3	5,5	2	1,0225	9	3,75
2	Kulim	-	-	-	-	2	0,52	2	0,1	4	5
3	Bina Widya	14	2,4399	11	6,715	5	1,925	18	9,3425	10	3,2525
4	Tuah Madani	-	-	1	0,012	-	-	7	1,88	-	-
5	Rumbai	11	54,43	10	13,38	7	0,73	12	12,57	15	9,7275
6	Rumbai Barat	-	-	1	1	1	5	1	0,5	2	5,0625
7	Rumbai Timur	7	5,335	2	2,1	4	2,125	13	4,595	6	5,1
8	Payung Sekaki	11	1,6375	13	18,9075	3	0,65	17	6,3878	10	5,28

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		K	Luas (Ha)	K	Luas (Ha)	K	Luas (Ha)	)	Luas (Ha)	K	Luas (Ha)
9	Marpoyan Damai	4	0,495	7	4,9175	3	0,83	9	1,775	9	2,74
10	Bukit Raya	22	4,0248	12	17,323	4	1,425	8	9,3425	5	2,0625
11	Senapelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sukajadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pekanbaru Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lima Puluh	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		81	78,4375	65	81,5565	32	19	89	41,5953	70	58,715

Sumber: BPBD Kota Pekanbaru Tahun 2024

Secara wilayah, Rumbai menjadi kecamatan dengan luas kebakaran terbesar pada 2024 yaitu 9,73 hektar dari 15 kejadian, diikuti oleh Bina Widya, Payung Sekaki, dan Rumbai Timur. Kecamatan lain juga mencatat kejadian kebakaran dengan variasi luas yang berbeda-beda. Meskipun terjadi peningkatan jumlah dan luas kebakaran pada 2024, upaya mitigasi dan penanggulangan kebakaran lahan tetap menjadi prioritas utama untuk meminimalisir risiko bencana di Kota Pekanbaru.

Disamping bencana banjir dan kebakaran lahan, Kota Pekanbaru juga mengalami bencana puting beliung, tanah longsor, dan semburan gas lumpur yang terjadi di Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2021, tidak memakan korban jiwa. Berikut ini adalah lokasi kejadian dan yang terdampak bencana banjir, kebakaran lahan, puting beliung, tanah longsor dan semburan gas lumpur yang telah didata oleh BPBD Kota Pekanbaru sejak tahun 2023 :

Tabel II.15. Kejadian Bencana di Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Kejadian	Jumlah Lokasi	Keterangan
1	Banjir	36	22	1.416 KK
2	Kebakaran Lahan	94	88	44,3241 Ha
3	Puting Beliung	4	4	6 KK
4	Tanah Longsor	4	4	17 KK

Sumber: BPBD Kota Pekanbaru Tahun 2024

2.1.6.3. Resiliensi Terhadap Perubahan Iklim

Kota Pekanbaru menghadapi tantangan kompleks akibat perubahan iklim yang tercermin dari dinamika parameter klimatologis selama periode 2020–2024. Tingginya kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi menjadi ancaman utama, terutama banjir di musim hujan (Oktober–Januari) yang dipicu curah hujan ekstrem seperti pada November 2020 (433 mm), serta kekeringan di musim kemarau (Juli) dengan rekor terendah 51 mm (2024). Tren kenaikan suhu minimal (dari 23,51°C pada 2023 menjadi 24,1°C pada 2024) memperkuat fenomena urban heat island yang berpotensi menurunkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan beban kesehatan. Di sisi lain, fluktuasi kelembaban (76–91%) yang berkorelasi dengan pola hujan turut memengaruhi penyebaran penyakit tropis seperti DBD.

Resiliensi kota dibangun melalui integrasi strategi adaptasi dan mitigasi berbasis data. Adaptasi difokuskan pada penguatan infrastruktur tangguh iklim, seperti optimalisasi drainase di wilayah rawan banjir (Kecamatan Senapelan dan Marpoyan Damai) serta pembangunan embung untukantisipasi kekeringan. Sistem peringatan dini berbasis IoT dikembangkan untuk memitigasi risiko bencana, didukung pelibatan masyarakat dalam simulasi tanggap darurat. Pada aspek mitigasi, upaya penurunan emisi GRK diwujudkan melalui transisi transportasi rendah karbon (e-bus, jalur sepeda) dan pemanfaatan energi terbarukan di fasilitas publik, sejalan dengan komitmen FOLU Net Sink 2030 Provinsi Riau. Berikut tabel resiliensi terhadap perubahan iklim di Provinsi Riau Tahun 2020-2024:

Tabel II.16. Resiliensi terhadap perubahan iklim di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai
2020	52,01
2021	52,22
2022	53,56
2023	57,53
2024	60

Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2025

Kolaborasi multistakeholder menjadi kunci peningkatan kapasitas adaptif. Pembentukan Satgas Perubahan Iklim lintas OPD memastikan koordinasi kebijakan terpadu, sementara program Pekanbaru Hijau mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penghijauan kota dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Meski tantangan masih signifikan, terutama di wilayah dengan tutupan hijau minimal dan kepadatan penduduk tinggi, capaian penurunan suhu maksimal (35,03°C pada 2020 menjadi 32,3°C pada 2024) menunjukkan progres strategis. Ke depan, penguatan resiliensi akan terus berfokus pada proteksi kelompok rentan, inovasi teknologi lingkungan, dan sinergi kebijakan dengan pemangku kepentingan regional untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim.

2.1.7. Aspek Demografi

Perkembangan kota tak terlepas dari pengaruh beragam aspek kependudukan, tingkat kematian, kelahiran dan bahkan urbanisasi akan berpengaruh pada perkembangan kota. Oleh karenanya penduduk merupakan faktor penting dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam perspektif pembangunan berwawasan kependudukan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, namun juga berperan penting sebagai subjek pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan direncanakan secara seksama dengan

memperhitungkan berbagai aspek. Salah satu determinan penting dalam perencanaan pembangunan adalah aspek penduduk beserta pengaruhnya.

2.1.7.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk banyak digunakan sebagai indikator perkembangan wilayah, kelayakan tempat tinggal maupun indikator sosial lainnya. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam periode waktu tertentu. Sementara itu Laju pertumbuhan penduduk dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga memungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah berkurangnya mata pencarian apabila tidak diiringi penambahan kesempatan kerja, peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipasi dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan hasil proyeksi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan, jumlah penduduk Kota Pekanbaru diperkirakan akan terus mengalami peningkatan selama periode 2025 hingga 2029. Pada tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sebesar 1.035,88 ribu jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi 1.070,03 ribu jiwa pada tahun 2029. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika demografi yang stabil dan menjadi dasar penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah.

Tabel II.17 Proyeksi Jumlah Penduduk, Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Proporsi Penduduk Usia Lanjut serta Angka Ketergantungan Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029

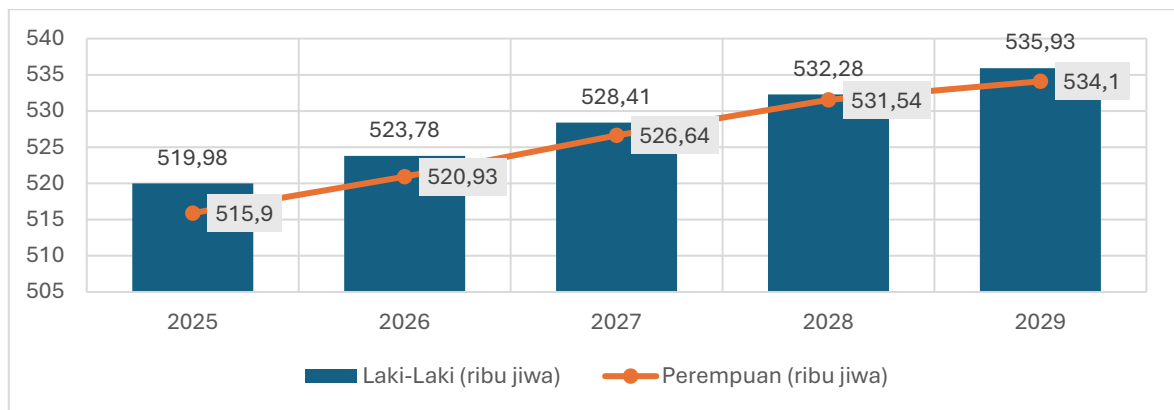
Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	83.78	82.89	81.94	81.00	80.09
5-9	96.21	94.54	93.38	91.06	87.69
10-14	87.43	88.73	89.87	91.06	92.72
15-19	79.38	79.96	81.87	83.46	85.07
20-24	77.63	77.16	77.06	77.29	77.84
25-29	82.18	80.90	79.46	78.02	76.79
30-34	83.81	83.21	82.52	81.74	80.82
35-39	82.23	82.48	82.59	82.51	81.25
40-44	77.48	78.24	78.96	79.65	80.21
45-49	71.91	72.76	73.57	74.36	75.13

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029
50-54	64.80	66.23	67.37	68.31	69.14
55-59	52.11	54.20	56.44	58.68	60.75
60-64	40.98	42.87	44.52	46.06	47.66
65-69	26.95	28.88	31.05	33.34	35.55
70-74	17.62	18.62	19.93	20.90	22.00
75+	11.37	12.78	14.49	16.40	18.40
Jumlah (Ribu jiwa)	1035.88	1044.71	1055.05	1063.82	1070.03
Proporsi Usia Produktif	68.78	68.75	68.66	68.63	68.59
Proporsi Usia Lanjut (%)	5.4	5.77	6.21	6.64	7.09
Angka Ketergantungan (%)	45.38	45.46	45.65	45.72	45.8

Sumber : Proyeksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035

Secara komposisi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki diperkirakan naik dari 519,98 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 535,93 ribu jiwa pada tahun 2029. Hal yang sama terjadi pada penduduk perempuan, dari 515,90 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 534,10 ribu jiwa pada tahun 2029. Keseimbangan pertumbuhan penduduk antara laki-laki dan perempuan mencerminkan struktur penduduk yang simetris, dengan distribusi gender yang relatif merata.

Dari sisi struktur umur, penduduk usia produktif (15–64 tahun) masih menjadi kelompok dominan, dengan proporsi sebesar 68,78% pada tahun 2025 dan sedikit menurun menjadi 68,59% pada tahun 2029. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, dari 5,40% pada tahun 2025 menjadi 7,09% pada tahun 2029. Peningkatan ini menunjukkan adanya transisi demografi menuju populasi yang semakin menua, yang menuntut penyesuaian kebijakan sosial dan pelayanan publik di masa depan.

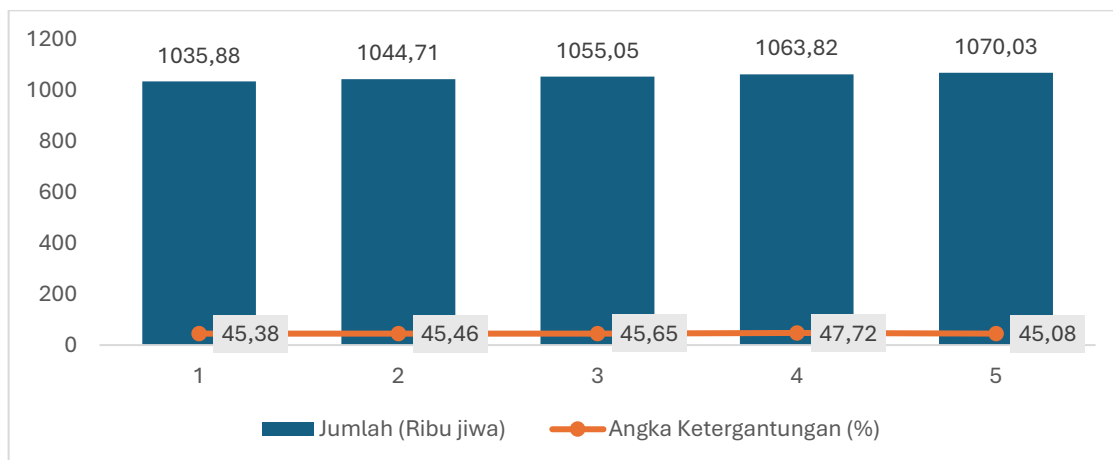


Sumber : Proyeksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035

Grafik II.12. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025-2029 (ribu jiwa)

Pada saat yang sama, angka ketergantungan, yaitu rasio antara penduduk usia non-produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif, juga mengalami kenaikan meskipun relatif kecil. Angka ini naik dari 45,38% pada tahun 2025 menjadi 45,80% pada tahun 2029. Artinya, setiap 100 orang penduduk

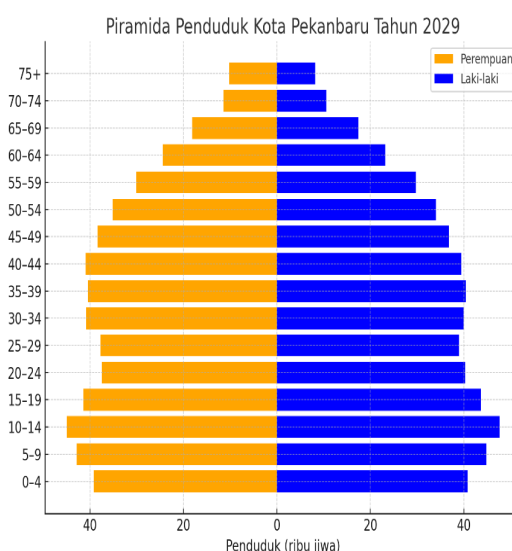
usia produktif harus menanggung sekitar 46 penduduk non-produktif. Kenaikan angka ini mengindikasikan potensi meningkatnya beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh kelompok usia kerja dalam jangka menengah.



Sumber : Proyeksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035

Grafik II.13. Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 (%)

Lebih lanjut, piramida penduduk Kota Pekanbaru tahun 2029 menggambarkan bentuk yang mulai menyempit pada bagian bawah (usia anak-anak), dan melebar pada bagian tengah (usia produktif), serta menunjukkan pelebaran di puncak (usia lanjut). Komposisi ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru masih berada dalam periode bonus demografi, namun secara bertahap akan menuju struktur penduduk yang menua (aging population).



Sumber : Proyeksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035

Grafik II.14. Piramida Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Usia Tahun 2029

Secara keseluruhan, proyeksi penduduk Kota Pekanbaru hingga tahun 2029 menunjukkan tren pertumbuhan yang moderat, dominasi usia produktif yang masih kuat, serta peningkatan proporsi penduduk lanjut usia. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam perencanaan pembangunan. Optimalisasi potensi

penduduk usia produktif harus dilakukan secara terarah melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan penyediaan lapangan kerja produktif. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu mulai mempersiapkan sistem perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan yang adaptif terhadap peningkatan penduduk usia lanjut

2.1.7.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Berikut adalah jumlah penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024, yaitu:

Sebaran jumlah, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di 15 kecamatan Kota Pekanbaru pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel II.12 sebagai berikut:

Tabel II.17. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Payung Sekaki	89.309	90.327	99.589	101.966
2	Tuahmadani	142.464	145.323	161.132	171.586
3	Binawidya	72.614	74.143	80.132	84.214
4	Bukit Raya	93.712	94.090	107.347	110.783
5	Marpoyan Damai	127.897	128.389	150.313	155.880
6	Tenayan Raya	103.899	106.442	116.014	120.292
7	Kulim	53.898	55.217	57.603	62.472
8	Limapuluh	38.647	38.739	45.021	45.936
9	Sail	20.402	20.450	25.999	26.348
10	Pekanbaru Kota	22.624	22.678	26.744	27.187
11	Sukajadi	42.889	42.992	48.026	48.574
12	Senapelan	35.388	35.472	38.390	38.700
13	Rumbai	92.195	93.348	102.207	104.970
14	Rumbai Barat	25.205	25.803	29.205	31.506
15	Rumbai Timur	33.442	34.127	35.626	37.185
Kota Pekanbaru		994.585	1.007.540	1.123.348	1.167.599

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2025

Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru terus meningkat dari 994.585 jiwa pada tahun 2021, menjadi 1.167.599 jiwa pada tahun 2024. Sebagai daerah perkotaan yang identik dengan kegiatan perdagangan, jasa dan industri, maka peningkatan jumlah penduduk Pekanbaru disebabkan oleh migrasi masuk atau urbanisasi yang berasal dari antar kabupaten/kota di Provinsi Riau maupun antar provinsi di Indonesia. Keterbukaan wilayah dan aktivitas ekonomi perdagangan, jasa dan industri menjadikan penduduk dengan mudah bermukim di Pekanbaru.

Tabel II.18. Sebaran Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per 2020–2024 (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Payung Sekaki	36	101.966	8,73%	1,35	2.868
2	Tuahmadani	30	171.586	14,70%	6,22	5.750
3	Binawidya	36,59	84.214	7,21%	4,07	2.302
4	Bukit Raya	22,05	110.783	9,49%	2,57	5.024
5	Marpoyan Damai	29,74	155.880	13,35%	2,81	5.241
6	Tenayan Raya	114,4	120.292	10,30%	3,30	1.052
7	Kulim	56,87	62.472	5,35%	8,65	1.099
8	Limapuluh	4,04	45.936	3,93%	0,55	11.370
9	Sail	3,26	26.348	2,26%	1,66	8.082
10	Pekanbaru Kota	2,26	27.187	2,33%	-0,06	12.030
11	Sukajadi	3,76	48.574	4,16%	-0,20	12.919
12	Senapelan	6,65	38.700	3,31%	-0,49	5.820
13	Rumbai	61,86	104.970	8,99%	2,57	1.697
14	Rumbai Barat	86,01	31.506	2,70%	7,41	366
15	Rumbai Timur	138,31	37.185	3,18%	4,53	269
Pekanbaru		632,26	1.167.599	100%	3,23	1.847

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2025

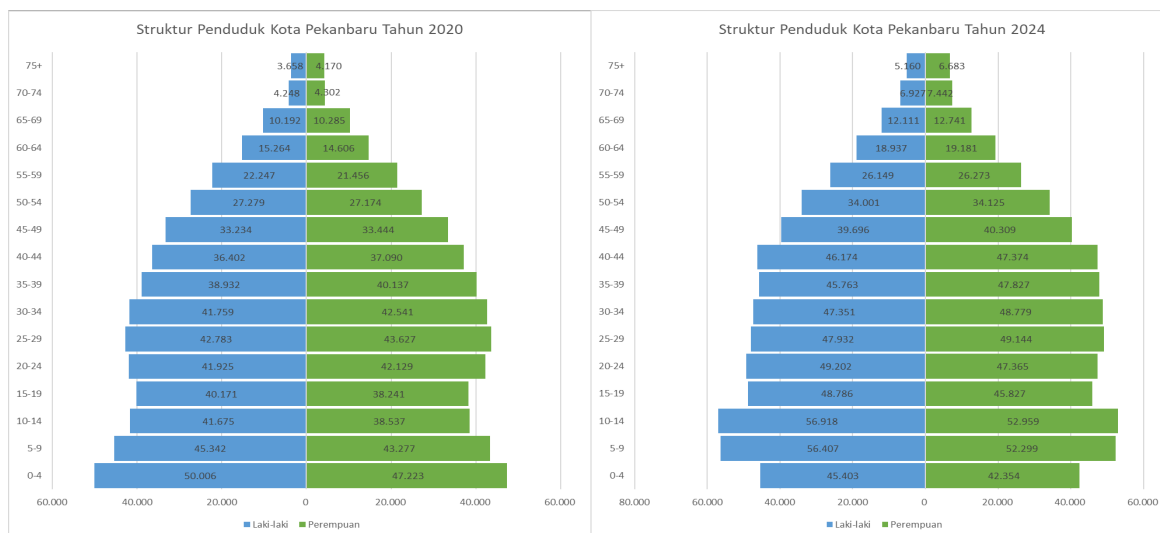
Secara akumulasi jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2024 telah mencapai 1,16 Juta Jiwa dengan kepadatan penduduk rerata sejumlah 1.847 jiwa per km², serta laju pertumbuhan penduduk dalam rentang waktu lima tahun terakhir mencapai 3,23%. Jika melihat distribusi penduduk disetiap kecamatan, maka jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tuah Madani yang mencapai 171.586 jiwa jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Sail yakni sejumlah 26.348 jiwa. Sementara itu kepadatan penduduk Kota Pekanbaru tertinggi berada di Kecamatan Sukajadi yang mencapai 12.919 jiwa/km², dimana kepadatan terendah berada di Kecamatan Rumbai Timur dengan kepadatan penduduk hanya sejumlah 269 jiwa/km². Disisi lain laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Kulim dengan pertumbuhan mencapai 8,65% dan terendah terjadi di Kecamatan Kecamatan Senapelan yang justru tumbuh secara negatif mencapai -0,49%.

2.1.7.3. Rasio Penduduk

Struktur penduduk Kota Pekanbaru selama periode 2020 sampai 2024 sedikit mengalami perubahan. Struktur penduduk pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk usia muda (0-14) tahun sebesar 266.060 jiwa, bertambah pada tahun 2024 menjadi 306.340 jiwa. Sementara jumlah penduduk usia tua (diatas 65 tahun) tercatat sebesar 36.855 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 51.064 jiwa pada tahun

2024. Adapun penduduk usia produktif sebesar 302.915 jiwa pada tahun 2020 meningkat menjadi 357.404 jiwa pada tahun 2024.

Hasil perhitungan dependensi rasio penduduk usia muda dan tua di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebesar 44,52%, turun pada tahun 2024 menjadi 44,11% pada tahun 2024. Hal ini berarti bahwa dalam 100 penduduk usia produktif (15-65 tahun) menanggung sebanyak 44 jiwa penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tua (di atas 65 tahun).



Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2025

Gambar II.7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Pekanbaru Tahun 2020 dan 2024

2.1.7.4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Berdasarkan klasifikasi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu terakhir menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru pada tahun 2024, mayoritas pekerja berasal dari kelompok buruh/karyawan/pegawai, dengan jumlah mencapai 249.574 jiwa. Selanjutnya, sebanyak 96.297 jiwa merupakan pekerja yang berusaha sendiri. Adapun jumlah pekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar tercatat sebanyak 47.346 jiwa, sedangkan mereka yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar berjumlah 32.945 jiwa. Sementara itu, kelompok yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar mencapai 32.945 jiwa, dan pekerja bebas tercatat sebanyak 16.785 jiwa.

Tabel II.19. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Status Pekerjaan Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha sendiri	78.649	83.663	108.127	86.970	96.297
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	40.752	33.273	43.143	40.403	43.887
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	34.045	27.725	22.930	21.830	32.945

Status Pekerjaan Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Buruh/Karyawan/Pegawai	294.790	290.765	294.427	253.017	249.574
Pekerja bebas	11.047	12.219	20.370	19.589	16.785
Pekerja keluarga/tak dibayar	48.334	44.709	44.636	42.258	47.346
Jumlah	507.617	492.354	533.633	464.067	486.834

Sumber: Kota Pekanbaru dalam Angka Tahun 2025

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

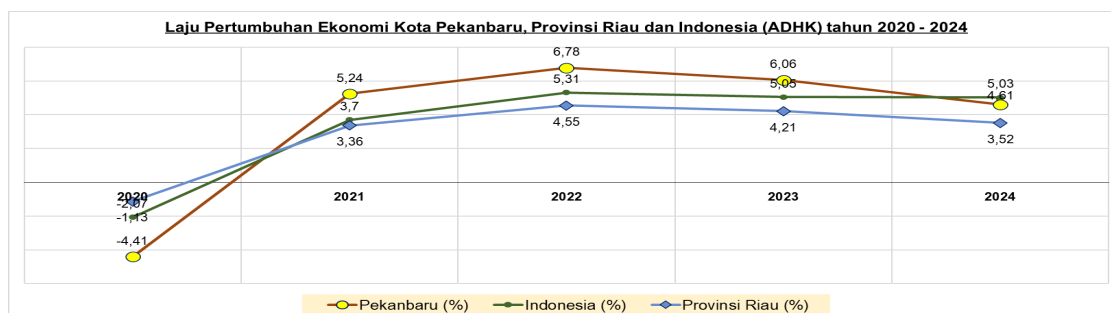
Aspek kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Aspek kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Indikator yang digunakan untuk menganalisis kinerja fokus tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi terdiri dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, laju inflasi, indeks gini, ketimpangan pendapatan antar penduduk dan kemiskinan.

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dihitung dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 2010. Nilai PDRB Kota Pekanbaru merupakan keseluruhan nilai dari produksi barang dan jasa pada seluruh wilayah Kota Pekanbaru sebagai ukuran nilai tambah dari aktivitas ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru selama tahun 2020-2024 berfluktuasi, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Grafik II.15. Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2020-2024

Pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru mengalami penurunan hingga -4,41 persen, berada di bawah capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Pasca pandemi, sejak tahun 2021, terjadi pemulihan ekonomi yang berlanjut hingga mencapai 6,78 persen pada tahun 2022. Namun, hingga tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan turun menjadi 4,61 persen.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor berperan paling dominan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru pada tahun 2024, dengan kontribusi sebesar 30,79 persen. Sebagai daerah yang ditopang oleh aktivitas sektor perdagangan, pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Selama periode 2023–2024, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Riau mengalami penurunan, yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada tahun 2022 disebabkan oleh pertumbuhan signifikan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang meningkat dari -13,77 persen pada tahun 2020 menjadi 12,69 persen pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang naik dari -4,41 persen pada tahun 2020 menjadi 6,78 persen pada tahun 2022. Namun, setelahnya, kinerja sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan yang turun menjadi 4,99 persen pada tahun 2024, diikuti dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru menjadi 4,61 persen pada tahun yang sama.

Tabel II.20. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekanbaru (persen), 2020–2024

Sektor PDB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,3	2,02	2,36	3,29	4,21
B. Pertambangan dan Penggalan	-1,84	2,02	1,63	3,58	3,57
C. Industri Pengolahan	1,4	2,2	2,4	4,09	3,77
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,64	-3,86	4,36	0,11	5,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,4	3,02	0,97	6,76	1,28
F. Konstruksi	-3,19	3,02	4,54	8,51	4,34
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-13,77	10,81	12,69	5,81	4,99
H. Transportasi dan Pergudangan	-19,54	2,64	24,64	6,09	5,91
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-23,14	17,59	11,88	4,74	10,66
J. Informasi dan Komunikasi	26,24	7,34	4,15	6,71	5,98

Sektor PDB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
K. Jasa keuangan dan Asuransi	5,11	5,86	5,56	3,31	1,03
L. Real Estat	1,78	3,18	5,19	3,93	3,47
M,N. Jasa Perusahaan	-24,77	1,69	13,28	6,9	6,46
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-1,04	-0,81	4,81	7,24	8,52
P. Jasa Pendidikan	3,12	3,48	4,39	3,63	4,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35,82	11,78	1,77	5,35	5,29
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-22,64	4,98	6,52	7,17	5,58
PDRB LAPANGAN USAHA	-4,41	5,24	6,78	6,06	4,61

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, dimana bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Konsep kemiskinan yang digunakan mengacu pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Perkembangan kondisi kemiskinan Kota Pekanbaru dari sisi persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan masih berada dibawah Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan kondisi kemiskinan di Kota Pekanbaru masih relatif baik dari pada kondisi kemiskinan di Provinsi Riau. Lebih jelasnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.21.Kondisi Kemiskinan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kondisi Kemiskinan	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pekanbaru					
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	30,4	32,73	35,96	37,67	38,17
Persentase Penduduk Miskin (%)	2,62	2,83	3,06	3,16	3,15
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	589.281	613.183	655.389	712.000	749.522
Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,48	0,4	0,33	0,38	0,34
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,13	0,07	0,07	0,09	0,06
Provinsi Riau					
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	483,39	500,81	485,03	485,66	485,66
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,82	7,12	6,78	6,68	6,68
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	544.057	565.937	605.912	658.611	658.611
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,14	1,06	1,10	1,00	1,00
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,28	0,24	0,27	0,24	0,24

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebesar Rp. 589.281/kapita/bulan meningkat menjadi Rp. 749.522 kapita/bulan pada tahun 2024.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tercatat sebesar 0,48 pada tahun 2020, mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2024 menjadi 0,34. Nilai P1 yang rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai P2 di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,13, mengalami flutuasi menurun hingga tahun 2024 menjadi 0,06.

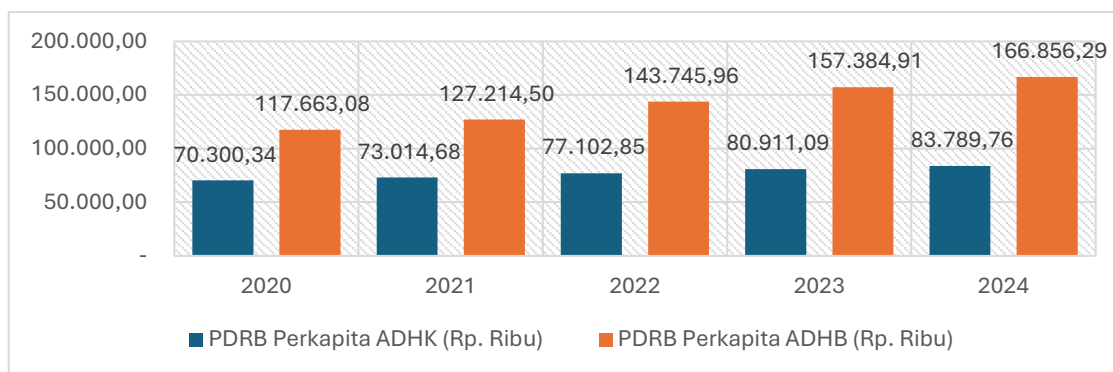
Persentase penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2020 sebesar 2,62% mengalami flutuasi hingga tahun 2024 menjadi 3,15%. Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2020 sebanyak 30,4 ribu jiwa, meningkat menjadi 38,17 jiwa pada tahun 2024.

Pengentasan kemiskinan ini telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan berbagai macam program yang telah direncanakan seperti: 1) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro; 2) Program pengembangan UMKM; 3) Program penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota; 4) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga, adat dan masyarakat hukum adat; 5) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; 6) Program penempatan tenaga kerja; 7) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; 8) Program kerawanan pangan; 9) Program Perlindungan jaminan sosial; 10) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; 11) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 12) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 13) Program pengelolaan profil kependudukan; 14) Program kawasan permukiman; 15) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh; 16) Program penyelenggaraan statistik sektoral; 17) Program aplikasi informatika; 18) Informasi dan komunikasi publik; 19) Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum; 20) Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah; 21) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS); 22) Program pembinaan keluarga berencana (KB); 23) Program pengelolaan pendidikan; 24) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; 25) Program pengelolaan perikanan budidaya; dan 26) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Penanganan percepatan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan data statistik, tetapi penanganan program kemiskinan harus dapat langsung menyentuh terhadap manfaat kepada masyarakat melalui adanya integrasi antar program. Dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru Tahun 2021 direkomendasikan beberapa strategi antara lain: 1) Fokus pada target melalui pemberdayaan masyarakat miskin terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan dan kesehatan); 2) Mensinergikan program lintas OPD di Kota Pekanbaru; 3) Mengoptimalkan Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan; 4) Menyesuaikan Target Kinerja Yang Akan Dicapai; 5) Memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui Dana Dekon dan CSR.

2.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita penduduk Kota Pekanbaru merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kota Pekanbaru dari keseluruhan perekonomian. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pada periode waktu tertentu. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk, maka semakin makmur penduduk di negara atau daerah tersebut. Secara umum perekonomian Kota Pekanbaru selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan PDRB ADHK dan ADHB selama periode tersebut. Peningkatan PDRB berdampak pada peningkatan PDRB per Kapita penduduk. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas produksi pada masyarakat di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan termasuk aktivitas konsumsi. Peningkatan produksi riil mengakibatkan terjadi peningkatan distribusi perekonomian daerah kepada penduduk, yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB per kapita penduduk pada harga konstan selama periode 2020 tercatat sebesar Rp. 70.300,34 ribu menjadi 83.789,76 ribu pada tahun 2024.



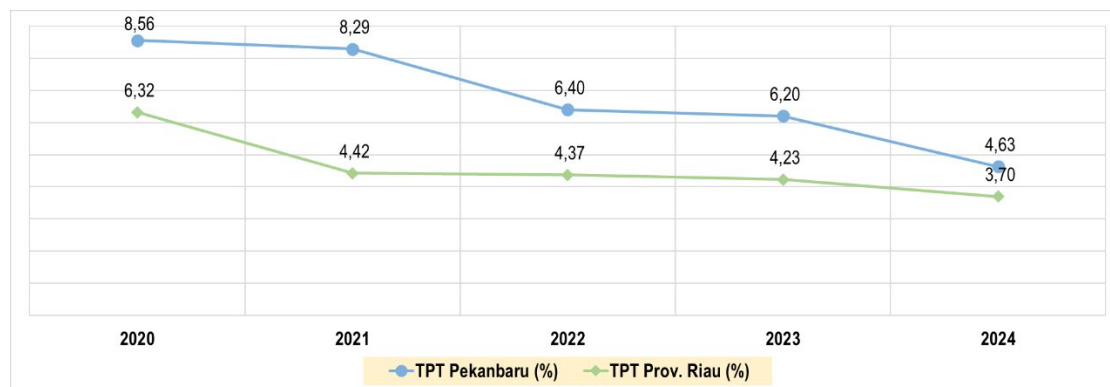
Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.16. PDRB per Kapita Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 (Ribu Rupiah)

Sementara itu perkembangan PDRB per kapita harga berlaku juga mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita harga konstan selama periode 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh faktor inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum pada seluruh sektor perekonomian. Stabilitas harga-harga dalam perekonomian Pekanbaru perlu menjadi perhatian dimasa mendatang untuk menjaga stabilitas konsumsi dan produksi dalam perekonomian, terutama dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat agar tidak berdampak buruk terhadap perekonomian. Peningkatan PDRB per kapita Kota Pekanbaru selama periode 2020-2024 menandakan terjadinya peningkatan produktivitas dalam perekonomian. Dengan kata lain, PDRB per kapita yang terus meningkat mengindikasikan terjadinya kenaikan produktivitas penduduk dari tahun ketahun.

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi akibat angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau malas bekerja. Keberhasilan pembangunan Kota Pekanbaru pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kota Pekanbaru. Indikator tingkat pengangguran menjadi ukuran terhadap kemampuan perekonomian menyerap angkatan kerja. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau selama periode 2020-2024.

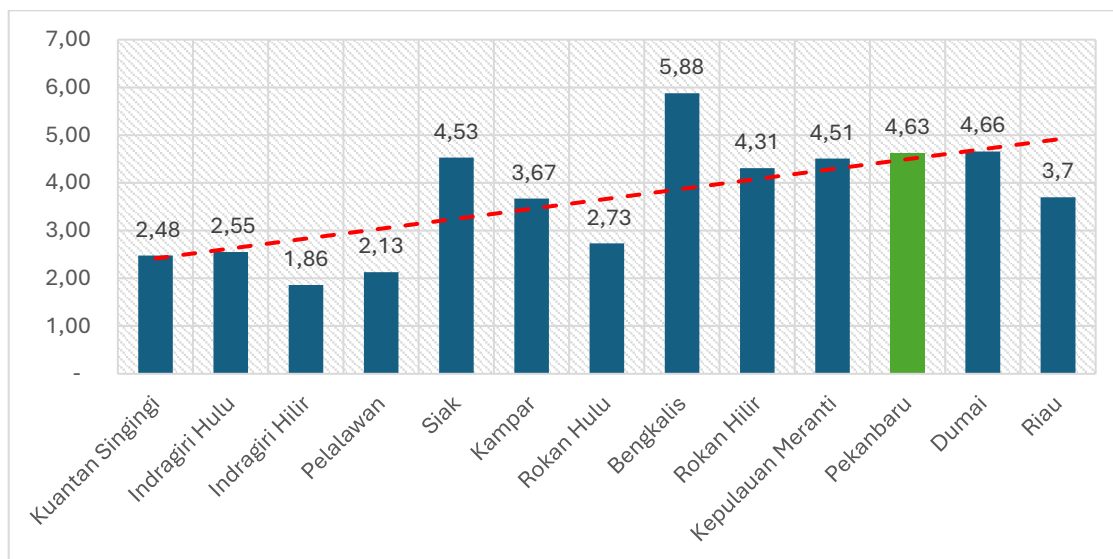


Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.17. Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Tingkat pengangguran terbuka Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebesar 8,56%, kemudian turun hingga tahun 2024 menjadi 4,63%. Namun masih berada diatas tingkat pengangguran terbuka Provinsi yaitu sebesar 3,70%. Tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru menempati urutan nomor 3 tertinggi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Trend penurunan tingkat pengangguran terbuka selama periode 2020-2024 adalah pertumbuhan ekonomi dan investasi dan

pembangunan infrastruktur yang meningkat selama periode tersebut. Ketika ekonomi tumbuh, perusahaan cenderung mempekerjakan lebih banyak karyawan untuk memenuhi permintaan yang lebih besar atas barang dan jasa.



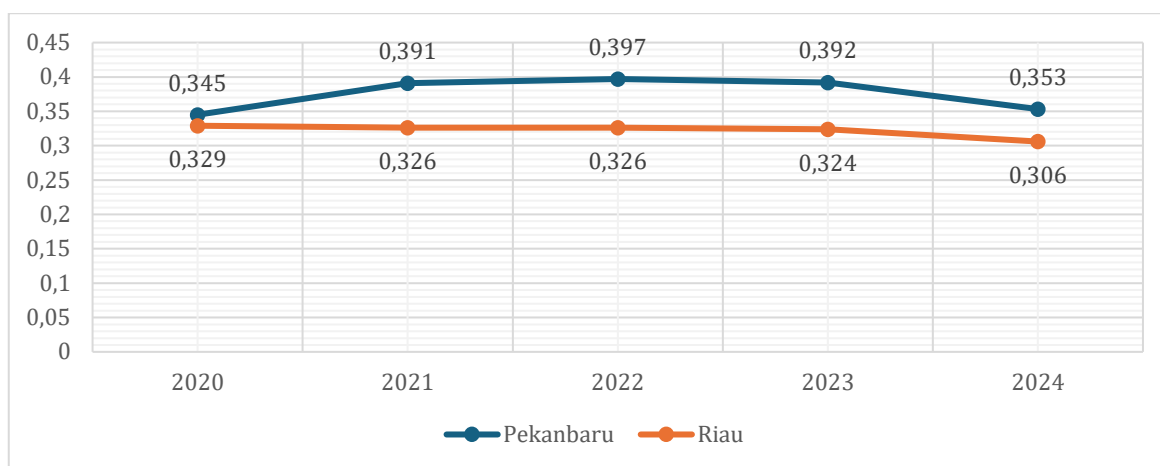
Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.18. Posisi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024

2.2.1.5. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dalam perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh. Secara umum ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kota Pekanbaru lebih timpang dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Riau.

Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan sangat tidak merata jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan ketidakmerataan sedang jika angka indeks gini antara 0,36 sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan relatif merata jika indeks gini antara 0,20 sampai 0,35. Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,345, pada tahun 2021 sampai tahun 2022 terjadi kenaikan angka sebesar 0,391 dan 0,397, hal ini akibat buruk dari virus covid-19, kemudian pada tahun 2023 angka gini rasio turun menjadi 0,392, dan pada tahun 2024 turun menjadi 0,353, dikarenakan pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Berikut Perkembangan indeks gini Kota Pekanbaru dan indeks gini Provinsi Riau.



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Grafik II.19. Perkembangan Gini Ratio Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Pergerakan kategori tidak-merata sedang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Kota Pekanbaru kedepan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut belum mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.

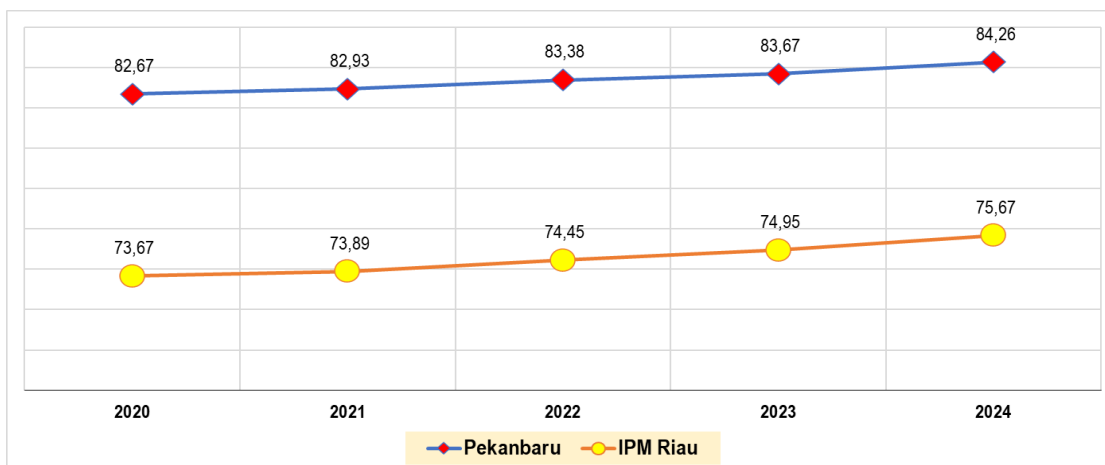
Ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kota Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari nilai gini ratio Kota Pekanbaru jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk di Provinsi Riau relatif lebih merata dibandingkan ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2024 gini rasio Kota Pekanbaru di angka 0,353, atau termasuk kategori ketimpangan sedang. Sedangkan gini rasio Provinsi Riau masuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai rasio yang lebih rendah yaitu sebesar 0,306 pada tahun 2024.

Gini rasio yang tinggi mengindikasikan hasil-hasil pembangunan memiliki dampak negatif pada pemerataan pendapatan penduduk. Aliran uang dari produksi dalam perekonomian tidak terdistribusi dengan merata kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan berupa pemberian transfer of payment dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial (social security) yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada kelompok rentan dan miskin belum dapat terdistribusi dengan baik. Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang tinggi akan menyebabkan terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk yang dapat memicu permasalahan sosial. Oleh sebab itu,

permasalahan ketimpangan pendapatan harus dikontrol dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) secara komposit dibangun oleh indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks ekonomi yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakikat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pekanbaru mengalami kenaikan selama periode 2020-2024 lebih dari IPM Riau dan menempati urutan pertama di Provinsi Riau.

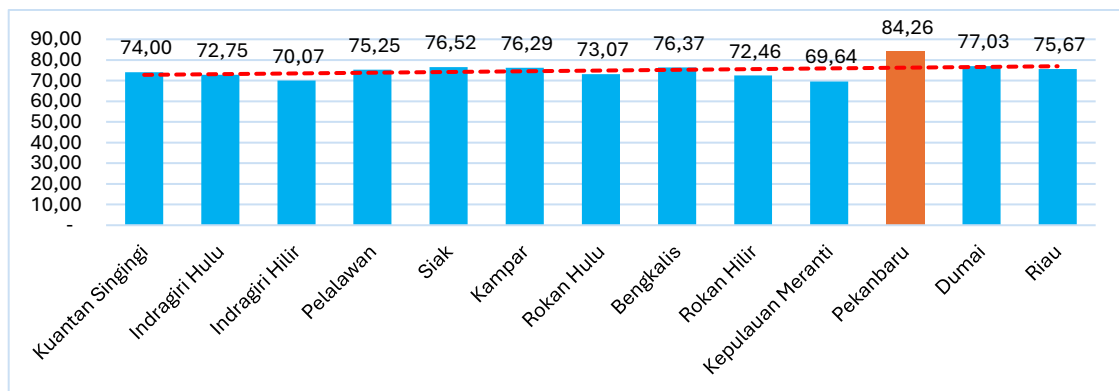


Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.20. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2020 perkembangan IPM sebesar 82,67 poin, meningkat 84,26 poin pada tahun 2024. Sementara itu perkembangan IPM Provinsi Riau tercatat sebesar 73,67 pada tahun 2020, menjadi 75,67 poin pada tahun 2024. Perkembangan IPM Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa hasil dari pembangunan yang

dilakukan pemerintah berhasil dalam meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kota Pekanbaru sebesar 1,59 poin selama 2020-2024.



Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.21. Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru pada tahun 2024 mencapai 84,26, yang merupakan nilai tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Riau. Angka ini menunjukkan bahwa Pekanbaru memiliki kualitas pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Sebagai perbandingan, rata-rata IPM Provinsi Riau berada di angka 75,67, dengan beberapa daerah seperti Kepulauan Meranti (69,64) dan Indragiri Hilir (70,07) memiliki IPM yang lebih rendah. Kota Dumai menempati posisi kedua tertinggi dengan IPM 77,03, sedangkan daerah lainnya berkisar antara 70 hingga 76. Capaian ini mencerminkan keunggulan Pekanbaru dalam menyediakan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah lain di Riau.

Tabel II.22. Capaian indikator IPBK (Indikator Pembangunan Berwawasan Kependudukan)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pekanbaru	62	4,6	65	65,7	68

Sumber: Laporan indeks pembangunan berwawasan kependudukan

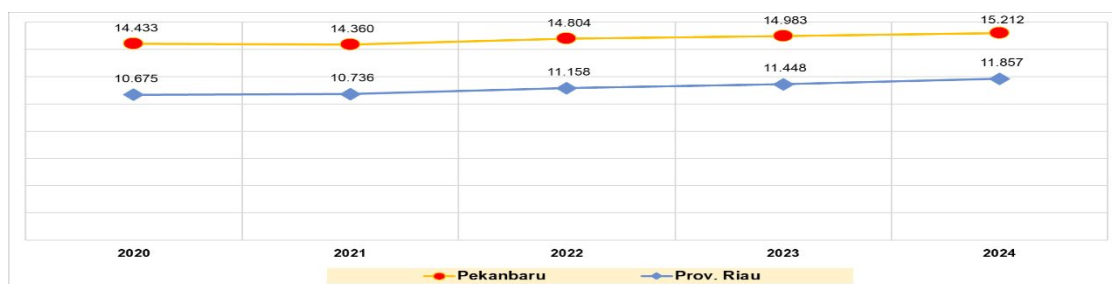
Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, indikator Pembangunan berwawasan kependudukan Kota Pekanbaru menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 62, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 4,6 pada tahun 2021. Namun, pada tahun berikutnya terjadi pemulihan signifikan dengan capaian meningkat menjadi 65 pada 2022, 65,7 pada 2023, dan mencapai 68 pada 2024.

2.2.1.7. Pengeluaran Riil per Kapita

Salah satu komponen penting dalam pembangunan kesejahteraan penduduk adalah standar hidup layak yang dinilai dari kemampuan penduduk dalam memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Tingkat pengeluaran riil penduduk dalam perhitungan IPM merupakan ukuran tingkat daya beli penduduk untuk memenuhi kebutuhan agar dapat hidup dengan layak. Pengeluaran riil per kapita penduduk dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan atau riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity).

Selama periode 2020-2024, pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Pekanbaru terus mengalami kenaikan yang positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Riau. Pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Pekanbaru mengalami kenaikan sebesar Rp. 779 ribu dari Rp. 14.433 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp. 15.212 ribu pada tahun 2024. Namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Pekanbaru sebesar Rp. 11.360 ribu untuk mencapai pengeluaran riil per kapita penduduk ideal dalam perhitungan IPM yaitu Rp. 26.572 ribu. Pengeluaran per kapita riil merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makan dan non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan. Pengeluaran per kapita riil diukur untuk menghitung total pengeluaran ekonomi dibagi dengan jumlah penduduk dengan memperhitungkan inflasi. Pengeluaran per kapita riil akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk dari dimensi ekonomi dalam perhitungan IPM. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya.



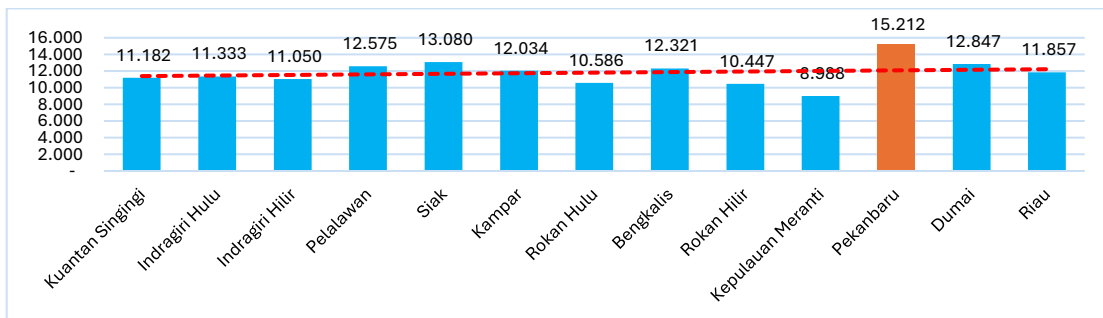
Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.22. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

Pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Pekanbaru berada pada peringkat pertama di Riau, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita penduduk Riau selama periode 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kota Pekanbaru memiliki tingkat kesejahteraan dan tingkat hidup yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di 11 kabupaten/kota lainnya.

Memperhatikan komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kota Pekanbaru terlihat bahwa indeks ekonomi merupakan komponen kedua setelah indeks pendidikan dalam pembentukan kualitas

pembangunan manusia di Kota Pekanbaru. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup layak bagi seluruh penduduk di Kota Pekanbaru telah terdorong untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Meskipun demikian, masih diperlukan kebijakan pembangunan bidang ekonomi untuk mencapai tingkat pembangunan manusia yang ideal sesuai dengan harapan dalam pembangunan manusia sesuai dengan perhitungan IPM.



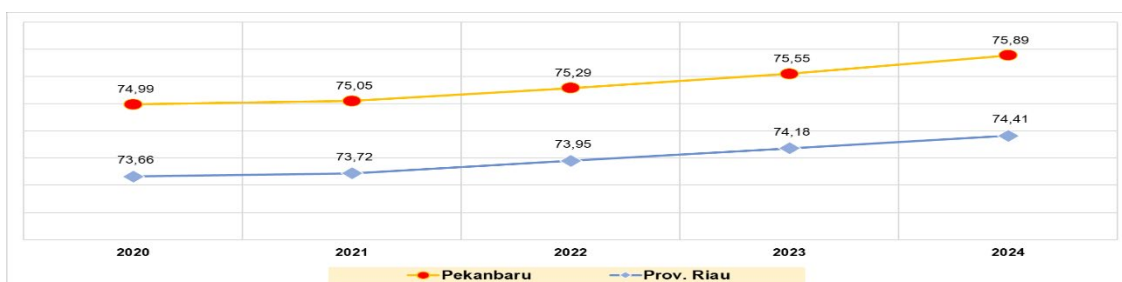
Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.23. Posisi Capaian Pengeluaran Riil per Kapita (Rp 000/Kapita/Bulan) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dalam IPM menggambarkan kualitas pembangunan kesehatan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. penduduk merupakan jumlah rata-rata usia penduduk yang diperkirakan atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah pada masa mendatang. Umur harapan hidup penduduk menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya.

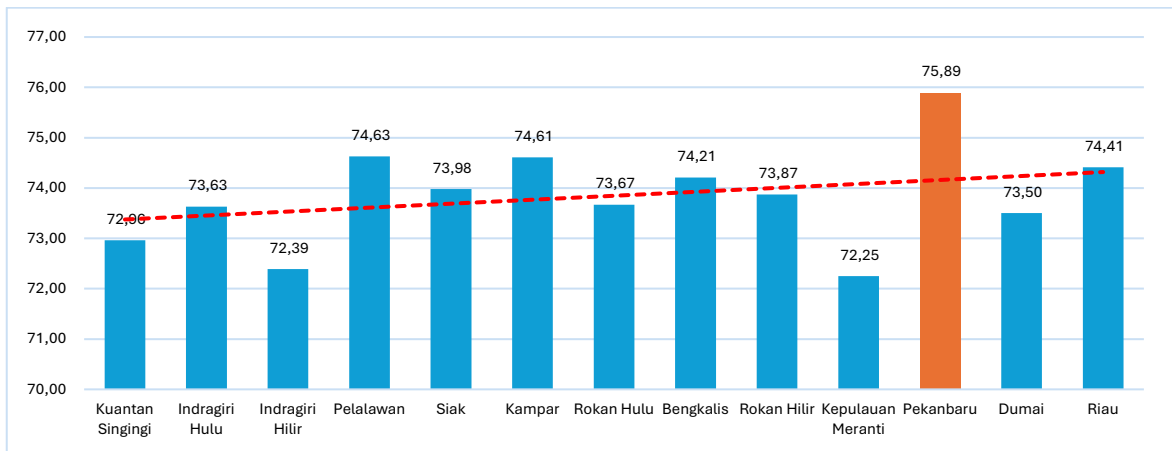


Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.24. Perkembangan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 (Tahun)

Umur harapan hidup penduduk Kota Pekanbaru mengalami peningkatan 0,90 tahun selama periode 2020-2024, yaitu dari usia harapan hidup 74,99 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,89 tahun pada tahun 2024. Usia harapan hidup penduduk Kota Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup penduduk Provinsi Riau

yaitu sebesar 74,41 tahun pada tahun 2024. UHH Kota Pekanbaru berada pada peringkat pertama tertinggi di Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan penduduk di Kota Pekanbaru meningkat untuk mencapai kualitas pembangunan ideal menurut ukuran IPM dalam pembangunan manusia.



Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.25. Posisi Capaian Usia Harapan Hidup (Tahun) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024

Secara umum pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru pada aspek kesehatan mengalami perbaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan penduduk di Kota Pekanbaru semakin membaik, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Pembangunan kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kematian bayi, termasuk respon cepat terhadap keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan jangkauan tenaga kesehatan. Selain faktor-faktor tersebut, hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap perbaikan usia harapan hidup penduduk pada suatu daerah adalah gaya hidup sehat penduduk. Dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mempromosikan dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta untuk mengedukasi individu tentang pentingnya perawatan kesehatan pencegahan dan promosi kesehatan. Melalui upaya ini, pembangunan kesehatan dapat menjadi pilar utama dalam pencapaian pembangunan manusia yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan kesehatan, termasuk pembinaan gaya hidup sehat bagi peningkatan kualitas hidup penduduk di Kota Pekanbaru masih lebih tinggi dari capaian pembangunan kesehatan dalam pembangunan manusia di Provinsi Riau selama periode 2020-2024.

2.2.2.2. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga merupakan lembaga atau unit terkecil dalam masyarakat yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang dikenal sebagai keluarga inti. Apabila

anggota keluarga mencakup pula kakek, nenek, atau individu lain yang memiliki maupun tidak memiliki hubungan darah (misalnya pembantu rumah tangga), maka disebut keluarga luas atau *extended family*. Sebagai unit terkecil masyarakat, derajat kesehatan keluarga menjadi penentu derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Derajat kesehatan keluarga sangat dipengaruhi oleh penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga untuk mempraktikkan PHBS menjadi inti pengembangan desa dan kelurahan. PHBS adalah seperangkat perilaku yang dijalankan secara sadar sebagai hasil pembelajaran, sehingga individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu mandiri dalam menjaga kesehatan dan berperan aktif mewujudkan masyarakat sehat. Pendekatan yang digunakan untuk mencapai keluarga sehat adalah pendekatan siklus hidup.

Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung hal ini adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui kunjungan keluarga dan intervensi sesuai permasalahan yang dihadapi. Keberhasilan program diukur dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang dihitung berdasarkan 12 indikator keluarga sehat, dengan nilai berkisar 0–1 dan dikategorikan sebagai:

- a. Keluarga Sehat: $IKS > 0,8$
- b. Keluarga Pra-Sehat: $0,5 < IKS \leq 0,8$
- c. Keluarga Tidak Sehat: $IKS < 0,5$

Kedua belas indikator keluarga sehat tersebut adalah:

1. Keluarga mengikuti program KB, tidak hanya untuk membatasi jumlah anak tetapi juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
2. Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan didukung tenaga kesehatan kompeten.
3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
4. Bayi memperoleh ASI eksklusif hingga usia dua tahun.
5. Balita mendapat pemantauan pertumbuhan secara rutin.
6. Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar.
7. Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan.
8. Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan memperoleh pengobatan.
9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok.
10. Seluruh anggota keluarga terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
11. Keluarga memiliki akses terhadap air bersih.
12. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih.

Nilai IKS dapat dianalisis per indikator maupun per wilayah, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan permasalahan spesifik. Misalnya, jika indikator penderita hipertensi memiliki nilai rendah, intervensi dilakukan sesuai pedoman penanggulangan penyakit tidak menular dan standar praktik klinis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel II.23. Indikator Keluarga Sehat Kota Pekanbaru 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus baru TBC per tahun	424	353	433	573	603
2	Jumlah pasien TBC aktif berobat	1824	1984	2137	1958	2389
3	Angka Kesembuhan (Cure Rate)	55,1	9,83	15,08	18,87	17,3
4	Angka Pengobatan Lengkap (Complate Rate)	63	82,67	76,78	72,21	70,96
5	Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate)	87,5	92,5	91,85	91,08	88,27
6	Jumlah Kematian TB	95	118	129	117	172
7	Jumlah kasus per bulan/tahun	501	437	795	291	551
8	Angka Incidence Rate (IR) dan Case Fatality Rate (CFR)	IR 43	IR 38	IR 67	IR 27	IR 50,8
9	Jumlah fasilitas layanan HIV	54	54	54	54	54
10	Distribusi wilayah rawan (endemisitas)	CFR 0,6	CFR 1,1	CFR 0,3	CFR 0	CFR 0,4
11	Jumlah kasus ISPA dan diare per tahun	16962 (Isipa) 1427 (Gastro)	5197 (Isipa) 1140 (Gastro)	6152 (Isipa) 1202 (Gastro)	9284 (Isipa) 1071 (Gastro)	13745 (Isipa) 1248 (Gaspro)
12	Proporsi balita yang ditangani	1,24	0,97	28,38	26,22	22,63
13	Ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi (PU PR)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Layanan Standar (%)	N/A	13,39	96	65,4	50,7
15	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup (%)	N/A	N/A	69,8	27,5	55
16	Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	70,35	73,17	86,81	60,2	72,0
18	Persentase Kepesertaan Aktif JKN	61,59	67,10	67,44	76,49	76,56

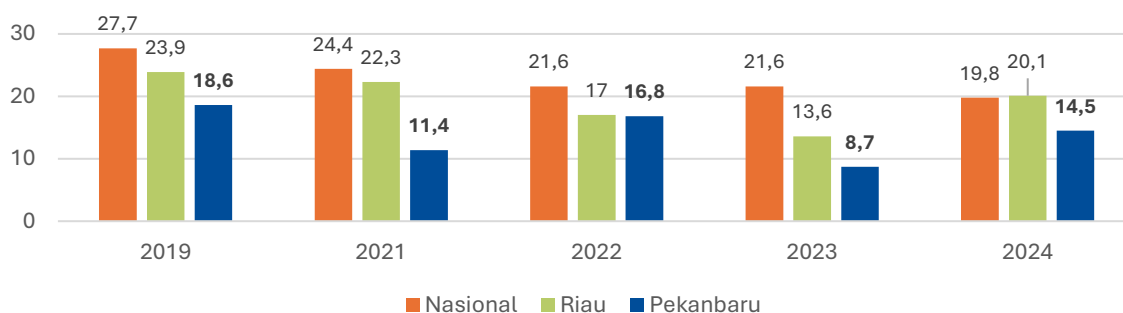
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
19	Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur 15–49 Tahun	20654	17770	16840	15303	15162
20	Angka Kelahiran Remaja (ASFR) 15–19 Tahun per 1.000 Wanita	N/A	8,7	13,00	4,90	7,4
22	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	N/A	33,1	64,8	67,92	70,76

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2025

Selama lima tahun terakhir, jumlah kasus baru HIV/AIDS menunjukkan tren meningkat, dari 424 kasus pada tahun pertama menjadi 603 kasus pada tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa penularan HIV masih menjadi tantangan serius dalam upaya pengendalian penyakit. Jumlah pasien aktif yang menjalani pengobatan juga mengalami peningkatan, dari 1.824 pasien menjadi 2.389 pasien. Namun, jumlah fasilitas layanan HIV tidak mengalami penambahan dan tetap berada pada angka 54 unit setiap tahunnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban layanan yang semakin besar apabila tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan tenaga kesehatan. Dari sisi indikator keberhasilan pengobatan, Cure Rate sempat mengalami penurunan signifikan dari 55,1% menjadi 9,83%, namun pada tahun terakhir meningkat hingga mencapai 23,24%. Complete Rate relatif stabil di kisaran 63%–82,67%, sementara Success Rate menunjukkan capaian yang cukup baik, konsisten di atas 87%.

2.2.2.3. Prevelensi Stunting

Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 (dua) tahun. Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan kasus stunting yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah, perkembangan prevalensi stunting Kota Pekanbaru disajikan pada grafik dibawah ini.



Sumber: RISKESDAS dan SSGI, 2025

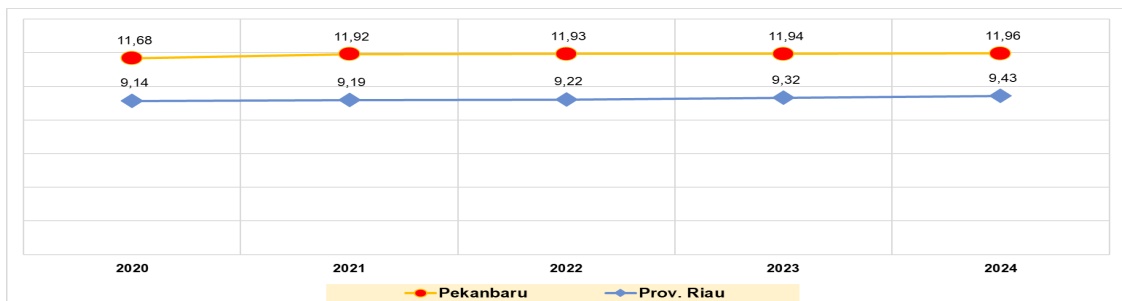
Grafik II.26. Prevalensi Stunting Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Nasional 2019-2024

Dari grafik di atas, balita dengan status stunting di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sebesar 18,58 persen menurun menjadi 11,4 persen pada tahun 2021, sempat meningkat sedikit pada 16,8 persen pada tahun 2022 namun menurun kembali pada 8,7 persen pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, terjadi peningkatan angka prevalensi stunting menjadi sebesar 14,5 persen. Meningkatnya angka prevalensi stunting ada beberapa faktor, antara lain, kurangnya asupan gizi ibu hamil, ibu mengalami anemia sewaktu hamil, serta mengalami KEK, pengasuhan anak kepada orang lain serta pernikahan muda, dan tentunya terbatasnya ekonomi keluarga juga menjadi penyebab stunting. Secara umum persentase balita dengan status stunting di Kota Pekanbaru berada di bawah rata-rata Provinsi Riau dan Nasional.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) menggambarkan tingkat pendidikan rata-rata yang ditempuh oleh individu dalam suatu populasi. Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia yang digunakan oleh penduduk berusia diatas 25 tahun dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Rata-rata lama sekolah ideal dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun.

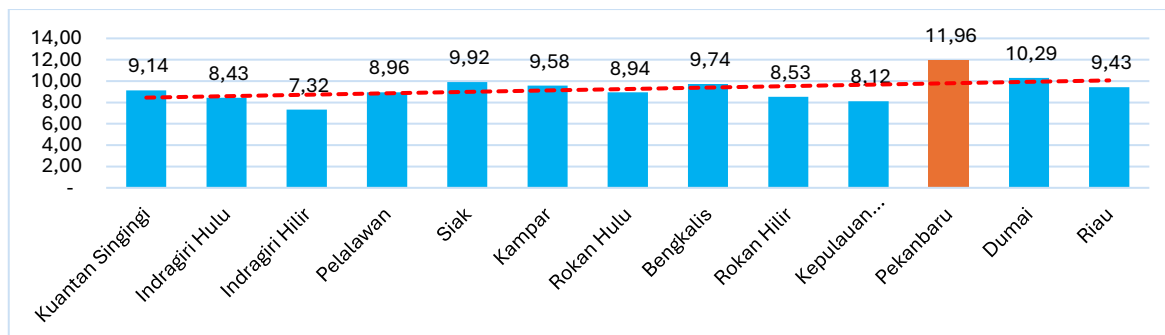


Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.27. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

Rata-rata lama sekolah penduduk Pekanbaru pada tahun 2024 adalah 11,96 tahun, dan berada pada posisi pertama di Provinsi Riau. Meski demikian, masih diperlukan percepatan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk hingga mencapai rata-rata lama sekolah ideal (15 tahun). Secara umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kota Pekanbaru lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk hingga 0,28 tahun selama periode 2020-2024. Capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk

mencapai kualitas pendidikan ideal dalam konteks pembangunan kualitas sumber daya manusia ibukota. Kebijakan pembangunan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah sebesar 3,05 tahun lagi untuk mencapai rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas hingga 15 tahun atau setingkat pendidikan Diploma III.



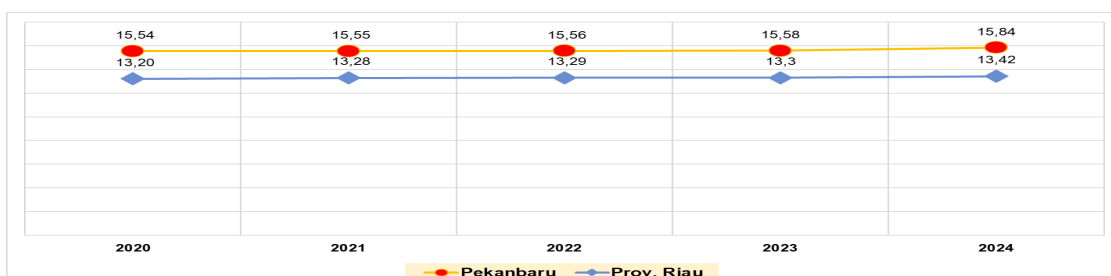
Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.28. Posisi Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024

2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah mengacu pada perkiraan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak dalam suatu daerah. Harapan lama sekolah adalah lama sekolah formal (diukur dalam tahun) yang diharapkan penduduk akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (ditetapkan pada usia 7 tahun) pada masa yang akan datang. Harapan lama sekolah disebut angka harapan sekolah yang diperkirakan dapat ditempuh oleh anak dari kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang dibangun. Harapan lama sekolah akan berkaitan dengan pembangunan sistem pendidikan yang dilakukan oleh daerah untuk menjamin anak-anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan secara maksimal. Pengukuran angka harapan lama sekolah (expected years of schooling) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Dalam perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Secara umum, Angka Harapan Lama Sekolah penduduk di Kota Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan harapan lama sekolah penduduk di Provinsi Riau, sehingga harapan lama sekolah penduduk Kota Pekanbaru

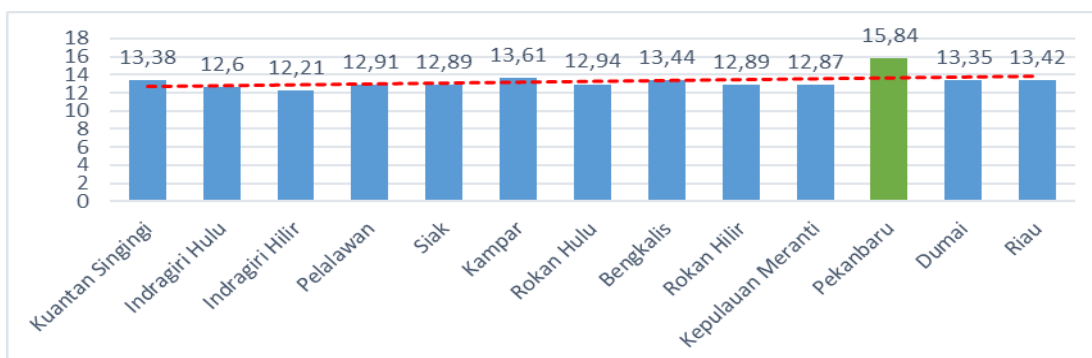
berada pada urutan pertama pada tahun 2024 dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.



Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.29. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2020, Angka Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Pekanbaru adalah 15,54 tahun dan meningkat menjadi 15,84 tahun pada tahun 2024. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah 14,20 tahun dan meningkat menjadi 13,42 tahun pada tahun 2024. Harapan lama sekolah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun pada tahun 2024 setara semester 8 perguruan tinggi.



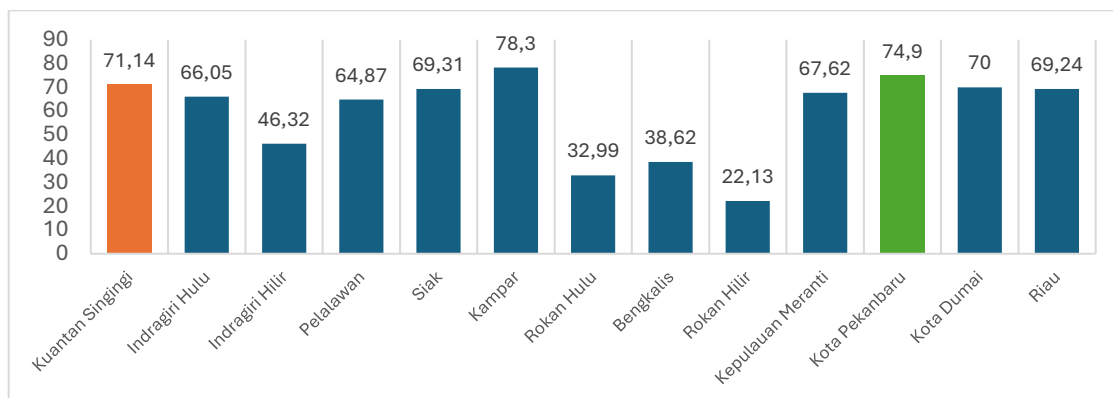
Grafik II.30. Posisi Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024

Harapan lama sekolah penduduk Kota Pekanbaru berada pada posisi pertama diantara kabupaten/kota di Riau dan lebih tinggi dari harapan lama sekolah penduduk Provinsi Riau. Memperhatikan capaian pembangunan manusia di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau pada bidang pendidikan, khususnya dalam meningkatkan harapan sekolah penduduk sebagai komposit pembentukan IPM berada di atas capaian IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan lama sekolah penduduk sudah berhasil dalam menggunakan investasi dalam sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk akses yang lebih baik ke pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Namun masih perlu peningkatan kualitas pendidikan dengan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi akses ke pendidikan, seperti masalah keuangan, kelalaian gender, dan masalah transportasi. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan ini demi

kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di Kota Pekanbaru. Pembangunan pendidikan masih perlu terus didorong untuk mencapai kesejahteraan penduduk yang lebih baik. Untuk mencapai harapan lama sekolah sampai pada tingkat ideal 18 tahun masih diperlukan peningkatan secara gradual hingga 2,16 tahun lagi. Kebijakan pembangunan pendidikan terutama pemberian kemudahan akses masuk perguruan tinggi bagi penduduk Pekanbaru dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah. Pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk Pekanbaru yang ingin melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi dan memperluas cakupan pendidikan tinggi bagi penduduk Pekanbaru menjadi pilihan kebijakan pembangunan pendidikan.

2.2.3.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) melibatkan dua unsur atau aspek utama, yaitu aspek masyarakat dan unsur pembangunan literasi masyarakat yang meliputi 7 komponen, antara lain: pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1), ketercukupan koleksi (UPLM2), ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3), tingkat kunjungan masyarakat per-hari (UPLM4), jumlah perpustakaan ber-SNP (Standar Nasional Perpustakaan) (UPLM5), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM6) dan Anggota perpustakaan (UPLM7). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2025, nilai IPLM Kota Pekanbaru pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,9. Capaian ini menunjukkan kinerja literasi yang sangat baik, menempatkan Pekanbaru sebagai salah satu dari tiga wilayah dengan nilai IPLM tertinggi di Provinsi Riau setelah Kabupaten Kampar (78,3) dan berada jauh di atas rata-rata provinsi yang sebesar 69,24. Keunggulan ini menegaskan bahwa Kota Pekanbaru memiliki fondasi literasi masyarakat yang cukup kuat dibandingkan mayoritas kabupaten/kota lain seperti Kuantan Singingi (71,14), Indragiri Hulu (66,05), Indragiri Hilir (46,32), Pelalawan (64,87), Siak (69,31), Rokan Hulu (32,99), Bengkalis (38,62), Rokan Hilir (22,13), Kepulauan Meranti (67,62), Kota Dumai (70), dan Riau (69,24).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Grafik II.31. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau Tahun 2024

Dari sisi pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1), Kota Pekanbaru mencatat rasio 0,7324, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kuantan Singingi (0,4929) maupun Indragiri Hulu (0,2091). Hal ini mengindikasikan distribusi layanan perpustakaan di wilayah kota telah menjangkau lebih luas dan merata.

Untuk ketercukupan koleksi (UPLM2), Pekanbaru memperoleh skor 0,3623, yang walaupun belum optimal seperti Kabupaten Kampar (1), tetap berada di atas banyak daerah lainnya, seperti Pelalawan (0,10) atau Bengkalis (0,0181). Ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas dan kuantitas bahan literasi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan.

Dalam hal ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3), Kota Pekanbaru bersama dengan mayoritas kabupaten/kota lain telah mencapai skor maksimal (1), menandakan ketersediaan tenaga pengelola perpustakaan yang memadai. Namun, indikator yang paling menonjol adalah tingkat kunjungan masyarakat per-hari (UPLM4) sebesar 0,115, yang merupakan salah satu skor tertinggi setelah Kabupaten Kampar (0,1411). Hal ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan yang tinggi, dan menjadi bukti efektivitas promosi literasi serta daya tarik layanan perpustakaan di kota.

Seluruh indikator kelembagaan dan partisipatif, seperti jumlah perpustakaan ber-SNP (Standar Nasional Perpustakaan) (UPLM5), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM6), dan Anggota perpustakaan (UPLM7), juga mencatat skor 1, menunjukkan tata kelola layanan perpustakaan di Kota Pekanbaru telah memenuhi standar nasional. Hal ini akan mendukung Kualitas pendidikan Kota Pekanbaru yang tinggi yang ditandai oleh partisipasi siswa yang luas, kurikulum Merdeka, dan akreditasi sekolah yang baik. Sinergi antara pendidikan formal dan pembangunan literasi masyarakat ini memperkuat budaya belajar sepanjang hayat dan memperluas akses terhadap sumber pengetahuan di luar ruang kelas.

2.2.3.4. Angka Literasi/ Numerasi

Capaian literasi dan numerasi peserta didik di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya perkembangan yang patut diapresiasi, namun sekaligus menegaskan masih terdapat tantangan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Data tahun 2023–2024 memperlihatkan bahwa skor literasi siswa Sekolah Dasar telah berada pada level cukup baik, sementara di tingkat Sekolah Menengah Pertama bahkan lebih tinggi dengan capaian di atas 80. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program penguatan literasi, baik melalui gerakan literasi sekolah maupun penyediaan sarana pendukung, telah memberikan dampak positif.

Namun demikian, capaian numerasi masih tertinggal jauh, khususnya di tingkat Sekolah Dasar. Skor numerasi pada tahun 2024 masih berada pada kisaran menengah,

meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa penguasaan konsep berhitung, logika matematis, dan penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari masih lemah. Apabila tidak segera diintervensi, kelemahan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan pada proses pembelajaran di jenjang berikutnya, sekaligus mengurangi daya saing sumber daya manusia dalam bidang yang membutuhkan keterampilan kuantitatif.

Tabel II.24. Indeks Literasi Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenjang	2020	2021	2022	2023	2024
1	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SD	NA	NA	NA	66,16	67,54
2	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SMP	NA	NA	NA	77,75	81,28
3	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SD	NA	NA	NA	48,41	55,85
4	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SMP	NA	NA	NA	66,47	68,57

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2025

Kesenjangan yang cukup besar antara capaian literasi dan numerasi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan perhatian dalam implementasi kebijakan pendidikan. Sementara literasi mendapat dukungan program yang masif, numerasi relatif belum menjadi prioritas yang setara. Padahal, dalam konteks pembangunan jangka menengah, keseimbangan antara kemampuan literasi dan numerasi merupakan fondasi penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu bersaing di era digital.

Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah memperkuat fondasi numerasi sejak pendidikan dasar tanpa mengurangi keberlanjutan program literasi yang telah berjalan baik. Arah kebijakan yang diperlukan adalah memperluas intervensi pembelajaran numerasi berbasis kontekstual, meningkatkan kapasitas guru dalam mengembangkan metode pembelajaran inovatif, serta mengintegrasikan numerasi dengan mata pelajaran lain untuk meningkatkan relevansi dan pemahaman siswa.

Peningkatan literasi dan numerasi secara seimbang menjadi isu strategis bagi Kota Pekanbaru dalam periode RPJMD 2025–2029, karena secara langsung terkait dengan pencapaian kualitas pendidikan, penguatan ketahanan sumber daya manusia, dan peningkatan daya saing daerah di masa mendatang.

2.2.3.5. Indeks Literasi Digital

Literasi digital merupakan keterampilan mendasar yang sangat penting di era transformasi digital saat ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan.

Kemampuan literasi digital bukan sekadar penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kecakapan dalam mencari, menganalisis, mengevaluasi, serta menyebarkan informasi secara bertanggung jawab.

Hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 3,33 poin, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 3,54 poin. Kondisi ini merefleksikan bahwa masyarakat Riau, termasuk Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi, masih menghadapi tantangan dalam penguasaan literasi digital yang komprehensif. Empat pilar pembentuk literasi digital yakni kecakapan digital (digital skills), budaya digital (digital culture), etika digital (digital ethics), dan keamanan digital (digital safety) menjadi faktor penting yang juga relevan untuk dianalisis dalam konteks pembangunan Kota Pekanbaru.

Pilar kecakapan digital menunjukkan nilai relatif baik di tingkat provinsi, yang berarti masyarakat sudah cukup terbiasa menggunakan perangkat digital untuk aktivitas sehari-hari. Hal ini relevan dengan kondisi Pekanbaru sebagai pusat ekonomi dan pendidikan yang ditopang oleh akses internet yang cukup luas. Namun, capaian di bidang budaya digital dan etika digital menegaskan bahwa masih diperlukan penguatan nilai dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan ruang digital secara beretika, produktif, dan bertanggung jawab.

Tantangan terbesar berada pada aspek keamanan digital, dengan skor yang masih rendah dibandingkan pilar lainnya. Rendahnya kemampuan dalam melindungi data pribadi, mencegah serangan siber, dan membangun kesadaran tentang keamanan digital berimplikasi langsung pada kerentanan masyarakat Kota Pekanbaru, terutama generasi muda, pelaku UMKM digital, dan sektor pelayanan publik berbasis teknologi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan literasi digital di Kota Pekanbaru tidak hanya perlu difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembangunan budaya digital yang sehat, penerapan etika bermedia, serta penguatan sistem keamanan digital. Dengan posisi Pekanbaru sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi Riau, peningkatan literasi digital menjadi isu strategis yang harus diutamakan dalam RPJMD 2025–2029. Hal ini penting untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, pelayanan publik berbasis elektronik, serta menciptakan masyarakat yang cerdas, aman, dan berdaya saing di era digital.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perkembangan cakupan kepesertaan di Kota Pekanbaru selama periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan persentase dari 72,16% pada tahun 2022 menjadi 75,87% pada tahun 2024. Meskipun capaian ini mengindikasikan arah yang positif, masih terdapat sejumlah kelemahan mendasar yang perlu dicermati.

Fluktuasi jumlah semesta coverage dari tahun ke tahun mengisyaratkan adanya persoalan dalam akurasi basis data kependudukan, baik karena faktor migrasi penduduk maupun sinkronisasi dengan data nasional. Selain itu, peningkatan persentase kepesertaan relatif lambat dengan rata-rata hanya sekitar 1,8 poin per tahun, sehingga masih menyisakan gap kepesertaan yang cukup besar, yakni sekitar 99 ribu jiwa pada tahun 2024.

Tabel II.25. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Tahun	Semesta Coverage	Total Coverage	Persentase
1	2022	414.179	298.876	72,16%
2	2023	397.060	293.371	73,89%
3	2024	410.558	311.494	75,87%

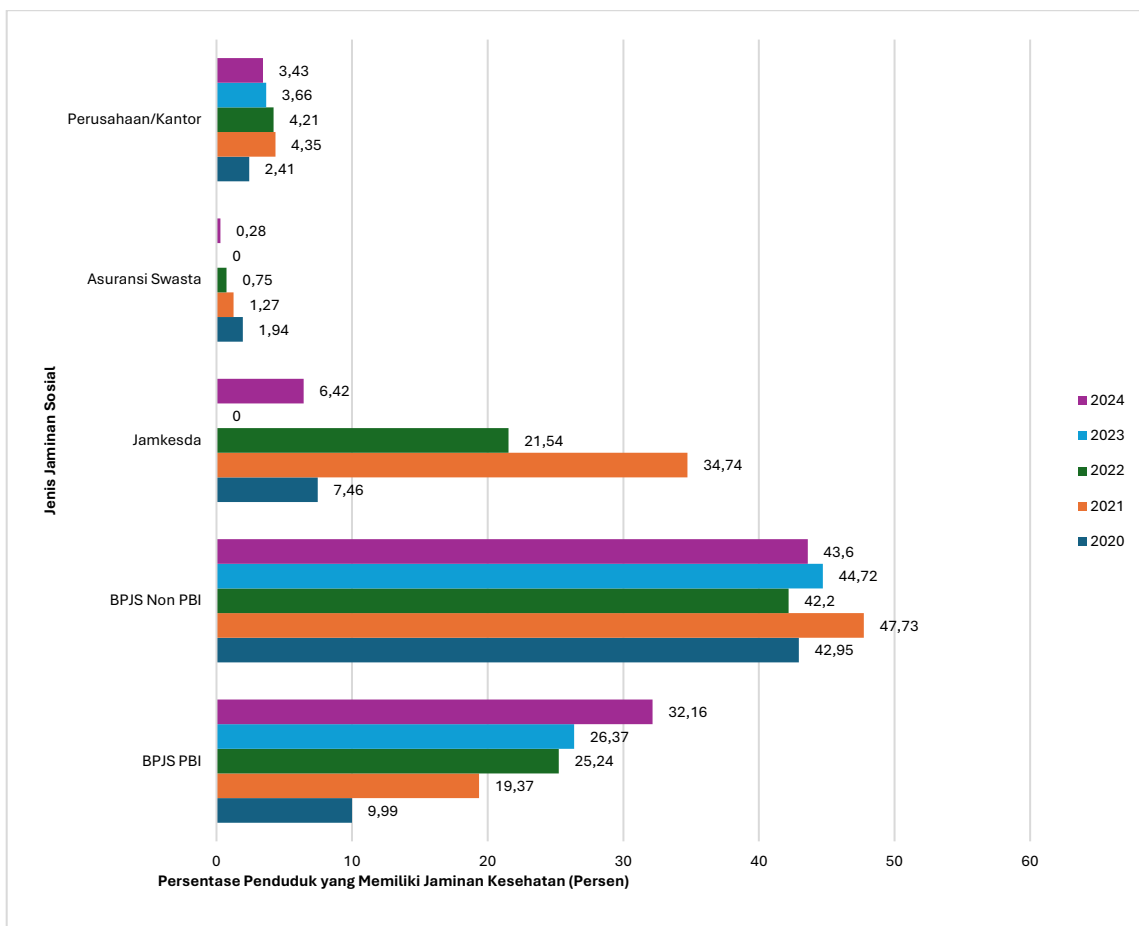
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2025

Pola peningkatan di tahun terakhir juga lebih banyak dipengaruhi oleh reaktivasi peserta lama daripada penambahan peserta baru, yang menunjukkan lemahnya mekanisme retensi akibat kendala iuran maupun kepatuhan. Di sisi lain, masih terdapat sekitar seperempat penduduk yang belum terjangkau, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, yang menghadapi hambatan akses maupun keberlanjutan kepesertaan. Dengan demikian, meskipun tren cakupan terus meningkat, secara diagnostik dapat disimpulkan bahwa sistem kepesertaan di Pekanbaru masih menghadapi tantangan struktural, teknis, dan sosial yang perlu ditangani secara komprehensif agar target cakupan universal dapat terwujud

2.2.4.2. Penerima Jaminan Sosial Kota Pekanbaru

Kondisi jaminan sosial di Kota Pekanbaru selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan arah kebijakan yang semakin inklusif. Peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) meningkat signifikan dari 9,99% pada tahun 2020 menjadi 32,16% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Tren ini juga menunjukkan bahwa BPJS PBI menjadi skema dominan dalam menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlindungi.

Sementara itu, kepesertaan BPJS Non PBI (yang mencakup peserta mandiri dan pekerja formal) relatif stabil di kisaran 42% hingga 47%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang mampu tetap konsisten berkontribusi dalam sistem jaminan sosial nasional. Namun demikian, terjadi fluktuasi pada skema Jamkesda, yang sempat melonjak tajam pada 2021 hingga 34,74%, lalu menurun drastis menjadi hanya 6,42% pada 2024. Penurunan tersebut mengindikasikan proses transisi dan integrasi peserta Jamkesda ke dalam skema BPJS, khususnya PBI.



Sumber: BPJS, 2025

Grafik II.32. Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Sosial di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Sebaliknya, tren kepesertaan pada asuransi swasta menunjukkan penurunan yang signifikan dari 1,94% (2020) menjadi hanya 0,28% (2024). Hal ini mengindikasikan menurunnya preferensi terhadap layanan asuransi non-pemerintah atau meningkatnya dominasi BPJS dalam penyediaan layanan kesehatan. Cakupan jaminan oleh perusahaan atau kantor juga menunjukkan tren penurunan dari 4,35% pada 2021 menjadi 3,43% pada 2024, yang menandakan perlunya penguatan kembali peran sektor swasta dalam mendukung perlindungan sosial tenaga kerja.

Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa Kota Pekanbaru telah bergerak ke arah sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan perluasan akses melalui BPJS PBI sebagai langkah nyata negara dalam menjamin hak dasar masyarakat. Namun demikian, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa seluruh skema jaminan sosial tetap berjalan seimbang, berkelanjutan, dan mampu menjangkau seluruh kelompok penduduk secara adil.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pemajuan kebudayaan dalam rangka memperkuat jati diri bangsa yang berkontribusi terhadap perekonomian bangsa khususnya Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan tersebut, Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) merupakan menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan yang sejalan dengan permasalahan dan rekomendasi dalam Pokok - Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan data olahan PPKD Kota Pekanbaru terdapat 11 target obyek pemajuan yang mengalami ketahanan budaya di Kota Pekanbaru, seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.26. Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1	Tradisi Lisan	34
2	Manuskrip	2
3	Adat Istiadat	27
4	Ritus	51
5	Pengetahuan Tradisional	183
6	Teknologi Tradisional	73
7	Seni	107
8	Bahasa	34
9	Permainan Rakyat	31
10	Olahraga Tradisional	6
11	Diduga Cagar Budaya	70
Jumlah		618

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2024

Dalam melakukan pemajuan kebudayaan Melayu khususnya di Kota Pekanbaru, sebagaimana dalam memajukan kebudayaan lainnya, permasalahan tentu tidak bisa kita hindari. Jika melihat kondisi dan sekaligus posisi Kota Pekanbaru maka terdapat beberapa tantangan yang saat ini menjadi permasalahan dalam memajukan kebudayaan melayu. Diantara tantangan tersebut diantaranya:

- Pengaruh budaya global yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi (TI) yang dapat menyebabkan menurunnya pengamalan adat istiadat Melayu, dan perubahan sifat dan perilaku generasi muda.
- Nilai-nilai luhur dalam budaya Melayu semakin tidak dikenal oleh masyarakat terutama generasi muda.
- Kerjasama antara pelaku seni budaya dan insan budaya dengan pemerintah belum terpadu, sehingga upaya pelestarian dan pemanfaatan seni budaya dalam diplomasi budaya, kunjungan kebudayaan dan pariwisata belum optimal.

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami peningkatan dari 0,6 pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 0,7 pada tahun 2022 hingga 2024. Sementara itu, jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk tetap stagnan di angka 125 selama empat tahun terakhir, hal yang sama juga terjadi pada jumlah gedung olahraga yang stagnan pada angka 82 per 10.000 penduduk. Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit peningkatan dalam jumlah grup kesenian, aspek seni, budaya, dan olahraga di Pekanbaru masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif lambat, sehingga dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Tabel II.27. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah group kesenian per 10.000 Penduduk	0,6	0,6	0,70	0,7	0,7
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	125	125	125	125	125
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	82	82	82	82	82

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru, 2025

Pada periode 2020-2024 jumlah group kesenian/sanggar seni stagnan pada angka 70 group. Selanjutnya Lembaga Adat Melayu sejak tahun 2020 telah tersedia di 12, angka ini terus meningkat menjadi 16, yang terdiri dari 15 Kecamatan dan ditambah dengan 1 Lembaga Adat Melayu tingkat Kota Pekanbaru.

Tabel II.28. Lembaga Seni Budaya Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Lembaga Seni dan Budaya	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Group Kesenian/ Sanggar Seni	70	70	70	70	70
2	Lembaga Adat Melayu (Kab dan Kec)	13	13	16	16	16
3	Jumlah Penduduk	983.356	994.585	1.007.540	1.123.348	1.167.599

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru, 2025

Data fasilitas olahraga di Kota Pekanbaru tahun 2023, secara rinci mengenai jenis fasilitas, kepemilikan dari masing-masing fasilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.29. Data Fasilitas Olahraga di Kota Pekanbaru Tahun

No.	CABANG OLAHRAGA	KECAMATAN		STATUS KEPEMILIKAN	
1	BASKET	Bina Widya	4	Fasum	3
		Marpoyan Damai	1	Masyarakat	3
		Sail	8	Pemerintah Kota	2
		Senapelan	1	Hak Milik	3
		Sukajadi	1	Prov Riau	1

No.	CABANG OLAHRAGA	KECAMATAN		STATUS KEPEMILIKAN	
		Tuah Madani	1	UNRI	3
				Sekolah Negeri	1
		Jumlah	16	JUMLAH	16
2	BILLIARD	Bukit Raya	2	Fasum	13
		Lima Puluh	5		
		Marpoyan Damai	1		
		Sail	1		
		Tenayan Raya	1		
		Tuah Madani	3		
		Jumlah	13	JUMLAH	13
3	BULU TANGKIS	Bina Widya	9	Fasum	47
		Bukit Raya	18	Masyarakat	19
		Lima Puluh	2	Pribadi	31
		Marpoyan Damai	8	Ormas	3
		Payung Sekaki	6	Pemerintah Kota	3
		Pekanbaru Kota	3	Pinjam Pakai	8
		Rumbai	9	Prov Riau	1
		Rumbai Barat	4	Telkom	1
		Sail	2		
		Senapelan	1		
		Tenayan Raya	9		
		Tuah Madani	25		
		Kulim	17		
		Jumlah	113	JUMLAH	113
4	FITNES	Lima Puluh	1	Fasum	6
		Payung Sekaki	4	Pribadi	1
		Pekanbaru Kota	1		
		Tenayan Raya	1		
		Jumlah	7	JUMLAH	7
5	FUTSAL	Bina Widya	6	Bank BRI	1
		Bukit Raya	10	Fasum	18
		Lima Puluh	1	Masyarakat	8
		Marpoyan Damai	12	Pinjam Pakai	1
		Payung Sekaki	3	Pribadi	28
		Rumbai	6	PT Angkasa Pura II	1
		Sail	1	Swasta	3
		Senapelan	1	Winarko	1
		Sukajadi	2		
		Tenayan Raya	5		
		Tuah Madani	8		
		Kulim	6		
		Jumlah	61	JUMLAH	61
6	GOLF	Marpoyan Damai	2	Fasum	2

No.	CABANG OLAHRAGA	KECAMATAN		STATUS KEPEMILIKAN	
7	GYM	Jumlah	2	JUMLAH	2
		Bina Widya	1	Pribadi	7
		Marpoyan Damai	6		
		Jumlah	7	JUMLAH	7
8	KARATE	Tuah Madani	1	Fasum	1
		Jumlah	1	JUMLAH	1
9	KOLAM RENANG	Bukit Raya	2	Fasum	3
		Marpoyan Damai	2	Pribadi	9
		Payung Sekaki	5		
		Rumbai	1		
		Tenayan Raya	1		
		Kulim	1		
		Jumlah	12	JUMLAH	12
10	MUAY THAI	Bukit Raya	1	Pribadi	1
		Jumlah	1	JUMLAH	1
11	PANAHAHAN	Bina Widya	1	Fasum	1
		Bukit Raya	1	UIR	1
		Jumlah	2	JUMLAH	2
12	PETAQUE	Bukit Raya	1	UIR	1
		Jumlah	1	JUMLAH	1
13	SENAM	Pekanbaru Kota	1	Pribadi	2
		Tenayan Raya	1	Masyarakat	1
		Tuah Madani	2	Fasum	1
		Jumlah	4	JUMLAH	4
14	SEPAKBOLA	Bina Widya	4	Fasum	15
		Bukit Raya	7	Masyarakat	16
		Lima Puluh	4	Pemko	6
		Marpoyan Damai	7	Pemprov Riau	2
		Payung Sekaki	1	Pinjam Pakai	4
		Rumbai	7	Pribadi	7
		Rumbai Barat	4	PTPN V	1
		Sail	7	Sekolah Negeri	2
		Tenayan Raya	9	Swasta	1
		Tuah Madani	5	TNI	5
		Kulim	7	UIR	1
				UNRI	2
		Jumlah	62	JUMLAH	62
15	SILAT	Kulim	1	Pribadi	1
		Jumlah	1	JUMLAH	1
16	SOFTBALL	Rumbai	1	Fasum	1
		Jumlah	1	JUMLAH	1
17	TAEKWONDO	Marpoyan Damai	1	Pribadi	1
		Jumlah	1	JUMLAH	1
18	TAKRAW	Bukit Raya	5	Fasum	6
		Pekanbaru Kota	1	Masyarakat	13

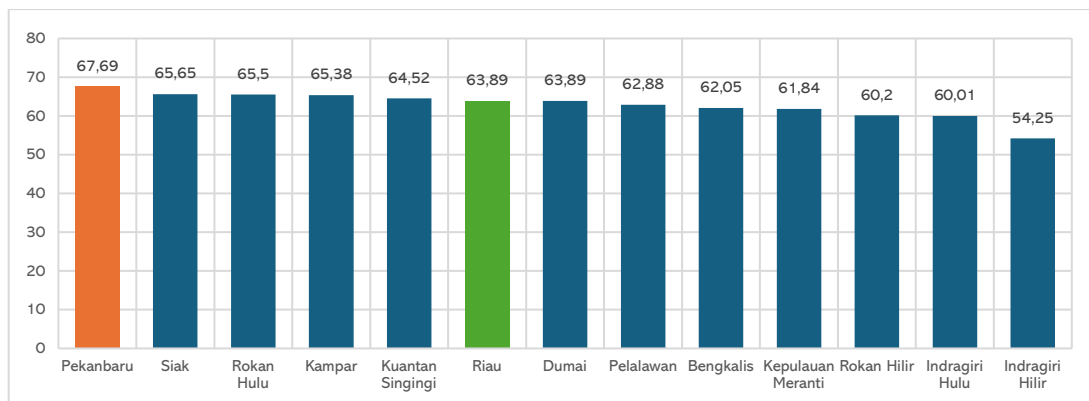
No.	CABANG OLAHRAGA	KECAMATAN		STATUS KEPEMILIKAN	
		Rumbai Barat	1	Pemko	2
		Sail	2	Pinjam Pakai	1
		Senapelan	1	Pribadi	2
		Sukajadi	1	Prov Riau	1
		Tenayan Raya	1		
		Tuah Madani	5		
		Kulim	8		
		Jumlah	25	JUMLAH	25
19	TEMLAK	Bukit Raya	1	TNI	1
		Jumlah	1	JUMLAH	1
20	TENIS	Bukit Raya	5	Bank mandiri	1
		Pekanbaru Kota	5	BUMN	1
		Sail	3	Fasum	2
				Kanwil Pajak	1
				Kementrian Keuangan	1
				Pemko	2
				Prov Riau	2
				TNI	2
				UIR	1
		Jumlah	13	JUMLAH	13
21	TENIS MEJA	Bukit Raya	5	Fasum	6
		Pekanbaru Kota	2	Masyarakat	7
		Rumbai Barat	1	Pemko	1
		Tuah Madani	7	Pribadi	2
		Kulim	2	Swasta	1
		Jumlah	17	JUMLAH	17
22	VOLI	Bina Widya	8	Fasum	60
		Bukit Raya	16	Hibah	2
		Marpoyan Damai	10	Masyarakat	33
		Payung Sekaki	4	Pemko	3
		Pekanbaru Kota	1	Pinjam Pakai	37
		Rumbai	7	Pribadi	17
		Rumbai Barat	18	PTPN V	1
		Sail	4	Tanah Konsensi PHR	1
		Senapelan	5	UIR	1
		Sukajadi	3		
		Tenayan Raya	25		
		Tuah Madani	31		
		Kulim	23		
		Jumlah	155	JUMLAH	155

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru, 2024

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Pekanbaru Tahun 2023 tercatat sebesar 67,69, menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau dan berada di atas rata-rata provinsi sebesar 63,89. Capaian ini mencerminkan relatif baiknya pemenuhan hak-hak anak di wilayah perkotaan, yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih memadai dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya.



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA Tahun 2023

Grafik II.33. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

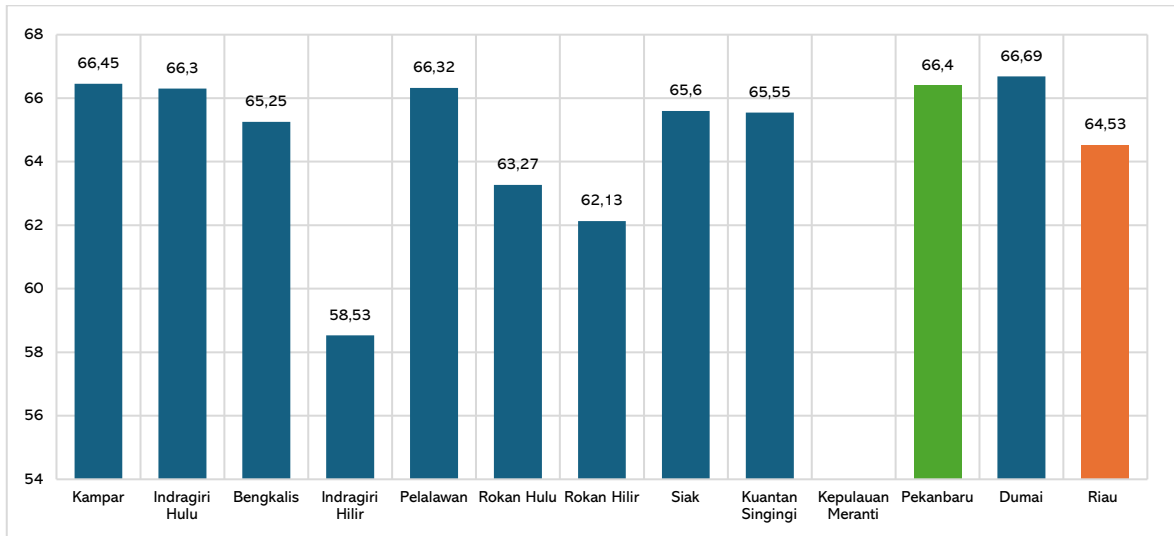
Keberadaan berbagai fasilitas layanan publik, tenaga pendamping profesional, serta kebijakan daerah yang responsif terhadap isu anak menjadi faktor pendorong tingginya skor ini. Namun, meskipun berada di peringkat teratas, masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam memperluas jangkauan layanan ke wilayah pinggiran kota, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ramah anak, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar perlindungan anak dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah administrasi Kota Pekanbaru.

2.2.6.2. Kualitas Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan keluarga yang tangguh, berkualitas, dan sejahtera dalam lingkungan yang mendukung di sepanjang siklus kehidupannya. Untuk itu, berbagai intervensi pembangunan keluarga harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap daerah.

Sebagai alat ukur, BKKBN mengembangkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data BKKBN Provinsi Riau tahun 2024, kota Pekanbaru mencatatkan nilai iBangga sebesar 66,64, yang merupakan salah satu capaian tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Riau. Nilai ini jauh di atas rata-rata

provinsi (64,53) dan menunjukkan performa pembangunan keluarga di Pekanbaru yang sangat baik dan kompetitif, sejajar dengan Kota Dumai (66,69) sebagai yang tertinggi.



Sumber: <https://siperindu.online/dashboard/#1>

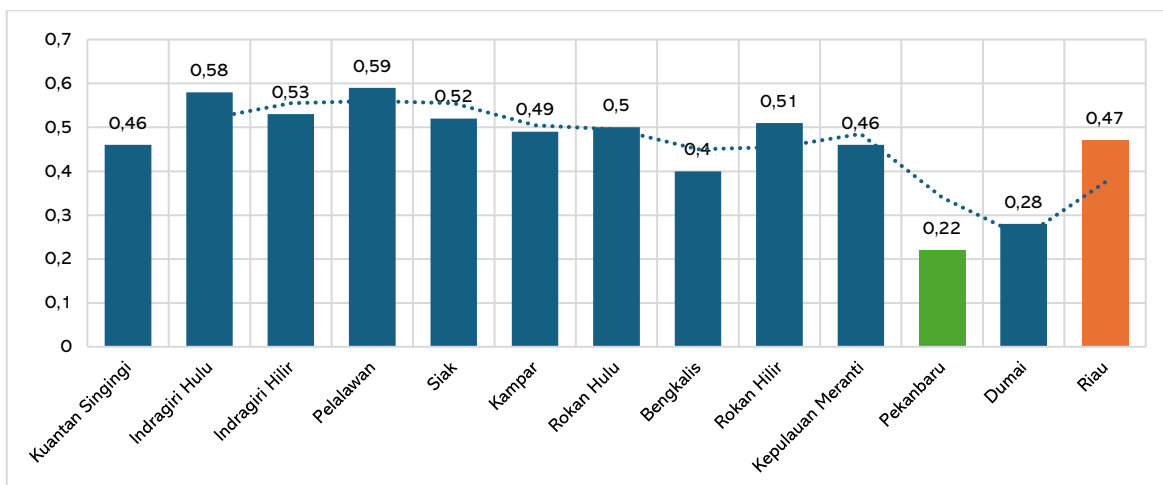
Grafik II.34. Capaian Kualitas Pembangunan Keluarga Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2024

Capaian tinggi ini mencerminkan keberhasilan Kota Pekanbaru dalam menjaga kualitas ketahanan keluarga, baik dari sisi ketenteraman, kemandirian, maupun kebahagiaan keluarga. Namun demikian, keberlanjutan capaian ini memerlukan perhatian terhadap pemerataan program, terutama bagi segmen masyarakat urban yang rentan terhadap disintegrasi sosial dan tekanan ekonomi. Strategi yang bersifat inovatif, kolaboratif, dan berbasis data akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian iBangga Pekanbaru di masa mendatang.

2.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur kesenjangan gender dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan akses pasar kerja. Nilai IKG yang lebih rendah menunjukkan ketimpangan yang lebih kecil.

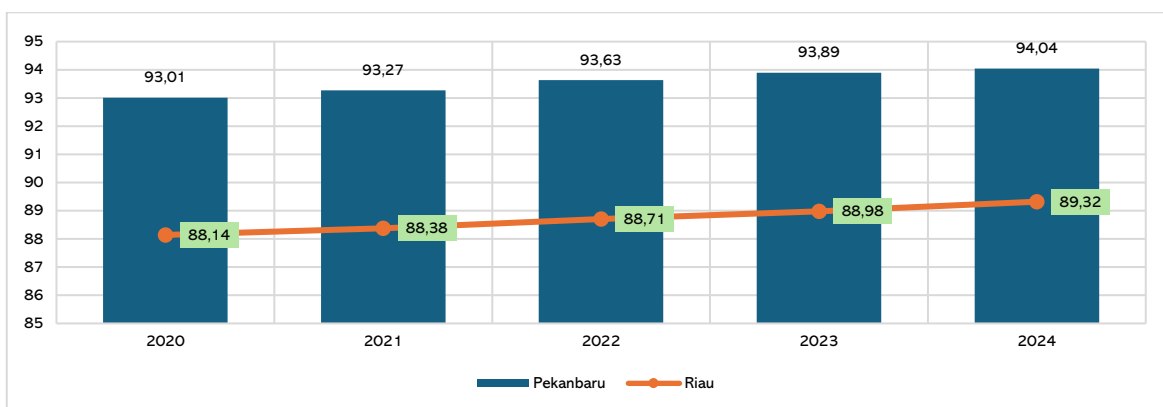
Berdasarkan data BPS Provinsi Riau tahun 2025, capaian IKG Kota Pekanbaru menunjukkan fluktuasi negatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai IKG Pekanbaru tercatat sebesar 0,23, dan sempat naik menjadi 0,29 di tahun 2021. Namun, setelah itu terjadi penurunan berturut-turut menjadi 0,15 (2022), 0,13 (2023), dan kembali naik sedikit menjadi 0,22 di tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Grafik II.35. Perkembangan IKG Kota Pekanbaru 2020 – 2024

Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, Kota Pekanbaru secara konsisten mencatat nilai IKG terendah di Provinsi Riau, jauh di bawah rata-rata Riau yang berada di angka 0,47 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan gender di Kota Pekanbaru masih tergolong tinggi, terutama dalam hal partisipasi perempuan di bidang politik dan ekonomi.



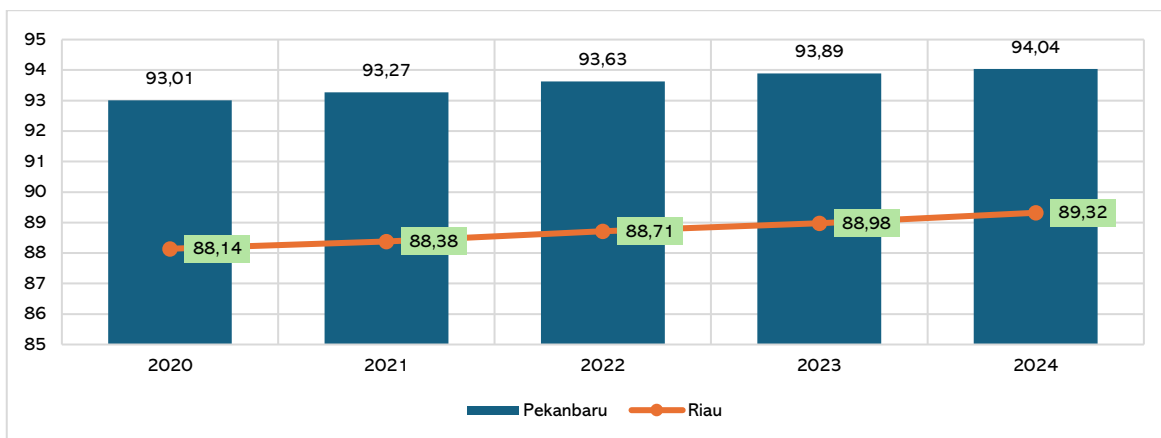
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Grafik II.36. Perkembangan IKG Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau

Meskipun nilai IKG menurun, hal ini bukan berarti peningkatan kualitas, melainkan menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami keterbatasan signifikan dalam akses dan partisipasi di sektor publik, terutama dibandingkan kota/kabupaten lain.

2.2.6.4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur rasio capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati nilai 100, semakin setara capaian pembangunan antara keduanya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

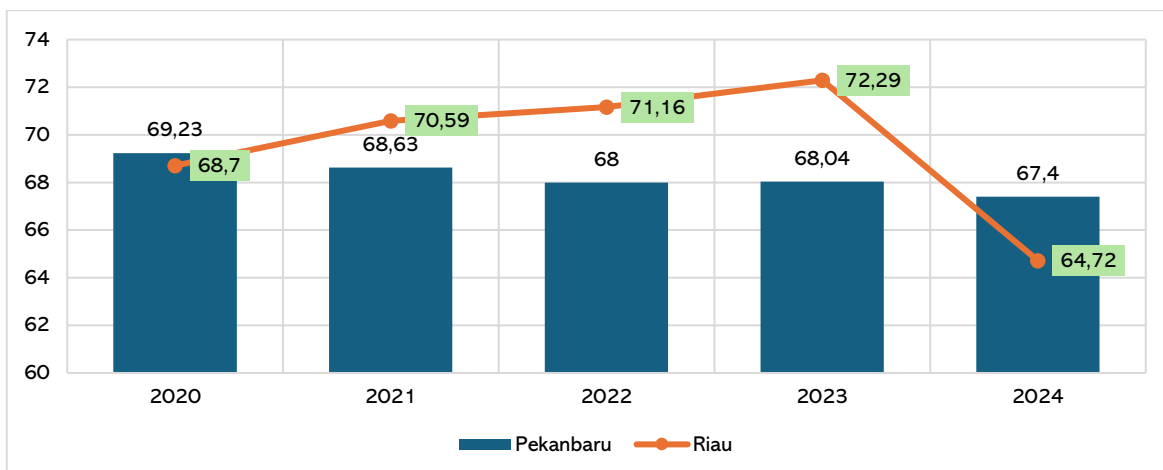
Grafik II.37. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau

Capaian IPG Kota Pekanbaru menunjukkan tren yang positif dan stabil. Dimulai dari 93,01 pada tahun 2020, meningkat menjadi 94,04 pada tahun 2024. Nilai ini secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Riau, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 89,32. Capaian ini menandakan bahwa dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan umur harapan hidup, kualitas pembangunan perempuan di Kota Pekanbaru relatif sejajar dengan laki-laki, bahkan lebih baik dibandingkan daerah lain di provinsi.

Kota Pekanbaru telah berhasil mempertahankan kualitas hidup perempuan secara umum, terutama dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang menjadi pendorong utama nilai IPG.

2.2.6.5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menilai keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pasar kerja formal, dan jabatan strategis. Selama periode 2020–2023, IDG Kota Pekanbaru menunjukkan tren penurunan dari 69,23 pada tahun 2020 menjadi 67,4 di tahun 2024. Penurunan ini berbanding terbalik dengan capaian Provinsi Riau yang justru meningkat dari 68,7 menjadi 72,29 pada tahun 2023, meskipun menurun kembali ke 64,72 pada tahun 2024. Capaian IDG Kota Pekanbaru tahun 2024 berada di bawah rata-rata provinsi, menandakan bahwa pemberdayaan perempuan di bidang politik, jabatan struktural, dan akses ekonomi formal masih belum optimal.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Grafik II.38. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Meskipun IPG tinggi, nilai IDG Pekanbaru yang menurun menunjukkan bahwa tingginya kualitas pendidikan dan kesehatan perempuan belum cukup terkonversi menjadi peran aktif perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

2.2.6.6. Indeks Pembangunan Pemuda

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, ada batasan usia termuda hingga tertua untuk menyebut seseorang sebagai pemuda yaitu berusia antara 16-30 tahun, tentang potensi pemuda dan olahraga disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.30. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

Tahun	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Persentase
2020	52	9	61	85,25%
2021	52	9	61	85,25%
2022	55	10	65	84,62%
2023	55	10	65	84,62%
2024	57	8	65	87,69%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, 2025

Pada tahun 2024, jumlah organisasi kepemudaan yang aktif di Kota Pekanbaru mencapai 57 organisasi dari total 65 organisasi yang terdaftar. Dengan demikian, persentase organisasi yang aktif sebesar 87,69%, menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 84,62%.

Jumlah pemuda sebanyak 249.229 jiwa atau 24,73 persen dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru merupakan kota dengan persentase jumlah pemuda terbesar di Indonesia (BPS Kota Pekanbaru Tahun 2023). Pemuda Kota Pekanbaru merupakan keunggulan demografi yang besar, tetapi belum menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang sebanding dengan jumlah dan persentasinya yang besar.

Permasalahan utama pembangunan kepemudaan di Kota Pekanbaru adalah ketersediaan lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda. Partisipasi dan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru masih rendah, serta masih tingginya permasalahan gender dan diskriminasi merupakan sebagian dari permasalahan kepemudaan di Kota Pekanbaru.

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu faktor utama dalam merumuskan arah pembangunan jangka menengah meliputi; 1) Daya saing sumber daya manusia, 2) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, 3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, 4) Transformasi Digital, 5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, 6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dan 7) Stabilitas Ekonomi Makro.

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1. Ketergantungan

Angka Ketergantungan adalah salah satu indikator demografi yang vital. Angka Beban Ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif sangat besar dan menanggung penduduk usia belum produktif/tidak produktif yang kecil. Angka Beban Ketergantungan di bawah 50 menunjukkan bahwa satu orang penduduk belum produktif/tidak produktif ditanggung oleh 2 orang penduduk produktif.

Angka beban ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency Ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel II.31. Angka Rasio Ketergantungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	266.060	265.808	266.169	303.077	306.340
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	36.855	39.847	43.017	46.568	51.064
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif ((1) dan (2))	302.915	305.655	309.186	349.645	357.404

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	680.441	688.930	698.354	773.703	810.195
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	44,52	44,37	44,27	45,19	44,11

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2025 (Diolah)

Dari tabel diatas diperoleh angka ketergantungan penduduk Kota Pekanbaru tercatat sebesar 44,52%, turun menjadi 44,27% pada tahun 2022. Namun kembali meningkat menjadi 45,19% pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 44,11% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Pekanbaru mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang usia non produktif (usia anak-anak dan penduduk usia lanjut) dan angka tersebut termasuk dalam kategori sedang.

Secara keseluruhan data di atas juga mengindikasikan bahwa Kota Pekanbaru sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun - 64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun). Ini menjadi nilai tambah dalam daya saing Kota Pekanbaru karena berarti terjadi peningkatan pasokan tenaga kerja (labor supply) yang potensial mendukung perkembangan perekonomian daerah.

2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan di Kota Pekanbaru menunjukkan fluktuasi kontribusi terhadap perekonomian dalam lima tahun terakhir. Meskipun nilai tambah sektor ini terus meningkat, perannya terhadap total PDRB relatif stagnan karena laju pertumbuhan lebih lambat dibandingkan sektor jasa seperti perdagangan dan konstruksi. Hal ini menandakan adanya pergeseran struktur ekonomi kota dari basis manufaktur menuju dominasi sektor tersier yang dipengaruhi urbanisasi dan perkembangan ekonomi digital.

Tabel II.32. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Pekanbaru miliar rupiah) Tahun 2020-2024

Tahun	Industri Pengolahan (A)	Total PDRB (B)	Rasio (A:B)	Rasio (A:B)
2020	23.994,01	115.486,90	23.994,01 : 115.486,90	1 : 4,81
2021	26.663,49	126.525,25	26.663,49 : 126.525,25	1 : 4,75
2022	30.507,95	144.559,27	30.507,95 : 144.559,27	1 : 4,74
2023*	32.214,56	159.960,67	32.214,56 : 159.960,67	1 : 4,97
2024**	35.213,42	171.306,52	35.213,42 : 171.306,52	1 : 4,87

Sumber: BPS Kota Pekanbaru dalam Angka, 2025

Pelemahan daya saing industri pengolahan tidak terlepas dari sejumlah faktor eksternal maupun internal. Kebijakan fiskal yang kurang mendukung, fluktuasi harga komoditas global, serta regulasi impor bahan baku yang menambah biaya produksi, menjadi penghambat utama. Selain itu, ketergantungan pada komoditas mentah dengan nilai tambah rendah serta minimnya inovasi teknologi membuat sektor ini belum mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Apabila kondisi ini berlanjut, risiko deindustrialisasi dini menjadi tantangan serius bagi perekonomian Pekanbaru. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada restrukturisasi industri menuju manufaktur bernilai tambah tinggi, pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran, serta penguatan kawasan industri. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas diversifikasi produk, dan mengintegrasikan industri lokal dengan rantai pasok global.

2.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor makanan dan minuman di Kota Pekanbaru memperlihatkan tren pertumbuhan yang relatif positif dalam lima tahun terakhir, meskipun rasio terhadap total PDRB menunjukkan fluktuasi. Pada periode awal, peningkatan efisiensi ditandai oleh perbaikan rasio seiring dengan meningkatnya konsumsi domestik pasca-pandemi. Namun, pada tahun 2023 terjadi pelemahan akibat lonjakan inflasi pangan yang menekan daya beli masyarakat. Kondisi ini berangsur pulih pada tahun 2024, didorong oleh geliat pariwisata dan penyelenggaraan berbagai festival kuliner yang memperluas pasar lokal.

Secara struktural, kinerja sektor makanan dan minuman relatif lebih baik dibandingkan subsektor industri pengolahan secara keseluruhan. Laju pertumbuhan sektor ini lebih cepat, sehingga kesenjangan dengan sektor industri utama mulai menyempit. Hal ini mengindikasikan bahwa makanan dan minuman memiliki peran strategis dalam mendiversifikasi basis ekonomi perkotaan yang selama ini didominasi perdagangan dan konstruksi.

Tabel II.33. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Pekanbaru (miliar rupiah) Tahun 2020-2024

Tahun	Makanan & Minum (A)	Total PDRB (B)	Rasio (A:B)	Rasio (A : B)
2020	1.703,41	115.486,90	1.703,41 : 115.486,90	1 : 67,79
2021	2.019,35	126.525,25	2.019,35 : 126.525,25	1 : 62,64
2022	2.336,79	144.559,27	2.336,79 : 144.559,27	1 : 61,85
2023*	2.521,23	159.960,67	2.521,23 : 159.960,67	1 : 63,46
2024**	2.880,38	171.306,52	2.880,38 : 171.306,52	1 : 59,47

Sumber: Kota Pekanbaru dalam Angka 2025

Meski demikian, ketergantungan terhadap bahan baku impor dan rendahnya tingkat digitalisasi UMKM kuliner masih menjadi kendala utama. Rasio kontribusi yang belum optimal mencerminkan sensitivitas tinggi terhadap fluktuasi harga pangan

global dan daya beli masyarakat. Jika tantangan ini tidak diantisipasi, sektor makanan dan minuman rentan mengalami perlambatan meskipun memiliki potensi pasar yang luas, mengingat jumlah penduduk Pekanbaru yang terus meningkat.

Prospek ke depan menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman berpeluang menjadi motor pertumbuhan baru apabila didukung oleh kebijakan penguatan rantai pasok lokal, integrasi dengan sektor pertanian, serta akselerasi digitalisasi UMKM kuliner. Kebijakan insentif fiskal dan promosi pariwisata kuliner dipandang mampu memperbaiki kinerja sektor, sekaligus menjadikannya penopang ketahanan ekonomi perkotaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.3. Rasio Kewirausahaan

Struktur kewirausahaan di Kota Pekanbaru masih didominasi oleh usaha mikro yang dijalankan secara mandiri tanpa melibatkan tenaga kerja tambahan. Fenomena ini mencerminkan ketergantungan yang besar pada kegiatan ekonomi subsisten, seperti perdagangan kecil dan jasa perorangan, sehingga daya dorong untuk transformasi ke arah usaha berskala lebih besar masih terbatas. Usaha dengan tenaga kerja tetap justru menunjukkan kecenderungan menurun, yang menandakan adanya hambatan dalam proses naik kelas menuju bentuk usaha formal yang lebih mapan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa basis kewirausahaan kota relatif rapuh karena sebagian besar pelaku usaha berada pada kategori paling rentan terhadap gejolak pasar maupun krisis.

Dari sisi produktivitas, kontribusi sektor perdagangan dan konstruksi terhadap perekonomian kota sangat dominan, namun penyerapan tenaga kerja dari sektor ini cenderung terbatas. Sebagian besar unit usaha hanya dijalankan oleh individu atau keluarga sehingga skala ekonominya kecil dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan di Pekanbaru lebih menekankan pada kuantitas pelaku usaha ketimbang kualitas dan kapasitas usahanya.

Tabel II.34 Rasio Kewirausahaan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tahun	Total Wirausaha (A)	Pekerja Non-Wirausaha (B)	Rasio (A:B)	Rasio
2020	153.446	354.171 (507.617 – 153.446)	153.446 : 354.171	1 : 2,31
2021	144.661	347.693 (492.354 – 144.661)	144.661 : 347.693	1 : 2,40
2022	174.200	359.433 (533.633 – 174.200)	174.200 : 359.433	1 : 2,06
2023	149.203	314.864 (464.067 – 149.203)	149.203 : 314.864	1 : 2,11
2024	173.129	313.705 (486.834 – 173.129)	173.129 : 313.705	1 : 1,81

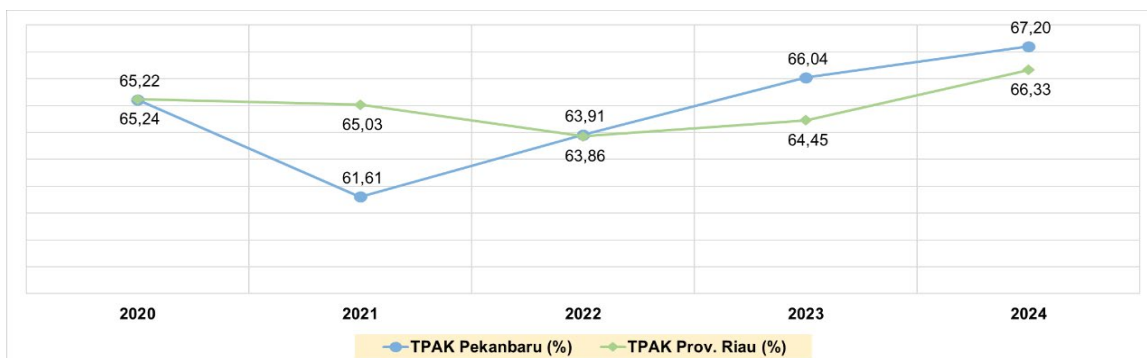
Sumber: Kota Pekanbaru dalam Angka 2025

Risiko eksternal seperti pandemi juga memperlihatkan kerentanan struktur usaha di kota ini. Usaha dengan buruh tetap mengalami tekanan lebih besar akibat tingginya beban operasional, sementara usaha mandiri justru tumbuh karena relatif

lebih fleksibel dalam menghadapi pembatasan aktivitas. Pemulihan yang terjadi pada periode berikutnya lebih banyak ditopang oleh usaha mandiri, namun belum diikuti dengan penguatan usaha formal. Hal ini menandakan bahwa ketahanan kewirausahaan Kota Pekanbaru masih bertumpu pada sektor informal dengan skala usaha yang kecil dan produktivitas rendah.

2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Mengukur Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi sangat penting dalam analisis kesejahteraan sosial. TPAK menjadi ukuran ketenagakerjaan untuk menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dari penduduk usia kerja. TPAK diukur di daerah untuk mengetahui persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam seluruh aktivitas perekonomian daerah. Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi indikator penting dalam kegiatan perekonomian karena menjadi ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesediaan tenaga kerja yang diperlukan untuk keperluan perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekanbaru mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Partisipasi angkatan kerja Kota Pekanbaru pada tahun 2020 tercatat sebesar 65,24%, turun menjadi 61,61% pada tahun 2021, selanjutnya meningkat hingga tahun 2024 menjadi 67,20%. Selama periode 2023-2024, Kota Pekanbaru berhasil meningkatkan capaian TPAKnya berada diatas capaian TPAK Provinsi Riau.

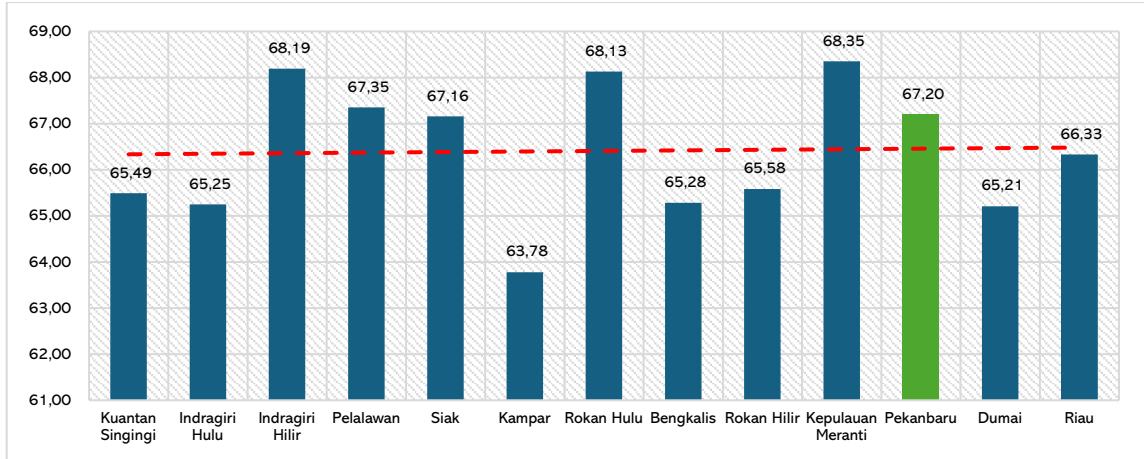


Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 (%)

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekanbaru berada pada posisi ke 5 setelah Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan pada tahun 2024. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dipengaruhi oleh struktur demografi suatu wilayah, dimana tingkat kelahiran yang tinggi dapat menciptakan populasi di bawah usia kerja. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang diperlukan dalam perekonomian dan juga merupakan faktor penting dalam mengerjakan pembangunan. Beberapa faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja

yang meningkat adalah perubahan struktur penduduk menurut usia, tingkat upah dan tingkat pendidikan. Peningkatan jumlah tenaga kerja disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Proporsi penduduk usia kerja pada tahun 2024 sebanyak 69,39% dari total jumlah penduduk, meningkat dari tahun 2020 sebesar 69,20%.

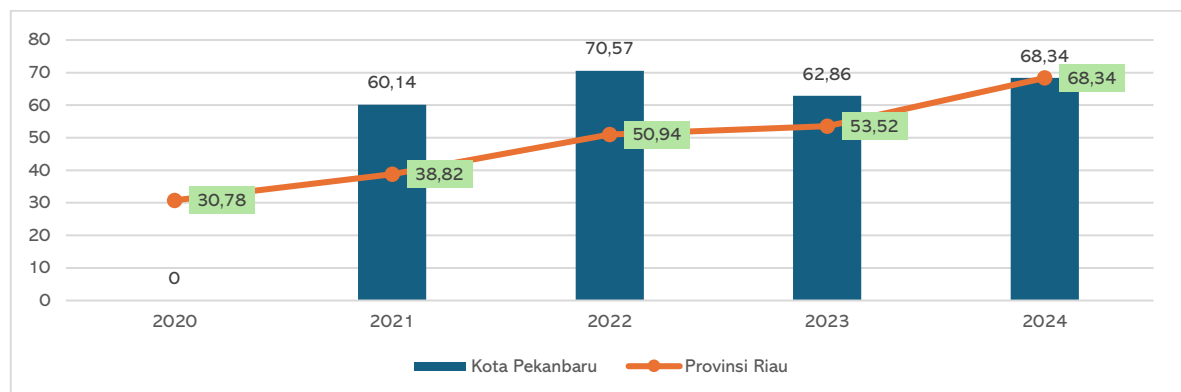


Sumber: BPS Riau, 2025

Grafik II.40. Posisi Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Tahun 2024

2.3.2.5. Indeks Inovasi Daerah

Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kota Pekanbaru selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup fluktuatif namun cenderung positif. Pada tahun awal, nilai indeks masih berada pada posisi yang relatif rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Kondisi ini mencerminkan bahwa kemampuan inovasi daerah, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, maupun inisiatif kebijakan, masih menghadapi keterbatasan dalam aspek sumber daya dan kelembagaan.



Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2025

Grafik II.41. Indeks Inovasi Daerah Kota Pekanbaru tahun 2020-2024

Memasuki tahun 2021 hingga 2022, terjadi lonjakan signifikan pada capaian indeks inovasi Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah

kota dalam mendorong transformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Kenaikan tajam tersebut juga selaras dengan dorongan kebijakan nasional yang menekankan pentingnya inovasi sebagai salah satu indikator kinerja pemerintahan daerah.

Namun demikian, pada tahun 2023 capaian indeks mengalami sedikit penurunan. Fenomena ini dapat dianalisis sebagai dampak dari beberapa kendala implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, adaptasi teknologi yang belum merata di seluruh perangkat daerah, serta tantangan koordinasi dalam menjaga kesinambungan program inovatif. Meskipun demikian, indeks kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2024, sehingga secara keseluruhan tren lima tahun tetap positif.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau, Indeks Inovasi Daerah Kota Pekanbaru secara konsisten berada pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Pekanbaru memiliki peran sebagai lokomotif inovasi di tingkat provinsi, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Keunggulan ini memberikan peluang bagi Pekanbaru untuk menjadi model praktik inovasi yang dapat direplikasi oleh daerah lain di Riau.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi Hijau di Kota Pekanbaru diposisikan sebagai arus utama pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemerataan kesejahteraan sosial melalui strategi rendah karbon. Pendekatan ini diarahkan untuk mendorong masuknya investasi hijau, penyediaan infrastruktur berkelanjutan, serta penciptaan pekerjaan dan keterampilan hijau sehingga tercapai keseimbangan antara daya saing ekonomi dan ketahanan ekologis kota.

Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan administrasi Provinsi Riau, Pekanbaru memberi kontribusi signifikan terhadap capaian Indeks Ekonomi Hijau (IEH) provinsi. Kinerja IEH Riau dalam beberapa tahun terakhir berada pada tingkat menengah, dengan kekuatan pada ketenagakerjaan, harapan hidup, produktivitas perikanan budidaya, produktivitas tenaga kerja industri, intensitas energi final, dan kualitas udara (parameter NO_2). Di sisi lain, masih terdapat kelemahan pada kualitas air permukaan (BOD), penurunan emisi kumulatif, serta produktivitas tenaga kerja di sektor jasa. Pola ini relevan bagi Pekanbaru yang ekonominya didominasi sektor jasa dan perdagangan, bertumpu pada jaringan logistik perkotaan, dan memiliki tantangan spesifik pada kualitas air Sungai Siak beserta anak sungainya, emisi transportasi, serta efisiensi energi bangunan.

Dari sisi lingkungan, tantangan utama kota adalah menekan beban pencemar ke badan air dan mempercepat penurunan emisi. Beban limbah domestik dan sedimen yang terbawa sistem drainase menahan perbaikan kualitas air, sementara emisi transportasi perkotaan memerlukan kebijakan mobilitas yang lebih berkelanjutan. Modal positif yang perlu dijaga ialah kualitas udara yang relatif baik untuk parameter NO_2 , yang memberikan ruang bagi upaya pengurangan partikulat dan gas rumah kaca tanpa mengganggu aktivitas ekonomi. Dari sisi ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor jasa menjadi agenda penting mengingat sektor ini penyumbang utama PDRB. Peluang transformasi berada pada berkembangnya “jasa hijau” seperti logistik rendah emisi, layanan digital, konsultasi energi, pariwisata sungai dan ruang terbuka hijau, serta industri pengolahan yang hemat energi. Dari sisi sosial, peluang penciptaan green jobs terbuka lebar; tantangannya memastikan kesesuaian keterampilan mulai dari audit energi, pengelolaan limbah, agritech-perikanan, retrofit bangunan, hingga kendaraan listrik—melalui skema pelatihan dan sertifikasi yang terstandar.

2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan pilar penting dalam mendorong daya saing daerah di era teknologi dan disrupsi informasi. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024, Kota Pekanbaru mencatat skor 47,77, yang menjadikannya sebagai wilayah dengan nilai IMDI tertinggi di Provinsi Riau, sekaligus masuk dalam kategori “Tinggi” bersama Rokan Hilir (47,71) dan Indragiri Hilir (47,29). Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kesiapan Kota Pekanbaru dalam mendukung masyarakat digital sudah berada pada level yang relatif maju di tingkat provinsi.

Dari sisi komponen infrastruktur dan ekosistem digital, Pekanbaru memperoleh skor tertinggi sebesar 68,43, jauh melampaui kabupaten/kota lainnya. Hal ini menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur TIK, jaringan internet, dan aksesibilitas perangkat digital di Pekanbaru sudah sangat memadai dan relatif merata. Keunggulan ini menjadi fondasi utama dalam mendukung tumbuhnya ekosistem digital, baik dalam layanan pemerintahan, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi berbasis teknologi.

Pada aspek keterampilan digital, Pekanbaru mencatat skor 59,36, menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan internet berada pada tingkat menengah-tinggi. Meskipun belum setinggi daerah seperti Indragiri Hilir (69,02) atau Kampar (67,97), capaian ini menunjukkan adanya kesiapan sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Hal ini mencerminkan keberhasilan sebagian program pelatihan digital yang

telah diimplementasikan oleh pemerintah dan swasta, serta partisipasi generasi muda dalam dunia digital.

Sementara itu, pada aspek pemberdayaan digital, Pekanbaru mencatat skor 28,15, yang masih berada pada tingkat sedang. Skor ini menandakan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi, kewirausahaan digital, dan inisiatif berbasis komunitas masih memiliki ruang peningkatan. Diperlukan intervensi lebih lanjut untuk mendorong partisipasi aktif UMKM, pelaku industri kreatif, dan kelompok rentan agar mampu memanfaatkan platform digital sebagai alat pemberdayaan ekonomi.

Tabel II.34. Indeks Masyarakat Digital Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur & Ekosistem	Keterampilan Digital	Pemberdayaan	Pekerjaan	Nilai IMDI 2024	Kategori
1	Bengkalis	54,46	63,84	31,94	35,84	46,94	Cukup
2	Indragiri Hilir	52,55	69,02	29,64	36,56	47,29	Tinggi
3	Indragiri Hulu	53,40	58,86	24,70	33,40	42,62	Cukup
4	Kampar	54,60	67,97	25,14	34,24	45,71	Cukup
5	Kepulauan Meranti	53,79	67,15	26,68	33,37	45,63	Cukup
6	Kota Dumai	57,94	56,39	27,53	34,74	44,17	Cukup
7	Kota Pekanbaru	68,43	59,36	28,15	34,66	47,77	Tinggi
8	Kuantan Singingi	54,32	57,73	22,07	33,33	41,70	Cukup
9	Pelalawan	49,86	58,80	21,50	33,90	40,44	Cukup
10	Rokan Hilir	52,83	66,79	31,32	35,37	47,71	Tinggi
11	Rokan Hulu	54,10	59,18	27,50	34,12	43,61	Cukup
12	Siak	53,62	53,00	20,68	31,49	39,48	Cukup

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2025

Pada indikator pekerjaan digital, Pekanbaru memperoleh skor 34,66, menunjukkan bahwa peluang kerja berbasis teknologi informasi mulai tumbuh namun belum merata. Pekerjaan di sektor digital seperti e-commerce, content creation, teknologi finansial, dan pengelolaan data masih didominasi kelompok tertentu dan perlu diperluas ke berbagai lapisan masyarakat melalui pelatihan, inkubasi bisnis digital, dan penyediaan akses modal.

Secara keseluruhan, capaian transformasi digital Kota Pekanbaru berada pada posisi yang relatif unggul dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Keunggulan infrastruktur dan keterampilan digital menjadi modal kuat dalam mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor. Namun, aspek pemberdayaan dan akses kerja digital masih menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan strategis dan kolaboratif. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memperluas jangkauan program literasi digital berbasis komunitas, memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan perguruan tinggi dalam pengembangan talenta digital, serta mendorong

transformasi UMKM dan industri lokal menuju digitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan faktor penting dalam memperkuat daya saing dan ketahanan perekonomian Kota Pekanbaru. Sebagai ibu kota Provinsi Riau sekaligus pusat perdagangan dan jasa, Pekanbaru memiliki posisi strategis dalam arus barang, jasa, dan investasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Perkembangan teknologi, keterhubungan infrastruktur, serta keterbukaan pasar menjadikan perekonomian Pekanbaru semakin terintegrasi dengan dinamika ekonomi yang lebih luas.

Namun demikian, integrasi ini juga membawa tantangan, terutama terkait dengan ketergantungan pada impor barang dan jasa, perubahan struktur pertumbuhan ekonomi, serta perlunya penguatan sektor produksi berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran investasi, perdagangan, dan kontribusi ekspor-impor menjadi kunci untuk menilai sejauh mana perekonomian Pekanbaru mampu beradaptasi sekaligus mengambil manfaat dari integrasi ekonomi domestik dan global.

Dalam konteks tersebut, dua indikator utama yang perlu diperhatikan adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai cerminan dari investasi produktif, serta Net Ekspor Barang dan Jasa sebagai gambaran posisi perdagangan daerah. Keduanya menjadi tolok ukur penting dalam menilai kapasitas Pekanbaru untuk memperkuat struktur ekonominya, meningkatkan daya saing, serta menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

2.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Pekanbaru pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Nilai PMTB tercatat sebesar Rp96,58 triliun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp130,27 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur, perumahan, bangunan, mesin, serta peralatan yang berfungsi memperkuat kapasitas produksi daerah. Di sisi lain, PDRB Kota Pekanbaru juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari Rp115,49 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp171,31 triliun pada tahun 2024.

Tabel II.35. PMTB, PDRB dan Persentase PMBTB Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tahun	PMTB (Juta Rp)	PDRB (Juta Rp)	Persentase PMTB
2020	96.579,18	115.486,90	83,63%
2021	105.192,02	126.525,25	83,14%
2022	116.404,12	144.559,27	80,52%
2023	124.332,59	159.960,67	77,73%

Tahun	PMTB (Juta Rp)	PDRB (Juta Rp)	Persentase PMTB
2024	130.271,48	171.306,52	76,05%

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2025

Meskipun nilai nominal PMTB terus meningkat, kontribusinya terhadap PDRB justru menurun. Pada tahun 2020, PMTB menyumbang 83,63% dari PDRB, tetapi persentase tersebut menurun secara bertahap hingga mencapai 76,05% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PMTB, sehingga struktur pertumbuhan ekonomi Pekanbaru semakin bergeser dari basis investasi ke arah yang lebih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa.

Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan struktur pertumbuhan ekonomi. Peningkatan konsumsi yang dominan memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun berkurangnya porsi kontribusi investasi dapat melemahkan fondasi pembangunan jangka panjang. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, terdapat risiko menurunnya kapasitas produksi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru, serta berkurangnya daya saing daerah.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan langkah strategis untuk memperkuat embali peran investasi dalam pembangunan Kota Pekanbaru. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberian insentif bagi investor, serta pengembangan kawasan industri dan perdagangan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih seimbang, berkelanjutan, dan mampu memperkuat daya saing daerah.

2.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Pekanbaru selama periode 2020–2024 menunjukkan posisi yang konsisten negatif. Nilai net ekspor tercatat sebesar Rp -54,63 triliun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp -56,45 triliun pada tahun 2024, menandakan bahwa impor barang dan jasa masih jauh lebih besar dibandingkan ekspor. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pekanbaru lebih berperan sebagai pusat konsumsi dan distribusi dibandingkan sebagai daerah basis produksi untuk pasar ekspor.

Tabel II.36. Persentase Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tahun	Net Ekspor Barang dan Jasa	PDRB (Juta Rp)	Persentase Net Ekspor Barang dan jasa
2020	-54.629,68	115.486,90	-47,30%
2021	-53.674,15	126.525,25	-42,42%
2022	-55.389,90	144.559,27	-38,32%
2023	-55.707,80	159.960,67	-34,83%

Tahun	Net Ekspor Barang dan Jasa	PDRB (Juta Rp)	Persentase Net Ekspor Barang dan jasa
2024	-56.456,12	171.306,52	-32,96%

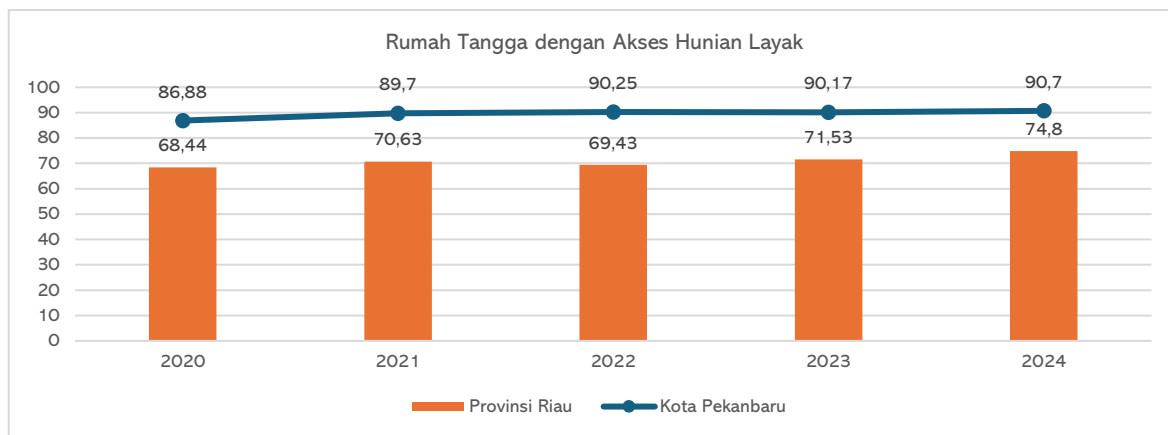
Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2025

Meskipun demikian, secara proporsional terhadap PDRB, kontribusi negatif net ekspor mengalami penurunan dari -47,30 persen pada tahun 2020 menjadi -32,96 persen pada tahun 2024. Penurunan persentase ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang cukup pesat mampu mengurangi beban defisit perdagangan dalam struktur PDRB. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap impor tetap menjadi tantangan bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sektor produksi unggulan, peningkatan daya saing industri pengolahan berbasis potensi lokal, serta dorongan bagi UMKM agar dapat menembus pasar ekspor. Dengan strategi tersebut, diharapkan peran net ekspor dapat menjadi lebih positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru ke depan.

2.3.6. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kota Pekanbaru selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan hunian layak tercatat sebesar 68,44 persen, kemudian meningkat menjadi 70,63 persen pada tahun 2021 dan 69,43 persen pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, tren secara umum tetap mengarah positif, dengan capaian 71,53 persen pada tahun 2023 dan mencapai 74,8 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap perumahan yang memenuhi standar kelayakan.



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru

Grafik II.42. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau, capaian Kota Pekanbaru masih lebih rendah. Provinsi Riau secara konsisten mencatatkan persentase di atas 86 persen, dengan tren yang relatif stabil dari 86,88 persen pada tahun 2020 hingga mencapai 90,7 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan di Pekanbaru, kesenjangan akses hunian layak dengan rata-rata provinsi masih cukup signifikan.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kebijakan perumahan di Kota Pekanbaru perlu terus diperkuat agar mampu memperkecil kesenjangan dengan rata-rata provinsi. Upaya yang dapat ditempuh antara lain melalui peningkatan program perumahan bersubsidi, pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan regulasi tata ruang dan kualitas lingkungan permukiman. Dengan langkah tersebut, diharapkan akses masyarakat Kota Pekanbaru terhadap hunian layak semakin meningkat dan setara dengan capaian rata-rata provinsi.

2.3.6.2. Daya Saing Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

Daya saing fasilitas wilayah dan infrastruktur merupakan salah satu aspek dalam melihat aspek daya saing di suatu daerah. Kondisi kelengkapan terhadap fasilitas wilayah dan infrastruktur di suatu daerah, tentunya dapat memberi daya dukung terhadap peningkatan perekonomian suatu daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Beberapa aspek dalam daya saing fasilitas wilayah dan infrastruktur Kota Pekanbaru dapat dilihat melalui ketersediaan listrik, kondisi panjang jalan, Jumlah Orang/Barang Melalui Bandara dan jumlah penginapan/hotel.

2.3.6.2.1. Ketersediaan Listrik

Listrik memegang peranan yang sangat vital sebagai sumber penerangan dan energi lainnya bagi penggerak sektor perekonomian di suatu daerah. Sehingga ketersediaan listrik merupakan salah satu komponen dalam mempengaruhi daya saing suatu daerah.

Tabel II.37. Produksi Listrik di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024 (Kwh)

Penggunaan Listrik	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga	75.292.023	70.506.845	76.645.371	96.965.323	77.565.726
Bisnis	79.195.597	43.944.035	47.964.135	59.331.581	51.688.831
Pabrik	17.349.346	4.024.618	17.507.177	21.170.443	5.364.785
Fasilitas Sosial	8.426.225	9.318.344	10.511.062	13.782.385	12.027.089
Penerangan Jalan	3.838.597	3.374.474	3.604.916	4.276.066	2.463.941
Kantor Pemerintahan	4.500.324	4.785.704	4.815.403	5.878.849	7.595.129
Hilang	22.453.633	-	-	-	-
Dipakai sendiri	1.452.456	-	-	-	-
Multiguna	-	-	-	-	-
Total Produksi Listrik	212.508.291	135.954.020	161.048.064	201.404.647	156.705.501

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2025

Total penggunaan listrik selama tahun 2024 di Kota Pekanbaru turun dari tahun sebelumnya menjadi 156.705.501 Kwh, dimana sebahagian besar dipergunakan oleh rumah tangga dan bisnis yaitu sebesar 77.565.726 Kwh dan bisnis sebesar 51.688.831 Kwh.

2.3.6.2.2. Kondisi Panjang Jalan

Selain listrik, kondisi jalan merupakan salah satu komponen infrastruktur pendukung dalam menggerakkan roda perekonomian. Meningkatnya perekonomian di suatu daerah dapat menjelaskan bahwa suatu daerah telah memiliki aspek daya saing daerah yang tinggi. Kondisi panjang jalan di Kota Pekanbaru jika di rinci dari jenis permukaan telah menggunakan aspal. Jenis permukaan aspal memiliki persentase yang lebih besar di bandingkan jenis lainnya. Meskipun demikian, jenis jalan yang memiliki permukaan tanah masih besar di tahun 2019-2022. Kondisi panjang jalan di Kota Pekanbaru berkurang seiring dengan beberapa ruas jalan yang telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Riau. Jenis Permukaan aspal yang mendominasi Kota Pekanbaru diharapkan dapat mempermudah konektivitas masyarakat dalam aktivitas perekonomian sehingga meningkatkan daya saing di Kota Pekanbaru.

Tabel II.38. Kondisi Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023 (km)

Jenis Permukaan Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
Aspal	867,44	875,11	875,11	843,31	147,24
Kerikil	76,67	77,05	77,05	97,79	-
Tanah	302,48	295,2	295,2	199,67	-
Beton	31,31	30,54	30,54	137,13	14,33
Total	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	161.57.00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, 2024

Rencana meningkatkan kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) Kota Pekanbaru terus dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan dan preservasi untuk menjaga kualitas infrastruktur fisik jalan. Peningkatan kemantapan jalan Kota Pekanbaru ditargetkan untuk mendukung Konektivitas transportasi Kota Pekanbaru yang memungkinkan pergerakan orang, barang, dan jasa secara lancar, aman, dan efisien serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana lokasi peningkatan kemantapan jalan Kota Pekanbaru diarahkan pada dukungan fungsi kawasan layanan dasar untuk masyarakat seperti Pendidikan, Kesehatan, Kawasan Perdagangan dan Jasa (pasar) dan lainnya serta jalur yang sering dilewati masyarakat dalam mendukung mobilitas sehari-hari yang merupakan kewenangan jalan Kota Pekanbaru.

2.3.6.2.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Bandara

Kelancaran transportasi angkutan barang dan penumpang merupakan salah satu variabel untuk melihat kualitas infrastruktur dan kelengkapan sarana dan

prasarana di suatu wilayah. Kelancaran yang terjadi tentu akan berdampak kepada bergeraknya roda perekonomian melalui bergeraknya sektor barang dan jasa. Peningkatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah tentunya dapat menggambarkan bagaimana kondisi daya saing di suatu daerah. Sehingga jumlah keberangkatan sarana transportasi serta jumlah penumpang dan barang pada suatu pelabuhan udara bisa menjadi ukurannya.

Selama periode 2019–2024, jumlah keberangkatan dan kedatangan pesawat, jumlah penumpang, jumlah bagasi dan jumlah barang di pelabuhan udara di Kota Pekanbaru mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan pada tahun 2020 dan 2021 yang diakibatkan oleh kebijakan pembatasan penerbangan selama pandemi COVID-19. Meskipun demikian, di tahun 2022, 2023 dan 2024 kondisi sudah pulih dan kembali meningkat.

Tabel II.39. Perkembangan Jumlah Penumpang, Bagasi dan Barang Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2019-2024

Uraian		Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pesawat (unit)							
Domestik	Datang	12.026	7.212	6.318	8.760	9.789	9.519
	Berangkat	12.040	7.225	6.308	8.755	9.769	9.521
Internasional	Datang	1.701	487	49	322	1.491	1.845
	Berangkat	1.693	483	48	324	1.479	1.850
Jumlah	Datang	13.727	7.699	6.367	9.082	11.280	11.364
	Berangkat	13.733	7.708	6.356	9.079	11.248	20.885
Penumpang (Orang)							
Domestik	Datang	1.903.399	1.410.644	688.036	1.089.765	1.186.891	1.228.762
	Berangkat	1.899.363	1.377.503	655.501	1.109.687	1.196.591	1.245.780
Internasional	Datang	142.235	159.457	36.047	20.503	162.607	232.559
	Berangkat	147.529	163.069	33.136	21.890	169.534	237.197
Jumlah	Datang	2.045.634	1.570.101	724.083	1.110.268	1.349.498	1.461.321
	Berangkat	2.046.892	1.540.572	688.637	1.131.577	1.366.125	2.707.101
Bagasi (Kg)							
Domestik	Bongkar	13.845.547	8.134.686	3.838.740	8.732.161	9.156.112	9.697.583
	Muat	12.484.005	7.035.211	3.159.405	8.017.415	8.226.648	9.105.397
Internasional	Bongkar	1.510.927	1.489.324	386.240	291.270	1.807.411	2.462.249
	Muat	1.005.072	963.936	199.320	183.517	1.212.893	1.693.072
Jumlah	Bongkar	15.356.474	9.624.010	4.224.980	9.023.431	10.963.523	12.159.832
	Muat	13.489.077	7.999.147	3.358.725	8.200.932	9.439.541	10.798.469
Kargo (Kg)							
Domestik	Bongkar	16.870.886	13.122.907	13.282.965	9.511.405	10.772.308	14.033.116
	Muat	5.844.896	5.007.473	4.666.491	4.636.086	5.023.992	6.246.012
Internasional	Bongkar	16.689	22.079	8.162	129	213.182	21.133
	Muat	28.022	533.708	84.953	-	97.277	8.310
Jumlah	Bongkar	16.887.575	13.144.986	13.291.127	9.511.534	10.985.490	14.054.249

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Muat	5.912.918	5.541.181	4.751.444	4.636.086	5.121.269	6.254.322

Sumber: Statistik Angkutan Udara Provinsi Riau 2025

2.3.6.2.4. Penginapan / Hotel

Komponen lainnya yang dapat dijadikan variabel yang dapat menggambarkan daya saing fasilitas dan infrastruktur suatu daerah adalah jumlah penginapan atau hotel. Perkembangan jumlah penginapan atau hotel yang ada di suatu daerah dapat menggambarkan kemajuan aktifitas perekonomian di suatu daerah. Meningkatnya aktifitas perekonomian suatu daerah, dapat memperlihatkan kondisi daya saing suatu daerah.

Tabel II.40. Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur yang Tersedia di Kota Pekanbaru

Fasilitas Hotel	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Hotel Berbintang					
Akomodasi	66	66	66	67	70
Kamar	6.180	6.379	6.470	6.358	6.727
Tempat Tidur	8.692	8.900	9.185	9.032	9.480
Hotel Non Berbintang					
Akomodasi	82	84	75	103	132
Kamar	2.700	2.684	2.609	2.487	2.440
Tempat Tidur	3.573	3.675	3.455	2.959	2.974
Jumlah					
Akomodasi	148	150	141	170	202
Kamar	8.880	9.063	9.079	8.845	9.167
Tempat Tidur	12.265	12.575	12.640	11.991	12.454

Sumber: Riau Dalam Angka, 2024

Dari data diatas, dapat dilihat peningkatan akomodasi, jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia di Kota Pekanbaru. Penurunan terjadi di tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak turunnya perekonomian yang diakibatkan oleh keterbatasan aktifitas disebabkan pandemi COVID-19. Meskipun demikian, di tahun 2023 menunjukkan peningkatan terhadap akomodasi, jumlah kamar dan tempat tidur tersebut. Hal ini dapat menjelaskan kondisi yang berangsur normal serta peningkatan ini menunjukkan daya saing Kota Pekanbaru yang cukup tinggi karena terus bertumbuhnya kegiatan perhotelan ini.

2.3.6.3. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.6.3.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Pekanbaru mengalami fluktuasi pada periode 2020–2024. Jumlah kejahatan yang dilaporkan meningkat tajam pada 2024, mencapai 6.005 kasus, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 614 hingga 1.542 kasus. Risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk juga meningkat menjadi 605 pada 2024 setelah mengalami tren penurunan pada 2021–2023. Sementara itu, persentase penyelesaian kejahatan menurun hingga tahun 2024 menjadi 35,1%. Peningkatan jumlah kejahatan serta menurunnya efektivitas penyelesaiannya pada 2024 dapat berdampak terhadap perkembangan investasi di Kota Pekanbaru, sehingga diperlukan upaya strategis dalam meningkatkan keamanan dan kepastian hukum kedepannya.

Tabel II.41. Angka Kriminalitas Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	614	1.542	1.401	1.401	6.005
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	134	24	21	21	605
Persentase Penyelesaian Kejahatan	63,52	75,16	87,87	68,53	35,1

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025

2.3.6.3.2. ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output. Setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Berikut adalah perkembangan nilai ICOR Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023, yaitu:

Tabel II.42. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Pekanbaru	13,71	-17,23	15,87	12,26	13,42

Sumber: BPS Riau, 2024 (diolah)

Nilai ICOR yang negatif dapat diartikan bahwa investasi yang dilakukan belum menghasilkan output yang optimal. Sedangkan nilai ICOR yang positif dapat diartikan bahwa investasi yang dilakukan sudah mulai menghasilkan output yang optimal pada tahun tersebut. Untuk itu nilai ICOR menjadi penting sebagai dasar pertimbangan calon investor dalam melakukan investasi di suatu daerah.

Pada tabel di atas, Kota Pekanbaru menunjukkan fluktuasi yang cukup variatif dalam ICOR dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2020, ICOR mengalami

penurunan yang tajam -17,23, Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ICOR mulai menunjukkan pemulihan, meskipun dengan angka yang tidak stabil 13,42 pada tahun 2023.

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Stabilitas ini tidak hanya berkaitan dengan pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan eksternal, tetapi juga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran secara efektif.

2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Kinerja penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru selama periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan secara nominal, meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih relatif stabil. Pada tahun 2020 pajak daerah tercatat sebesar Rp537,83 miliar dengan rasio terhadap PDRB sebesar 0,47 persen. Pada tahun berikutnya nilai pajak meningkat menjadi Rp587,50 miliar, namun rasio pajak justru sedikit menurun menjadi 0,46 persen karena pertumbuhan PDRB lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ekspansi ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kinerja perpajakan daerah.

Tabel II.43. Rasio Pajak daerah Terhadap PDRB Kota Pekanbaru 2020-2024

Tahun	Pajak (Miliar Rp)	PDRB (Miliar Rp)	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)
2020	537,83	115.486,90	0,47%
2021	587,50	126.525,25	0,46%
2022	719,42	144.559,27	0,50%
2023	784,91	159.960,67	0,49%
2024	822,84	171.306,52	0,48%

Sumber: LRA Kota Pekanbaru dan Pekanbaru dalam Angka 2025

Memasuki tahun 2022, penerimaan pajak meningkat signifikan hingga Rp719,42 miliar yang mendorong kenaikan rasio pajak terhadap PDRB menjadi 0,50 persen. Lonjakan ini dapat dimaknai sebagai dampak dari upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang disertai perbaikan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pemungutan oleh pemerintah daerah. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 meskipun penerimaan pajak terus meningkat masing-masing menjadi Rp784,91 miliar dan Rp822,84 miliar, rasio pajak terhadap PDRB justru kembali menurun ke 0,49 persen dan 0,48 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah.

Fenomena ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Kota Pekanbaru mengalami perkembangan positif, namun peningkatan kapasitas fiskal melalui pajak

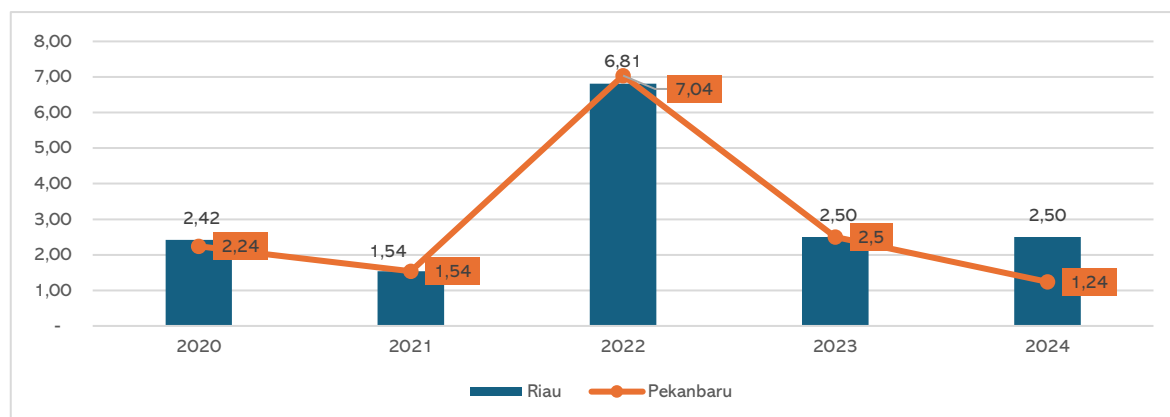
daerah belum optimal. Rendahnya rasio pajak terhadap PDRB menegaskan perlunya strategi peningkatan kemandirian fiskal dengan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Hal ini dapat ditempuh melalui pembaruan data objek dan subjek pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, serta perluasan basis penerimaan dari sektor-sektor yang masih berpotensi. Di sisi lain, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga harus diperkuat melalui pelayanan pajak yang transparan dan berbasis digital, serta edukasi publik mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, meskipun rasio pajak daerah terhadap PDRB masih berada di bawah satu persen, tren peningkatan nilai nominal penerimaan pajak menunjukkan adanya peluang yang besar untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Pekanbaru di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

2.3.7.2. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Inflasi dengan melihat perkembangan harga atau statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam bingkai Indeks Harga Konsumen (IHK), yang bertujuan untuk mengetahui perubahan harga dari setiap kelompok tetap barang/ jasa yang pada umunya dikonsumsi masyarakat.

Perkembangan inflasi Kota Pekanbaru selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi dan mencerminkan kerentanan perekonomian kota terhadap faktor eksternal maupun internal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Pekanbaru masih rentan terhadap gejolak kesehatan global dan pelemahan aktivitas konsumsi rumah tangga.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2025

Perkembangan inflasi Kota Pekanbaru pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi tercatat sebesar 2,24% pada tahun 2020, turun menjadi 1,54% pada tahun 2021, namun kembali meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 7,04%. Naiknya inflasi tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yang cukup signifikan disebabkan oleh peningkatan harga kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau hampir disetiap bulan, selain itu kelompok pengeluaran yang memberikan andil cukup tinggi terhadap inflasi Kota Pekanbaru adalah transportasi diatas 7 persen bahkan Provinsi Riau diatas 16 persen. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Selanjutnya inflasi Kota Pekanbaru turun hingga tahun 2024 menjadi 1,24%.

Lonjakan inflasi yang terjadi pada tahun 2022 hingga melampaui rata-rata provinsi menjadi gejala utama kerentanan terhadap faktor eksternal, khususnya kenaikan harga energi, pangan global, serta dampak penyesuaian harga BBM. Hal ini mengungkapkan kelemahan mendasar dalam sistem distribusi dan ketergantungan pasokan kebutuhan pokok dari luar daerah. Situasi ini juga menandakan bahwa ketahanan pangan lokal dan efisiensi logistik Kota Pekanbaru masih belum optimal dalam menahan guncangan harga.

Pada tahun 2023–2024, inflasi berhasil ditekan hingga berada pada kisaran yang rendah, bahkan pada 2024 inflasi Kota Pekanbaru tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Keberhasilan ini mengindikasikan adanya efektivitas kebijakan pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah daerah bersama TPID. Namun, inflasi yang terlalu rendah juga perlu diwaspadai karena dapat mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Kondisi ini menjadi tanda adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan inflasi. Langkah-langkah yang dilakukan terbukti efektif menurunkan angka Inflasi. Upaya yang akan dilakukan diantaranya, mengadakan pasar murah, penanaman gerakan menanam cabai di pekarangan rumah. Kemudian, juga melakukan Sidak ke pasar distributor dan Bulog serta memberdayakan perusahaan daerah PT Sarana Pangan Madani untuk bekerja sama antara daerah dalam rangka mendapatkan komoditas yang bisa mempengaruhi kenaikan inflasi. Kota Pekanbaru telah meluncurkan Gerakan Tanam (Gertam) cabai dan bawang merah di Lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi (siCANTIG), Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat pada tanggal 15 Oktober 2022. Gerakan tanam Cabai dan Bawang Merah ini diamanahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan terjadi kegoncangan

ekonomi. Dengan memanfaatkan Lahan kosong untuk menanam kebutuhan sayuran yang setiap hari dibutuhkan. Pemko Pekanbaru juga sudah membuat surat edaran yang meminta seluruh ASN dan masyarakat untuk menanam cabai dan bawang merah di halaman rumah. Pemko dan DPRD ikut mengawal agar tidak tinggi, dengan membentuk Satuan Tugas yang mengawasi harga Barang Pokok di Pasar Rakyat. Dengan demikian, terdapat dua masalah utama yang perlu diperhatikan: (1) kerentanan inflasi terhadap gejolak eksternal akibat lemahnya ketahanan pangan dan distribusi, serta (2) risiko pelemahan permintaan domestik ketika inflasi turun terlalu rendah. Kedua hal tersebut menuntut strategi kebijakan yang terintegrasi, meliputi penguatan sistem ketahanan pangan lokal, perbaikan infrastruktur distribusi dan logistik, serta penguatan daya beli masyarakat agar inflasi tetap terkendali sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum Kota Pekanbaru pada periode 2020–2023 belum memiliki capaian yang terukur. Namun pada tahun 2024, Kota Pekanbaru berhasil meraih nilai indeks sebesar 86,4 dengan kategori Baik (BB). Pencapaian ini mencerminkan adanya komitmen nyata pemerintah kota dalam melaksanakan agenda reformasi hukum, khususnya terkait dengan penataan regulasi, peningkatan kepastian hukum, serta penguatan kelembagaan hukum di lingkungan pemerintahan daerah.

Tabel II.44. Indeks Reformasi Hukum Kota Pekanbaru 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	poin	Na	Na	Na	Na	86,4 (BB)

Sumber : Bagian Hukum Setda, 2025

Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengukuran baru dilakukan pada tahun terakhir periode RPJMD, kualitas reformasi hukum di Kota Pekanbaru sudah berada pada level yang cukup tinggi. Hal ini dapat dimaknai sebagai hasil dari serangkaian upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah, antara lain perbaikan tata

kelola peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, serta penguatan peran perangkat daerah yang menangani urusan hukum.

Dengan capaian ini, tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas reformasi hukum secara berkelanjutan. Upaya yang perlu diprioritaskan mencakup harmonisasi regulasi dengan kebijakan pusat dan provinsi, penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih, peningkatan kapasitas aparatur hukum, serta penguatan akses masyarakat terhadap keadilan. Pencapaian Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2024 dapat dijadikan pijakan penting bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menetapkan strategi pembangunan hukum yang lebih progresif dalam RPJMD 2025–2029, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

2.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pekanbaru pada periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun dengan arah peningkatan yang cukup menjanjikan. Pada tahun 2020, capaian indeks tercatat sebesar 2,17 poin yang menandakan masih terbatasnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada tahap awal. Setahun kemudian, pada 2021, nilai indeks melonjak signifikan menjadi 3,48 poin, sebuah capaian yang menggambarkan adanya langkah percepatan dalam membangun tata kelola pemerintahan digital melalui perbaikan infrastruktur, kebijakan internal, serta upaya integrasi layanan publik berbasis elektronik.

Tabel II.45. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pekanbaru dan Provinsi Riau 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Pekanbaru)	poin	2,17	3,48	2,83	3,42	3,85
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Riau)	Poin	3,51	2,55	3,00	3,01	3,75

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025

Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2022, nilai indeks menurun ke angka 2,83 poin yang mencerminkan masih adanya tantangan baik dari sisi konsistensi kebijakan, kesiapan sumber daya aparatur, maupun koordinasi antar perangkat daerah. Meskipun demikian, tren positif kembali terlihat pada tahun 2023 dengan capaian 3,42 poin dan semakin menguat pada tahun 2024 dengan nilai tertinggi mencapai 3,85 poin. Kenaikan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah berhasil melakukan pembelajaran institusional yang efektif, di mana hasil evaluasi dari periode sebelumnya mampu dijadikan dasar perbaikan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

Secara umum, perkembangan SPBE Kota Pekanbaru memperlihatkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan capaian indeks pada dua tahun terakhir menjadi bukti bahwa transformasi digital di Kota Pekanbaru semakin terkonsolidasi, baik dalam aspek kebijakan, perencanaan strategis, maupun penerapan layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Kondisi ini memberikan fondasi yang kokoh bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menetapkan target yang lebih ambisius dalam periode RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada konsistensi kinerja, penguatan integrasi sistem, serta perluasan akses layanan digital yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan terpercaya.

2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan ukuran kinerja pelayanan publik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berdasarkan beberapa aspek, antara lain aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, mekanisme konsultasi dan pengaduan, serta inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan.

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Pekanbaru mulai terukur pada tahun 2022 dengan nilai 4,65, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 4,03, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 4,25. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan pada satu periode, Pemerintah Kota Pekanbaru tetap mampu menjaga standar pelayanan publik pada kategori tinggi, serta melakukan upaya perbaikan dari hasil evaluasi sebelumnya. Peningkatan di tahun 2024 mengindikasikan adanya penguatan konsistensi dalam tata kelola pelayanan publik berbasis standar yang telah ditetapkan.

Tabel II.46. Pelayanan Publik Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik (Pekanbaru)	Angka			4,65	4,03	4,25
Indeks Pelayanan Publik (Riau)	Angka	3,61	3,68	3,62	4,04	4,12

Sumber : KemenPANRB RI, 2025

Sementara itu, capaian Indeks Pelayanan Publik Provinsi Riau pada periode yang sama juga mengalami tren positif. Pada tahun 2020 nilai indeks berada pada 3,61, sedikit meningkat menjadi 3,68 pada tahun 2021, lalu mengalami penurunan tipis ke 3,62 pada tahun 2022. Namun sejak 2023 indeks meningkat menjadi 4,04 dan mencapai 4,12 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan publik di Provinsi Riau mengalami penguatan, terutama dalam dua tahun

terakhir, dengan kualitas pelayanan yang konsisten meningkat dan berada dalam kategori baik.

Secara umum, perkembangan Indeks Pelayanan Publik baik di Pekanbaru maupun Provinsi Riau memperlihatkan adanya upaya yang konsisten dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perbaikan pada periode 2023–2024 menjadi momentum penting untuk terus memperkuat aspek inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur agar pelayanan publik ke depan semakin transparan, akuntabel, dan terpercaya.

2.4.1.4. Indeks Integritas Nasional

Perkembangan Indeks Integritas pada tingkat nasional dan Provinsi Riau sepanjang periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi prinsip-prinsip integritas di lingkungan pemerintahan. Pada tingkat nasional, capaian indeks sempat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga 2023, namun kembali menurun pada tahun 2024. Pola yang sama juga terlihat pada Provinsi Riau, di mana setelah mengalami kenaikan, nilai indeks integritas justru mengalami penurunan pada tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun reformasi birokrasi dan program pencegahan korupsi terus dijalankan, masih terdapat celah dalam menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan yang berorientasi pada integritas dan transparansi.

Tabel II.47. Indeks Integritas Nasional dan Provinsi Riau 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas Nasional	angka	n/a	72,43	71,94	70,97	71,53
Indeks Survei Integritas Provinsi Riau	angka	n/a	66,07	64,16	68,81	62,83

Lebih lanjut, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK memberikan gambaran yang lebih rinci terkait variasi capaian antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. Beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Dumai, dan Rokan Hulu menunjukkan capaian indeks integritas yang relatif tinggi, menandakan adanya kemajuan dalam konsolidasi tata kelola yang bersih dan akuntabel. Sebaliknya, masih terdapat daerah dengan capaian lebih rendah seperti Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mencerminkan masih adanya tantangan dalam penerapan kebijakan antikorupsi, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung budaya kerja berintegritas.

Tabel II.48. Indeks Survei Integritas Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kabupaten	Indeks Internal	Indeks Eksternal	Indeks Eksper	Indeks Integritas
1	Kuantan Singingi	71,54	83,16	57,68	63,12

No	Kabupaten	Indeks Internal	Indeks Eksternal	Indeks Eksper	Indeks Integritas
2	Indragiri Hulu	71,67	83,18	72,9	69,51
3	Indragiri Hilir	74,89	88,51	74,61	75,41
4	Pelalawan	69,67	88,25	74,01	72,13
5	Siak	72,53	87,37	72,36	71,5
6	Kampar	72,54	83,01	72,52	72,09
7	Rokan Hulu	73,8	88,16	76,16	73,81
8	Bengkalis	73,55	90,04	64,25	71,19
9	Rokan Hilir	67,79	87,11	72,05	71,52
10	Kepulauan Meranti	72,49	87,85	68,49	69,36
11	Pekanbaru	69,79	83,74	61,52	68,09
12	Dumai	74,69	87,96	71,21	75,18
Riau		70,41	88,93	55,72	62,83
Nasional		72,34	86,44	69,68	71,53

Sumber: Riau dalam angka 2025

Hasil survei juga memperlihatkan perbedaan antara indeks internal, eksternal, dan ekspektasi (eksper). Beberapa kabupaten/kota mampu menjaga penilaian eksternal pada tingkat yang tinggi, tetapi indeks internal dan ekspektasi publik tidak selalu sejalan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi masyarakat, pengalaman pengguna layanan, dan kondisi faktual di internal birokrasi. Dengan demikian, meskipun dari sisi regulasi dan kebijakan formal sudah tersedia, praktik implementasi di lapangan masih menghadapi kendala terutama dalam hal konsistensi, kepemimpinan yang berintegritas, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Secara keseluruhan, perkembangan indeks integritas di Provinsi Riau menegaskan pentingnya upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pencegahan korupsi, peningkatan transparansi, dan konsistensi reformasi birokrasi. Penurunan indeks di tahun 2024 perlu dijadikan peringatan bahwa integritas bukan hanya soal capaian sesaat, melainkan menuntut keberlanjutan, pengawasan yang ketat, serta internalisasi nilai integritas di semua level birokrasi. Hal ini menjadi tantangan strategis bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam periode RPJMD 2025–2029 untuk memperkuat budaya kerja antikorupsi, memperbaiki sistem pengendalian internal, serta memastikan implementasi kebijakan benar-benar berdampak pada perubahan perilaku aparatur dan kepuasan masyarakat.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau selama periode 2020–2024 tercatat selalu mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Perda yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan

optimal tanpa ada hambatan yang berarti dalam aspek implementasi. Konsistensi capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan seluruh regulasi yang telah disusun dapat dijalankan secara menyeluruh, baik yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun penegakan hukum di daerah.

Tabel II.49. Persentase Penegakan Perda Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Hukum Setda, 2025

Pencapaian penuh selama lima tahun berturut-turut juga memperlihatkan adanya mekanisme kelembagaan yang relatif solid, baik dari sisi koordinasi antarperangkat daerah maupun dukungan sumber daya hukum yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa regulasi daerah di Pekanbaru dan Provinsi Riau tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan, tetapi benar-benar dijalankan sesuai dengan fungsi pengaturan dan pengendalian yang diharapkan.

Namun demikian, meskipun capaian 100 persen menandakan ketaatan terhadap Perda, perlu dicermati bahwa indikator ini lebih menekankan pada aspek formal implementasi, bukan pada kualitas maupun dampak dari penegakan Perda tersebut terhadap masyarakat. Oleh karena itu, tantangan ke depan bukan sekadar menjaga angka capaian yang sudah maksimal, melainkan memastikan bahwa penegakan Perda benar-benar memberikan manfaat nyata, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta mampu menjawab permasalahan publik secara efektif.

Konsistensi ini menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan arah kebijakan hukum daerah pada periode RPJMD 2025–2029, khususnya dalam memperkuat kualitas regulasi, efektivitas implementasi, serta evaluasi dampak penegakan Perda terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.4.2.2. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan tidak menyimpang dari politik Indonesia ideologi bangsa. Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan suatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai

perkembangan demokrasi politik di Indonesia sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri merumuskan pengukuran IDI.

Tabel II.50. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau	75,21	76,86	75,66	73,64	75,55
Kebebasan	85,15	86,08	-	88,40	79,39
Hak-hak Politik	61,68	65,40	-	-	-
Lembaga Demokrasi	84,19	83,48	-	-	-
Kesetaraan	-	-	75,88	70,53	80,13
Kapasitas Lembaga Demokrasi	-	-	62,83	66,69	66,30
Peringkat Nasional	22	11	19	29	26

Sumber : RPJMD Provinsi Riau, 2025

IDI diukur khusus untuk Indonesia sehingga cara pengukurannya berbeda dengan indeks-indeks lain yang unit analisisnya negara. IDI 2009– 2020 telah menjadi rujukan pembangunan politik nasional dan daerah. IDI memiliki keunggulan berupa data dan informasi yang detail karena yang dikumpulkan adalah kasus dan data riil. Sejak tahun 2021 perhitungan IDI menggunakan metoda baru tetap menggunakan triangulasi, yakni mengombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Aspek yang dinilai dengan metoda baru yaitu : Aspek 1. Kebebasan dengan 7 indikator; Aspek 2. Kesetaraan dengan 7 indikator; Aspek 3. Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan 8 indikator.

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disajikan berdasarkan data Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2023 berkisar dengan kategori sedang memiliki nilai berkisar antara 60-80. Capaian IDI Provinsi Riau tahun 2023 mengalami kenaikan 1,91 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini disebabkan karena naiknya penilaian pada aspek kesetaraan. Pada aspek kesetaraan, indikator partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan merupakan indikator dengan skor tertinggi di Provinsi Riau. Secara rinci perkembangan IDI Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

2.4.2.3. Indeks Rasa Aman

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, rasa aman adalah rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Konsep ini sering digunakan

dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Beberapa dimensi pengukuran indeks rasa aman dapat dilihat melalui: (a) dimensi perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan; (b) dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial; (c) dimensi keamanan dan kekerasan. Untuk proporsi penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2014 – 2020 yang merasa aman di area tempat tinggalnya dapat dilihat pada tabel Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk berikut.

Tabel II.51. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, Kota Pekanbaru Tahun 2021–2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	1542	1401	1401	6005
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	24	21	21	605

Sumber : BPS Riau dalam angka, 2025

2.4.2.4. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Tingkat ketentraman dan ketertiban di Kota Pekanbaru dapat dilihat melalui data Laporan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan yang menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat 27 pelanggaran, yang meningkat menjadi 35 pelanggaran pada tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, angka pelanggaran sedikit menurun menjadi 30 dan 29, masing-masing. Meskipun ada penurunan di akhir periode, angka pelanggaran yang relatif stabil menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan keindahan di kota ini.

Tabel II.52. Laporan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Laporan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan	Laporan	27	35	35	30	29

Sumber : Satpol-PP Kota Pekanbaru, 2025

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau dalam lima tahun terakhir memperlihatkan tren perkembangan yang semakin positif. Pada awal periode, daya saing masih berada pada level yang relatif sedang, namun kemudian menunjukkan peningkatan yang berarti seiring dengan perbaikan pada berbagai faktor penunjang, seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, serta penguatan iklim investasi.

Tabel II.53. Indeks Daya Saing Daerah Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,32	3,76	3,73	3,74	4,21

Sumber : Bappeda, 2025

Meskipun pada pertengahan periode sempat mengalami sedikit penurunan, hal tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintah daerah segera melakukan berbagai penyesuaian kebijakan dan perbaikan strategi pembangunan. Upaya tersebut berhasil mengembalikan stabilitas dan kembali mendorong peningkatan capaian daya saing di tahun-tahun berikutnya.

Perkembangan paling menonjol terlihat pada akhir periode, di mana daya saing daerah mengalami lonjakan yang signifikan. Kondisi ini menandakan adanya penguatan yang lebih menyeluruh, baik dari sisi tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, perbaikan infrastruktur yang lebih merata, maupun produktivitas ekonomi daerah yang semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau memiliki arah pembangunan yang semakin konsisten menuju peningkatan daya saing. Perkembangan tersebut menjadi momentum penting sekaligus pijakan untuk menetapkan strategi yang lebih ambisius pada periode perencanaan berikutnya, dengan menitikberatkan pada kesinambungan kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur strategis, serta penciptaan iklim investasi yang inklusif dan kompetitif.

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kota Pekanbaru, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

2.4.4.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu instansi pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan instansi pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak usia anak sekolah yang bersekolah di suatu jajaran pendidikan pada suatu wilayah, capaian APK SD/MI dan APK SMP/MTs Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.54. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertahun
1	AngkaPartisipasi Kasar SD/MI	104,63	103,09	97,37	102,82	107,77	0,85%
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	95,36	97,94	95,42	93,86	105,89	2,83%

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2025

APK SD/MI Kota Pekanbaru tahun 2020 sebesar 104,63 mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu menjadi 107,77 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,85%. Sedangkan APK SD/MI sebesar 95,36 pada tahun 2020, mengalami fluktuasi hingga tahun 20204 menjadi 105,89, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 2,83%.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi nilai APM (maksimal 100) semakin baik, capaian APM SD/MI dan APM SMP/MTs Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.55. Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertahun
1	Angka Partisipasi Murni SD/MI	94,02	94,25	93,89	94,62	97,19	0,84%
2	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	74,96	75,54	75,46	78,81	81,68	2,19%

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka 2025

APM SD/MI Kota Pekanbaru tahun 2020 sebesar 94,02 mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir menjadi 97,19 pada tahun 2024 atau dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,84 persen, hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahun anak bersekolah tingkat SD/MI (usia 7-12 tahun) bertambah sebesar 0,84 persen.

Sementara itu pada jenjang SMP/MTs, APM Kota Pekanbaru tahun 2020 sebesar 74,96 mengalami peningkatan terhadap lima tahun menjadi 81,68 atau dengan rata-rata pertumbuha pertahun sebesar 2,19 persen. Meskipun nilai APM SMP/MTs lebih rendah dari nilai APM SD/MI, namun pertumbuhan pertahunnya lebih tinggi dari APM SD/MI atau dengan kata lain pertambahan masyarakat untuk bersekolah dari tahun ke tahun lebih tinggi.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan

dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah, capain APS SD/MI dan APS SMP/MTs Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.56. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Tahun
1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	99,54	99,99	93,59	99,7	99,63	0,13%
2	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	97,81	97,95	93,06	98,6	98,03	0,13%

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka 2025

APS SD/MI pada tahun 2024 tercatat sebesar 99,63 persen, meningkat dibanding tahun 2022 yang hanya mencapai 93,59 persen. Rata-rata pertumbuhan tahunan selama lima tahun terakhir sebesar 0,13 persen.

Sementara itu, APS SMP/MTs pada tahun 2024 sebesar 98,03 persen, juga mengalami pemulihan dari angka terendah pada tahun 2022 sebesar 93,06 persen, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang sama, yaitu 0,13 persen. capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan di Kota Pekanbaru telah kembali ke tren positif pascapandemi, meskipun tetap perlu perhatian untuk menjaga keberlanjutan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang.

4. Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk mengajar siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran, ketersediaan sekolah sesuai jenjang pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.57. Jumlah Data Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
		N	S	Total	N	S	Total	N	S	Total	N	S	Total	N	S	Total
1	Taman Kanak-kanak (TK) / Raudhatul Athfal (RA)	6	423	429	7	430	437	7	338	345	7	378	385	4	228	232
2	Kelompok Bermain (KB)	0	233	233	0	236	236	0	236	236	1	197	198			
3	Taman Penitipan Anak (TPA)	1	67	68	1	68	69	1	69	69	0	54	54			
4	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	18	18			
Jumlah		7	751	758	8	762	770	8	671	678	8	647	655			

Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2025

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan data referensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2025, jumlah satuan PAUD di Kota Pekanbaru menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah satuan PAUD tercatat sebanyak 758 unit, yang terdiri dari TK/RA, KB, TPA, dan SPS. Jumlah ini meningkat menjadi 770 unit pada tahun 2021, tetapi kemudian mengalami penurunan menjadi 678 unit pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, jumlah satuan PAUD tercatat sebanyak 655 unit. Sedangkan pada tahun 2024, data yang tersedia hanya mencatat jumlah TK/RA sebanyak 232 unit, terdiri dari 4 satuan negeri dan 228 satuan swasta. Data untuk jenis satuan PAUD lainnya seperti Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) pada tahun 2024 belum tersedia. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan signifikan dalam jumlah satuan pendidikan PAUD, terutama pada TK/RA, yang sebelumnya mencapai 385 unit pada tahun 2023.

Tabel II.58. Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024

NO	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD					
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	758	770	678	655	103
1.2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 4-6 tahun	55.367	55.292	n/a	n/a	n/a
1.3.	Rasio ketersediaan PAUD	137	139	n/a	n/a	n/a
2	SD/MI					
2.1.	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	336	343	347	355	364
2.2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	100.832	100.853	117.187	129.893	130.850
2.3.	Rasio Ketersediaan SD/MI	33	34	30	28	36
3	SMP/MTs					
3.1.	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	180	190	193	194	208
3.2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	47.001	46.917	54.659	63.579	64.386
3.3.	Rasio Ketersediaan SMP/MTs	38	40	35	31	31

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2025

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru tahun 2025, rasio ketersediaan sekolah PAUD tercatat sebesar 137 sekolah per 10.000 penduduk usia 4-6 tahun pada tahun 2020, meningkat menjadi 139 sekolah pada 2021 dengan jumlah gedung PAUD mencapai 770 unit. Namun, jumlah gedung PAUD mengalami penurunan signifikan menjadi hanya 103 unit pada tahun 2024. Untuk jenjang SD/MI, rasio ketersediaan sekolah turun dari 34 sekolah per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun pada 2021 menjadi 36 sekolah pada 2024 seiring bertambahnya gedung sekolah dari 343 unit menjadi 364 unit. Pada jenjang SMP/MTs, rasio ketersediaan sekolah turun dari 40 sekolah per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun pada 2021 menjadi 31 sekolah pada 2024, meskipun jumlah gedung sekolah meningkat dari 190 menjadi 208 unit.

Tabel II.59. Akreditasi Lembaga Pendidikan Kota Pekanbaru 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Jumlah SD sederajat	b	306	323	323
Jumlah SD sederajat terakreditasi	291	293	293	293
Jumlah SD terakreditasi A	219	212	220	220
Jumlah SD terakreditasi B	62	72	63	63
Jumlah SD terakreditasi C	10	9	10	10
Jumlah SMP sederajat	152	153	158	161
Jumlah SMP sederajat terakreditasi	136	138	141	141
Jumlah SMP terakreditasi A	83	85	82	82
Jumlah SMP terakreditasi B	42	43	46	50
Jumlah SMP terakreditasi C	11	10	13	11
Jumlah SMP terakreditasi A	83	85	323	323
Jumlah SMP terakreditasi B	42	43	293	293
Jumlah SMP terakreditasi C	11	10	220	220

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2025

Jumlah SD sederajat tahun 2022 sebanyak 306 sekolah, menurun 3 sekolah dibandingkan tahun 2021, dengan jumlah yang terakreditasi sebanyak 293 sekolah mengalami peningkatan sebanyak 2 sekolah dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah sekolah SD sederajat ini diikuti oleh penurunan yang terakreditasi A. Sedangkan Jumlah SMP sederajat tahun 2021 sebanyak 152 sekolah mengalami pertambahan sampai tahun 2024 menjadi 161 sekolah, penambahan jumlah SMP sederajat ini diikuti dengan peningkatan jumlah jumlah sekolah yang terakreditasi dan akreditasi A.

5. Rasio Guru per Murid PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu, secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.60. Rasio Guru/Murid PAUD SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Satuan Pendidikan	Guru (Orang)					Murid (Orang)					Rasio Guru /Murid				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	1.944	2.046	1.826	1.543	1.724	20.255	16.655	18.183	13.248	17.391	10,42	8,14	9,96	8,59	10,09
SD	6.599	6.770	5.493	5.319	6.427	126.759	122.207	124.683	121.003	122.279	19,21	18,05	22,7	22,75	19,03
SMP	3.656	3.784	2.692	2.637	2.805	56.360	56.600	62.153	56.245	56.131	15,42	14,96	23,09	21,33	20,01

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2025

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2024, rasio guru terhadap murid pada jenjang PAUD mencapai 1:10 (1 guru mengajar 10 murid), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk jenjang SD, rasio guru/murid berada di angka 1:19, menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2022 dan 2023

yang mencapai 1:23. Sementara itu, pada jenjang SMP, rasio guru/murid tahun 2024 adalah 1:20, lebih rendah dari tahun sebelumnya, yang berarti terjadi peningkatan pemerataan tenaga pendidik.

Secara umum, penurunan rasio guru/murid ini menunjukkan bahwa beban mengajar guru menjadi lebih ringan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Terutama di tingkat SMP/MTs yang memerlukan lebih banyak guru mata pelajaran, rasio yang lebih rendah memungkinkan proses belajar-mengajar menjadi lebih efektif dan fokus terhadap perkembangan siswa.

6. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

Berdasarkan surat Kemendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 tgl. 16 Februari 2024 dan surat Kemendikdasmen No. 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 tgl. 24 Januari 2025 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota terdapat capaian Kota Pekanbaru tahun 2023-2024 seperti tabel dibawah ini:

Tabel II.61. Capaian SPM Kota 2021-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	49,26	54,08	57,65	61,92
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	99,32	99,29	99,3	99,11
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	18,03	31,82	58,42	57,99
4	Skor Kemampuan Literasi SD	55,97	60,76	66,16	67,54
5	Skor Kemampuan Numerasi SD	36,39	42,95	48,41	55,85
6	Skor Kemampuan Literasi SMP	69,64	72,64	77,75	81,28
7	Skor Kemampuan Numerasi SMP	69,64	72,64	66,47	68,57
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	81,42	75,89	73,32	73,15
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	74,13	72,04	76,28	76,28
10	Indeks Iklim Keamanan SD	70,58	69,61	72,23	73,89
11	Indeks Iklim Kebinekaan SD	60,45	69,7	72,62	71,22
12	Indeks Inklusivitas SD	54,15	56,25	55,9	58,34
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	70,58	69,22	72,24	73,24
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	60,45	68,38	74,4	72,54
15	Indeks Inklusivitas SMP	54,15	56,26	59,74	61,11

Sumber : Surat Kemendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 tgl. 16 Februari 2024 dan surat Kemendikdasmen No. 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 tgl. 24 Januari 2025 dan Rapor Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2025

2.4.4.1.2. Bidang Kesehatan

1. Jumlah Kasus Kematian Ibu, Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Balita

Jumlah Kematian Ibu merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator Jumlah Kematian Ibu dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan,

Sedangkan Jumlah kematian bayi/Infant Mortality adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Sementara itu Jumlah Kematian Balita adalah jumlah kematian balita sampai usia 59 bulan (anak balita) per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor – faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Jumlah kematian Ibu, bayi dan Balita Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.62. Jumlah kematian Ibu, Bayi dan Balita di Kota Pekanbaru tahun 2020 - 2024

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertahun
Jumlah kematian ibu	14	22	5	12	14	13,4
Jumlah kematian bayi	6	6	4	3	3	4,4
Jumlah kematian balita	0	0	1	5	4	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2025

Jumlah Kematian Ibu di Kota Pekanbaru menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 14 kasus, meningkat menjadi 22 kasus pada tahun 2021 dan mencapai turun menjadi 5 kasus pada tahun 2022. Namun, terjadi kenaikan drastis pada tahun 2023 menjadi hanya 12 kasus, dan kembali naik ke 14 kasus pada tahun 2024. Rata-rata Jumlah Kematian Ibu per tahun selama lima tahun terakhir adalah 13,4 kasus. Fluktuasi ini menandakan perlunya peningkatan mutu layanan kesehatan ibu, baik dalam hal *antenatal care*, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, hingga layanan rujukan darurat kebidanan.

Jumlah Kematian Bayi di Kota Pekanbaru juga menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah kematian bayi tercatat sebesar 6 kasus, lalu menurun menjadi 4 kasus pada tahun 2022, dan semakin menurun pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 3 kasus. Rata-rata kematian bayi selama lima tahun terakhir adalah 4,4 kasus. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan neonatal, imunisasi, serta gizi pada bayi. Namun, upaya preventif harus tetap ditingkatkan untuk terus menurunkan jumlah kematian bayi menuju nol kasus.

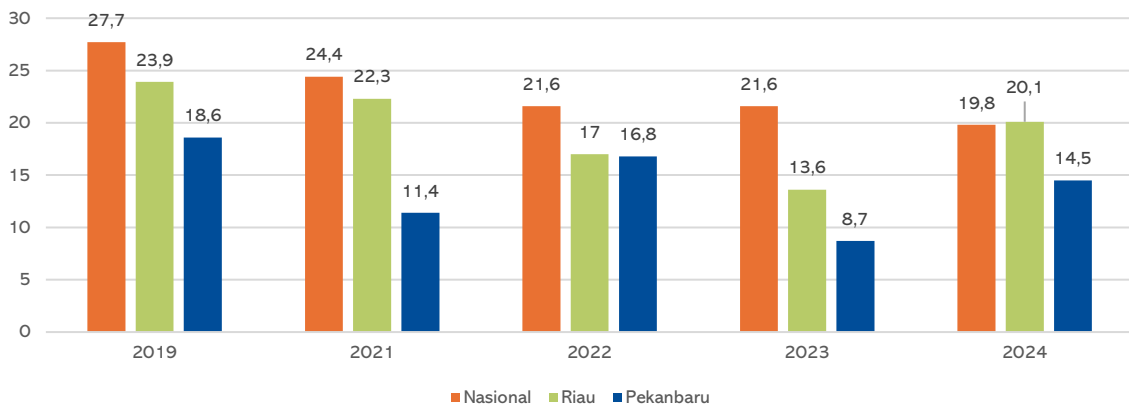
Jumlah Kematian Balita selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 0 kasus pada tahun 2020 menjadi 4 kasus pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan layanan kesehatan dasar untuk balita, penguatan intervensi gizi, peningkatan cakupan imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang untuk mencegah kematian pada kelompok usia rentan ini.

Secara keseluruhan, Kota Pekanbaru menunjukkan kemajuan dalam pengendalian jumlah kematian bayi dan balita, namun jumlah kematian ibu masih memerlukan perhatian khusus. Perlu sinergi antara sektor kesehatan, masyarakat, dan

pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem kesehatan ibu dan anak yang tangguh dan responsif.

2. Prevelensi Stunting

Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 (dua) tahun. Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan kasus stunting yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah, perkembangan prevalensi stunting Kota Pekanbaru disajikan pada grafik dibawah ini.



Sumber: RISKESDAS dan SSGI, 2025

Grafik II.44. Prevalensi Stunting Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Nasional 2019-2024

Dari grafik di atas, balita dengan status stunting di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sebesar 18,58 persen menurun menjadi 11,4 persen pada tahun 2021, sempat meningkat sedikit pada 16,8 persen pada tahun 2022 namun menurun kembali pada 8,7 persen pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, terjadi peningkatan angka prevalensi stunting menjadi sebesar 14,5 persen. Meningkatnya angka prevalensi stunting ada beberapa faktor, antara lain, kurangnya asupan gizi ibu hamil, ibu mengalami anemia sewaktu hamil, serta mengalami KEK, pengasuhan anak kepada orang lain serta pernikahan muda, dan tentunya terbatasnya ekonomi keluarga juga menjadi penyebab stunting. Secara umum persentase balita dengan status stunting di Kota Pekanbaru berada di bawah rata-rata Provinsi Riau dan Nasional.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase gizi buruk adalah perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah balita yang ditimbang. Berikut ini disajikan data persentase balita gizi buruk di Kota Pekanbaru.

Tabel II.63. Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk	9	7	29	9	20
2	Jumlah Balita yang ditimbang	51.818	23.619	29.972	32.768	28.714
3	Persentase balita gizi buruk	0,02%	0,03%	0,09%	0,003%	0,07%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2025

Jumlah balita gizi buruk dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 9 anak, turun menjadi 7 anak pada 2021, namun kembali meningkat tajam menjadi 29 anak pada 2022. Penurunan sempat terjadi lagi di tahun 2023 menjadi 9 anak, lalu naik menjadi 20 anak di 2024. Persentase balita gizi buruk tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 0,09%, sedangkan yang terendah terjadi pada 2023 yaitu hanya 0,003% dari total balita yang ditimbang.

Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan balita, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberian makanan bergizi pada ibu dan anak serta kondisi ekonomi keluarga juga memengaruhi.

4. Keberhasilan Pengobatan TB

Untuk penyakit menular prioritas ditujukan untuk dapat mengendalikan penyakit Tuberculosis (TB), HIV/AIDS, Pneumonia, PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi), dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB). Penyakit menular yang masuk kedalam standar pelayanan minimal kabupaten/kota adalah Tuberculosis (TB) dan HIV/AIDS.

Tabel II.64. Angka Cure Rate, Complete Rate, Success Rate dan Jumlah Kematian TB Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

No	Indikator	Tahun					Rata-rata Pertahun
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Angka Kesembuhan (Cure Rate)	55,10	9,83	15,08	18,87	17,30	23,24
2	Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate)	63,00	82,67	76,78	72,21	70,96	73,12
3	Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate)	87,50	92,50	91,85	91,08	88,27	90,24
4	Jumlah Kematian TB	95	118	129	117	172	126

Sumber: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2025

Angka Kesembuhan (Cure Rate) merupakan indikator yang menunjukkan persentase pasien baru TB paru BTA positif yang sembuh setelah menyelesaikan masa pengobatan. Pada tahun 2024, angka kesembuhan tercatat sebesar 17,30 persen, meningkat dari tahun 2023 sebesar 18,87 persen dan tahun 2022 sebesar 15,08 persen. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 55,10 persen,

terjadi penurunan yang cukup signifikan. Rata-rata angka kesembuhan per tahun selama periode 2020–2024 adalah 23,24 persen. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pentingnya penyelesaian pengobatan TB secara tuntas untuk meningkatkan angka kesembuhan secara konsisten.

Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) mencerminkan persentase pasien tuberkulosis yang menyelesaikan pengobatan sesuai standar. Pada tahun 2024, angka ini tercatat sebesar 70,96 persen, menurun dari tahun 2023 sebesar 72,21 persen dan tahun 2022 sebesar 76,78 persen. Puncak capaian terjadi pada tahun 2021 dengan angka 82,67 persen, sementara tahun 2020 sebesar 63,00 persen. Rata-rata angka pengobatan lengkap selama lima tahun terakhir adalah 73,12 persen. Capaian ini menegaskan pentingnya pendampingan terhadap pasien TB agar mereka konsisten mengikuti dan menyelesaikan seluruh rangkaian pengobatan untuk mencegah penularan dan kekambuhan.

Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) mencakup pasien TB yang dinyatakan sembuh dan menyelesaikan pengobatan. Pada tahun 2024, angka keberhasilan pengobatan tercatat sebesar 90,24 persen, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2023 (88,27 persen) dan 2022 (91,85 persen), serta relatif stabil jika dibandingkan tahun 2020 (87,50 persen). Tahun 2021 mencatat capaian tertinggi yaitu 92,50 persen. Rata-rata keberhasilan pengobatan selama periode ini adalah 90,24 persen, menunjukkan bahwa mayoritas pasien TB berhasil menyelesaikan pengobatan dengan baik. Meskipun demikian, perlu terus ditingkatkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini.

Jumlah kematian TB merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Jumlah kasus kematian TB pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus kematian TB yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan penderita TB mayoritas disertai dengan penyakit komorbid sehingga meningkatkan risiko kematian.

5. Fasilitas Kesehatan

Pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dari aspek kesehatan. Sejalan dengan upaya pemerintah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, teknologi, perbaikan pengelolaan kelembagaan kesehatan dan kebijakan, sehingga terjadinya perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.65. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (jiwa)	983.356	1.169.070	1.179.410	1.020.308	1.217.010
Jumlah Balita (jiwa)	112.136	161.190	95.890	96.120	96.046
Jumlah posyandu	652	630	630	657	630
Rasio Posyandu	0,6	0,6	0,6	0,68	0,6
Jumlah Puskesmas, poliklinik dan pustu	248	269	269	269	278
Rasio Puskesmas, poliklinik dan pustu	0,21	0,25	0,25	0,25	0,25
Jumlah Rumah Sakit	31	31	31	31	31
Rasio Rumah Sakit	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: SIPD Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2025

Perkembangan fasilitas kesehatan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2020 – 2024 terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan tuntutan penambahan jumlah penduduk dan semakin banyak nya angka kesakitan. Peningkatan fasilitas kesehatan di Kota Pekanbaru didominasi oleh peran swasta.

Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan. Adapun tugas posyandu berdasarkan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel II.66. Tugas Posyandu Berdasarkan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal

Bidang	Dukungan Layanan
Bidang Pendidikan	Pendidikan anak usia dini Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa Penguatan pemanfaatan literasi digital Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi
Bidang Kesehatan	Penggerakan kunjungan posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; Penyuluhan kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; Deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; Rujukan ke unit kesehatan desa/kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan; dan Pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah. Penjangkauan akses yang terdiri atas: Imunisasi Vitamin A Tablet tambah darah di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang	Dukungan Layanan
Bidang Pekerjaan Umum	Edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah milik desa; Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku; Pemeliharaan jaringan air pedesaan; Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa.
Bidang Perumahan Rakyat	Identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan Komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
Bidang Trantibumlinmas	Penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana; Pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini; Pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan
Bidang Sosial	Komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan Keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan Inklusi sosial; Identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan Memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu

Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu, yang mencakup 6 bidang pelayanan. Penerapan 6 SPM ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar di masyarakat melalui Posyandu.

6. Tenaga Medis

Ketersediaan tenaga medis harus diiringi dengan pemerataan penempatan tenaga medis pada fasilitas-fasilitas layanan kesehatan, agar pelayanan kesehatan dapat secara maksimal bagi masyarakat. Jumlah Tenaga Medis Menurut Unit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel II.67. Jumlah Tenaga Medis Menurut Unit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	983.356	994.585	1.179.410	1.020.308	1.217.010
Jumlah Dokter	1.145	1.537	1.541	1.444	1.708
Rasio Dokter terhadap 100.000 Penduduk	116,44	-	130,7	141,53	140,34
Jumlah Perawat	3.199	4.237	4.244	4.111	4.259
Rasio Perawat per 100.000 penduduk	325,31	-	359,8	402,92	349,96

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Bidan	919	1.169	1.172	1.090	1.199
Rasio Bidan per 100.000 penduduk	93,46	-	99,4	106,83	98,52
Jumlah Farmasi	681	610	689	701	699

Sumber: BPS Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2025

Rasio tenaga kesehatan di Kota Pekanbaru menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan distribusi tenaga medis antar wilayah.

Pada tahun 2024, jumlah dokter tercatat sebanyak 1.708 orang, dengan rasio 140,34 per 100.000 penduduk. Meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, rasio ini masih tergolong cukup tinggi, menunjukkan bahwa secara umum kebutuhan tenaga dokter telah mencukupi. Pada tahun yang sama, jumlah perawat mencapai 4.259 orang, dengan rasio 349,96 per 100.000 penduduk. Sementara itu, jumlah bidan meningkat menjadi 1.199 orang, dengan rasio 98,52 per 100.000 penduduk.

Pada tahun 2023, rasio dokter tercatat 141,53 per 100.000 penduduk, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Rasio perawat mencapai puncaknya di angka 402,92, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022, data rasio tenaga kesehatan tidak disebutkan secara eksplisit, namun tren peningkatan diperkirakan mulai konsisten sejak tahun tersebut.

Sedangkan pada tahun 2020, rasio dokter berada di angka 116,44 per 100.000 penduduk, menunjukkan titik awal peningkatan yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Rasio perawat pada tahun ini tercatat sebesar 325,31, dan jumlah bidan sebanyak 919 orang.

7. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Sesuai dengan ketentuan SPM Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, jenis pelayanan dasar dan indikator kinerja SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.68. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ini hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	83,95	97,22	99,81	87,29
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	81,27	96,66	99,71	86,98
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	78,4	98,07	99,42	86,41
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	60,82	95,25	99,94	69,79

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021	2022	2023	2024
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	22,9	97,83	99,96	79,11
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	19,1	91,39	99,93	12,47
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	82,3	95,3	99,55	71,05
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	13,39	90,13	99,94	12,52
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	37,13	96,38	99,79	65,16
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	48,47	93,06	98,74	56,92
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	36,75	95,49	99,84	140,25
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan	59,14	91,96	95,08	102,49

Pada tahun 2024, capaian indikator SPM Urusan Kesehatan di Kota Pekanbaru menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya di hampir semua jenis pelayanan dasar. Misalnya, pelayanan kesehatan ibu hamil turun menjadi 87,29% dari 99,81% di tahun 2023, dan ibu bersalin menjadi 86,98% dari 99,71%. Pelayanan untuk balita turun tajam menjadi 69,79% dari 99,94%, dan usia produktif hanya mencapai 12,47% setelah sebelumnya hampir sempurna di 99,93%. Hal serupa juga terjadi pada pelayanan penderita hipertensi dan diabetes melitus yang masing-masing hanya mencapai 12,52% dan 65,16% di tahun 2024, turun drastis dari capaian 99% di tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan layanan kesehatan dasar di tahun 2024 di semua indikator.

2.4.4.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

A. Indeks Aksesibilitas Jalan

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan prasarana jalan atau indeks aksesibilitas, dapat dianalisis melalui rasio panjang jalan terhadap luas wilayah (km²).

Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula daerah yang dilayani. Rasio >5 menunjukkan indeks aksesibilitas sangat tinggi, $>1,5$ menunjukkan indeks aksesibilitas tinggi, $>0,5$ dikategorikan sedang, $>0,15$ dikategorikan rendah, dan $>0,05$ dikategorikan aksesibilitas sangat rendah. Indeks aksesibilitas Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.69. Indeks Aksesibilitas Berdasarkan Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2022- 2024

Tahun	Status Jalan (Km)				Luas Wilayah	Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	Indeks Aksesibilitas
	Kota	Provinsi	Nasional	Jumlah			
2022	1.277,90	127,51	83,45	1.488,86	632,26	2,35	Tinggi
2023	1035,065	161,57	75,76	1272,395	632,26	2,01	Tinggi
2024	1035,065	161,57	75,76	1272,395	632,26	2,01	Tinggi

Sumber: SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2025

Panjang jaringan jalan di Kota Pekanbaru pada tahun 2024 ini tercatat sebesar 1.272,395 km, yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 75,76 km, Jalan Provinsi 161,57 km, dan Jalan Kota 1.035,065 km. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km², sehingga menghasilkan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah sebesar 2,01 km/km². Berdasarkan nilai tersebut, indeks aksesibilitas Kota Pekanbaru berada dalam kategori tinggi.

Capaian ini tetap menunjukkan tingkat konektivitas wilayah yang baik, meskipun terjadi alih status sejumlah ruas jalan dari pengelolaan kota ke provinsi sejak tahun 2023. Hal ini juga menjelaskan penurunan panjang jalan kota sejak 2022, namun tidak memengaruhi secara signifikan kualitas aksesibilitas secara keseluruhan.

B. Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas Kabupaten/Kota, serta kecamatan hingga kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, kondisi jalan mantap Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.70. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	906,1	906,01	921,55	714,45	796,432
Panjang Jalan (Km)	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.035,07	1.035,07
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik dan sedang (%)	70,91	70,91	72,11	78,47	76,945

Sumber: SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2025

Panjang jalan dalam kondisi baik (km) pada tahun 2024 tercatat sepanjang 796,43 km, atau 76,95% dari total panjang jalan 1.035,07 km. Angka ini mengalami

penurunan dibanding tahun 2023 yang mencapai 78,47%. Meski masih tergolong tinggi, penurunan ini menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap jalan yang mulai mengalami kerusakan. Kondisi jalan yang mantap sangat penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Berikut table kondisi jalan keseluruhan.

Tabel II.71. Kondisi Kemantapan Jalan Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

Tahun	Panjang Tiap Kondisi (%)								Kondisi Mantap (Baik + Sedang)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	
2020	749,01	58,61	157,09	12,29	63,86	5	307,93	24,1	70,91
2021	749,01	58,61	157,09	12,29	63,86	5	307,93	24,1	70,91
2022	833,56	65,23	88,14	6,9	48,27	3,78	307,93	24,1	72,11
2023	714,45	69,03	97,724	9,44	168,632	16,29	54,259	5,24	78,47
2024	682,31	0,6592	114,122	0,11026	127,339	0,12303	111,294	0,10752	76,95

Sumber: SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2025

C. Pelayanan Pengentasan Titik Genangan dan Lokasi Banjir Perkotaan

Dalam hal genangan lokal dan banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah menyusun Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru tahun 2020. Pada Masterplan tersebut terdata sebanyak 121 titik genangan/banjir yang di dalamnya terdapat 363 titik masalah genangan/banjir. Kondisi itu diakibatkan anak sungai dan saluran drainase dalam kota yang mengalir ke Sungai Siak sering tidak lancar dan berpotensi terjadinya genangan lokal dan banjir di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru.

Kondisi ini mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat di daerah perkotaan, khususnya di musim penghujan. Secara umum penyebab munculnya genangan/banjir di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Perilaku pengembang ruko/perkantoran yang menutupi drainase tanpa memperhatikan kaidah teknis sehingga ketika hujan, air dari halaman ruko/perkantoran tersebut tidak masuk ke drainase malah terperangkap di badan jalan.
2. Banyaknya sampah dan sedimentasi di dalam drainase akibat perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam drainase sehingga menghambat aliran air.
3. Alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun disebabkan pertumbuhan pemukiman dan pembangunan kota yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan.

Belum terintegrasinya drainase di beberapa titik di Kota Pekanbaru serta rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana prasarana pengendali

banjir untuk mengantarkan air permukaan di kawasan terbangun ke pembuangan akhir (badan air penerima).

D. Cakupan Pelayanan Air Minum

Salah satu kebutuhan hakiki manusia adalah kebutuhan akan air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk minum maupun memasak, mandi, cuci dan sebagainya. Hal ini menjadi penting karena sumber air baku yang ada sudah tidak layak, baik dari jumlah maupun kualitasnya. Konsumsi air bersih menunjukkan aktifitas masyarakat, baik domestik (rumah tangga) maupun non domestik. Peningkatan konsumsi air bersih sejatinya menunjukkan aktifitas masyarakat dan kegiatan lainnya yang meningkat. Untuk itulah diperlukan peran perusahaan air minum dalam menangani hajat hidup orang banyak tersebut, gambaran kinerja penyaluran air bersih melalui PDAM disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.72. Kinerja Penyaluran Air Bersih melalui PDAM

Jenis Konsumen	2020 (m ³)	%	2021 (m ³)	%	2022 (m ³)	%	2023 (m ³)	%	2024 (m ³)	%
Sosial	30.340	1,24	20.888	0,98	17.901	0,94	18.202	0,97	13.824	0,65
Non Komersial	1.682.325	68,5	1.481.026	69,5	1.345.358	71	1.263.005	67,2	1.259.502	59,26
Instansi Pemerintah	116.031	4,72	108.293	5,08	75.581	3,99	29.583	1,58	18.929	0,89
Niaga	455.179	18,5	382.708	18	308.797	16,3	369.703	19,7	658.020	30,96
Industri	202	0,01	23	0	240	0,01	382	0,02	470	0,02
Masyarakat	171.853	7	137.110	0,64	146.740	0,78	197.837	10,5	174.566	8,21
Jumlah	2.455.930	100	2.130.048	100	1.894.617	100	1.878.712	100	2.125.311	100

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2025

Pada tahun 2024, jumlah distribusi air minum PDAM di Kota Pekanbaru mencapai 2.125.311 m³. Air paling banyak disalurkan untuk sektor non-komersial sebesar 59,26%, diikuti oleh sektor niaga sebanyak 30,96%, dan yang paling sedikit untuk sektor industri yakni 0,02%. Peningkatan akses air minum terus dilakukan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, guna menjangkau lebih banyak masyarakat.

E. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan akses air minum perpipaan, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan melaksanakan program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) SPAM Kota Pekanbaru kapasitas 750 liter/detik, yang pembangunan fisik sudah dimulai sejak tahun 2021. Sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) adalah PT. PP. TIRTA MADANI, sedangkan sebagai Penanggung Jawab Perjanjian Kerjasama (PJPK) adalah Perumdam Tirta Siak, dengan skema kerjasama Rehabilitation, Built, Operate and Transfer (RBOT), dan masa kerjasama selama 25 tahun

setelah COD Fase A (Juni 2022). Melalui program KPBU ini akan mampu meningkatkan layanan akses air minum perpipaan sampai dengan 61.000 SR (Sambungan Rumah).

Disamping KPBU SPAM Kota Pekanbaru, saat ini juga sudah beroperasi KPBU SPAM Regional Pekanbaru-Kampar dengan kapasitas 1.000 liter/detik, yang nantinya akan didistribusi 700 liter/detik untuk melayani Kota Pekanbaru dan 300 liter/detik untuk melayani wilayah Kabupaten Kampar. Melalui program KPBU SPAM Regional ini, akan dapat meningkatkan pelayanan air minum jaringan perpipaan sebanyak 71.400 SR di Kota Pekanbaru.

Tabel II.73. Jumlah Pelanggan dan Persentase Rumah Tangga yang terlayani PDAM

No	Indikator	2020 (SR)	2021 (SR)	2022 (SR)	2023 (SR)	2024 (SR)
1	PDAM Tirta Siak Zona I	2.461	2.495	3.649	3.668	3.426
2	KPBU SPAM - PDAM Tirta Siak Zona II	11.253	11.210	9.470	9.660	7.566
3	SPAM B2B Pekan Kampar Zona III	0	0	0	215	494
Jumlah		13.714	13.705	13.119	13.543	11.486
Jumlah Rumah Tangga		233.749	236.864	239.948	242.989	243.185
Persentase Rumah Tangga yang terlayani		5.87%	5.79%	5.47%	5.57%	4.72%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2025

Cakupan akses air bersih melalui sistem perpipaan di Kota Pekanbaru selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang belum konsisten dan masih menghadapi sejumlah tantangan. Data menunjukkan bahwa jumlah pelanggan PDAM relatif stagnan dalam tiga tahun awal, dengan 13.714 pelanggan pada tahun 2020–2021, sedikit menurun menjadi 13.119 pada 2022, dan kembali menurun pada 2023 menjadi 13.543, hingga akhirnya mengalami penurunan signifikan menjadi 11.486 pelanggan pada tahun 2024.

Salah satu tantangan yang dihadapi PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru adalah persaingan dengan Sumber Air Alternatif, masyarakat masih banyak yang menggunakan sumur bor, air isi ulang, atau vendor air, karena layanan PDAM belum dianggap memadai atau belum tersedia di lokasi mereka. Air yang didapatkan dari sumur bor atau air tanah dalam di kota Pekanbaru memiliki kualitas yang baik, sehingga dibutuhkan upaya untuk mengedukasi masyarakat untuk beralih ke sumber air PDAM.

F. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan Jaringan Perpipaan

Pemenuhan akses air minum dan air bersih non-perpipaan di Kota Pekanbaru dilaksanakan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur air minum skala lingkungan, seperti Sumur Dalam dan Sumur Artesis. Sepanjang tahun 2020–2024, telah dibangun 51 unit sumur, yang melayani sekitar 2.550 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan

10.200 jiwa. Pembangunan terbanyak terjadi pada tahun 2023 dengan 20 unit sumur, sementara tahun 2022 merupakan tahun terendah dengan hanya 2 unit. Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan infrastruktur air minum skala lingkungan berupa kegiatan pengeboran Sumur Dalam dan Sumur Artesis, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.74. Data Cakupan Akses Air Bersih dengan Sistem Bukan Perpipaan Tahun 2020 -2024

NO	Sarpras Air Bersih / Air Minum	Jumlah Sumur Terbangun (Unit)	Jumlah KK Terlayani (1 Sumur 50 KK)	Jumlah Jiwa
1	Pembangunan Tahun 2020	14	700	2.800
2	Pembangunan Tahun 2021	6	300	1.200
3	Pembangunan Tahun 2022	2	100	400
4	Pembangunan Tahun 2023	20	1000	4000
5	Pembangunan Tahun 2024	9	450	1800
Jumlah		51	2.550	10.200

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru, 2025

Keterangan: Jumlah Sumur Dalam (SPAM Bukan Jaringan Perpipaan) di masing- masing lokasi diestimasi dapat melayani lebih dari lima puluh Kepala Keluarga (KK) dengan asumsi 1 KK = 4 Jiwa

G. Cakupan Pelayanan Air Limbah

SPALD-T Kota Pekanbaru dibangun melalui Program MSMIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2023 SPALD-T Kota Pekanbaru telah beroperasi dan melayani sebanyak 536 SR pada tahun 2024. Disamping itu pelayanan SPALD-S Individual telah terealisasi pembangunannya sebanyak 634 SR. UPTD SPALD sebagai operator memiliki 2 unit mobil tinja.

Tabel II.75. Data Cakupan Akses Air Limbah Domestik Tahun 2020 -2024

NO	Jenis Pelayanan Air Limbah Domestik	2020 (SR)	2021 (SR)	2022 (SR)	2023 (SR)	2024 (SR)
1	SPALD-S	0	105	584	584	634
2	SPALD-T	-	-	-	253	536
3	Jumlah Rumah Tangga	233.749	236.864	239.948	242.989	245.607
4	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Sanitasi Aman	0,00%	0,04%	0,24%	0,24%	0,26%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru, 2025

2. Penataan Ruang

A. Perencanaan Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal . Tata letak ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040, selanjutnya diikuti dengan penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk beberapa

lokasi yaitu Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Kulim, Sebagian Kecamatan Rumbai Timur, Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tuah Madani.

B. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sesuai dengan amanat UU CK beserta turunannya.

C. Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam rangka menjamin tersedianya ruang yang memadai untuk kawasan konservasi, pelestarian fungsi hidrologis, serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Hingga tahun 2024, terdapat 21 titik RTH/Taman Kota yang tersebar di berbagai kecamatan dengan total luas mencapai 155.454 m², atau sekitar 0,025 persen dari total wilayah Kota Pekanbaru.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam RTRW Kota dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis dan fungsi lainnya. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman Kota di Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.76. Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman di Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Nama RTH	Lokasi	Jenis RTH	Luas RTH (m2)
1	Taman RTH Kaca Mayang	Jl. Sudirman Kec. Pekanbaru Kota	Taman	12.074
2	Taman Kota	Jl. Diponegoro Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota	Taman	11.445
3	Taman Kayu Putih	Jl. Tambelan Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota	Taman	3.970
4	Taman Tunjuk Ajar Integritas	Jl. Ahmad Yani Kec. Senapelan	Taman	14.477
5	Taman Bawah Jembatan Lekton II	Jl. Perdagangan Kec. Senapelan	Taman	4.678
6	Taman Bawah Jembatan Lekton I	Jl. Yos Sudarso Kec. Senapelan	Taman	9.054
7	Hutan Kota	Jl. MH. Thamrin Kel. Suka Mulya Kec. Sail	Hutan Kota	59.489
8	Taman Wisata Mini/Simpang Tiga MTQ	Jl. Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai	Taman	8.468
9	Taman di belakang Puswil	Jl. Cut Nyak Dien Kec. Sukajadi	Taman	1.192
10	Taman Simpang Harapan Raya	Jl. Lintas Timur Simpang Jl. Sudirman	Taman	509
11	Taman Bantaran Sungai Batak	Jl. Akasia I. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya	Taman	814
12	Taman Simpang Badak	Jl. Hangtuah Ujung Tenayan Raya	Taman	161
13	Taman Depan Auri	Jl. Adi Sucipto	Taman	1.026
14	Taman Cinta Raja	Jl. Amir Hamzah Kel. Cinta Raja	Taman	1.028
15	Taman Pasar Bawah	Jl. Saleh Abbas	Taman	321
16	Taman Patung Kuda	Jl. T. Tambusai	Taman	382

No	Nama RTH	Lokasi	Jenis RTH	Luas RTH (m ²)
17	Taman PCR	Jl. Umban Sari	Taman	25.252
18	Taman Kantor Camat Bukit Raya	Jl. Ash Shofa	Taman	250
19	Taman Kantor Camat Payung Sekaki	Jl. KH. Nasution	Taman	372
20	Taman Perum Rejosari	Jl. Utama	Taman	420
21	Taman Perum Kenanga	Jl. Kenanga	Taman	72
Total				155.454

Sumber: SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Sebagian besar RTH berupa taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik, konservasi lingkungan, dan peningkatan kualitas udara. Pengelolaan RTH masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, dan keindahan. Apabila aset Hutan Kota diserahkan kepada Pemerintah Kota, pengelolaannya dapat dioptimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk mendukung pemenuhan target luasan RTH sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Tabel II.77. Luas RTH Publik Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024

Luas	2021	2022	2023	2024
Kota Pekanbaru (m ²)	632.260.000	632.260.000	632.260.000	632.260.000
RTH Eksisting (m ²)	15.174.240	15.421.507	19.839.085	19.839.085
Persentase RTH terhadap Luas Kota	2,4	2,41	3,13	3,13

Sumber: SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, serta fungsi sosial masyarakat di perkotaan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hingga tahun 2024, luas wilayah Kota Pekanbaru tercatat sebesar 632.260.000 m².

Capaian indikator kinerja luas RTH publik baru mencapai 3,13% hingga tahun 2024, atau masih terdapat kekurangan sebesar 2,87% terhadap target antara (6%) dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Keterbatasan pencapaian disebabkan oleh minimnya lahan yang tersedia dan dapat dikelola secara langsung sebagai RTH publik.

Sebagai solusi, Pemerintah Kota perlu menyusun rencana prioritas pengadaan lahan atau pembebasan lahan untuk pengembangan RTH, serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka yang ada. Hal ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam pemenuhan RTH sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, maka layanan dasar dan Capaian Jenis Pelayanan Dasar dan indikator Kinerja SPM urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.78. Layanan SPM Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru Tahun 2024

Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM	Indikator Pencapaian	Target	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	5,47%	5,57%	4,72%
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	4.600	5.179	5.587

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, 2025

Capaian layanan air minum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum melalui sistem perpipaan baru mencapai 5,47%. Angka ini meningkat menjadi 5,57% pada tahun 2023, dan 4,72% pada tahun 2024. Capaian layanan pengolahan air limbah domestik mengalami tren peningkatan. Tercatat sebanyak 4.600 jiwa terlayani pada tahun 2022, meningkat menjadi 5.179 jiwa pada tahun 2023, dan mencapai 5.587 jiwa pada tahun 2024. Saat ini masyarakat Kota Pekanbaru masih mengakses air bersih bersumber dari non perpipaan Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih dan sanitasi melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Upaya ini diarahkan melalui sinergi program lintas sektor dan pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk percepatan pembangunan jaringan perpipaan serta optimalisasi pelayanan PDAM.

2.4.4.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebesar 276.290 unit dengan jumlah penduduk 1,149.359 jiwa, dengan rasio rumah layak huni sebesar 0,280, pada tahun 2021 rasio rumah layak huni meningkat menjadi 0,319, dengan jumlah rumah layak huni 235.627 unit dan jumlah penduduk 1.074.000 jiwa. Rasio pemukiman layak huni Berdasarkan data capaian, pada Tahun 2022 adalah 0,211 poin turun dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 0,108 Poin.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2022 meningkat dari 94,1 persen menjadi 95,53 persen pada tahun 2021. Untuk cakupan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2021 sebesar 91,82 persen, ditahun 2022 menurun menjadi 88,19 persen.

Tabel II.79. Data Cakupan Akses Rumah Layak Huni Tahun 2020 -2024

NO	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah layak huni (unit)	276.290	235.627	239.099	276.290	209.858
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	983.356	994.585	1.007.540	1.123.348	1.026.670
3	Luas Permukiman layak huni (Ha)	13.502	13.502	-	38.645	38.646
4	Luas Wilayah Permukiman (Ha)	13.519	13.519	-	38.824	38.824
5	Jumlah seluruh rumah layak disuatu wilayah kerja dalam kurun waktu (Unit)	276.290	235.627	239.099	209.858	5.249
6	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)	277.378	236.864	239.948	217.022	5.604
7	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu (jiwa)	5.790	9.154	6.341	8.896	3.452
8	Jumlah Rumah Tangga MBR pada kurun waktu tertentu (jiwa)	7.238	10.391	7.190	7.190	3.807
9	Rasio rumah layak huni (1/2)	0,281	0,237	0,237	0,187	0,204
10	Rasio permukiman layak huni (3/4)	0,9987	0,9987	0,9987	0,9987	0,9954
11	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni (5/6)	99,6%	94,1%	95,53%	96,69%	93,6%
12	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (7/8)	79,99 %	91,82 %	88,19 %	88,13 %	90,67%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2025

2. Kawasan Kumuh

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 664 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru, ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru sebesar 189,08 Ha yang terdapat di 11 Kawasan. Pada tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan penanganan kawasan kumuh pada 7 (tujuh) kawasan kumuh sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel II.80. Pengurangan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	RT-RW	Kegiatan Penanganan	Sumber Dana	Luas Kumuh yang berkurang (Ha)
1	Rumbai	Sri Meranti	001-017	Pembangunan Jalan Lingkungan	APBD Kota Pekanbaru T.A 2023	1,49

No	Kecamatan	Kelurahan	RT-RW	Kegiatan Penanganan	Sumber Dana	Luas Kumuh yang berkurang (Ha)
2	Lima Puluh	Tanjung Rhu	004-005	Pembangunan Jalan Lingkungan	APBD Kota Pekanbaru T.A 2023	2
3	Rumbai	Sri Meranti	001-018	Perbaikan Drainase Drainase Lingkungan	APBD Kota Pekanbaru T.A 2023	0,39
4	Payung Sekaki	Tirta Siak	001-002	Pembangunan Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan	APBN PROGRAM KOTAKU T.A 2023	2,27
5	Senapelan	Kampung Baru	001-004	Pembangunan Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan	APBN PROGRAM KOTAKU T.A 2023	1,8
6	Senapelan	Kampung Baru	001-008	Pembangunan Drainase Drainase Lingkungan	APBN PROGRAM KOTAKU T.A 2023	2,53
7	Senapelan	Kampung Baru	002-005	Pembangunan Sumur Bor Dalam	APBN PROGRAM KOTAKU T.A 2023	1,35
TOTAL						11,83

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru, 2025

Pada Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 519 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru sebesar 178,02 Ha yang terbagi menjadi 18 (delapan belas) kawasan, yakni :

Tabel II.81. Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Lokasi	Luas	Legalitas Lahan	Priortitas
1	Kawasan Kumuh Kota Lama	3,80 Ha	Legal	Tinggi
2	Kawasan Kumuh Okura	10,22 Ha	Legal	Sedang
3	Kawasan Kumuh Limbungan	14,7 Ha	Legal	Tinggi
4	Kawasan Kumuh Lembah Sari	3,92 Ha	Legal	Sedang
5	Kawasan Kumuh Meranti Pandak	22,14 Ha	Legal	Tinggi
6	Kawasan Kumuh Sri Meranti	12,85 Ha	Legal	Sedang
7	Kawasan Kumuh Lembah Damai	13,58 Ha	Legal	Sedang
8	Kawasan Kumuh Umban Sari	1,34 Ha	Legal	Sedang
9	Kawasan Kumuh Limbungan Baru	4,56 Ha	Legal	Sedang
10	Kawasan Kumuh Palas	1,75 Ha	Legal	Sedang
11	Kawasan Kumuh Muara Fajar	39,07 Ha	Legal	Sedang
12	Kawasan Kumuh Sago	7,58 Ha	Legal	Tinggi
13	Kawasan Kumuh Tangkerang Tengah	4,40 Ha	Legal	Sedang
14	Kawasan Kumuh Pesisir	11,71 Ha	Legal	Sedang
15	Kawasan Kumuh Cinta Raja	1,61 Ha	Legal	Tinggi
16	Kawasan Kumuh Bencah Lesung	8,50 Ha	Legal	Ringan
17	Kawasan Kumuh Rejosari	7,6 Ha	Legal	Sedang
18	Kawasan Kumuh Sialang Sakti	8,69 Ha	Legal	Sedang

No	Lokasi	Luas	Legalitas Lahan	Priortitas
Total		178,02 Ha		

Sumber: SK Walikota Nomor 519 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan SK Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, penanganan kawasan kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha merupakan kewenangan Provinsi Riau, sedangkan kawasan kumuh dengan luas kurang dari 10 (sepuluh) Ha merupakan kewenangan Pemerintah Kota.

3. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Sesuai Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, dalam Pasal 3 ayat (4), indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Pengertian prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 21 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman, paling sedikit terdiri dari jalan, drainase, sanitasi dan jaringan air minum.
2. Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, paling sedikit terdiri dari rumah ibadah, dan ruang terbuka hijau (RTH).
3. Pasal 1 angka 23 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, paling sedikit terdiri dari jaringan listrik termasuk KWH meter, dan jaringan telepon.

Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan, sehingga dengan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan PSU yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Bidang PSU menjadi sangat strategis untuk dapat mewujudkan PSU Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang berkualitas dan mampu menjadi penunjang fungsi hunian secara maksimal.

Berdasarkan indikator kinerja Bidang PSU, dapat disampaikan pencapaian bidang PSU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Tabel II.82. Perkembangan Indikator Bidang PSU Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi baik	61,55	62,35	71,89	80,29	89	92.80
2	Persentase Saluran (Drainase) Lingkungan dengan kondisi baik	47,63	43,7	56,89	84,87	85.11	87.15
3	KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar	800	950	205	479	0*	0*
4	Persentase TPU yang berkondisi baik	57	64	73	80	85	88
5	KK MBR yang terlayani air bersih	1000	500	300	250	1300	350

Sumber: Dinas Perkim Kota Pekanbaru, 2025

Keterangan : *Tupoksi Terkait Sanitasi sudah tidak ada di Bidang PSU Dinas Perkim

Untuk pelaksanaan sub urusan penyediaan PSU pemerintah Kota Pekanbaru telah mengatur pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 155 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.

4. Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021, maka capaian jenis pelayanan dasar dan indikator kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.83. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN					Waktu Capaian
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Jumlah warga negara yang terkena relokasi pemerintah akibat program pemerintah Kota Pekanbaru yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	Setiap tahun

Sumber: Aplikasi pelaporan SPM untuk Pemerintah Daerah (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>)

Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan 2 indikator pencapaian dengan target 100% SPM urusan perumahan rakyat. Realisasi indikator capaian target SPM urusan perumahan rakyat untuk tahun 2024 berdasarkan aplikasi pelaporan SPM

untuk Pemerintah Daerah (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>) telah mencapai 100 persen berdasarkan hasil perhitungan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun permasalahan yang terdapat dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ialah:

1. Belum adanya Surat Penetapan Bencana oleh Kepala Daerah karena tidak ada bencana yang berdampak besar terhadap wilayah administratif Kota Pekanbaru. Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 Kota Pekanbaru termasuk ke dalam kategori risiko bencana sedang;
2. Belum adanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Relokasi terhadap Korban Bencana atau Program Pemerintah Daerah.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut adalah Menyusun Peraturan Walikota tentang Pembangunan atau Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana yang mengatur ketentuan di luar dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

2.4.4.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Penegakan Perda

Pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Berdasarkan data yang bersumber dari SIPD Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2024, terlihat dinamika jumlah laporan pelanggaran dalam lima tahun terakhir (2020–2024), baik yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).disajikan pada pada dibawah ini.

Tabel II.84.Laporan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Laporan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan	Laporan	27	35	35	30	29
Laporan pelanggaran Perda/Perkada	Laporan	420	1.137	1.461	1.417	1.417

Sumber: SIPD Satpol PP Kota Pekanbaru, 2025

Pada tahun 2024, laporan pelanggaran ketentraman, ketertiban, dan keindahan di Kota Pekanbaru tercatat sebanyak 29 laporan, menurun dari 35 laporan pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap ketertiban umum. Sebaliknya, laporan pelanggaran Perda/Perkada tetap tinggi, yaitu 1.417 laporan pada 2024, meningkat dari 420 laporan pada 2020, mencerminkan intensitas penegakan yang semakin aktif. unsur PPNS yang ada di SATPOL PP memiliki peran yang sangat penting dimana Kota Pekanbaru memiliki 60 orang PPNS sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan Kota Pekanbaru.

2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di Kota Pekanbaru tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP, tetapi juga didukung oleh kehadiran anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Jumlah petugas Linmas pada tahun 2024 tercatat sebanyak 490 orang, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 500 orang. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.123.348 jiwa pada tahun 2024, rasio petugas Linmas terhadap jumlah penduduk adalah 4,36 per 10.000 penduduk, menurun dari rasio tahun 2022 sebesar 4,96. Penurunan ini menunjukkan perlunya penambahan jumlah petugas Linmas agar proporsional dengan pertumbuhan penduduk dan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.85. Cakupan Petugas Linmas Kota Pekanbaru 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Petugas Linmas	488	500	500	490	530
Jumlah Penduduk	983.356	994.585	1.007.540	1.123.348	1.167.599
Rasio jumlah LINMAS per 10.000 penduduk	4,83	5,02	4,96	4,36	4,56

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru 2024, diolah Bappeda Kota Pekanbaru

3. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana kebakaran melalui waktu tanggap (response time) yang cepat, yaitu maksimal 15 menit setelah laporan diterima. Kecepatan ini ditunjang oleh kesiapsiagaan personel dan ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran. Pada tahun 2024, tingkat waktu tanggap mencapai 91%, meningkat dari 82% pada tahun 2023 dan menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 tingkat waktu tanggap baru mencapai 71%, dan meningkat bertahap hingga 89% pada 2022, rincian tingkat waktu tanggap disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.86. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di Kota Pekanbaru 2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat waktu tanggap (response time rate)	71%	75%	89%	82%	91%

Sumber: SIPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, 2025

4. Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang ditunjukkan melalui capaian indikator pelayanan dasar yang semakin membaik dari tahun ke tahun. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menunjukkan peningkatan signifikan dari 71% pada tahun 2020 menjadi 99,43% di tahun 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya kapasitas dan efektivitas tim pemadam kebakaran serta sistem tanggap darurat yang berjalan optimal. dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.87. Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 -2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdana dan perkara	83,30 %	100%	100%	100%	100%
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	90%	56%	100%	100%	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahandan kesiapsiagaan terhadap bencana	116%	84%	100%	100%	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86%	100%	100%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	71%	75%	89%	99,43 %	91%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, 2025

Capaian indikator kinerja SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berada pada Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti diketahui bahwa pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah mencapai angka 100%, dengan indikator capaian berupa Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkara. Selanjutnya 3 pelayanan dasar yang dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu: Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan capaian 100%, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan

capaian 100%, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan capaian 100%.

2.4.4.1.6. Bidang Urusan Sosial

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, urusan sosial harus merupakan salah satu fokus pembangunan, karena penyelenggaraannya pada hakikatnya adalah pembangunan sumber daya manusia demi untuk terciptanya lingkungan sosial yang sehat dan dinamis, yang akan berefek kepada meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat secara umum, DTKS Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.88.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
1	Sukajadi	314	8.497
2	Pekanbaru Kota	2.306	6.658
3	Sail	1.218	3.205
4	Lima Puluh	3.321	8.439
5	Senapelan	3.487	9.705
5	Rumbai Barat	3.505	10.126
6	Bukit Raya	5.607	14.834
7	Binawidya	5.205	12.357
8	Marpoan Damai	12.406	33.013
9	Tenayan Raya	10.855	29.395
10	Payung Sekaki	6.694	17.765
11	Rumbai Timur	9.907	27.975
12	Tuah Madani	14.324	38.192
13	Kulim	5.885	15.679
14	Rumbai Timur	3.789	9.767
15	Sukajadi	314	8.497
Total		88.823	245.607

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2024

Jumlah Individu dalam DTKS Kota Pekanbaru tahun 2024 sebanyak 245.607 jiwa atau 88.823 keluarga yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru, data ini di gunakan untuk mendesain Program Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk disasar sebagai penerima manfaat program.

Sementara itu, data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Desil 1 dari Kemenko PMK terdapat 5.880 Kepala Keluarga (KK) atau 30.814 Individu. Data ini diverifikasi & divalidasi kembali, Kemudian diperkuat Musyawarah di tingkat kelurahan untuk mendapatkan Kategori kemiskinan ekstrem sesuai dengan INPRES NO 4/2022 dan Radio Gram Mendagri 400.4.2/4505/Bangda bahwa Data P3KE dilakukan verifikasi dan validasi kemudian ditetapkan Kepala Daerah Kab/Kota.

Data yang sudah ditetapkan Kepala Daerah di bagikan kepada OPD terkait, Pemerintah Desa dan Swasta untuk dilaksanakan upaya Percepatan Pensasaran Kemiskinan Ekstrem. Kota Pekanbaru telah menetapkan penduduk miskin ekstrem melalui Keputusan Walikota Pekanbaru No 443 Tahun 2023 terdapat 708 Kepala Keluarga (KK) dan 3.926 Jiwa (individu).

2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar, perkembangan PPKS dan data PPKS Detail Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.89.Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Tahun
Total PPKS	188.405	266.318	281.169	236.669	236.669	-3,28
PPKS yang diberi Pelayanan	158.894	194.572	206.017	169.144	169.144	-1,94
Persentase	84,34	73,06	73,27	71,47	71,47	2,3

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2025

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberikan pelayanan di Kota Pekanbaru menunjukkan tren fluktuatif selama lima tahun terakhir, dengan kecenderungan penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 dan 2023, jumlah PPKS yang terlayani tercatat sebanyak 169.144 jiwa atau sebesar 71,47%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 206.017 jiwa (73,04%) dan tahun 2021 sebanyak 194.572 jiwa (73,06%). Adapun pada tahun 2020, jumlah PPKS yang terlayani sebanyak 158.894 jiwa dengan persentase tertinggi, yaitu 84,34%.

ini mencerminkan bahwa meskipun jumlah PPKS menurun, efektivitas pelayanan sosial terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjangkau kelompok rentan. Ke depan, penguatan data terpadu dan perluasan jangkauan pelayanan akan menjadi fokus dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan. perkembangan PPKS dan data PPKS Detail layanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dapat disajikan pada tabel dibawah ini.


Tabel II.90. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Tahun 2021-2024

NO	KATEGORI PSKS	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		DATA	DIBANTU	%	DATA	DIBANTU	%	DATA	DIBANTU	%	DATA	DIBANTU	%
1	Anak Balita Terlantar	4	4	100	4	4	100	1	1	100	5	5	100
2	Anak Terlantar	1	1	100	1	1	100	27	27	100	7	7	100
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	4	4	100	4	4	100	-	-	-	4	4	100
4	Anak Jalanan	85	85	100	85	85	100	70	70	100	31	31	100
5	Anak Dengan Kedisabilitas	6	6	100	6	6	100	31	31	100	31	31	100
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	0	0	0	4	4	100	7	7	100
7	Anak Yang Mengalami Tindak Kekerasan	9	9	100	9	9	100	-	-	-	42	4	100
8	Lanjut Usia Terlantar	21	21	100	21	21	100	22	22	100	195	42	100
9	Orang Dengan Kedisabilitas	34	34	100	34	34	100	126	126	100	0	195	100
10	Tuna Susila	23	23	100	23	23	100	-	-	-	114	0	0
11	Gelandangan	11	11	100	11	11	100	76	76	100	67	114	100
12	Pengemis	127	127	100	127	127	100	126	126	100	0	67	100
13	Pemulung	901	901	100	901	901	100	-	-	-	0	0	0
14	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
15	Orang Dengan HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
16	Korban Eks Napza	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
17	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
18	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
19	Bekas Warga Binaan Lembaga Permayarakatan	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
20	Korban Bencana Alam	25	25	100	25	25	100	25	25	100	673	673	100
21	Korban Bencana Sosial	57	57	100	57	57	100	57	57	100	285	285	100
22	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	2	100	2	2	100	2	2	100	0	0	
23	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	4.154	0	0	4.154	0	0	4.154	0	0	0	0	0
25	Fakir Miskin	183.842	158.485	86,21	183.842	158.485	86	183.842	158.485	86,21	247730	159393	64,87%
26	Komunitas Adat Terpencil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah		189306	159795	1586,21	189306	159795	1586	188563	159052	1286,21	247,195	160,858	65,07

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2025



3. Potensi Sumber dan Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memiliki potensi untuk membantu negara dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial, sehingga mampu mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Ada 12 jenis PSKS baik berupa individu, kelompok ataupun lembaga yang ada di Kota Pekanbaru yaitu: 1). Pekerja Sosial Profesional 2).Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 3). Taruna Siaga Bencana (Tagana) 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 5) Karang taruna 6).Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 7). Keluarga pioner 8). Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) 9). Wanita pemimpin kesejahteraan sosial 10). Penyuluh Sosial 11). Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 12). Dunia usaha, data PSKS Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.91. Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertahun
1	Total PSKS	1.033	996	733	1.288	831	16,8
2	PSKS yang Aktif	859	811	640	1.288	831	32,66
	Persentase	83,16	81,43	87,31	100	100	11,38

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2024

Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Pekanbaru dalam periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, total PSKS tercatat sebanyak 1.033, kemudian menurun menjadi 996 pada 2021 dan terus menurun menjadi 733 pada 2022. Jumlah ini meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 1.288, namun kembali turun menjadi 831 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan jumlah PSKS selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 16,8 persen per tahun.

Adapun jumlah PSKS yang aktif pada periode yang sama juga mengalami dinamika. Pada tahun 2020, terdapat 859 PSKS aktif, menurun menjadi 811 pada 2021, dan 640 pada 2022. Kemudian meningkat tajam menjadi 1.288 PSKS aktif pada 2023, dan tetap aktif seluruhnya (831 PSKS) pada 2024. Persentase keaktifan PSKS meningkat dari 83,16% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024, dengan rata-rata pertumbuhan PSKS aktif sebesar 32,66 persen per tahun. Kebijakan Kota Pekanbaru terhadap PSKS yang aktif diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pekerja sosial masyarakat seperti pelatihan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota dan pelatihan untuk kesiapsiagaan bencana.


Tabel II.92. Data PSKS di Kota Pekanbaru Tahun 2024

NO	Jenis PSKS	Kecamatan														
		Bukit Raya	Lima Puluh	Marpoyan Damai	Payung Sekaki	P. Kota	Rumbai	R. Barat	R. Timur	Sail	Senapelan	Sukajadi	Bina Widya	Tuah Madani	Kulim	T. Raya
1	Pekerja Sosial Profesional	5	4	10	7	3	7	4	3	3	5	4	3	11	4	9
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	15	10	25	11	15	11	10	9	5	15	19	21	9	6	23
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	15	8	20	9	10	22	5	6	10	10	3	3	20	8	19
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	9	6	18	10	7	8	7	8	8	6	5	10	4	3	6
5	Karang Taruna (KT)	35	30	40	53	25	34	19	5	31	44	58	75	69	60	57
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Keluarga Pioner	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penyuluh Sosial	5	2	6	-	1	2	-	-	3	1	2	5	4	2	2
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Dunia Usaha	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
11	Pendamping Rehabilitasi Sosial	3	4	3	2	1	2	1	-	2	-	-	2	5	-	2

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2025



4. Sistem Layanan Rujukan Terpadu

Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan mereka, perkembangan SLRT Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.93. Data system layanan rujukan terpadu di kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024

Tahun	Pengaduan Terlayani Rekomendasi KIP yang diberikan	Rekmendasi KIS yang diberikan	Pengaduan Non DTK Yang Dilayani
2020	443	1.302	2.795
2021	502	1.614	7.176
2022	905	3.302	3.089
2023	1.666	3.782	3.023
2024	151	0	100
TOTAL	3.667	10.000	16.183

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2024

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2024, total pengaduan yang terlayani selama periode 2020–2024 mencapai 3.667 kasus. Rekomendasi terhadap program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan sebanyak 10.000 rekomendasi, sedangkan rekomendasi untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 16.183 rekomendasi. Selain itu, terdapat pengaduan Non-DTKS yang dilayani sebanyak total 16.183 kasus.

Perkembangan kinerja SLRT terlihat dari tren peningkatan pengaduan dan rekomendasi sepanjang 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, terdapat 443 pengaduan terlayani, 1.302 rekomendasi KIP, dan 2.795 rekomendasi KIS. Jumlah tersebut meningkat signifikan pada tahun 2023, di mana pengaduan terlayani mencapai 1.666, rekomendasi KIP sebanyak 3.782, dan pengaduan Non-DTKS yang dilayani sebanyak 3.023 kasus.

Implementasi SLRT berjalan secara optimal di Kota Pekanbaru telah mendukung pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial. dapat mendukung update DTKS dan menjadi akses bagi masyarakat miskin untuk layanan kesejahteraan sosial.

5. Standar Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan dasar merupakan pelayanan

publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal, capaian SPM urusan sosial disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.94. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2023	Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh	100%	Setiap tahun

Sumber: Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

Capaian Mutu Pelayanan Dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata – rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis Capaian Penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan dasar adalah merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, semua indikator SPM urusan sosial Kota Pekanbaru tahun 2023 tercapai 100%.

2.4.4.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar

2.4.4.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wiayah/negara dan

merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Perkembangan TPAK Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.95. Kondisi ketenagakerjaan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	507.617	492.354	570.146	749.142	759.592
Angkatan Kerja	211.586	157.770	248.116	494.728	510.469
Bukan Angkatan Kerja	296.031	334.584	322.030	254.414	249.123
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,22	61,61	63,91	66,04	67,2

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, Tahun 2025

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru Tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan tren yang meningkat dalam lima tahun terakhir. TPAK tahun 2024 tercatat sebesar 67,20 persen, meningkat dari 63,91 persen pada tahun 2022 dan 65,22 persen pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan semakin tingginya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan signifikan, dari 211.586 orang pada tahun 2020 menjadi 510.469 orang di tahun 2024, seiring dengan pertumbuhan penduduk usia kerja yang mencapai 759.592 orang pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah bukan angkatan kerja menurun menjadi 249.123 orang. menunjukkan pergeseran positif menuju produktivitas..

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak Angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja, perkembangan TPT Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.96. Pengangguran Terbuka Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertahun
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,56	8,29	6,4	6,2	4,63	6,82

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, Tahun 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekanbaru menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru tahun 2024, TPT tercatat sebesar 4,63 persen, merupakan angka terendah dalam periode 2020–2024 dan jauh menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 8,56 persen.

3. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang mana penyelesaiannya dilakukan dengan perundingan dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tabel II.97. Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perjanjian Bersama dan Anjuran Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelesaian melalui perjanjian bersama	52	31	3	74	21
Penyelesaian melalui anjuran	129	72	0	74	39

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2025

Penyelesaian hubungan industrial di Kota Pekanbaru dalam periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan dan efektivitas kebijakan. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tahun 2024, penyelesaian melalui perjanjian bersama mengalami fluktuasi, dari 52 kasus pada tahun 2020, turun drastis menjadi 3 kasus pada 2022, kemudian meningkat menjadi 74 kasus pada 2023, dan kembali menurun menjadi 21 kasus pada 2024. Sementara itu, penyelesaian melalui anjuran juga menunjukkan tren serupa, dari 129 kasus di tahun 2020 menjadi 39 kasus pada 2024. seiring implementasi Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial yang mendorong penyelesaian perselisihan secara tripartit dan preventif.

4. Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja, gambaran penempatan tenaga kerja Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.98. Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Kota Pekanbaru Tahun 2021 -2024

No.	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Mendaftar	3928	5533	4.672	3145
2	Lowongan	1696	2695	2.666	2140
3	Penempatan	1773	2618	2.242	1745

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2025

Jumlah tenaga kerja yang mendaftar melalui sistem penempatan tenaga kerja pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.145 orang, dengan jumlah lowongan tersedia

2.140 posisi dan penempatan berhasil sebanyak 1.745 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi penurunan jumlah pendaftar maupun penempatan tenaga kerja. Tingkat penempatan tenaga kerja tahun 2024 mencapai sekitar 81,54 persen dari jumlah lowongan yang tersedia, menunjukkan efektivitas layanan penempatan kerja yang cukup baik. ini mengindikasikan peningkatan kemandirian usaha kerja mandiri.

5. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan adalah kegiatan yang melatih seseorang untuk mempunyai usaha melalui praktek-praktek, dimana seseorang dituntut untuk tidak hanya bisa berbicara tetapi juga bisa menunjukkannya dalam bentuk praktek yaitu berwirausaha, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.99. Tenaga Kerja yang Terdaftar Ikut Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendaftar Pelatihan	1835	3219	3624	3512	3784
2	Lulusan Pelatihan Yang Mendapatkan Sertifikat	1268	2418	2815	2922	3152

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2025

Jumlah pendaftar pelatihan terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 3.784 orang mengikuti pelatihan, meningkat dibanding tahun 2022 yang berjumlah 3.624 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.152 orang berhasil lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi, atau sekitar 83,32 persen dari total peserta pelatihan. Angka ini menunjukkan peningkatan kualitas pelatihan yang diberikan, serta semakin tingginya minat masyarakat untuk meningkatkan keterampilan kerja.

Peningkatan ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk berwirausaha dan meningkatkan daya saing di pasar kerja. Program pelatihan kerja yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru terbukti mendukung pengembangan SDM produktif dalam memperkuat ketenagakerjaan dan ekonomi lokal berbasis keterampilan.

2.4.4.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangan

Kota Layak Anak (KLA) merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan. Kota Pekanbaru telah memiliki Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Perda ini

diperlukan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak dengan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, dan dunia usaha dalam menyukseskan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

Tabel II.100. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dari Tahun 2020 -2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata- rata Tahun
1	Kekerasan dalam Rumah Tangga	20	13	46	31	27	69,29
2	Kekerasan Berbasis Gender	7	8	20	18	17	95,24
3	Kekerasan Terhadap Anak	13	20	31	27	156	52,59
4	Penelantaran	2	-	21	0	4	5,4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, 2024

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren fluktuatif namun secara umum masih memerlukan perhatian serius. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tercatat sebanyak 27 kasus pada tahun 2024, mengalami penurunan dari puncaknya di tahun 2022 yang mencapai 46 kasus, namun masih lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang hanya 20 kasus. Kasus Kekerasan Berbasis Gender juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan awal periode. Pada tahun 2024 tercatat 17 kasus, meningkat dari 7 kasus pada tahun 2020. Yang paling signifikan adalah peningkatan Kekerasan terhadap Anak, yang mencapai 156 kasus pada tahun 2024, melonjak tajam dari tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berkisar di bawah 35 kasus.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai program perlindungan dan pencegahan, masih diperlukan upaya yang lebih terintegrasi, baik dalam hal edukasi masyarakat, peningkatan layanan pengaduan, maupun penanganan yang cepat dan tepat terhadap korban kekerasan.

2. Cakupan Perempuan di Legislatif

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat proporsi dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.101. Jumlah Cakupan Perempuan di Legislatif I kota pekanbaru dari tahun 2020 -2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Tahun
1	Jumlah Kursi yang diduduki perempuan	9	9	9	9	8	9

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertahun
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	45	45	45	45	45	45

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, 2025

Untuk keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir relatif stabil. Dari total 45 kursi, jumlah kursi yang diduduki oleh perempuan tercatat sebanyak 9 orang sejak tahun 2020 hingga 2023, dan pada tahun 2024 hanya 8 orang

3. Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender

Semangat dan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender (PUG), Indeks Pembangunan Gender Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.102. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kota Pekanbaru 2020 -2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pert/Thn
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,01	93,27	93,27	93,89	94,04	93,50

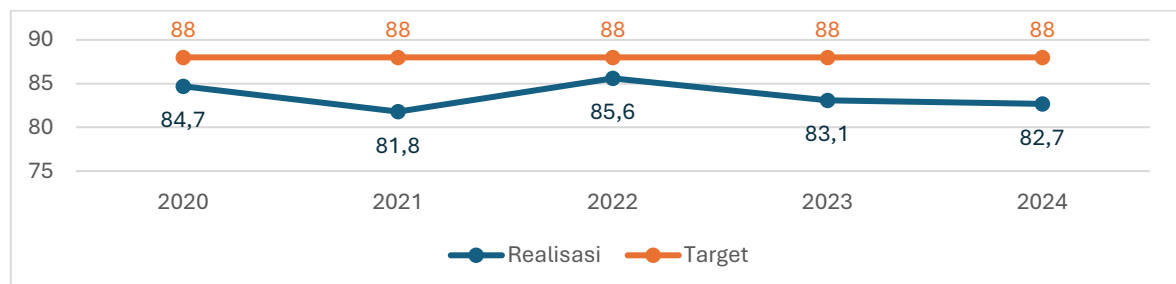
Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2025

Indeks Pembangunan Gender Kota Pekanbaru dalam waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 93,01% pada tahun 2020 menjadi 94,04% pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meningkat dari tahun ke tahun.

2.4.4.2.3. Bidang Urusan Pangan

1. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)

Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) merupakan indikator mutu gizi dan keanekaragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator kualitas konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan penduduk semakin beragam dan bergizi seimbang. Perkembangan skor PPH konsumsi pangan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Grafik II.45. Skor Pola Pangan Harapan Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, skor PPH tertinggi dicapai pada Tahun 2022 yaitu sebesar 85,6. Skor PPH ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Secara kualitas konsumsi pangan Kota Pekanbaru masih belum beragam dan bergizi seimbang. Kelompok pangan yang harus ditingkatkan konsumsinya adalah umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta buah dan sayur.

2. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari.

Secara kuantitas, konsumsi pangan penduduk Kota Pekanbaru perkapita perhari jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi dan Protein yang dianjurkan adalah sebagai berikut

Tabel II.103. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	Angka Kecukupan	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Energi	KKal/Kap/Hari	2100	2102,4	1988.1	1.941,50	1.901,20	1.890,4
2.	Protein	Gram/Kapita/hari	57	63,5	58.4	60.06	60,5	59,0

Sumber: SIPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pangan yang dikonsumsi penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2024 dalam bentuk energi adalah sebesar 1890,4 kkal/kapita/hari. Angka ini lebih kecil dari angka kecukupan energi yang dianjurkan yaitu 2.100 kkal/kapita/hari sehingga penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2023 tingkat konsumsi energinya (TKE) adalah sebesar 90,0%. Pangan yang dikonsumsi dalam bentuk protein adalah sebesar 59,0 gram/kapita/hari, Angka ini sudah melebihi dari angka kecukupan protein yang dianjurkan yaitu sebesar 57 gram/kapita/hari. Sehingga tingkat konsumsi protein (TKP) adalah sebesar 103,5 %. Secara umum, tingkat konsumsi energi sejak tahun 2021 terjadi penurunan dan belum sesuai anjuran. Berbeda dengan konsumsi protein yang selalu melebihi anjuran.

3. Indikator Komponen FSVA Kelurahan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun dalam upaya menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, sehingga dapat memberikan arahan dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

Kota Pekanbaru sudah melaksanakan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dengan unit analisis kelurahan. Hasil analisis FSVA tersebut ditindaklanjuti dengan hasil analisis FSVA Kota Pekanbaru yang divisualisasikan pada aplikasi siDIVA. Aplikasi ini diharapkan sebagai salah satu upaya pemerintah kota pekanbaru yang sesuai dengan kewenangannya dalam membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Hasil FSVA Kota Pekanbaru tahun 2024, bahwa masih terdapat 9 Kelurahan yang masih dalam Indeks 1, 2 dan 3 (status 1. Sangat Rentan Pangan, 2. Rentan Pangan dan 3. Agak Rentan Pangan) atau sejumlah 10.84% dari total kelurahan yang ada di kota Pekanbaru, dengan data-data sebagai berikut:

Tabel II.104. Indikator Komponen FSVA Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Indikator Komponen FSVA Kelurahan di Kota Pekanbaru	Indeks 1	Indeks 2	Indeks 3	Jumlah Kelurahan Yang Dalam Indeks 1, 2 dan 3	% Kelurahan Yang Butuh Stimulus
		Sangat Rentan Rawan Pangan	Rentan Rawan Pangan	Agak Rentan Rawan Pangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 3+4+5)	(7 = 6 / Total Kelurahan)
1	Sarana Prasarana	11	4	22	37	44,58
2	Akses Transportasi	0	0	0	0	0,00
3	Penduduk Tidak Sejahtera	13	13	16	42	50,60
4	Akses Air Bersih	12	11	17	40	44,57
5	Tenaga Kesehatan	14	10	-	24	28,92
6	Komposit	0	1	8	9	10,84

Sumber: Data diolah dengan siDIVA, 2025

Kelurahan yang masih dalam status 1, 2 dan 3 di atas masih memerlukan intervensi yang cukup besar dalam penanganan pangan. Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dan 2022 telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan sasaran Kelompok Wanita Tani yang lokusnya diarahkan pada kelompok yang beranggotakan keluarga beresiko stunting.

2.4.4.2.4. Bidang Urusan Pertanian

Pertanahan merupakan suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang. Pencapaian kinerja pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2020-2024, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.105. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pengadaan Tanah Berdasarkan Prioritas Pembangunan	66,43%	74,375%	79%	93,86%	90,07%
2	Persentase Sengketa Tanah yang Terfasilitasi	11%	100%	100%	100 %	100%

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, 2025

Realisasi Persentase Pengadaan Tanah Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 sebesar 90,07% dan Persentase Sengketa Tanah yang Terfasilitasi sebesar 100%. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pengadaan tanah prioritas pembangunan adalah melengkapi dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan lengkap dan benar dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk meminimalisir kegagalan.

2.4.4.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

1. Layanan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL)

Penilaian dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan memeriksa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dilakukan oleh Tim Teknis Penilai AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL. Hasil akhir penilaian AMDAL berupa Surat Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru dan pemeriksaan UKL-UPL berupa surat rekomendasi UKL-UPL yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dokumen lingkungan yang telah dilakukan penilaian disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.106. Dokumen Lingkungan yang Telah Dinilai oleh DLHK Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2024

No	Dokumen Lingkungan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	AMDAL	0	0	1	1	2	4
2.	UKL-UPL	20	13	8	9	10	60
3.	DPLH	28	6	5	1	3	43
4.	DELH	0	1	1	0	4	6
5.	SPPL	636	283	0			919
Jumlah		684	303	15	11	19	1032

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru telah melakukan penilaian terhadap 1.032 dokumen lingkungan. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari dokumen AMDAL, UKL-UPL, DPLH, DELH, dan SPPL, dengan jumlah terbesar berasal dari kategori SPPL yang mayoritas diterbitkan pada tahun 2020 dan 2021. 4 dokumen Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL), (UKL-UPL) dinilai sebanyak 60 dokumen, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) tercatat sebanyak 43 dokumen, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) 6dokumen Sementara itu, dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) merupakan yang paling banyak dinilai, yakni sebanyak 919 dokumen pada periode 2020 – 2024.

2. Pengendalian Pencemaran Air

Dalam rangka meminimalkan dampak dari aktivitas pembuangan air limbah ke lingkungan, dilakukan upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air maka setiap perorangan/pemrakarsa atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.102/MENLH/SETJEN/KUM.1/II/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, data pembuangan air limbah rumah sakit disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.107. Izin Pembuangan Air Limbah Rumah Sakit yang Telah Diterbitkan Tahun 2020 -2024

No	Izin Pembuangan Air Limbah	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	Rumah Sakit	3	2	4	9	7	25

Sumber DLHK Kota Pekanbaru, 2025

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) telah menerbitkan 97 izin pembuangan air limbah rumah sakit.. Tercatat Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) telah menerbitkan sebanyak 25 izin pembuangan air limbah rumah sakit

Tabel II.108. Data Izin Pembuangan Air Limbah yang Telah Diterbitkan Tahun 2020 -2024

Jenis Dokumen	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Izin Pengurusan Limbah Cair	12	8	11	31	27	89

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru telah menerbitkan sebanyak 89 izin pembuangan air limbah (limbah cair). Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 31 izin, diikuti oleh 27 izin pada tahun 2024. Dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai, DLHK Kota Pekanbaru melakukan pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik pantau tertentu. Hasil pemantauan tersebut diinterpretasikan ke dalam kelas air sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk menetapkan kelas air.

Tabel II.109. Nilai Indeks Pencemaran (IP) dan Status Perairan Sungai Siak Ruas Pekanbaru Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2020 -2024

No	Lokasi	Nilai IP dan Status Perairan				
		2020	2021	2022	2023	2024
ST 1	Jembatan Siak II	2,915 (TR)	2,32 (TR)	2,31 (TR)	2,32 (TR)	0,900 (MBM)
ST 2	Jembatan Siak I	3,181 (TR)	2,44 (TR)	1,23 (TR)	2,44 (TR)	1,712 (TR)
ST 3	Sekitar PT. Asia Forestama Raya (AFR)	4,199 (TR)	3,71 (TR)	1,01 (TR)	3,71 (TR)	1,662 (TR)
ST 4	Pelita Pantai	3,062 (TR)	2,60 (TR)	3,42 (TR)	2,6 (TR)	1,914 (TR)
ST 5	Pelindo	3,3 (TR)	2,29 (TR)	1,26 (TR)	2,29 (TR)	1,318 (TR)

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2025

Tabel II.110. Nilai Indeks Pencemaran dan Status Perairan Anak Sungai Siak Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2020 -2024

No	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sungai Sail I	3,965 (TR)	2,91 (TR)	2,66 (TR)	2,91 (TR)	2,024 (TR)
2	Sungai Sail II	3,496 (TR)	2,94 (TR)	1,23 (TR)	2,94 (TR)	2,172 (TR)
3	Sungai Sail III	3,86 (TR)	3,74 (TR)	3,02 (TR)	3,74 (TR)	1,515 (TR)
4	Sungai Sago	3,638 (TR)	5,07 (TR)	1,23 (TR)	5,07 (TR)	1,460 (TR)
5	Sungai Senapelan	3,025 (TR)	3,51 (TR)	1,19 (TR)	3,51 (TR)	2,103 (TR)
6	Sungai Air Hitam	3,581 (TR)	2,69 (TR)	1,24 (TR)	2,69 (TR)	3,412 (TR)
7	Sungai Umban	4,052 (TR)	2,08 (TR)	2,69 (TR)	2,08 (TR)	1,858 (TR)
8	Sungai Tenayan	2,605 (TR)	2,93 (TR)	1,2 (TR)	2,93 (TR)	1,520 (TR)
9	Sungai Pengambang	2,015 (TR)	2,015 (TR)	1,16 (TR)	1,41 (TR)	1,524 (TR)
10	Sungai Limau	2,815 (TR)	2,815 (TR)	1,02 (TR)	1,72 (TR)	1,932 (TR)
11	Sungai Sibam	3,865 (TR)	3,865 (TR)	0,81 (TR)	3,79 (TR)	3,541 (TR)

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2025

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air Sungai Siak dan anak Sungai Siak tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP No. 82 Tahun 2001 untuk Air Kelas II. Kualitas air tersebut telah tercemar dan hal ini dipengaruhi oleh:

1. Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan domestik perkotaan yang berasal dari anak Sungai Siak dan pada akhirnya bermuara ke Sungai Siak.
2. Proses alamiah perairan.
3. Tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
4. Sampah yang di buang ke badan air.

Ditinjau dari segi kualitas air, maka beberapa perairan anak sungai berada dalam kondisi tercemar ringan, Indeks Pencemaran Perairan Sungai Siak dikategorikan tercemar ringan, sedangkan Indeks pencemaran anak-anak Sungai Siak di Kota Pekanbaru dikategorikan tercemar ringan. Sungai masih dianggap tempat pembuangan sampah dan limbah oleh masyarakat.

3. Pengendalian Pencemaran Udara

Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru pada umumnya dipengaruhi oleh particulate matter (PM10), yaitu polutan khas berupa debu, asap dan partikel lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan serta asap yang keluar dari kendaraan diesel (berbahan bakar solar), secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.111. Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

Tahun	Jumlah Hari						Total
	Baik	Sedang	Tidak Sehat	Sangat Tdk Sehat	Berbahaya	Tidak Ada Data	
2020	251	73	0	0	0	42	366
2021	81	235	8	0	0	41	365
2022	146	178	4	0	0	37	365
2023	19	286	16	0	0	44	365
2024	94	265	0	0	0	7	366

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2025

Pada tahun 2024, kualitas udara ambien di Kota Pekanbaru didominasi oleh kategori sedang sebanyak 265 hari, sementara hari dengan kualitas udara baik tercatat sebanyak 94 hari. Tidak terdapat hari dengan kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, maupun berbahaya. Hanya 7 hari tercatat tanpa data. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas udara pada tahun 2024 berada dalam kategori relatif aman, meskipun dominasi kategori sedang mengindikasikan masih adanya kontribusi pencemaran dari aktivitas transportasi dan industri di wilayah perkotaan.

4. Layanan Pengelolaan Persampahan

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sampah di wilayah tertentu, timbulan sampah di Kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu meningkat ini dikarenakan jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya. Selengkapnnya mengenai kinerja pengelolaan persampahan Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.112. Indikator Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan sampah yang ditangani	Ton	283.518	353.133	356.503	330.977	369.019
Jumlah Sampah yang terkurang melalui 3Ri	Ton	64.102	63.528	65.560	16.041,51	11.970,19
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	22,61	17,99	18,39	16,52	3,24

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2025

Timbulan sampah yang ditangani di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah yang berhasil ditangani sebesar 283.518 ton dan meningkat menjadi 356.503 ton pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 330.977 ton dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 369.019 ton. Penambahan timbulan

sampah ini umumnya sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi kota.

Sementara itu, pengurangan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menunjukkan tren penurunan. Jika pada tahun 2020 jumlah sampah yang berhasil dikurangi mencapai 64.102 ton atau 22,61 persen dari total timbunan, maka pada tahun 2024 jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 11.970,19 ton atau 3,24 persen.

2.4.4.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Cakupan Penerbitan KTP

Cakupan penerbitan KTP adalah jumlah dokumen KTP yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan. Cakupan penerbitan KTP di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.113. Cakupan Penerbitan/Perekaman KTP di Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Penduduk ber KTP	Cakupan Penerbitan KTP (%)
2020	1.028.237	716.752	716.807	100,01
2021	1.074.989	762.487	720.035	94.43
2022	1.085.246	761.012	752.826	98.92
2023	1.123.348	798.843	770.385	96,44
2024	1.167.599	817.927	817.922	99,99

Sumber: Data Profil Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2025

Cakupan penerbitan KTP elektronik di Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan yang positif hingga tahun 2024. Pada tahun tersebut, cakupan penerbitan KTP hampir mencapai 100 persen, tepatnya sebesar 99,99 persen, dengan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik sebanyak 817.922 orang dari total wajib KTP sebanyak 817.927 orang. terdapat sejumlah kecil penduduk wajib KTP yang belum terekam, yang umumnya terdiri dari penduduk berkebutuhan khusus, lansia, dan pelajar tingkat SLTA yang merupakan wajib KTP pemula.

2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio Bayi Berakte Kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi yang sudah memiliki akte kelahiran pada tahun yang bersangkutan terhadap jumlah bayi pada tahun yang bersangkutan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.114. Data Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2020 – 2024 di Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah Anak usia 0-5 Tahun	Akta Kelahiran		%
		Memiliki	Tidak Memiliki	
2020	98.475	97.407	1.068	98,92%
2021	102.299	101.554	745	99,27%
2022	86.495	86.232	263	99,70%
2023	108.463	108.181	282	99,74%
2024	109.170	108.989	181	99,83%

Sumber: LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2025

Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-5 tahun di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2024. Tahun 2020 Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-5 tahun di Kota Pekanbaru mencapai 98,92 persen, tahun 2022 yang sebesar 99,70 persen, Dan tahun 2024, mencapai 99,83 persen, dengan 108.989 anak telah memiliki akta kelahiran dari total 109.170 anak. Tingginya persentase anak yang memiliki akte kelahiran disebabkan oleh kemudahan untuk mengakses akte kelahiran, baik melalui tempat bersalin (Klinik/Puskesmas/Rumah Sakit) dan kesadaran orang tua mengurus akte kelahiran untuk kepentingan pendidikan nantinya serta alasan lainnya.

3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah yang memiliki akte perkawinan terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang sudah menikah. Rasio pasangan berakte nikah di Kota Pekanbaru merupakan rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah, indikator ini bertujuan untuk mengukur kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang belum melakukan pencatatan pernikahan atau yang belum memiliki Akta Perkawinan bagi pasangan non muslim, untuk lebih jelas terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.115. Data Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2020 – 2024 di Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah Penduduk Menikah yang memiliki Akta Nikah	%
2020	67.527	100,00%
2021	70.605	100,00%
2022	930	100,00%
2023	358.173	100,00%
2024	387.241	100,00%

Sumber: LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk menikah yang memiliki akta nikah di Kota Pekanbaru mencapai 387.241 orang dengan capaian 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pasangan yang menikah telah memiliki dokumen akta nikah sebagai bukti resmi perkawinan. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 930 dokumen,

4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran untuk mengukur capaian kinerja kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang belum melakukan pencatatan kelahiran anaknya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru, selain dari itu dimaksudkan juga untuk memberikan pengetahuan kepada pihak terkait mengenai pencatatan kelahiran serta memberikan pelayanan langsung ke lapangan dan juga memberikan kemudahan akses dari segi jarak untuk melakukan pencatatan kelahiran, perkembangan cakupan penerbitan akta kelahiran disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.116. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Penduduk Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Usia <18	Akta Kelahiran	Tidak Memiliki	%
		Memiliki		
2020	322.446	267.740	54.687	83,03%
2021	342.078	311.247	30.831	90.99%
2022	345.049	339.844	5.205	98.49%
2023	344.835	333.423	11.412	96.69%
2024	363.752	353.750	10.002	97.25%

Sumber: LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2025

Cakupan penerbitan akta kelahiran bagi penduduk usia di bawah 18 tahun di Kota Pekanbaru terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, sebanyak 353.750 anak dari total 363.752 penduduk usia di bawah 18 tahun telah memiliki akta kelahiran, sehingga persentase cakupan mencapai 97,25 persen. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 96,69 persen dan tahun 2022 sebesar 98,49 persen. Namun masih terdapat 10.002 penduduk yang belum memiliki akte kelahiran yang menjadi PR bagi pemerintah. Peningkatan cakupan ini merupakan hasil dari kemudahan proses pengurusan administrasi kependudukan serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

2.4.4.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Ibadah (PMB-RI)

Salah satu inovasi pemberdayaan dalam mewujudkan masyarakat madani adalah pemberdayaan melalui rumah ibadah. Ada 98 Rumah Ibadah yang dijadikan Masjid Paripurna dan menyebar di setiap Kecamatan serta Kelurahan dengan masing-masing sebanyak 1 (satu) Masjid Paripurna. Pengukuhan program ini sebagai salah satu program strategis dalam pemberdayaan masyarakat dituangkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna. Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pekanbaru tersebut perlu upaya menetapkan Masjid Paripurna sebagai ujung ombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Maksud pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna adalah mengoptimalkan fungsi masjid di bidang Idarah (Manajemen Masjid), Imarah (Meramaikan Masjid dan Ri'ayah (Pemeliharaan Fisik

Bangunan) melalui pengelolaan manajemen secara profesional. Masjid Paripurna adalah masjid yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kota Pekanbaru. Masjid merupakan sentral umat Islam dalam berbagai aspek, baik dari sisi hubungan manusia dengan manusia (habl min al-nas) atau hubungan manusia dengan Allah SWT (habl min Allah).

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Salah satu aktor yang turut terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Pekanbaru. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ini dibentuk pada setiap Kecamatan dan Kelurahan sehingga untuk LPM Kecamatan berjumlah 15 LPM, sedangkan di Kelurahan berjumlah sebanyak 83 LPM se Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertujuan sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kelurahan yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah

Pada tahun 2019, Walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019, dimana kepengurusan LPM Kota Pekanbaru melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Kota Pekanbaru. hal ini dilandasi semangat sinergi antara pemerintah Kota Pekanbaru bersama masyarakat yang diwakili oleh lembaga pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

3. Indeks Perkembangan Pembangunan Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa/kelurahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Di bawah ini disajikan data Indeks Pembangunan Kelurahan se-Kota Pekanbaru sesuai dengan Pemendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Tabel II.117. Data Indeks Pembangunan Kelurahan Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

Tahun	Tingkat Perkembangan Pembangunan								
	Cepat Berkembang	%	Berkembang	%	Kurang Berkembang	%	Tidak Ada Data	%	Total
2021	4	4,82	15	18,07	10	54	54	65,06	83
2022	6	7,23	20	24,10	13	44	44	53,01	83
2023	20	24,10	38	45,78	7	18	18	21,69	83
2024	18	21,69	48	57,83	3	3,61	14	16,87	83

Sumber: DP3PM Kota Pekanbaru, 2025

Berdasarkan data di atas, dari 83 Kelurahan yang terdapat di Kota Pekanbaru, hanya sejumlah 65 Kelurahan pada tahun 2023 dan 69 Kelurahan pada tahun 2024 yang melakukan penginputan data pada aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Sedangkan sisanya belum melakukan penginputan data perkembangan pembangunan kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dari semua kelurahan yang menginput pada tahun 2024, terdapat 18 (delapan belas) kelurahan yang mendapat nilai Cepat Berkembang atau sebesar 21,69%, 48 (empat puluh delapan) Kelurahan dengan nilai Berkembang atau sebesar 57,83 % dan sisanya sebanyak 3 (tiga) kelurahan dengan predikat nilai Kurang Berkembang atau sebesar 3,61% sedangkan sisanya sebanyak 14 kelurahan atau sebesar 16,87% tidak terdapat data perkembangan pembangunan kelurahan karena tidak melakukan penginputan data.

Dari semua kelurahan yang menginput pada tahun 2022, terdapat 6 kelurahan yang mendapat nilai Cepat Berkembang atau sebesar 7,23%, 20 kelurahan dengan nilai Berkembang atau sebesar 24,10% dan sisanya sebanyak 13 (sepuluh) kelurahan dengan predikat nilai Kurang Berkembang atau sebesar 15,66% sedangkan sisanya sebanyak 44 kelurahan atau sebesar 53,01% tidak terdapat data perkembangan pembangunan kelurahan karena tidak melakukan penginputan data.

Pelaksanaan penilaian Desa dan Kelurahan ini oleh Tim Penilai Pembangunan Desa dan Kelurahan yang menjadi bahan utama penilaian adalah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan desa dan Kelurahan yang terdiri dari delapan indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban, Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

2.4.4.2.8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (dibawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (diatas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk

meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Sementara itu Angka fertilitas total adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. Diketuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Tabel II.118. Angka TFR Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (TFR)	2,36	2,21	2,23	2,04	2,08

Sumber: SIPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, angka Total Fertility Rate (TFR) mengalami penurunan dari 2,36 pada tahun 2020 menjadi 2,08 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata seorang wanita usia subur (15-49 tahun) di Kota Pekanbaru memiliki sekitar 2 anak selama masa reproduksinya. Tren penurunan TFR ini mencerminkan perubahan pola keluarga dan keberhasilan program pengendalian penduduk serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaturan jumlah anak demi peningkatan kualitas hidup keluarga.

Tabel II.119. Jumlah Peserta KB Aktif Kota Pekanbaru Bulan Desember 2024

NO	Kecamatan	PUS	Peserta KB Aktif								
			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Sunti-kan	Pil	Jumlah	PA/PUS
1	Sukajadi	3.813	208	210	14	495	74	1.135	534	2.670	70,02
2	Pekanbaru Kota	1.884	163	113	1	337	60	535	178	1.387	73,62
3	Sail	2.351	161	215	2	427	33	389	338	1.568	66,70
4	Lima Puluh	3.003	186	84	3	260	93	870	438	1.934	64,40
5	Senapelan	2.822	195	121	4	149	100	738	335	1.642	58,19
6	Rumbai Barat	3.731	74	151	4	276	282	1.025	419	2.231	59,80
7	Bukit Raya	13.770	1031	323	8	2.893	946	3.207	1.718	10.131	73,57
8	Binawidya	10.097	641	370	5	1.172	388	3714	953	7.243	71,73
9	Marpoyan Damai	18.811	1274	942	13	2198	457	6.266	3.024	14.186	75,41

NO	Kecamatan	PUS	Peserta KB Aktif								
			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Sunti-kan	Pil	Jumlah	PA/PUS
10	Payung Sekaki	9.855	538	371	9	820	266	3.122	1.846	6.972	70,75
11	Rumbai	11.673	490	554	8	1.223	488	3.315	1.864	7.943	68,05
12	Tenayan Raya	12.489	600	506	15	1.244	569	4.033	1.506	8.474	67,85
13	Tuah Madani	24.120	1493	847	32	1.729	1.131	8.631	2.911	16.796	69,64
14	Kulim	11.721	719	381	10	1.251	826	4.130	1.233	8.556	73,00
15	Rumbai Timur	5.930	324	202	8	630	276	2.339	826	4.605	77,66
Kota Pekanbaru		136.070	7.745	5.051	136	13.420	5.186	38.866	17.030	87.434	64,26

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, 2025

Masih rendahnya usia pasangan subur yang menggunakan KB Aktif (64,26 %) disebabkan oleh masih rendahnya minat PUS pada penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terdiri dari IUD, MOW, MOP dan Implant yakni 18.118 akseptor dari 136.070 PUS atau 13,32 persen dan masih kurangnya petugas penyuluh lapangan KB.

2.4.4.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

Kondisi geografis Kota Pekanbaru yang berupa dataran geografis menjadikan sarana transportasi darat sebagai sarana transportasi utama. Pada tahun 2024 tercatat total panjang jalan di Kota Pekanbaru sebesar 2.117 km yang terbagi menjadi jalan tingkat nasional, provinsi dan kota. Sarana transportasi publik berupa angkutan darat, air dan udara tersedia di Pekanbaru.

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Penyediaan perlengkapan jalan atau pemasangan rambu pada jalan kewenangan pusat dan provinsi yang ada di wilayah Kota Pekanbaru dilaksanakan sebagian besar oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terutama pada jalan kewenangan Provinsi. Sedangkan untuk terminal penumpang yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Kementerian Perhubungan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki dan Terminal Tipe C Senapelan dan Rumbai yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi di sektor transportasi yang pada saat ini dengan menghadirkan layanan door to door service yang berdampak kepada persaingan bisnis di sektor transportasi, dimana pada saat ini kondisi sarana dan prasarana angkutan umum yang sebagian besar masih konvensional sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan Pelayanan Sistem Angkutan Umum Massal

yang diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan masyarakat di bidang layanan transportasi dengan menghadirkan layanan Transmetro Pekanbaru yang lebih modern dan bersubsidi kepada masyarakat sehingga mampu menjangkau luasan jaringan dan keterjangkauan tarif layanan.

A. Sarana Angkutan Umum

Data sarana angkutan umum Kota Pekanbaru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.120. Data Angkutan Umum Transportasi Darat Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Jenis Angkutan	Nama Perusahaan	Jumlah Unit/ Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Oplet	Koperasi Riau Mandiri (Koprime)	33	6	4	-	-
2	Oplet	PT.Kupang Surya Trans	14	1	4	-	-
3	Oplet	PT. Ratu Tiga Saudara	-	-	-	-	-
4	Oplet	PT. Riau Citra Semesta	-	-	-	-	-
5	Bus Kota	Koperasi Riau Mandiri (Koprime)	2	-	-	-	-
6	Taksi	Puskopau	17	2	-	-	30
7	Taksi	Kopsi	12	-	-	42	37
8	Taksi	PT. Blue Bird	15	55	70	70	70
9	Taksi	PT. Riau Indah Transport	-	-	-	-	-
Jumlah Total			93	64	78	112	112

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2025

Jumlah angkutan umum di Kota Pekanbaru pada tahun 2024 tercatat sebanyak 112 unit, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebanyak 78 unit. Kenaikan ini terutama berasal dari pengoperasian armada taksi oleh beberapa perusahaan seperti PT. Blue Bird yang tetap mengoperasikan 70 unit, serta Puskopau dan Kopsi yang kembali mengaktifkan armada mereka masing-masing sebanyak 30 dan 37 unit.

Trans Metro Pekanbaru merupakan sarana angkutan masal yang melayani masyarakat Kota Pekanbaru. Dalam melayani masyarakat Pekanbaru yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, Trans Metro Pekanbaru memiliki beberapa trayek / rute dalam melayani masyarakat, lebih jelas disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.121. Trayek dan Kode Trayek Trans Metro Pekanbaru 2024

No	Trayek	Jumlah Angkutan	Jumlah Penumpang
		(Unit)	(Orang)
1	Koridor 1	8	452.868
2	Koridor 1A	2	11.397
3	Koridor 2	6	143.886
4	Koridor 3	6	213.208
5	Koridor 4A	4	95.906
6	Koridor 4B	4	31.875
7	Koridor 4C	2	35.869

No	Trayek	Jumlah Angkutan	Jumlah Penumpang
		(Unit)	(Orang)
8	Koridor 5	-	-
9	Koridor 6	-	-
10	Koridor 7A	-	-
11	Koridor 7B	-	-
12	Koridor 8A	6	85.856
13	Koridor 8B	-	-
14	Koridor 9	-	-
15	Koridor 10	-	-
16	Feeder 01	-	-
17	Feeder 02	-	-
Jumlah		38	1.070.919

Sumber: SIPD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2025

Program Pekansikawan (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan) juga menjadi program prioritas pembangunan jangka panjang yang dapat mengintegrasikan pembangunan 4 (empat) daerah tersebut. Pada kenyataannya, untuk transportasi sendiri, bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) telah melayani 2 daerah yaitu Pekanbaru dan Kampar melalui Koridor 1 dengan rute Pandau – Ramayana. Kedepan diharapkan, angkutan umum massal ini dapat melayani 4 daerah tersebut. Pekansikawan masuk kedalam 21 list kawasan metropolitan baru yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Melalui Pekansikawan, maka akan ada integrasi program antara Kota Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan misalnya transportasi, pembangunan jalan dan jembatan, serta pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk kenyamanan para pejalan kaki yang menggunakan angkutan massal.

B. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik. Pada tahun 2024 ada 11 JPO yang tersedia di Kota Pekanbaru, untuk lokasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.122. Lokasi Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru

No	Lokasi JPO
1	JPO Jalan Sudirman (Depan Toko Modelux)
2	JPO Jalan Sudirman (Depan Plaza Sukaramai)
3	JPO Jalan Sudirman (Depan RS. Awal Bross)
4	JPO Jalan Sudirman (Depan Sudirman Square)
5	JPO Jalan Sudirman (Depan Hotel Ratu Mayang Garden)
6	JPO Jalan Sudirman (Depan Gor MTQ)
7	JPO Jalan Tuanku Tambusai (Depan Toko Hawaii)
8	JPO Jalan Tuanku Tambusai (Depan Simpang Pelajar)
9	JPO Jalan Hr. Soebrantas (Depan Giant Panam)
10	JPO Jalan Hr. Soebrantas (Depan Sd Tabek Gadang)

No	Lokasi JPO
11	JPO Jalan Hr. Soebrantas (Depan Tabek Gadang)

Sumber: SIPD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2025

C. Halte

Pada tahun 2024, jumlah halte di Kota Pekanbaru sebanyak 384 dengan tipe halte permanen sebanyak 65, semi permanen 128 dan portabel sebanyak 191 untuk mendukung beroperasinya bus Trans Metro Pekanbaru, jumlah halte di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.123. Jumlah Halte di Kota Pekanbaru tahun 2024

No	Nama Ruas Jalan	Tipe Halte			
		Permanen	Semi Permanen	Portabel	Jumlah
1	Sudirman	20	3	6	29
2	Ahmad Yani	-	7	5	12
3	Soekarno - Hatta	3	24	14	41
4	Riau	-	6	13	19
5	TuankuTambusai	8	9	11	28
6	Imam Munandar	11	2	9	22
7	K.H Nasution	6	5	11	22
8	ArifinAchmad	6	4	9	19
9	H.R Soebrantas	1	20	9	29
10	Hang Tuah	-	23	18	41
11	Pasir Putih - Pandau	7	2	12	21
12	Diponegoro	-	2	5	7
13	S.S Kasim	-	1	4	5
14	M. Dahlan	-	1	6	7
15	Umban Sari	-	3	6	9
16	YosSudarso	-	2	10	12
17	S.M Amin	-	10	14	24
18	Soetomo	-	1	5	6
19	TanjungDatuk	1	1	6	8
20	Pattimura	-	1	4	5
21	Paus	-	-	5	5
22	Kartama	-	1	6	7
23	PadatKarya	-	-	3	3
24	Bandara SSK II	2	-	1	3
Jumlah		65	128	191	384

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2025

D. Perlengkapan Jalan

Pengembangan jaringan jalan sarana dan prasarana jalan bagi keperluan angkutan barang atau orang harus ditunjang dengan perlengkapan yang setiap tahun dilaksanakan untuk menjaga keselamatan berlalu lintas, menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran penggunaan jalan, perlengkapan jalan menurut undang-undang nomor 22 tahun 2019 pada pasal 25 yaitu alat perlengkapan jalan berupa

rambu-rambu laulintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, pengendali dan pengamanan jalan, pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan luar badan jalan. Tujuan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan bertujuan (1) peningkatan pengamanan dan keselamatan jalan, (2) menekan angka kecelakaan bagi pengguna jalan/ kendaraan bermotor, dan (3) menyediakan dan memasang perlengkapan jalan di lokasi rawan kecelakaan dan di daerah yang membutuhkan fasilitas keselamatan LLAJ. Berikut data jumlah unit pemasangan rambu – rambu di Kota Pekanbaru tahun 2020 – 2024.

Tabel II.124. Jumlah Unit Pemasangan Rambu-rambu di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Jumlah Unit/ Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jalan Provinsi	Unit	-	-	8	-	30
2	Jalan Kota	Unit	144	50	56	-	54

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2025

2. Pelayaran

Berdasarkan KP 432/2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Pemerintah Kota Pekanbaru mengelola dua pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Sungai Duku sebagai pelabuhan penumpang dan Pelabuhan Tenayan yang direncanakan sebagai pelabuhan penumpang dan barang. Untuk mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Tenayan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Engineering Detail Design (DED) pelabuhan tersebut.

Tabel II.125. Jumlah Penumpang dan Barang yang Berangkat dan Datang di Kota Pekanbaru 2020 -2024

No	Uraian	Jumlah Unit/ Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Berangkat					
1	Bandara					
	Orang	702.937	605.252	1.128.839	1.366.749	1.500.691
	Barang (Ton)	8.177	9.291	13.355	14.566	6.254
2	Terminal					
	Orang	21.534	27.542	18.204	14.236	n/a
	Barang (Ton)	-	-	-	-	-
3	Pelabuhan					
	Orang	1,337	40,919	46,527	44,414	30,037
	Barang (Ton)	8.163	9.278	12.902	31.440	1.110
	Datang					
1	Bandara					
	Orang	739.246	598.684	1.110.688	1.350.083	1.479.935
	Barang (Ton)	17.579	13.198	18.155	21.954	14.054

No	Uraian	Jumlah Unit/ Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Terminal					
	Orang	16.967	21.717	15.842	11.224	n/a
	Barang (Ton)	-	-	-	-	-
3	Pelabuhan					
	Orang	875	43,922	45,321	41,477	27,193
	Barang (Ton)	17.524	13.197	18.527	41.661	723

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Pada moda bandara, jumlah penumpang berangkat menunjukkan tren meningkat dari 702.937 orang pada tahun 2020 menjadi 1.500.691 orang pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah barang yang diangkut melalui bandara berangkat mengalami fluktuasi, dari 8.177 ton pada tahun 2020 meningkat hingga 14.566 ton pada 2023, namun turun kembali menjadi 6.254 ton pada tahun 2024. Untuk penumpang datang, terjadi peningkatan signifikan dari 739.246 orang pada tahun 2020 menjadi 1.479.935 orang pada tahun 2024, sedangkan barang yang masuk melalui bandara juga berfluktuasi dengan puncak di tahun 2023 sebesar 21.954 ton, lalu menurun ke 14.054 ton pada 2024.

Pada moda terminal, jumlah penumpang berangkat sempat meningkat dari 21.534 orang pada 2020 menjadi 27.542 orang pada 2021, kemudian menurun hingga 14.236 orang pada 2023, dan tidak tersedia data pada tahun 2024. Pola serupa juga terlihat pada penumpang datang yang menurun dari 16.967 orang pada 2020 menjadi 11.224 orang pada 2023, dan tidak tersedia data pada 2024. Data barang melalui terminal tidak tercatat sepanjang periode.

Untuk moda pelabuhan, penumpang berangkat menunjukkan peningkatan pesat dari hanya 1.337 orang pada 2020 menjadi 46.527 orang pada 2022, namun turun ke 30.037 orang pada 2024. Jumlah barang berangkat dari pelabuhan juga mengalami kenaikan signifikan hingga 31.440 ton pada 2023, kemudian turun tajam ke 1.110 ton pada 2024. Sementara itu, penumpang datang melalui pelabuhan meningkat dari 875 orang pada 2020 menjadi 45.231 orang pada 2022, namun kembali menurun ke 27.193 orang pada 2024. Barang datang melalui pelabuhan sempat meningkat hingga 41.661 ton pada 2023, sebelum menurun drastis menjadi 723 ton pada 2024. Penurunan volume barang kemungkinan besar disebabkan oleh penyesuaian jalur logistik atau berkurangnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa bandara merupakan moda transportasi utama dengan jumlah penumpang dan barang tertinggi dibandingkan terminal maupun pelabuhan. Tren pergerakan penumpang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi pada jumlah barang, terutama di pelabuhan yang mengalami lonjakan pada 2023 namun turun tajam pada 2024.

3. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah suatu perlengkapan jalan raya sebagai penunjang keamanan pemakai jalan raya. Pada tahun 2017, dilakukan pendataan LPJU di Kota Pekanbaru dan setelah diverifikasi jumlah LPJU Kota Pekanbaru berjumlah 37.133 titik yang tersebar di Jalan Provinsi sebanyak 1.217 titik, Jalan Nasional sebanyak 117 titik dan Jalan Kota sebanyak 24.609 titik. Pada tahun 2022 dari 37.133 titik yang diverifikasi, sebanyak 2.406 titik sudah diremajakan ke LED Smart System dan 458 titik Non Smart. Pada tahun 2023 Lampu Penerangan Jalan Umum telah dilakukan verifikasi ulang, terdapat 49.007 titik lampu, yang terdiri dari 6.289 titik LED Smart System dan 42.718 titik Non Smart System.

4. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

KIR adalah proses pemeriksaan berkala yang dilakukan pada kendaraan bermotor, khususnya kendaraan niaga seperti truk dan bus . Uji KIR dilakukan untuk memastikan kendaraan bermotor ini memenuhi standar keselamatan dan layak beroperasi di jalan raya, perkembangan jumlah kendaraan yang melaksanakan KIR disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.126. Jumlah kendaraan yang telah melaksanakan uji berkala pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2024,

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	AJDP	163	-	-	11	-
2	Taksi	490	172	70	133	1,253
3	Oplet	236	22	12	6	1,842
4	Rental	185	131	131	11	1,658
5	Oto Bis	1.078	946	1.003	953	3,728
6	Mini Bus	451	358	315	204	2,863
7	Pick Up	31.209	22.169	19.385	18.595	60,277
8	Truck Sumbu – 2	9.881	6.572	7.085	6.535	29,955
9	Truck Sumbu – 3	1.126	288	2.074	394	6,806
10	Tanki Sumbu – 2	166	237	390	310	1,332
11	Tanki Sumbu – 3	103	152	-	124	676
12	Trucktor Head	84	156	259	166	770
13	Kereta Tempelan	20	83	143	127	628
14	Kereta Gandengan	-	-	-	0	4
15	Kendaraan Khusus	233	377	400	334	858
Jumlah		98.391	31.665	31.267	27.903	112,650

Sumber: SIPD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2025

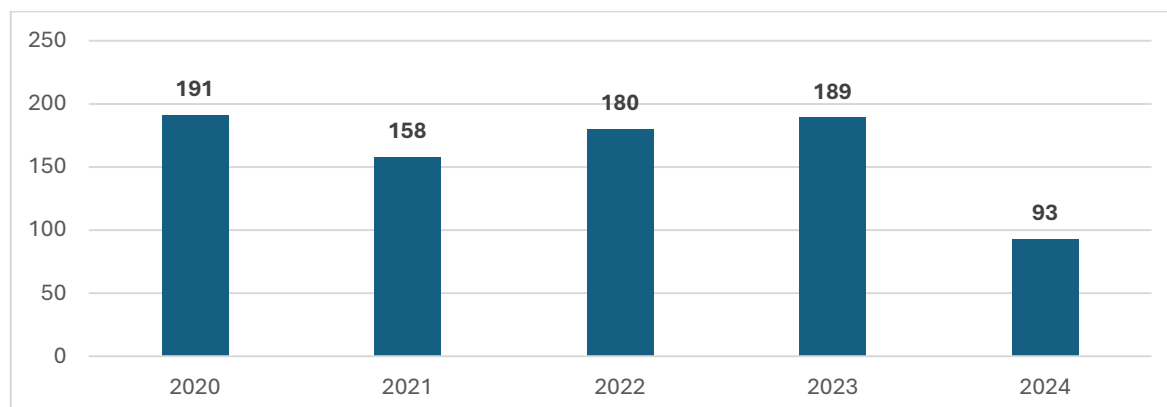
Jumlah kendaraan yang telah melaksanakan uji berkala di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 112.650 unit kendaraan. Jumlah ini melonjak hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencatat 31.267 unit kendaraan.

Kendaraan yang paling banyak melakukan uji berkala berasal dari jenis pick up sebanyak 60.277 unit, disusul oleh mini bus sebanyak 2.863 unit, oto bis sebanyak 3.728 unit, dan truck sumbu-2 sebanyak 29.955 unit. Jenis kendaraan lainnya seperti taksi, rental, tanki, dan truk sumbu-3 juga menunjukkan peningkatan jumlah uji berkala secara signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan tajam ini mencerminkan adanya perbaikan kesadaran pemilik kendaraan terhadap pentingnya keselamatan dan kelaikan jalan kendaraan, serta optimalisasi pengawasan dan pelayanan uji berkala yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Selain itu, kemungkinan penerapan regulasi yang lebih ketat dan digitalisasi pelayanan turut mendorong peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala di tahun 2024.

5. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak diduga melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, jumlah kecelakaan di kota Pekanbaru disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber: Polresta Pekanbaru, 2025

Grafik II.46. Rekapitulasi Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru pada periode tahun 2020-2024 berfluktuatif, tahun 2020 sebanyak 191 kejadian menurun menjadi 93 kejadian tahun 2024.

2.4.4.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah menyelenggarakan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, Indeks SPBE Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.127. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Tahun
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,17	3,48	8,31	3,42	3,65	4,21

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024, Kota Pekanbaru memperoleh skor sebesar 3,65 yang termasuk dalam kategori baik, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 3,42. Peningkatan indeks SPBE ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital serta meningkatkan efisiensi layanan publik berbasis elektronik di perangkat daerah Kota Pekanbaru.

Rata-rata indeks SPBE Kota Pekanbaru selama periode 2020–2024 berada di angka yang terus membaik, dengan capaian tertinggi sempat dicatat pada tahun 2022 sebesar 8,31. Lonjakan tersebut merupakan hasil dari percepatan pembangunan infrastruktur digital dan penerapan kebijakan transformasi digital di berbagai perangkat daerah. Secara keseluruhan, peningkatan indeks SPBE Kota Pekanbaru menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam penerapan e-government menuju tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan modern. Agar penerapan SPBE berjalan optimal, diperlukan dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai di setiap OPD. Sarana TIK yang dibutuhkan meliputi perangkat keras (server, komputer, laptop, perangkat jaringan, dan perangkat penyimpanan data), perangkat lunak (aplikasi pelayanan, sistem manajemen data, serta perangkat keamanan informasi), serta jaringan internet dengan kapasitas yang stabil dan merata. Berikut ini adalah data kebutuhan Sarana dan Prasarana TIK untuk OPD pada tabel di bawah ini.

Tabel II.128. Kebutuhan Sarana dan Prasarana TIK untuk OPD

No	OPD (y)	Jumlah Pegawai			Kebutuhan			
		ASN (a)	Non-ASN (b)	Total c = (a+b)	Komputer i = (a x 1 unit)	Printer j = (a x 1 unit)	Bandwidth k = (c x 1 Mbps)	Storage z = (1+20%)n x N
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64	13	77	64	64	77	
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	42	25	67	42	42	67	

No	OPD (y)	Jumlah Pegawai			Kebutuhan			
		ASN (a)	Non-ASN (b)	Total c = (a+b)	Komputer i = (a x 1 unit)	Printer j = (a x 1 unit)	Bandwidth k = (c x 1 Mbps)	Storage z = (1+20%)n x N
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35	183	218	35	35	218	
4	Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	152	388	440	152	152	440	
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru	35	16	51	35	35	51	
6	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	53	24	77	53	53	77	
7	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	48	24	72	48	48	72	
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	38	20	58	38	38	58	
9	Dinas Ketahanan Pangan	32	17	49	32	32	49	
10	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	36	63	99	36	36	99	
11	Dinas Koperasi UKM	30	25	55	30	30	55	
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	77	571	648	77	77	648	
13	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	53	251	304	53	53	304	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	43	30	73	43	43	73	
15	Dinas Pendidikan	141	67	208	65	130	208	
16	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	68	67	135	53	38	135	
17	Dinas Perhubungan	81	447	528	70	40	528	
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	49	57	106	38	17	106	
19	Dinas Pertanahan	26	25	51	16	20	51	
20	Dinas Pertanian Dan Perikanan	84	57	141	10	10	141	

No	OPD (y)	Jumlah Pegawai			Kebutuhan			
		ASN (a)	Non-ASN (b)	Total $c = (a+b)$	Komputer $i = (a \times 1 \text{ unit})$	Printer $j = (a \times 1 \text{ unit})$	Bandwidth $k = (c \times 1 \text{ Mbps})$	Storage $z = (1+20\%)n \times N$
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	51	128	179	36	40	179	
22	Dinas Tenaga Kerja	25	19	44	25	25	44	
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69	104	173	69	69	173	
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	32	52	84	32	32	84	
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76	190	266	76	76	266	
26	Inspektorat	78	6	84	78	78	84	
27	Kecamatan Binawidya	59	28	87	59	59	87	
28	Kecamatan Bukitraya	52	15	67	52	52	67	
29	Kecamatan Kulim	44	16	60	44	44	60	
30	Kecamatan Lima Puluh	39	13	52	39	39	52	
31	Kecamatan Marpoyan Damai	66	20	86	66	66	86	
32	Kecamatan Payung Sekaki	52	18	70	52	52	70	
33	Kecamatan Pekanbaru Kota	43	20	63	43	43	63	
34	Kecamatan Rumbai	45	22	67	45	45	67	
35	Kecamatan Rumbai Barat	40	23	63	40	40	63	
36	Kecamatan Rumbai Timur	28	21	49	28	28	49	
37	Kecamatan Sail	34	12	46	34	34	46	
38	Kecamatan Senapelan	44	18	62	44	44	62	
39	Kecamatan Sukajadi	59	19	78	59	59	78	
40	Kecamatan Tenayan Raya	66	22	88	66	66	88	
41	Kecamatan Tuah Madani	50	19	69	50	50	69	
42	Satuan Polisi Pamong Praja	90	480	570	90	90	570	

No	OPD (y)	Jumlah Pegawai			Kebutuhan			
		ASN (a)	Non-ASN (b)	Total $c = (a+b)$	Komputer $i = (a \times 1 \text{ unit})$	Printer $j = (a \times 1 \text{ unit})$	Bandwidth $k = (c \times 1 \text{ Mbps})$	Storage $z = (1+20\%)n \times N$
43	Dinas Kesehatan	1096	125	1.221	1096	1096	1.221	
44	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36	45	81	36	36	81	
45	Dinas Sosial	25	42	77	25	25	77	
46	RSUD Madani	181	474	655	181	181	655	
47	DPRD	67	120	187	67	67	187	
48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	63	1.486	1549	63	63	1549	

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2025 (diolah)

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru tidak hanya menuntut ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, tetapi juga memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan proporsional. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pekanbaru sebagai *leading sector* dalam implementasi SPBE memiliki peran strategis dalam mengelola infrastruktur teknologi, menyediakan layanan digital, serta memastikan integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berikut ini adalah data Kebutuhan SDM Dinas Kominfo Kota Pekanbaru Tahun 2025 pada tabel di bawah ini.

Tabel II.129. Kebutuhan SDM Dinas Kominfo Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	POSISI JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	2
2	Penata Layanan Operasional	8
3	Penelaah Teknis Kebijakan	4
4	Pengelola Layanan Operasional	6
5	Pengolah Data dan Informasi	4
	TOTAL KESELURUHAN	24

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, 2025 (diolah)

2. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon dan PC/Komputer

Komunikasi dan informatika sangat penting bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Jaringan komunikasi yang memadai dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang penting dan untuk mendapatkan informasi dibutuhkan teknologi pendukungnya, antara lain telephone dan internet. Penggunaan HP/Telepon dan PC/Komputer dilakukan pengukuran terhadap penduduk yang berusia 5 tahun keatas dalam tiga bulan terakhir setiap suvei dilakukan oleh BPS. PC/Komputer sudah menjadi kebutuhan dalam mendukung

aktivitas masyarakat, berikut disajikan persentase rumah tangga yang menggunakan HP/Telephone dan PC/Laptop di Kota Pekanbaru.

Tabel II.130. Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon dan PC/Komputer di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Tahun
1	Persentase Penduduk yg Menggunakan HP/Telepon	94,83	95,01	90,78	79,55	94,83	91
2	Persentase Penduduk yg Menggunakan PC/Komputer	29,53	23,99	20,48	22,86	94,83	38,34

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2025

Persentase penduduk Kota Pekanbaru yang menggunakan HP/telepon mencapai 94,83%, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (79,55%). Sementara itu, persentase penduduk yang menggunakan PC/komputer juga menunjukkan lonjakan tajam menjadi 94,83% pada tahun 2024, setelah sebelumnya berada di kisaran 20–29%. Kenaikan ini mencerminkan percepatan adopsi teknologi informasi di masyarakat, yang kemungkinan besar dipicu oleh meningkatnya kebutuhan digitalisasi di bidang pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

3. Persentase Penduduk Mengakses Internet

Penduduk mengakses internet adalah kemampuan untuk tersambung ke jaringan internet menggunakan terminal komputer, komputer atau perangkat lainnya termasuk Facebook, Twitter, Tik tok, Instagram, Whatsapp. Perkembangan digital di Kota Pekanbaru menunjukkan tren yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru juga turut mendorong digitalisasi melalui berbagai program, termasuk perluasan jaringan internet, layanan publik berbasis elektronik, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Berikut gambaran masyarakat mengakses internet disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.131. Persentase Penduduk yang Mengakses Internet di Kota Pekanbaru 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pert/Thn
1	Kota Pekanbaru	75,22	81,22	78,48	85,63	88,6	7,02
2	Provinsi Riau	52,78	62,83	68,85	73,02		13,01

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan data BPS Provinsi Riau tahun 2024, persentase penduduk Kota Pekanbaru yang mengakses internet mencapai 88,6%, meningkat dari 85,63% pada tahun 2023. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Riau, yang pada tahun 2023 berada di angka 73,02%. Secara rata-rata, pertumbuhan penduduk

Kota Pekanbaru yang mengakses internet selama lima tahun terakhir (2020–2024) adalah 7,02% per tahun.

Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhan tahunan Kota Pekanbaru masih berada di bawah rata-rata provinsi (13,01%). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah di luar ibu kota provinsi mengalami peningkatan akses internet yang lebih pesat, kemungkinan besar karena perluasan infrastruktur jaringan internet dan peningkatan layanan digital yang lebih merata ke berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pada tahun 2024, persentase penduduk Kota Pekanbaru yang mengakses internet mencapai 88,6 persen, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka ini tetap berada di atas rata-rata provinsi Riau, yang juga menunjukkan tren kenaikan pesat dalam akses internet. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya ketersediaan infrastruktur digital dan tingginya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat Pekanbaru.

Dalam konteks ini, keberadaan media cetak dan online terverifikasi juga sangat relevan dengan persentase penduduk yang mengakses internet di Kota Pekanbaru yang terus meningkat setiap tahunnya. Tingginya akses internet masyarakat membuat arus informasi semakin cepat dan luas, sehingga kualitas media menjadi faktor penting dalam menjaga akurasi dan kredibilitas informasi yang diterima masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang aktif menggunakan internet, kebutuhan akan media yang terpercaya juga semakin besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan media terverifikasi berperan penting dalam mewujudkan ekosistem informasi digital yang sehat, mendukung literasi masyarakat, serta mencegah penyebaran hoaks atau berita yang menyesatkan. Berikut disajikan data kerjasama media Kota Pekanbaru pada tabel di bawah ini.¹

Tabel II.132. Data Kerjasama Media Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	DATA MEDIA	2024
1	Media yang terverifikasi	274
2.	Media yang belum terverifikasi	66
	Jumlah Media	340

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2025 (diolah)

4. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk dari, oleh, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan media teknologi informasi, di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.133. Cakupan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

No	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	25	20	20	20	25

Sumber: SIPD Diskominfo, 2025

Cakupan layanan telekomunikasi di Kota Pekanbaru dari tahun 2020 hingga 2024 terus menunjukkan peningkatan yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan. Pada tahun 2020, cakupan pembangunan dan pemberdayaan KIM tercatat sebesar 16,66 persen, kemudian meningkat menjadi 20 persen pada tahun 2022, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 25 persen.

2.4.4.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berasas kekeluargaan. Untuk melihat aktivitas koperasi dapat dilihat dari koperasi aktif, yaitu koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Perkembangan koperasi di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.134. Jumlah Koperasi Aktif di Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif	425	456	468	491	503
2	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	661	657	657	657	655

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, 2025

Jumlah koperasi aktif di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 503 koperasi aktif, naik dari 491 koperasi pada tahun 2023 dan 425 koperasi pada tahun 2020. Meskipun demikian, jumlah koperasi tidak aktif masih tergolong tinggi dan stagnan, yaitu sebanyak 655 koperasi sejak tahun 2021 hingga 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan koperasi yang aktif, tantangan dalam menghidupkan kembali koperasi tidak aktif masih perlu menjadi perhatian.

Tabel II.135. Data Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam	17 Unit	18 Unit	20 Unit	20 Unit	2 Unit

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, 2025

Sementara itu, jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam masih sangat terbatas. Pada tahun 2022, dari total 1.062 koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, hanya 20 unit yang memiliki izin usaha resmi. Hal ini menandakan masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi perizinan, serta perlunya penguatan kapasitas kelembagaan koperasi agar dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan.

Adapun ruang lingkup penilaian Kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek permodalan, kualitas aktivitas produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dari pertumbuhan dan jati diri. Selanjutnya, penilaian Kesehatan koperasi diklasifikasikan ke dalam kategori sehat yaitu jika memperoleh skor 80,00 - 100 (sehat), dan 66,00 - <80,00 (cukup sehat), dan kategori tidak sehat jika memperoleh skor 51,00 - < 66,00 (dalam pengawasan) dan skor 0 - < 51,00 (dalam pengawasan khusus), koperasi berdasarkan kesehatan KSP/USP disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.136. Data Koperasi Berdasarkan Kesehatan KSP/USP Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

No.	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah KSP/USP	1040	1049	1062	1.061	1.061
2.	Jumlah KSP/USP yang Sehat	170	173	184	216	216
3.	Jumlah KSP/USP yang Tidak Sehat	870	876	878	845	845

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, 2025

2. Persentase UKM Non BPR/LKM, BPR/LKM, dan UMKM Aktif

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM), BPR identik untuk memberikan layanan kepada UMKM, perkembangan UKM non BPR/LKM, BPR/LKM dan UMKM aktif di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.137. Persentase UKM Non BPR/LKM, BPR/LKM dan UMKM Aktif di Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase UKM non BPR/ LKM aktif	-	-	-	-	-
2	Persentase BPR/ LKM aktif	80,69	87,16	-	93,63	100,1
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,39	19,01	25,65	39,61	51,74

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, 2025

Pada tahun 2024, kinerja pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru menunjukkan tren positif. Persentase Usaha Mikro dan Kecil aktif meningkat signifikan menjadi 51,74 persen, naik dari 39,61 persen pada tahun sebelumnya. Ini

menunjukkan adanya perkembangan yang pesat dalam aktivitas UMKM, baik dari segi jumlah maupun keberlangsungan usaha. Sementara itu, persentase BPR/LKM aktif juga terus mengalami peningkatan, mencapai 100,1 persen pada tahun 2024,

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Koperasi, UKM telah melakukan upaya meningkatkan kinerja UMKM di Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja Persentase UMKM Naik Kelas dan Pertumbuhan Wirausaha Baru (WUB). terdapat Peningkatan yang tidak lepas dari berbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Koperasi dan UKM, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, hingga fasilitasi akses pembiayaan. terutama akibat perubahan klasifikasi dalam PP No. 7 Tahun 2021, pada tahun 2024 upaya pemberdayaan yang lebih terarah mulai menunjukkan hasil, tercermin dari tumbuhnya semangat kewirausahaan dan peningkatan skala usaha para pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.

2.4.4.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Perkembangan investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru baik dari investasi dalam negeri maupun luar negeri disajikan pada tabel dibawah ini.


Tabel II.138. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2020 -2024

Tahun	PMDN					PMA					TOTAL (PMDN+PMA)	
	Proyek (Jumlah)	Realisasi (Rp juta)	Jumlah Daya Serap Tenaga kerja (Orang)		Rasio (Orang/ Proyek)	Proyek (Jumlah)	Realisasi (Rp Juta)	Jumlah Daya Serap Tenaga kerja (Orang)				
			TKI	TKA								
2020	1.288	2.534.744,00	5.036	-	3,91	132	2.657.171,52	2.393	2	18,14	1420	5.191.916
2021	2.289	2.208.048,10	6.440	1	2,81	134	1.897.766,40	1.676	-	12,51	2423	4.105.815
2022	1.674	3.983.436.500	915	-	0,55	144	337.489,04	-	-	0	1.788	4.320.925,54
2023	5.088	5.898.237.700.000	12.865	1	2,50	342	606.157.680.000	414	-	1,21	5.430	6.504.395.380.000
2024	7.788	4.858.612.109.225	11.312	1	1,45	604	843.471.337.060	622	0	1,02	8.392	5.702.083.446.285

Sumber: SIPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, 2025

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. Multiplier effect atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (direct investment) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (portofolio investment).

Pada tahun 2024, realisasi total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Pekanbaru mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar Rp 5.702.083.446.285, dengan total 8.392 proyek.

Sedangkan, Realisasi PMDN tahun 2024 mencapai Rp 4.858.612.109.225 melalui 7.788 proyek, yang menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) sebanyak 11.312 orang, dengan rasio tenaga kerja per proyek sebesar 1,45 orang. Sementara itu, PMA juga menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp 843.471.337.060 dari 604 proyek, menyerap 622 TKI dan 0 Tenaga Kerja Asing (TKA), dengan rasio tenaga kerja per proyek sebesar 1,02 orang.



Peningkatan investasi ini mencerminkan iklim usaha dan ekonomi yang semakin kondusif di Kota Pekanbaru, serta keberhasilan Pemerintah Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan realisasi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

2.4.4.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, ada batasan usia termuda hingga tertua untuk menyebut seseorang sebagai pemuda yaitu berusia antara 16-30 tahun, terentang potensi pemuda dan olahraga disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.139. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

Tahun	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Persentase
2020	52	9	61	85,25%
2021	52	9	61	85,25%
2022	55	10	65	84,62%
2023	55	10	65	84,62%
2024	57	8	65	87,69%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, 2025

Pada tahun 2024, jumlah organisasi kepemudaan yang aktif di Kota Pekanbaru mencapai 57 organisasi dari total 65 organisasi yang terdaftar. Dengan demikian, persentase organisasi yang aktif sebesar 87,69%, menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 84,62%.

Jumlah pemuda sebanyak 249.229 jiwa atau 24,73 persen dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru merupakan kota dengan persentase jumlah pemuda terbesar di Indonesia (BPS Kota Pekanbaru Tahun 2023). Pemuda Kota Pekanbaru merupakan keunggulan demografi yang besar, tetapi belum menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang sebanding dengan jumlah dan persentasinya yang besar. Permasalahan utama pembangunan kepemudaan di Kota Pekanbaru adalah ketersediaan lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda. Partisipasi dan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru masih rendah, serta masih tingginya permasalahan gender dan diskriminasi merupakan sebagian dari permasalahan kepemudaan di Kota Pekanbaru.

2. Prestasi Olahraga

Prestasi olahraga merupakan hasil optimal yang dicapai oleh seorang atlet atau kelompok orang (tim/regu) dalam bentuk kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas, baik dalam kompetisi resmi maupun individu, data prestasi olahraga disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.140. Data Prestasi Olahraga Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024

No	Uraian	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Atlit Yang Dibina	150	150	96	145
2	Jumlah Organisasi Olahraga	4	4	7	8
3	Jumlah Cabang Olahraga	43	43	50	50

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, 2025

Pada tahun 2024, sektor keolahragaan di Kota Pekanbaru menunjukkan perkembangan positif. Jumlah atlet yang dibina meningkat menjadi 145 orang, setelah sebelumnya sempat menurun menjadi 96 orang pada tahun 2023. Jumlah ini mendekati capaian tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing membina 150 atlet.

Selain itu, jumlah organisasi olahraga juga bertambah dari 7 organisasi pada tahun 2023 menjadi 8 organisasi pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan partisipasi dan kelembagaan dalam dunia olahraga di daerah. Jumlah cabang olahraga yang aktif tetap konsisten sebanyak 50 cabang, meningkat dari 43 cabang pada tahun 2021 dan 2022.

Perkembangan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, serta mendukung capaian target nasional sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022. Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pembinaan atlet dan pengembangan organisasi olahraga sebagai upaya meningkatkan prestasi, kesehatan masyarakat, serta memperkuat semangat sportivitas dan persatuan.

Tabel II.141. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Jenis Penghargaan	Lembaga/ Negara yang memberikan
1	Juara Umum I Renang Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
2	Juara I Futsal Putra Kejurda U-18 Provinsi Riau	Pemprov Riau
3	Juara III Futsal Putri Kejurda U-18 Provinsi Riau	Pemprov Riau
4	Juara I U-14 Cabor Sepakbola Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
5	Juara I U-15 Cabor Sepakbola Kejurda pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
6	Juara III Takraw Putri Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
7	4 Orang Perwakilan Kota Pekanbaru lulus sebagai Pasibraka Tingkat Provinsi Riau	Pemprov Riau
8	2 Orang Perwakilan Kota Pekanbaru terpilih sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Riau	Pemprov Riau
9	7 Medali Emas, 9 Medali Perak, 8 Medali Perunggu PON XX Papua	Kemenpora
10	4 Medali Emas, 12 Medali Perak, 18 Medali Perunggu PEPARNAS XVI Papua	Kemenpora

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, 2022

Tabel II.142. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2022

No	Jenis Penghargaan	Lembaga/ Negara yang memberikan
1	Juara Umum I POPDA XV RIAU 2022	Pemprov Riau
2	Juara Umum III PORPROV X RIAU 2022	Pemprov Riau
3	Juara I Jalan Cepat 5k Remaja Putra KEJURNAS ATLETIK 2022	PASI Pusat
4	PRA POPNAS Tahun 2022	Kemenpora
5	Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Satuan Pendidikan Tahun 2022	Pemkab Kota Payakumbuh
6	Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda Tingkat Nasional Piala Walikota Pariaman Tahun 2022	Pemkab Kota Pariaman
7	Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda Tingkat Nasional Piala Walikota Pariaman Second Round Tahun 2022	Pemkab Kota Pariaman
8	Juara I Cabor Atletik ASEAN PARA GAMES 2022	National Paralympic Committee (NPC)
9	1 Orang Perwakilan Kota Pekanbaru lulus sebagai Pasibraka Tingkat Provinsi Riau	Pemprov Riau

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, 2023

Tabel II.143. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Jenis Penghargaan	Lembaga/ Negara yang memberikan
1	Juara 1 dan 2 Cabor Atletik Asean Para Games XII 2023	National Paralympic Committee (NPC)
2	Juara 1 Cabor Judo Asean Para Games XII 2023	National Paralympic Committee (NPC)
3	Juara 2 Kejurnas Para Bulutangkis 2023	National Paralympic Committee (NPC)
4	Juara 1 Kejurnas Indonesia Taekwondo Challenge Kemenpora Cup	Kemenpora
5	Juara 3 Cabang Olahraga Ski Air Kejurnas Pra PON	Kemenpora
6	Juara 3 Cabang Olahraga Squash Kejurnas Pra PON	Kemenpora
7	Juara 3 Kejuaraan Nasional Sambo	PERSAMBI Pusat
8	Juara 3 Cabang Olahraga Sambo Indonesian Martial Arts Games	KONI Pusat
9	Juara 1 Cabor Atletik Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
10	Juara 2 Cabor Sepaktakraw Putra Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
11	Juara 3 Cabor Sepaktakraw Putri Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
12	Taekwondo Championship Kajati Riau Cup	Pemprov Riau
13	Juara 1 Cabor Taekwondo Junior Putri Gubernur Cup Jambi	Pemprov Jambi
14	Juara 1 Cabor Taekwondo Piala Walikota Solok	Pemkot Solok

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, 2024

2.4.4.2.14. Bidang Urusan Statistik dan Persandian

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kota Pekanbaru Dalam Angka” dan Buku “PDRB”. Untuk pencapaian indikator “Buku Kota Dalam Angka” dan “Buku PDRB”, Pemerintah Kota Pekanbaru tetap melaksanakan kegiatan pendukung serupa, namun lebih mengarah pada penyajian informasi buku secara elektronik yang dapat di akses pada website Pekanbaru.go.id. Pada TA 2021, pemenuhan kebutuhan indikator “Buku Kota Dalam Angka” dan “Buku PDRB” di laksanakan melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) berupa bantuan untuk konten/isi.

Dalam rangka mewujudkan sistem data dan Statistik yang terintegrasi yang diwujudkan melalui PERKADA tentang Satu Data Indonesia di Kota Pekanbaru dan Portal Satu Data Pekanbaru dibangun tahun 2021. Sementara itu buku Pekanbaru Dalam Angka adalah produksi dari BPS dan Diskominfo hanya melakukan Publikasi dan Penggandaan setelah mendapat izin dari BPS, dan hal ini berlangsung sejak 2017 hingga saat ini.

Kedua dokumen di atas ada di Kota Pekanbaru, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Adapun sistem data dan statistik yang terintergrasi yang sudah dibangun adalah Sistem Satu Data Pembangunan Kota Pekanbaru. Pencapaian indikator tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi diwujudkan melalui pengadaan sistem informasi data Kota Pekanbaru, yaitu Bank Data. Kehadiran Bank Data tersebut di harapkan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi untuk berbagai keperluan, seperti Perencanaan. Hal yang sama, yaitu pemenuhan kebutuhan data dan informasi untuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri akan dapat terpenuhi dari berbagai jenis data base pada Bank Data tersebut. Persentase ketersediaan Data Statistik Sektorial Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebesar 75 persen. Sementara itu Buku Kota Pekanbaru Dalam Angka dan Buku PDRB Kota Pekanbaru sudah tersedia yang dikeluarkan oleh BPS Kota Pekanbaru.

Tabel II.144. Ketersedian Data Statistik Sektorial Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Belum	Rencana	Rencana	Direncanakan	Rencana
2.	Buku Kota Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, 2024

Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsistensi serta ikatan pada

etika profesi sandi. Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pengamanan untuk sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah Kota Pekanbaru diperoleh melalui 5 (lima) aspek diantaranya aspek tata kelola, aspek pengelolaan risiko, aspek kerangka kerja keamanan informasi, aspek pengelolaan aset serta aspek teknologi dan keamanan informasi

Selama tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Pekanbaru terus mengupayakan penyediaan data statistik sektoral. Namun, sistem data dan statistik yang terintegrasi masih belum terealisasi sepenuhnya, dengan status masih dalam tahap perencanaan hingga tahun 2024. Sementara itu, Buku Kota Pekanbaru Dalam Angka tersedia secara konsisten setiap tahun. Sebaliknya, Buku PDRB hanya tersedia hingga 2022, dan tidak diterbitkan pada 2023 serta belum tercatat pada 2024.

Tabel II.145. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2020 -2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	45	60	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, 2025

Dalam bidang keamanan informasi, terjadi peningkatan signifikan. Pada 2024, seluruh perangkat daerah (100%) telah menggunakan sandi dalam komunikasi internal, naik dari 60% pada 2021. Pengamanan informasi dilakukan melalui lima aspek utama: tata kelola, manajemen risiko, kerangka kerja keamanan, pengelolaan aset, serta teknologi informasi.

2.4.4.2.15. Bidang Urusan Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang merupakan cara hidup yang berkembang dan memiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya. Kota Pekanbaru memiliki nilai sejarah, selain itu juga menjadi simbol eksistensi masyarakat melayu dengan nilai-nilai budaya tradisional yang dimilikinya. Budaya Melayu dimanifestasikan dalam tradisi daerah yang terus dipertahankan, antara lain pada helat pernikahan, pantun, tari-tarian, nyanyian, bentuk atap selembayung, pakaian, dan lembaga budaya melayu. Pada lingkup yang lebih luas budaya melayu juga diterapkan dalam pandangan hidup, akhlak (etika, rasa malu, dan kejujuran), teknologi dan nilai-nilai luhur lainnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pemajuan kebudayaan dalam rangka memperkuat jati diri bangsa yang berkontribusi terhadap perekonomian bangsa khususnya Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan tersebut, Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan

(PPKD) merupakan menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan yang sejalan dengan permasalahan dan rekomendasi dalam Pokok - Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan data olahan PPKD Kota Pekanbaru terdapat 11 target obyek pemajuan yang mengalami ketahanan budaya di Kota Pekanbaru, seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.146. Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Pekanbaru

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1	Tradisi lisan	34
2	Manuskrip	2
3	Adat istiadat	27
4	Ritus	51
5	Pengetahuan Tradisional	183
6	Teknologi tradisional	73
7	Seni	107
8	Bahasa	34
9	Permainan rakyat	31
10	Olahraga Tradisional	6
11	Diduga Cagar Budaya	70
TOTAL		618

Sumber : SIPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2025

Seiring dengan perkembangan zaman dimana arus informasi dan budaya asing masuk secara deras, nilai-nilai asli dan budaya tradisional cenderung melemah. Apabila keadaan ini tidak diantisipasi dengan bijaksana, dapat berakibat pada lunturnya pemahaman dan pewarisan kepada generasi penerus. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal ini, bahkan untuk mewujudkan kembali kejayaan budaya melayu, dimana hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Riau,

Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan Kota Pekanbaru sebagai Pusat Budaya Melayu. pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat dari 57,78% pada tahun 2020 menjadi 91,67% pada tahun 2024. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah petugas pengelola kearsipan relatif stabil, yaitu sebanyak 20 orang per tahun dari 2020 hingga 2023, dan meningkat menjadi 21 orang pada tahun 2024. Meskipun peningkatannya belum signifikan, hal ini tetap menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat kapasitas SDM di bidang kearsipan.

Tabel II.147. Pelaksanaan Kinerja Bidang Kebudayaan Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan	Satuan	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	-	-	1	1	1	Parade tari, Bujang Dara
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	1 8	1 8	3 0	3 0	4 3	6 Cagar budaya Peringkat Kota Dan 12 Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan investarisasi	Budaya	2	-	-	2	2	Potang balimau Dan Haul Marhum Pekan
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	5	5	5	6	6	Rumah Singgah Sultan Siak Makam Marhum Pekan dan Makam Pahlawan Kerja, Tugu Prasasti Merah Putih, Tugu Titik Nol

Sumber: SIPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2025

Pelaksanaan kegiatan kebudayaan di Kota Pekanbaru mengalami perkembangan positif selama periode 2020 hingga 2024. penyelenggaraan festival seni dan budaya rutin dilakukan setiap tahun, dengan kegiatan utama seperti Parade Tari dan Bujang Dara, Pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya juga meningkat secara signifikan. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan bertambah dari 18 pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 43 pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 6 cagar budaya berperingkat kota dan 12 cagar budaya berperingkat provinsi menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melestarikan warisan budaya.

Upaya revitalisasi dan inventarisasi karya budaya dilakukan secara berkelanjutan, dengan 2 karya budaya penting seperti Potang Balimau dan Haul Marhum Pekan yang berhasil direvitalisasi pada tahun 2020 dan 2023–2024. Pengelolaan cagar budaya secara terpadu juga mengalami peningkatan, dari 5 cagar budaya yang dikelola pada tahun 2020–2022 menjadi 6 pada tahun 2023 dan 2024.

Beberapa situs penting yang dikelola secara terpadu antara lain Rumah Singgah Sultan Siak, Makam Marhum Pekan, Makam Pahlawan Kerja, Tugu Prasasti Merah Putih, dan Tugu Titik Nol. Pengelolaan terpadu ini berpotensi besar sebagai pusat pengembangan kawasan strategis yang dapat diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah.

2.4.4.2.16. Bidang Urusan Perpustakaan

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka,

bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Keberadaan perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab fasilitas perpustakaan terutama buku, baik menyangkut keragaman koleksi maupun jumlah koleksi buku yang tersedia harus menjadi perhatian di samping fasilitas lainnya. Hal ini karena masing-masing pengunjung mempunyai kepentingan referensi yang berbeda dengan buku yang ingin dicari dan memanfaatkan fasilitas

Pada tahun 2024, jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Pekanbaru tercatat sebanyak 267.377 orang, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 391.333 pengunjung. periode 2020 hingga 2023, dengan total pengunjung mencapai puncaknya sebanyak 391.333 orang, naik dari 330.343 orang pada tahun 2022 dan 244.698 orang pada tahun 2021.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2024 berjumlah 93.567 eksemplar, sedikit menurun dibanding tahun 2023. Sedangkan jumlah koleksi judul buku sebanyak 61.898 judul, juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Rasio perpustakaan per satuan penduduk meningkat menjadi 1,1676, menunjukkan peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan bagi masyarakat. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah pustakawan bersertifikat bertambah menjadi 15 orang, sementara tenaga teknis bersertifikat berkurang menjadi 38 orang pada tahun 2024.

Tabel II.148. Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Indikator Perpustakaan Lainnya Tahun 2020 -2024

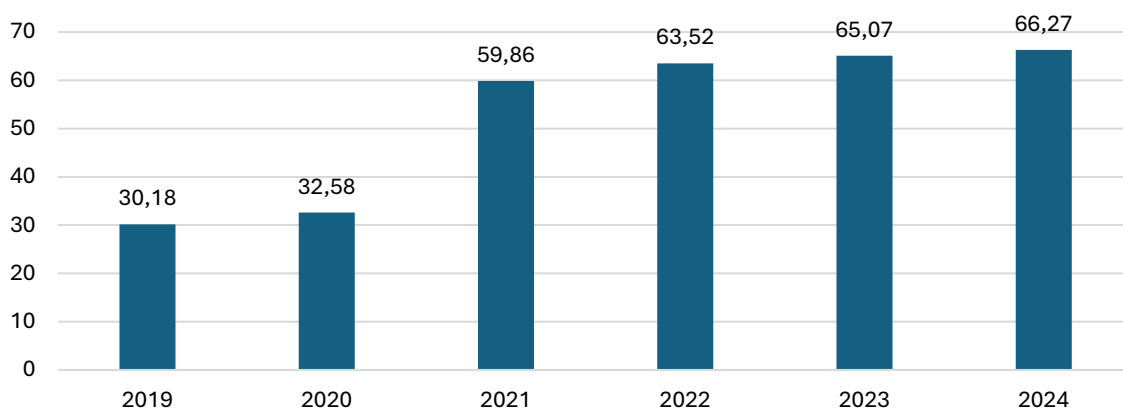
Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	237.449	244.698	330.343	391.333	267.377
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	78.733	90.068	94.485	96.183	93.567
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	Ratio	1,121528	1,121528	1,121528	1,121528	1,167599
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	19.787	203.915	275.286	32.611	22.281
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	51.748	62.794	65.245	65.751	61.898

Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pustakawan yang Memiliki Sertifikat	Orang	7	8	13	14	15
Tenaga Teknis yang Memiliki Sertifikat	Orang	48	46	46	52	38

Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2024

Sesuai amanat Permendagri Nomor 81 Tahun 2022, Kota Pekanbaru dalam urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan mendukung capaian nasional untuk indikator kinerja urusan tahun 2023. Untuk indikator kinerja urusan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dimana target nasional 67,3 dan target daerah senilai 60 sedangkan capaian daerah 2022 senilai 63,52. Selanjutnya untuk indikator kinerja urusan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dimana target nasional senilai 14 dan target daerah 18,2 sedangkan capaian daerah 2022 senilai 19,50.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Membaca Masyarakat, perpustakaan menjadi salah satu solusi peningkatan minat baca, yaitu dengan meningkatkan koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan dan menyeimbangkan rasio perpustakaan per satuan penduduk. Dalam rangka mengukur minat membaca masyarakat, Indeks Membaca Masyarakat menjadi acuan untuk melihat keaktifan masyarakat dalam membaca. Kota Pekanbaru pada tahun 2022 capaian indeks membaca masyarakat berada di angka 63,52 poin, capaian tersebut meningkat 3,66 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 59,86 poin. Menurut Perpustakaan Nasional, selama masa pandemi kategori buku paling populer dibaca melalui perpustakaan digital iPusnas adalah kategori fiksi. Peringkat kedua buku- buku berkategori Pendidikan, dan ketiga buku-buku kategori bisnis dan ekonomi. Nampaknya dalam situasi pandemi membaca buku-buku novel roman atau fiksi dapat menjadi penghiburan sekaligus meningkatkan imunitas tubuh. seperti gambar dibawah ini.



Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2025

Grafik II.47. Tingkat Kegemaran Membaca Kota Pekanbaru Tahun 2019- 2024

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kota Pekanbaru melalui program dan kegiatan yang mengajak dan memotivasi masyarakat agar lebih meningkatkan minat baca diantaranya dengan cara:

1. Meningkatkan koleksi buku perpustakaan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka diantaranya dengan melakukan pengadaan buku, pengolahan buku dan penerimaan hibah buku dari pihak ketiga serta masyarakat.
2. Melaksanakan Preservasi Bahan Pustaka melalui pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka dengan hasil yaitu jumlah target koleksi perpustakaan yang dipreservasi pada APBD tahun 2022 adalah 1150 (seribu seratus lima puluh) eksemplar dan alih media sebanyak 12 media dan terealisasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 1209 (seribu dua ratus sembilan) eksemplar buku dan 12 media yang telah dialih mediakan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat dilihat melalui statistik layanan seperti kunjungan pemustaka, jumlah buku yang dibaca di tempat, jumlah buku yang dipinjam, jumlah buku rusak, jumlah buku hilang yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru.
4. Kunjungan pemustaka di layanan Perpustakaan Keliling saat ini mengalami kenaikan drastis sebesar 1.330 orang pemustaka dari tahun lalu, hal ini dengan sudah dibolehkannya kegiatan aktifitas secara normal pada bulan juli hingga desember, namun kegiatan dengan adanya rasionalisasi anggaran sehingga kebijakan untuk turun ke sekolah dan tempat lainnya diminimalisir.
 - a) Serangkaian Acara dari TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) Kegiatan TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru berjalan dari bulan Juli 2022 dengan menggunakan anggaran dan non anggaran dengan mengundang beberapa narasumber yang juga berperan dalam dunia literasi. salah satu dari rangkaian kegiatan TPBIS yang telah dilaksanakan oleh seksi layanan dan otomasi perpustakaan, sebagai berikut:
 - b) Kelas Ibu berkreasi I : Menyulam, Selasa di minggu genap September
 - c) Pelatihan mengenal Bioflok Ikan air tawar Setiap Minggu di Minggu ganjil September – Desember
 - d) Belajar bersama Pustakawan : Pengelolaan Perpustakaan Sekolah

- e) Pelatihan membuat Resensi Buku bahasa Inggris ke bahasa Indonesia
Setiap sabtu dan minggu, Minggu Ganjil September – Desember.

5. Pembinaan Perpustakaan juga telah melakukan kunjungan ke perpustakaan sekolah, baik perpustakaan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Perpustakaan Kelurahan guna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perpustakaan yang sudah dibentuk agar memenuhi Standar Nasional Perpustakaan serta mau mengikuti Akreditasi guna meningkatkan pelayanan terhadap pemustakanya. Disamping itu Bidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca bekerjasama dengan Bidang Pengolahan, Pelestarian dan Layanan Perpustakaan melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan bagi 24 orang tenaga pengelola perpustakaan dari 10 sekolah.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat dengan pengukuran pada Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat dan Aspek Masyarakat yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi & Promosi serta Anggota Perpustakaan. Diketahui nilai indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2022 adalah 19.50 lebih tinggi dari target nasional yaitu 14,0.

2.4.4.2.17. Bidang Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada akan menghadirkan kemanfaatan besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya, pada lembaga pemerintahan akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan indikator bukti bagi kepentingan lain.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan keinginan, diantaranya yaitu keberadaan sumber daya manusia (arsiparis). Sumberdaya manusia kearsipan yang baik dan mencukupi merupakan faktor yang dapat mewujudkan tertatanya kearsipan. Sumberdaya yang mengelola arsip secara baku di Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel II.149. Indikator Kearsipan Tahun 2020 -2024

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	57,78	62,5	68,7	79,19	91,67
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Org	20	20	20	20	21

Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2025

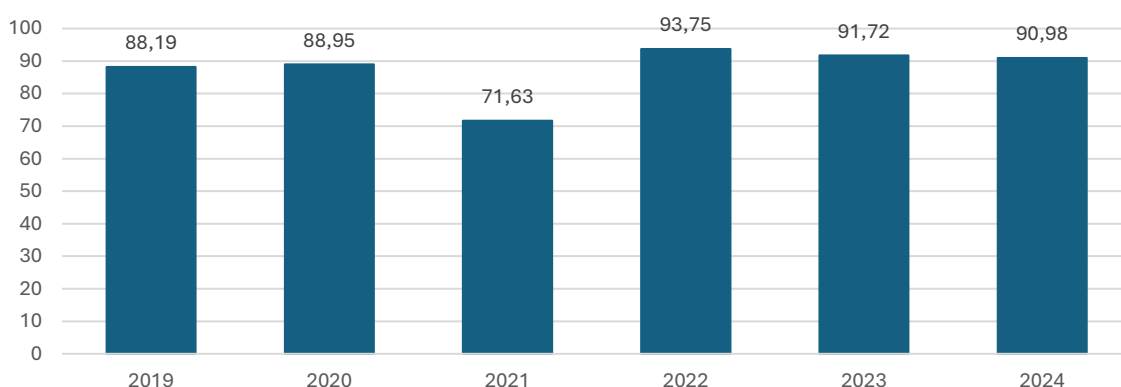
Pada tahun 2024, persentase perangkat daerah di Kota Pekanbaru yang mengelola arsip secara baku meningkat signifikan mencapai 91,67%, naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 79,19%. Hal ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam penerapan tata kelola kearsipan yang sesuai standar di lingkungan pemerintahan daerah.

Sementara itu, jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan meningkat tipis menjadi 21 orang pada tahun 2024, setelah selama beberapa tahun sebelumnya stabil di angka 20 orang. Peningkatan ini mencerminkan adanya penambahan personel yang mendukung pengelolaan arsip yang lebih efektif dan profesional.

Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Kota Pekanbaru pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 91 dapat direalisasikan dengan nilai 83,75. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah:

1. Adanya perubahan kriteria penilaian audit kearsipan yang semula mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 kemudian diubah melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 dimana sejak Tahun 2020 instrument penilaian LAKE yang digunakan lebih kompleks dan luas, namun demikian terjadi peningkatan nilai LAKE dari 71,63 pada tahun 2021 menjadi 83,75 pada tahun 2022.
2. Sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai yang merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat dan anggaran yang terbatas.

Pengelolaan arsip daerah belum dilakukan secara optimal sesuai dengan NSPK dan aturan bidang kearsipan antara lain pemenuhan aspek kebijakan, kewajiban melaksanakan pembinaan, pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan aspek sumber daya kearsipan lainnya.



Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2025

Grafik II.48. Nilai LAKE Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024

Berdasarkan PMDN 81 Tahun 2022, indikator kinerja urusan bidang kearsipan, Kota Pekanbaru turut serta mendukungnya di tahun 2023. Untuk indikator kinerja urusan. Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif Dan Jati Diri Bangsa daerah menargetkan 1.700 orang, dan untuk indikator kinerja urusan Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya yang Dipreservasi dengan target daerah sebanyak 13.358 arsip dimana capaian daerah 2022 sebanyak 12.571 arsip. Selanjutnya indikator kinerja urusan Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya yang Dipreservasi dengan target nasional 8.051 arsip, sedangkan target daerah 13.359 arsip dan capaian daerah 2022 sebanyak 12.571 arsip, dan untuk indikator kinerja urusan Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa dimana target nasional 411.095 pengguna, daerah menargetkan di tahun 2023 sebesar 1.700 pengguna sedangkan capaian daerah di tahun 2022 sebanyak 2.756 pengguna.

2.4.4.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.4.3.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan, perkembangan produksi perikanan di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.150. Jumlah Produksi Perikanan di Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan tahun
Ikan Konsumsi (Ton)	9.532	9.838,02	9.999,01	9.904,60	9.921,57	1,02
Ikan Hias (Ekor)	1.009.732	963.136	975.817	1.037.300	1.100.902	2,28

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan tahun
Benih Ikan (Juta Ekor)	85,54	98,44	108,47	103.584.000	94,36	23,83

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2025

Produksi perikanan di Kota Pekanbaru pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang stabil dan positif di beberapa komoditas utama. Produksi ikan konsumsi tercatat sebesar 9.921,57 ton, sedikit meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 9.904,60 ton. Rata-rata pertumbuhan tahunan produksi ikan konsumsi selama periode 2020 hingga 2024 adalah sekitar 1,02%, yang didukung oleh potensi sumber daya perairan seluas ±7.956,58 hektar, meliputi Sungai Siak dan anak-anak sungainya, serta danau dan rawa di wilayah kota.

Produksi ikan hias juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mencapai 1.100.902 ekor pada tahun 2024, meningkat dari 1.037.300 ekor pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan minat yang terus berkembang terhadap ikan hias, baik air tawar maupun air laut, sebagai hobi dan elemen estetika dalam rumah tangga.

Sedangkan produksi benih ikan pada tahun 2024 tercatat sebesar 94,36 juta ekor, menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 103,58 juta ekor, namun secara umum mengalami tren pertumbuhan positif sebesar 9,15% per tahun dalam beberapa tahun terakhir.

2. Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan (AKI) merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun, perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.151. Angka Konsumsi Ikan di Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	43,83	46,46	49,89	44,72	45,53	8,85

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2025

Pada tahun 2024, angka konsumsi ikan di Kota Pekanbaru tercatat sebesar 45,53 kg per kapita per tahun, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 44,72 kg per kapita. angka konsumsi ikan di Pekanbaru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 8,85 persen per tahun.

Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Pekanbaru secara konsisten meningkatkan konsumsi ikan sebagai bagian dari pola pangan sehat dan bergizi. Berdasarkan analisis Pola Pangan Harapan yang memanfaatkan data Susenas tahun 2021, kebutuhan pangan ikan masyarakat Kota Pekanbaru pada tahun tersebut mencapai sekitar 46.208 ton.

2.4.4.3.2. Bidang Urusan Pariwisata

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Pariwisata merupakan fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat diluar lingkungan biasanya untuk tujuan pribadi, bisnis atau profesional, yang disebut dengan wisatawan. Wisatawan adalah setiap pengunjung yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam, tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, di tempat yang dikunjungi. Sementara itu wisatawan mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.152. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Setiap Bulannya Tahun 2020 – 2024

Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun (orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	2.896	37	0	180	2.750
Februari	2.324	5	0	244	3.818
Maret	0	9	0	35	2.404
April	0	8	1	4	3.863
Mei	0	12	15	46	3.851
Juni	0	0	56	21	4.309
Juli	0	2	8	82	2.799
Agustus	0	0	73	32	4.411
September	0	0	27	48	3.692
Oktober	0	0	50	11	3.028
November	0	0	98	31	2.930
Desember	0	0	113	43	3.005
Total	5.220	73	441	788	40.860

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2024

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Total kunjungan pada tahun 2024 mencapai 788 orang, naik dari 441 orang pada tahun 2022 dan 73 orang pada tahun 2021.

2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara (wisnus) adalah penduduk Indonesia yang melaksanakan perjalanan dalam wilayah Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan, dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji), perkembangan jumlah wisatawan nusantara di Kota Pekanbaru di sajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.153. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara yang Masuk ke Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Bulan	Jumlah Kunjungan Wisnus Tahun (orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	77.617	96.083	110.267	112.061	152.117
Februari	52.393	74.578	92.520	90.031	147.895
Maret	16.285	70.019	87.943	85.893	133.263
April	1.200	70.268	57.822	184.986	225.874
Mei	4.471	76.848	151.149	111.664	199.718
Juni	31.959	72.269	142.992	114.534	225.876
Juli	30.933	51.440	81.625	113.388	186.517
Agustus	29.945	49.508	86.009	116.489	189.721
September	22.420	62.420	97.462	119.925	198.253
Oktober	28.566	83.011	99.480	120.086	194.622
November	33.207	94.478	111.777	128.228	202.323
Desember	37.239	122.167	143.931	159.801	198.403
Jumlah Total	366.235	923.089	1.265.977	1.457.086	2.254.582

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2025

Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) ke Kota Pekanbaru mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kunjungan hanya mencapai **366.235 orang** akibat dampak pandemi COVID-19. Seiring pemulihan sektor pariwisata, angka ini melonjak menjadi **923.089 orang** di tahun 2021 dan terus naik hingga **2.254.582 orang** di tahun 2024.

Kunjungan tertinggi terjadi pada bulan **Juni dan April 2024**, masing-masing sekitar **225 ribu orang**. Peningkatan ini mencerminkan pulihnya mobilitas masyarakat serta keberhasilan promosi dan pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru.

Kunjungan wisatawan nusantara yang masuk ke Kota Pekanbaru pada tahun 2020 berjumlah 366.235 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2019 berjumlah 671.542 orang, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pandemi Covid-19 menyebabkan Kota Pekanbaru mengalami lockdown sehingga nyaris tidak ada kegiatan pariwisata ditahun tersebut. Pada tahun 2021 dampak pandemic Covid-19 masih dirasakan, namun jumlah wisatawan nusantara yang masuk ke Kota Pekanbaru mengalami kenaikan menjadi 923.089 orang dan tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 1.457.086 orang.

2.4.4.3.3. Bidang Urusan Pertanian

1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian merupakan faktor yang amat strategis, merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, menguasai kehidupan sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan bahkan menjadi katub pengaman pada krisis ekonomi Indonesia. Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB adalah nilai tambah barang dan jasa sektor pertanian/perkebunan yang merupakan salah satu

sektor pembentuk PDRB dari sisi lapangan usaha, dengan perkembangan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.154. Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	1,68	1,65	1,55	1,5	1,52	16,44

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, Tahun 2025

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,52 persen, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,50 persen. Meskipun kontribusi sektor ini relatif kecil dibandingkan sektor perdagangan besar dan eceran (31,76%), konstruksi (30,10%), dan industri pengolahan (22,11%),

Kota Pekanbaru memang bukan wilayah yang bercirikan pertanian utama, namun pengembangan dan pertumbuhan sektor ini terus diupayakan untuk mendukung ketahanan pangan lokal serta mendorong diversifikasi ekonomi di tengah dominasi sektor perdagangan dan industrisektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sumber daya masyarakat.

2. Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija

Tabel II.155. Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

No	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Panen (ha)		502,5	518,8	686,59	496,23	649,88
1	Padi Sawah	0	0	0	0	0
2	Padi Ladang	0	0	0	0	0
3	Jagung	310,7	224	391,63	269,9	360,45
4	Ubi Kayu	170,6	258,1	277,48	209,3	224,68
5	Kacang Tanah	18,2	11,5	7,25	3,8	9,85
6	Ubi Jalar	3	9,7	5,38	8,23	43,9
7	Kacang Kedelai	0	15,5	4,85	5	11
Produksi (Ton)		8.354,15	7.895,90	8.237,54	7.362,87	9.508,16
1	Padi Sawah	0	0	0	0	0
2	Padi Ladang	0	0	0	0	0
3	Jagung	963,17	694,4	2.630,93	2.185,10	2.689,90
4	Ubi Kayu	7.330,48	7.097,75	5.549,60	5.120,65	5.908,45
5	Kacang Tanah	45,5	39,75	14,5	26,33	15,46
6	Ubi Jalar	15	48,5	37,66	25,79	879,05
7	Kacang Kedelai	0	15,5	4,85	5	15,3
Produktivitas (Ton/Ha)		53,57	40,06	36,72	43,63	70,88
1	Padi Sawah	0	0	0	0	0

No	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
2	Padi Ladang	0	0	0	0	0
3	Jagung	3,1	3,1	6,72	8,1	7,46
4	Ubi Kayu	42,99	27,5	20	24,47	26,3
5	Kacang Tanah	2,5	3,46	2	6,93	15,7
6	Ubi Jalar	5	5	7	3,13	20,02
7	Kacang Kedelai	0	0	1	1	1,4
Cakupan Bina Kelompok Tani						
1	Kelompok Pengrajin Bidang Pertanian	49	50	50	50	53
2	Kelompok Tani (Poktan)	339	377	377	408	411
3	Pengusaha Bunga Tercatat	53	53	53	53	50

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2024

Luas panen tanaman pangan dan palawija di Kota Pekanbaru pada tahun 2024 mencapai 649,88 hektar, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya 496,23 hektar. Produksi bahan pangan utama lokal juga meningkat menjadi 9.508,16 ton pada tahun 2024, naik dari 7.362,87 ton pada tahun sebelumnya. Produktivitas pertanian pun menunjukkan tren positif dengan capaian rata-rata 70,88 ton per hektar, jauh lebih tinggi dibandingkan 43,63 ton per hektar di tahun 2023.

Beberapa komoditas utama seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang kedelai mengalami peningkatan luas panen dan produksi, di mana jagung memiliki luas panen 360,45 hektar dan produksi mencapai 2.689,90 ton. Ubi kayu dengan luas panen 224,68 hektar menghasilkan 5.908,45 ton, sementara ubi jalar mengalami lonjakan luas panen menjadi 43,9 hektar dengan produksi sebesar 879,05 ton.

Selain itu, pengembangan kelompok tani juga terus berlanjut dengan jumlah kelompok tani mencapai 411 kelompok dan kelompok pengrajin bidang pertanian berjumlah 53 kelompok pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan yang nyata dalam sektor pertanian Kota Pekanbaru, baik dari sisi pengelolaan lahan, produksi, maupun produktivitas, yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah

3. Jumlah Produksi ternak

Pada tahun 2024, populasi ternak di Pekanbaru mengalami perubahan signifikan dibandingkan beberapa tahun terakhir. Sapi meningkat menjadi 4.079 ekor dari 3.424 ekor pada 2023, kambing naik ke 7.580 ekor dari 4.890 ekor, dan itik bertambah menjadi 12.483 ekor. Sebaliknya, kerbau menurun drastis menjadi 146 ekor dari 229 ekor pada 2023, dan ayam kampung turun ke 101.549 ekor dari 243.000 ekor. Ayam ras pedaging tetap tinggi dengan 6.651.487 ekor. Tren ini

mencerminkan pergeseran pola pemeliharaan ternak di kota tersebut selama periode 2020–2024. sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II.156. Jumlah Populasi Ternak Kota Pekanbaru Tahun 2020-204

Populasi Ternak	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi	3.811	3.721	3.693	3.424	4.079
Kerbau	448	426	235	229	146
Kambing	5.923	5.943	6.178	4.890	7.580
Domba	150	148	359	431	435
Babi	18.652	17.989	17.830	14.826	16.658
Ayam Ras Pedaging	6.267.376	6.261.290	7.029.500	6.579.386	6.651.487
Ayah Kampung	247.569	245.290	234.800	243.000	101.549
Itik	6.831	7.831	7.648	7.109	12.483

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2025

4. Jumlah Produksi Hasil Peternakan

Pada tahun 2023, produksi daging di Kota Pekanbaru tercatat sebanyak 19.933,39 ton, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 21.946,04 ton. Sementara itu, produksi telur juga menurun menjadi 214,42 ton pada tahun 2023 dari 231,11 ton pada tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan, produksi daging dan telur tetap menunjukkan kontribusi penting dalam sektor peternakan kota selama periode 2020 hingga 2023. , sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.157. Jumlah Produksi Hasil Peternakan Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

Produksi	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Daging	Ton	21.451,59	21.081,66	21.946,04	19.933,39	10.324,24
Telur	Ton	265,81	243,84	231,11	214,42	196,04

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2025

2.4.4.3.4. Bidang Urusan Kehutanan

Luas kawasan hutan dan perairan di Kota Pekanbaru pada tahun 2024 tercatat sebesar 63.155 hektar. Kecamatan Tenayan Raya masih mendominasi dengan luas kawasan mencapai 27,33 persen dari total luas tersebut. Diikuti oleh Kecamatan Rumbai Pesisir (Kecamatan Rumbai Barat dan Rumbai Timur) dan Rumbai, masing-masing dengan kontribusi sebesar 24,86 persen dan 20,64 persen. Sementara itu, Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki kawasan hutan dan perairan paling sedikit, mencatatkan kontribusi sebesar 2,26 persen. Data ini menunjukkan distribusi kawasan hutan dan perairan yang tidak merata antar kecamatan di Kota Pekanbaru.

2.4.4.3.5. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan dalam Kota Pekanbaru, penggunaan tenaga listrik setiap tahunnya mengalami peningkatan. Listrik memegang peranan yang sangat vital sebagai sumber penerangan dan energi lainnya bagi rumah tangga maupun industri. Persentase rumah tangga yang telah menggunakan listrik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.158. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Produksi Listrik (Kwh)	212.508.291	135.954.020	161.048.064	201.404.647	156.705.501
Total Jenis Pelanggan Listrik (orang)	449.240	420.202	485.736	503.664	447.458
Jumlah Pelanggan berasal dari Rumah Tangga (orang)	393.004	364.335	424.343	443.295	387.594
Penggunaan Utilization berasal dari Rumah Tangga (Kwh)	75.292.023	70.506.845	76.645.371	96.965.323	77.565.726
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	35,43	51,86	47,59	48,14	49,5
Persentase Jenis Pelanggan berasal dari Rumah Tangga (%)	87,48	86,7	87,36	88,01	86,83

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2025

Berdasarkan data tahun 2024, total produksi listrik di Kota Pekanbaru mencapai 156.705.501 Kwh. Dari jumlah tersebut, penggunaan listrik oleh rumah tangga sebesar 49,5 persen. Sementara itu, jumlah pelanggan listrik yang berasal dari rumah tangga mencapai 387.594 orang, atau setara dengan 86,83 persen dari total pelanggan. Data ini menunjukkan bahwa rumah tangga masih menjadi pengguna listrik terbesar di Kota Pekanbaru, baik dari sisi konsumsi maupun jumlah pelanggan.

2.4.4.3.6. Bidang Urusan Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sumbangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Kategori ini meliputi penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang- barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor nilai dan kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.159. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
Nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah)	33.748,41	37.897,05	44.476,88	48.984,73	52.745,01	7,53
Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB	29,22	29,95	30,76	30,62	30,79	0,37

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2025

Struktur perekonomian Kota Pekanbaru pada tahun 2024 masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Nilai PDRB sektor ini mencapai Rp52,75 triliun dengan kontribusi sebesar 30,79 persen terhadap total PDRB Kota Pekanbaru. Meskipun kontribusi sektor ini relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,37 persen per tahun sejak 2020, sektor ini tetap menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekanbaru, mengungguli sektor konstruksi dan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan reparasi kendaraan masih menjadi tulang punggung ekonomi kota Pekanbaru.

2. Nilai Ekspor dan Impor Kota Pekanbaru

Ekspor-impor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor impor menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan, perkembangan ekspor dan impor Kota Pekanbaru disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.160. Nilai Ekspor Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rat /Tahun
Nilai Ekspor (USD)	20.228.809	6.252.952	10.447.583	161.382.149	2.891.917	40.240.682

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2025

Ekspor Kota Pekanbaru mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, nilai ekspor tercatat sebesar USD 2.891.917, menurun drastis dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2023 yang mencapai USD

161.382.149. Meskipun begitu, jika dilihat dari periode sebelumnya, ekspor Kota Pekanbaru menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang sangat tinggi, yakni sebesar 372,39 persen per tahun. Tahun 2023 menjadi puncak tertinggi ekspor dengan

Tabel II.161. Nilai Impor Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata / Tahun
Nilai Impor (USD)	160.478.037	64.409.187	1.213.364.704	1.060.844.138	199.749.298	539.769.073

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2025

Nilai impor Kota Pekanbaru mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, nilai impor tercatat sebesar USD 199.749.298, menurun dibandingkan dengan nilai impor pada tahun 2023 yang sebesar USD 1.060.844.138. Lonjakan impor tersebut terutama disebabkan oleh kinerja impor yang sangat tinggi di tahun 2022 dan 2023, yang naik secara drastis hingga 1.783,84 persen.

Kondisi Pasar Kota Pekanbaru

Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga memiliki tugas dalam melakukan pengelolaan, penataan dan pengawasan di pasar - pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa jenis pasar yang ada di Kota Pekanbaru, seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.162. Jenis, kondisi, dan Pengelola pasar yang ada di Kota Pekanbaru

No	Jenis Pasar	Nama Pasar	Pengelola	Kondisi
1	Pasar Rakyat	Pasar Rumbai	Disperindag Kota Pekanbaru	Kondisi bangunan Pasar sudah mulai rusak
		Pasar lima puluh		Banyak yang rusak
		Pasar labuh baru		Banyak yang rusak berat
		Pasar Agus Salim		Baik dan perlu penataan
		Pasar Simpang Baru		Baik dan perlu penataan
		Pasar Cikpuan		Kurang baik dan perlu penataan
		Pasar Teratai Higienis Madani		Baik dan perlu penataan
		Pasar Tengku Kasim		Baik dan perlu penataan
		Pasar Tanjung Jati		Baik dan perlu penataan
2	Pasar Pemerintah dengan Pihak Ketigagun Serah Guna (BGS) amsat lo	Pasar Sukaramai	PT. Makmur	Baik
		Trade Center	Papan Permata	
		Pasar Wisata Pasar Bawah	PT. Dalena Pratama Indah	Baik
		Pasar Senapelan	PT. Peputra Mahajaya	Baik
		Pasar Sail	CV. Putera Bertuah	Baik
		Pasar Induk	PT. Agung Rafa Bonai	Baik

No	Jenis Pasar	Nama Pasar	Pengelola	Kondisi
3	Pasar milik swasta	Pasar pagi arengka	Swasta	Baik
		Pasar tengor	Swasta	Baik dan perlu penataan
		Psdrr sronsrm jaya	Swasta	Baik dan perlu penataan
		Pasar sangol	Swasta	Baik dan perlu penataan
		Pasar jalan pemuda	Swasta	Baik dan perlu penataan
		Pasar uka	Swasta	Baik dan perlu penataan

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2025

Sedangkan jumlah pedagang yang berjualan di Pasar Kota Pekanbaru disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.163. Rekap Data Pedagang Pasar Rakyat Kota Pekanbaru

No.	Nama Pasar	Kios	Los	PKL	Jumlah
1.	Pasar Lima Puluh	82	125	-	207
2.	Pasar Cik Puan	142	63	259	464
3.	Pasar Labuh Baru	77	108	-	185
4.	Pasar Agus Salim	26	1	518	545
5.	Pasar Simpang Baru	257	140	58	455
6.	Pasar Rumbai	87	110	174	371

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2023

Belum tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Pekanbaru disebabkan PKL dalam jumlah besar sementara kondisi pasar yang belum memadai dan memenuhi standar. Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya menempatkan PKL pada tempat yang baik sehingga lebih tertata.

2.4.4.4. Fokus Penunjang Urusan

2.4.4.4.1. Bidang Urusan Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah Kota Pekanbaru terdiri dari Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi visi dan misi daerah. Kemudian adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan sampai program kerja dan dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun kinerja urusan perencanaan pembangunan yang merupakan salah satu penunjang urusan mencapai target kinerja yang diharapkan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.164. Konsistensi dan Kesesuaian Dokumen Perencanaan Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024

Konsistensi & Kesesuaian	2020	2021	2022	2023	2024
Penjabaran Konsistensi Program RPD Kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2025

2.4.4.4.2. Bidang Urusan Keuangan

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Bidang Keuangan merupakan penunjang urusan pemerintahan, capaian kinerja bidang keuangan dapat ditunjukkan melalui capaian Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.165. Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru, 2025

2. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), bahwa alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah sebesar 20% telah dilaksanakan oleh Kota Pekanbaru. Hal Ini dapat dilihat dari tabel persentase realisasi belanja urusan pendidikan dari tahun 2020 s.d 2022.

Tabel II.166. Persentase Belanja Pendidikan Terhadap APBD Kota Pekanbaru

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan Tahun
Jumlah APBD (Rp. Milyar)	2.341,14	2.650,04	2.520,11	2.679,54	3.347,16	9,88
Belanja Pendidikan (Rp. Milyar)	598,36	673,45	653	614,2	778,23	7,57
Persentase Belanja Pendidikan	25,56	25,41	25,91	22,92	23,25	-2,18

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru, 2025

3. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan adalah sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan amandemen UUD 1945 dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Persentase Anggaran Belanja Urusan Kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2020 -2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel II.167. Persentase Belanja Kesehatan Terhadap APBD Kota Pekanbaru

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
Jumlah APBD (Rp. Milyar)	2.341,14	2.650,04	2.520,11	2.932,66	3.347,16	9,70

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
Belanja Kesehatan (Rp. Milyar)	242,7	304,05	277,76	205,91	420,40	23,73
Persentase Belanja Kesehatan	10,37	11,47	11,02	7,02	12,56	12,33

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru, 2024

Pada tahun 2020 – 2024 ,persentase belanja kesehatan Kota Pekanbaru terhadap APBD tercatat sebesar 7,02 persen di tahun 2023 dengan total belanja kesehatan sebesar Rp 205,91 miliar dari APBD sebesar Rp 2.932,66 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan masih berada di bawah batas mandatory 10 persen.

2.4.4.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Diklat

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru meliputi beberapa indikator kinerja, diantaranya rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah. Indikator kinerja tersebut dapat di sajikan pada table dibawah ini.

Tabel II.168. Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru

Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (hari)	5	5	5	5	5
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	66%	72%	32%	34%	40,80%
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	20	37	39	39	32
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	520	192	191	178	186
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	92	345	593	517	511

Sumber: Badan Kepegawaian dan Paltihan SDM Kota Pekanbaru, 2025

Pada 2024, rata-rata lama pelatihan pegawai tetap 5 hari, dengan 100% ASN mengikuti pelatihan formal. Pejabat ASN yang mengikuti pelatihan struktural naik menjadi 40,8% dari 34% di 2023. Jumlah jabatan pimpinan tinggi menurun menjadi 32 orang (dari 39 pada 2023), jabatan administrasi stabil di 186 orang, dan jabatan

fungsional tertentu tetap tinggi di 511 orang meski sedikit turun dari puncak 593 orang di 2022.

Secara keseluruhan, tahun 2024 menunjukkan kestabilan dalam pendidikan formal ASN dan pergeseran struktur jabatan yang mengarah pada penguatan jabatan fungsional, meskipun pelatihan struktural pejabat masih perlu mendapat perhatian lebih.

2.4.4.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan terdiri atas beberapa indikator kinerja antara lain rencana kelitbangan, pemanfaatan hasil kelitbangan, perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis (IKU) Badan penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.169. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru Tahun 2020 -2024

Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai Standar yang dimanfaatkan	70%	80%	80%	82%	83%
Persentase hasil Kegiatan kelitbangan Yang direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase OPD dan masyarakat yang memiliki inovasi di Kota Pekanbaru	76	122,9	136,2	87,75	80
Persentase Inovasi OPD Yang difasilitasi oleh BPP Kota Pekanbaru	57,1	93,9	100	100	100
Persentasi inovasi masyarakat yang di bina oleh BPP Kota Pekanbaru	18,8	29	36,2	10	7
Persentase Diseminasi Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase hasil kajian/ Penelitian yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, 2025

Pada 2024, pemanfaatan hasil penelitian mencapai 83%, dengan 100% hasil kelitbangan dijadikan bahan kebijakan. Inovasi OPD yang difasilitasi BPP stabil di 100%, meski inovasi masyarakat yang dibina turun menjadi 7%. Diseminasi dan publikasi hasil penelitian selalu 100%.

Pekanbaru meraih penghargaan Innovative Government Award 2021 dan 2022, dengan Indeks Inovasi Daerah meningkat dari 60,14 menjadi 70,57, mengukuhkan status Kota Sangat Inovatif.

2.4.4.4.5. Bidang Urusan Pengawasan

Fungsi penunjang pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

Tindak lanjut temuan terdiri dari : jumlah temuan, tindak lanjut yang selesai, tidak lanjut dalam proses, dan belum ditindaklanjuti. Adapaun untuk indikator tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.170. Indikator Kinerja Pengawasan Kota Pekanbaru Tahun 2022 – 2024

Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tindak lanjut temuan	44%	65%	73%	73%	75%
Jumlah Kasus Pelanggaran Pegawai	8	10	10	9	9
Indisipliner	6	5	6	6	8
Tindak Pidana	1	0	2	1	0
Tindak Pidana Korupsi	1	5	2	2	2
Jumlah Temuan BPK (LKPD)	18	23	14	18	13

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru, 2025

2.4.4.4.6. Bidang Urusan Sekretariat Dewan

Pada Sekretariat Dewan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, kinerja yang diharapkan yang pertama adalah Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat- alat kelengkapan DPRD Kota Pekanbaru yang telah terpenuhi oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Kinerja yang kedua adalah tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD). Kinerja yang kedua ini juga telah dipenuhi oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Kinerja yang ketiga adalah Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD. Kinerja ini juga telah dipenuhi oleh Sekretariat DPRD.

2.4.5. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah Pekanbaru merupakan seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai secara finansial, termasuk aset daerah yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Sebagai faktor strategis, keuangan daerah memegang peranan penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik dan pembangunan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan krusial dalam memulai dan melaksanakan pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Untuk mencapai pembangunan yang berkualitas, diperlukan pendekatan komprehensif meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah Pekanbaru harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Analisis pengelolaan keuangan daerah Pekanbaru difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kinerja pelaksanaan APBD tahun 2020-2024, kebijakan pengelolaan keuangan dalam periode yang sama, serta kerangka pendanaan tahun 2025-2030. Dalam menganalisis kinerja keuangan tahun 2020-2024, terdapat dua komponen utama yang dievaluasi, yaitu kinerja APBD dan neraca daerah. Kinerja APBD mencakup perkembangan pendapatan daerah, proporsi pendapatan, realisasi belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Sementara itu, neraca daerah menganalisis perkembangan aset dan kewajiban, rasio likuiditas untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, serta rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang.

2.4.5.1. Kinerja Pelaksanaan APBD tahun 2020-2024

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019, secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa dan transfer antar daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ; serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan seperti Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024 sebagaimana disajikan dibawah ini:

Tabel II.171. Realisasi APBD Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN	2.339.036.234.445	2.337.605.186.326	2.479.247.340.046	2.753.144.818.421	2.780.227.926.523
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	618.090.322.806	684.642.966.382	799.021.484.426	890.286.830.690	923.858.444.224
	B. PENDAPATAN TRANSFER	1.600.701.692.238	1.549.702.968.074	1.680.225.855.620	1.862.857.987.731	1.856.361.752.299
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	120.244.219.401	103.259.251.870	-	-	7.730.000
2	BELANJA	2.341.181.180.840	2.318.795.888.378	2.492.666.952.346	2.748.798.260.184	2.761.348.389.059
	A. BELANJA OPERASI	1.883.129.143.266	1.884.629.712.698	2.163.366.634.652	2.432.229.639.204	2.464.282.549.282
	B. BELANJA MODAL	396.136.063.969	415.994.763.452	328.335.985.977	315.807.494.724	295.428.103.948
	C. BELANJA TIDAK TERDUGA	61.915.973.605	18.171.412.228	964.331.717	761.126.257	1.637.735.829
	D. Belanja Tidak Terduga	61.915.973.605	18.171.412.228	964.331.717	761.126.257	1.637.735.829
	E. BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-
3	PEMBIAYAAN	14.293.613.940	12.148.667.545	28.107.871.493	4.688.259.192	9.034.817.429
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.293.613.940	12.148.667.545	30.957.871.493	14.688.259.192	9.034.817.429
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	-	2.850.000.000	10.000.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETO	14.293.613.940	12.148.667.545	28.107.871.493	4.688.259.192	9.034.817.429
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	12.148.667.545	30.957.965.493	14.688.259.192	9.034.817.429	27.914.354.894

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru, 2025

Realisasi pendapatan Kota Pekanbaru periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan rata-rata 4,43% per tahun, melampaui baseline RPJMD 2021-2026. Namun, struktur pendapatan mengindikasikan kerentanan fiskal struktural dengan ketergantungan pada transfer pemerintah mencapai rata-rata 67% dari total penerimaan. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya 33,2% di tahun 2024 mencerminkan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) yang belum optimal, di bawah ambang batas kemandirian fiskal minimal (50%).

Kinerja PAD tumbuh 10,60%, didorong oleh pajak daerah (+11,19%) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (+12,23%). Namun, retribusi daerah mengalami kontraksi (-5,80%) akibat inefisiensi pemungutan dan kebocoran penerimaan, sementara komponen "Lain-lain PAD" bersifat fluktuatif. Dominasi transfer (66,8% di 2024) menimbulkan risiko sistemik, khususnya dari pelambatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang hanya tumbuh 4,51%—di bawah inflasi kumulatif—serta penurunan drastis Bantuan Keuangan Pemprov Riau (-33,58%). Meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) melonjak 27,33%, kinerjanya tidak berkelanjutan (2024 turun Rp1,07 miliar). Pendapatan non-inti lainnya merosot -79,14%, menyisakan hanya Rp7,73 juta di 2024, akibat hilangnya kontribusi hibah pasca-2021 yang membatasi fleksibilitas pendanaan program inovatif RPJMD.

Tantangan strategis terletak pada stagnasi rasio DOF di kisaran 30-33%, belum memenuhi target kemandirian fiskal RPJMD. Keterbatasan kapasitas belanja juga mengancam realisasi program prioritas, terutama akibat volatilitas transfer dan pelemahan retribusi. Untuk itu, diperlukan konsolidasi fiskal jangka menengah melalui:

1. Revitalisasi basis PAD dengan transformasi digital pemungutan pajak/retribusi dan optimalisasi aset idle melalui BUMD;
2. Mitigasi risiko transfer via advokasi peningkatan DAU/DAK berbasis indeks kebutuhan riil dan penguatan sinergi fiskal dengan Pemprov Riau;
2. Diversifikasi pendapatan melalui reaktivasi hibah berbasis kinerja dan instrumen inovatif seperti green bond untuk proyek infrastruktur berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, target peningkatan DOF >40% pada RPJMD berikutnya dapat dicapai sekaligus menekan dependency quotient transfer di bawah 60%, mendorong percepatan kemandirian fiskal yang selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja terhadap anggaran, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi anggaran belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian.

Realisasi belanja Kota Pekanbaru periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan rata-rata 4,22% per tahun, mencerminkan ekspansi fiskal yang sejalan dengan target pembangunan RPJMD. Namun, struktur belanja mengindikasikan ketimpangan strategis dengan dominasi belanja operasi mencapai 89,3% dari total anggaran pada 2024, sementara belanja modal hanya menyumbang 10,7%—jauh di bawah standar kesehatan fiskal Permendagri (minimal 30%). Belanja operasi tumbuh signifikan (6,97%), didorong oleh belanja barang (+7,55%) yang mencapai Rp1,33 triliun (2024) dan belanja pegawai (+4,17%) sebesar Rp990,2 miliar. Meskipun belanja hibah melonjak 53,87% sebagai wujud sinergi pemangku kepentingan, belanja subsidi justru merosot -56,37% seiring penerapan prinsip efisiensi.

Di sisi lain, belanja modal mengalami kontraksi mengkhawatirkan (-7,13%), mengancam pencapaian target infrastruktur RPJMD. Penurunan terparah terjadi pada belanja tanah (-42,28%; Rp650 juta di 2024), gedung/bangunan (-16,16%), serta jalan/irigasi (-13,13%), yang berpotensi mengganggu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hanya belanja peralatan/mesin yang tumbuh positif (7,26%), menunjukkan upaya modernisasi aset pelayanan publik. Sementara itu, belanja tak terduga anjlok -53,01% (2024: Rp1,64 miliar), membatasi kapasitas respons darurat, dan tidak adanya alokasi transfer mengindikasikan pola belanja yang berbeda dengan kabupaten.

Tantangan utama terletak pada rendahnya rasio belanja modal (10,7%) yang berisiko menghambat investasi strategis RPJMD, serta ketergantungan berlebihan pada belanja operasi (89,3%) yang menyedot sumber daya fiskal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan:

1. Reformasi struktural melalui realokasi belanja operasi ke modal dengan target rasio 70:30 pada 2026;

2. Intensifikasi belanja modal fokus infrastruktur dasar (jalan, gedung sekolah/puskesmas) dan aset produktif BUMD;
3. Penguatan fiscal buffer dengan mengalokasikan 2-3% belanja tak terduga untuk mitigasi risiko;
4. Optimalisasi skema pendampingan (DAK Fisik, KPBU) untuk akselerasi proyek strategis.

Transformasi pengelolaan belanja ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan operasional dan investasi jangka panjang, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai mandat RPJMD.

Kota Pekanbaru menunjukkan kinerja fiskal konservatif dalam pengelolaan pembiayaan selama 2020-2024. Penerimaan pembiayaan didominasi oleh pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai satu-satunya sumber (100%), tanpa kontribusi dari instrumen lain seperti penjualan aset atau pinjaman. Namun, penerimaan ini mengalami penurunan signifikan (-12,50% per tahun), dari Rp15,29 miliar (2020) menjadi Rp9,03 miliar (2024). Volatilitas tercermin dari fluktuasi ekstrem—misalnya lonjakan 155% menjadi Rp30,96 miliar (2022) diikuti penurunan 53% pada 2023.

Pengeluaran pembiayaan bersifat sporadis dan hanya dialokasikan untuk penyertaan modal daerah (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah) pada tiga tahun: 2020 (Rp1 miliar), 2022 (Rp2,85 miliar), dan 2023 (Rp10 miliar). Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan belum optimalnya strategi investasi jangka panjang. Di sisi lain, tidak adanya realisasi pembentukan dana cadangan atau pelunasan utang mencerminkan pendekatan minim risiko, meski berpotensi mengurangi peluang penguatan kapasitas fiskal.

Akumulasi SAL (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebagai cerminan surplus anggaran tumbuh 22,68% rata-rata per tahun, mencapai puncak Rp30,96 miliar (2021) dan menutup periode di Rp27,91 miliar (2024). Pertumbuhan ini menunjukkan akumulasi dana menganggur (idle cash) yang masif, terutama karena 82,6% SAL tidak dialihkan ke instrumen produktif dimana terdapat 3 tantangan strategisnya:

1. Monopoli Sumber Pembiayaan: Ketergantungan 100% pada SILPA menciptakan kerentanan fiskal struktural jika surplus anggaran menyusut.
2. Suboptimalisasi Investasi: Rendahnya alokasi penyertaan modal (rata-rata Rp4,62 miliar/tahun) dan ketiadaan dana cadangan membatasi potensi penguatan BUMD dan aset produktif.
2. Volatilitas Penerimaan: Fluktuasi penerimaan pembiayaan (rentang Rp9-30 miliar) menyulitkan perencanaan investasi strategis RPJMD.

Rekomendasi:

1. Diversifikasi Sumber Pembiayaan:

- Optimalisasi penerimaan kembali dana bergulir dari UMKM/BUMD.
- Kajian obligasi daerah atau KPBU untuk proyek infrastruktur prioritas.

2. Transformasi SAL Menjadi Aset Produktif:

- Alokasi 20-30% SAL untuk penyertaan modal di BUMD sektor strategis (e.g., energi terbarukan, properti).
- Pembentukan dana cadangan bencana/taktis sesuai UU No. 1/2022.

3. Penguatan Kerangka Investasi:

- Penyusunan peta jalan penyertaan modal daerah berbasis analisis ROI (Return on Investment).
- Integrasi pembiayaan dengan program prioritas RPJMD seperti pengembangan smart city dan ekonomi digital.

Pola pembiayaan Pekanbaru yang konservatif telah menjaga stabilitas fiskal jangka pendek, tetapi berpotensi menghambat akselerasi pembangunan jika tidak diimbangi strategi investasi progresif. Optimalisasi SAL untuk mendanai proyek berpenghasilan (revenue-generating projects) dapat menjadi kunci peningkatan PAD dan derajat otonomi fiskal—sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Dengan langkah ini, akumulasi surplus tidaNeraca Daerah

Neraca Kota Pekanbaru periode 2019–2024 mencerminkan dinamika keuangan yang kompleks dengan tren pertumbuhan aset dan tantangan fiskal yang signifikan. Likuiditas dan manajemen kas menunjukkan dinamika signifikan dimana aset lancar meningkat dari Rp296,18 triliun (2020) menjadi Rp684,35 triliun (2024), terutama didorong pertumbuhan persediaan sebesar 225% dalam lima tahun dan piutang. Namun volatilitas kas sangat mencolok dengan lonjakan ke Rp31,45 triliun (2021) akibat peningkatan kas di BLUD, kemudian merosot drastis menjadi Rp9,51 triliun (2023) karena penurunan kas daerah dan BLUD. Meski terjadi pemulihan di 2024 menjadi Rp26,66 triliun, ketergantungan berlebihan pada kas di bendahara pengeluaran (Rp7,69 triliun) mengindikasikan risiko inefisiensi penyerapan anggaran yang berpotensi mengganggu likuiditas jangka pendek.

Piutang dan risiko penagihan menampilkan pola mengkhawatirkan dengan dominasi piutang pajak rata-rata Rp600 triliun/tahun yang diimbangi penyisihan piutang besar (Rp404-481 triliun), mengisyaratkan tingginya piutang bermasalah. Lonjakan ekstrem piutang transfer antardaerah sebesar 597% di 2024 menjadi Rp167,7 triliun mempertegas ketergantungan pada transfer pemerintah dan kerentanan terhadap ketidakpastian pendapatan. Ketidakstabilan piutang lainnya

seperti penurunan 82% di tahun 2021 mencerminkan kelemahan struktural dalam pengelolaan piutang non-pajak.

Investasi dan aset tetap mengungkap tantangan keberlanjutan dengan penyertaan modal pemda yang turun 37,6% selama periode 2020-2024, mengindikasikan pelemahan portofolio investasi daerah atau divestasi aset strategis. Meski nilai aset tetap relatif stabil di kisaran Rp7.000 triliun, akumulasi penyusutan mencapai Rp5.205 triliun (2024) yang berarti 77% aset telah terdepresiasi sehingga menuntut belanja pemeliharaan masif untuk mencegah penurunan fungsional. Konsistensi konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp323-332 triliun membuktikan komitmen pembangunan infrastruktur, namun memerlukan akselerasi penyelesaian untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi.

Kewajiban dan kerentanan fiskal menandakan tekanan akut di tahun 2024 dimana utang belanja melonjak 153% menjadi Rp467,15 triliun dan kini menyumbang 71,6% total kewajiban, berisiko membebani APBD berikutnya serta mengurangi fleksibilitas fiskal. Meski utang jangka pendek lainnya berhasil ditekan dari Rp116,64 triliun (2020) menjadi Rp6,01 miliar (2024), absennya utang jangka panjang membatasi ruang pembiayaan proyek strategis walau menguntungkan sustainability fiskal.

Ekuitas dan kesehatan keuangan daerah merefleksikan fundamental kuat tetapi dengan tren mengkhawatirkan dimana ekuitas tumbuh stabil dari Rp7.486 triliun (2020) ke Rp8.141 triliun (2023), namun anjlok ke Rp7.448 triliun (2024) akibat kombinasi kenaikan kewajiban dan potensi penurunan nilai aset. Rasio ekuitas-aset yang tinggi (96-98%) tetap menjadi pilar ketahanan, tetapi kemerosotan di tahun 2024 memerlukan respons kebijakan segera.

Aspek strategis harus fokus pada optimalisasi penerimaan melalui penagihan agresif piutang pajak-retribusi guna mengurangi ketergantungan transfer, efisiensi belanja berbasis kinerja untuk mengendalikan utang belanja, revitalisasi aset tetap lewat realokasi anggaran pemeliharaan menghadapi penyusutan masif, penguatan likuiditas via strategi treasury management termasuk optimalisasi investasi jangka pendek Rp1,5 triliun (2024), serta peningkatan kualitas investasi dengan evaluasi kinerja BUMD seiring penurunan penyertaan modal. Rekomendasi kebijakan krusial meliputi percepatan digitalisasi penagihan piutang untuk meningkatkan PAD, konversi aset dalam pengerjaan menjadi aset produktif melalui percepatan proyek, pembentukan kebijakan cadangan dana antisipasi volatilitas kas, optimalisasi kemitraan pihak ketiga senilai Rp176,9 triliun (2024) untuk pembangunan infrastruktur tanpa utang, serta audit komprehensif.


Tabel II.172. Neraca Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Aset Lancar	296.186.072.604,19	245.550.766.260,61	375.540.322.345,74	548.614.244.088,03	684.354.337.990,65
	B. Investasi Jangka Panjang	236.699.299.290,30	229.927.628.632,75	192.690.759.929,80	184.356.466.061,90	147.702.769.957,40
	C. Aset Tetap	7.003.688.736.042,36	7.083.415.699.590,39	7.078.094.631.794,61	7.020.967.926.817,43	6.794.364.015.868,00
	D. Aset Lainnya	251.656.191.094,60	252.267.791.287,00	501.549.129.445,46	551.380.816.597,75	289.237.005.473,00
	E. Properti Investasi	0	0	0	0	0
	JUMLAH ASET	7.788.230.299.031,45	7.811.161.885.770,75	8.147.874.843.515,61	8.305.159.239.962,61	7.915.818.342.425,55
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	301.875.011.266,29	239.142.623.745,01	185.967.862.723,65	163.791.180.472,93	467.571.650.398,43
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	301.875.011.266,29	239.142.623.745,01	185.967.862.723,65	163.791.180.472,93	467.571.650.398,43
3	EKUITAS					
	Ekuitas	7.486.355.287.765,16	7.572.019.262.025,74	7.961.906.980.791,96	8.141.368.059.489,68	7.448.246.692.027,12
	JUMLAH EKUITAS	7.486.355.287.765,16	7.572.019.262.025,74	7.961.906.980.791,96	8.141.368.059.489,68	7.448.246.692.027,12
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.788.230.299.031,45	7.811.161.885.770,75	8.147.874.843.515,61	8.305.159.239.962,61	7.915.818.342.425,55

Sumber BPKAD Kota Pekanbaru, 2024 (diolah)



Selanjutnya analisis neraca daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Kegunaan dari masing-masing perhitungan rasio tersebut adalah: (a) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meliputi rasio lancar, dan rasio cepat; (b) Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya, meliputi rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal; (c) Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah, meliputi rata-rata umur piutang, dan rata-rata umur persediaan. Tabel II.169 menyajikan hasil analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024.

Tabel II.173. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A. Rasio Likuiditas							
01	Rasio Lancar	0,98	1,03	2,02	3,35	1,46	1,77
	(Current ratio)						
02	Rasio Cepat	0,74	0,61	1,29	2,34	0,98	1,19
	(Quick ratio)						
B. Rasio Solvabilitas							
01	Rasio Total Hutang	3,88%	3,06%	2,28%	1,97%	5,91%	3,42%
	terhadap Total Asset						
02	Rasio Hutang	4,03%	3,16%	2,34%	2,01%	6,28%	3,56%
	terhadap Ekuitas						

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru, 2020-2024 (diolah)

Likuiditas menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Rasio lancar rata-rata 1,77 dan rasio cepat 1,19 masih berada di ambang batas aman (rasio > 1), namun tidak mencapai standar ideal (≥ 2). Puncak kinerja terjadi pada 2023 ketika aset lancar mampu menutupi kewajiban jangka pendek 3,35 kali (rasio lancar) dan 2,34 kali (rasio cepat), didorong oleh akumulasi kas dan penurunan utang. Namun, 2024 menjadi titik kritis: rasio lancar anjlok ke 1,46 dan rasio cepat ke 0,98 akibat lonjakan utang belanja sebesar 185% (menjadi Rp467,57 triliun). Penurunan drastis ini merefleksikan kerentanan operasional jangka pendek, terutama karena ketergantungan pada pendanaan likuid yang rentan terhadap gejolak.

Solvabilitas merefleksikan fundamental fiskal yang relatif sehat, meski terimbas tekanan 2024. Rasio utang-total aset rata-rata hanya 3,42% dan rasio utang-

ekuitas 3,56%, menunjukkan pendanaan dominan berbasis ekuitas (96,58%). Stabilitas ini ditopang oleh minimnya utang jangka panjang dan porsi aset tetap yang masif (85-88% total aset), seperti infrastruktur jalan (Rp4,7 kuadriliun) dan gedung (Rp2,4 kuadriliun). Namun, 2024 mencatat kenaikan risiko leverage: rasio utang/aset melonjak ke 5,91% dan utang/ekuitas ke 6,28% tertinggi dalam lima tahun akumulasi utang belanja jangka pendek. Meski masih dalam batas aman (<10%), tren ini berpotensi mengikis kapasitas fiskal jika tidak dikelola ketat.

Tantangan Krusial 2024 terletak pada tiga bidang:

1. Manajemen Utang: Lonjakan utang belanja Rp467,57 triliun perlu audit mendalam—apakah berasal dari akumulasi tunggakan, pembiayaan proyek strategis, atau inefisiensi anggaran.
2. Optimalisasi Aset Lancar: Piutang pajak menumpuk (Rp662,53 triliun) dengan penyisihan piutang mencapai Rp416,24 triliun (27% gagal bayar potensial), sementara persediaan membengkak 370% sejak 2020 (Rp225 triliun) berisiko jadi aset tidak produktif.
3. Ketahanan Infrastruktur: Akumulasi penyusutan aset tetap Rp5.205,8 triliun (naik 40% sejak 2019) mengisyaratkan penuaan aset dan kebutuhan revitalisasi mendesak.

Rekomendasi Strategis:

1. Restrukturisasi Utang: Konversi utang jangka pendek menjadi menengah, penetapan plafon utang belanja maksimal 5% dari APBD.
2. Percepatan Penagihan: Fokus pada piutang transfer antardaerah (Rp167,7 triliun) dan pajak daerah melalui digitisasi penagihan.
3. Efisiensi Persediaan: Penerapan sistem just-in-time dan lelang aset menganggur.
4. Pemeliharaan Aset: Alokasi anggaran pemeliharaan minimal 3% dari nilai aset tetap per tahun.

Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mempertahankan solvabilitas kuat (ekuitas >94%) hingga 2023, tetapi tekanan likuiditas 2024 mengisyaratkan perlunya koreksi struktural. Dominasi aset tetap menjadi pilar ketahanan, namun ketergantungan pada pendanaan jangka pendek dan manajemen piutang yang kurang agresif berpotensi menggerus stabilitas fiskal. RPJMD ke depan wajib memprioritaskan cash flow management dan optimalisasi aset untuk menjawab tantangan ini.

2.4.5.2. Kebijakan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Pekanbaru secara garis besar tercermin dalam kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap

tahunnya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja guna mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keuangan daerah diharapkan dapat dikelola secara efisien dalam rangka mengalokasikan sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang cermat melalui proses identifikasi kebutuhan serta penyerapan aspirasi masyarakat untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah.

Azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru adalah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan melalui APBD yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru merupakan wujud nyata pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah tetap harus selaras dengan rencana pembangunan daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Pekanbaru juga difokuskan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendorong percepatan kegiatan ekonomi, khususnya pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian perkotaan, perikanan, industri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata berbasis ekonomi kreatif.

Selain itu, kebijakan penganggaran di Kota Pekanbaru juga diarahkan untuk mengatasi permasalahan strategis dan mendesak, dengan memberikan perhatian pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta menekan angka pengangguran, tanpa mengabaikan pemenuhan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.

2.4.5.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah gambaran tentang belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan aparatur, proporsi

belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Pekanbaru ditampilkan pada Tabel 3.8 sebagai berikut

Tabel II.174. Proporsi Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	BELANJA MODAL					
1	Belanja Tanah	0,60%	0,32%	0,34%	0,03%	0,02%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,32%	4,17%	4,35%	2,76%	4,86%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,46%	6,85%	3,13%	3,42%	2,67%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,38%	6,44%	4,87%	4,66%	2,59%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,18%	0,16%	0,49%	0,61%	0,53%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
	Jumlah Belanja Modal	16,94%	17,94%	13,17%	11,47%	10,70%
	BELANJA TAK TERDUGA					
7	Belanja Tak Terduga	2,65%	0,78%	0,04%	0,03%	0,06%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	2,65%	0,78%	0,04%	0,03%	0,06%
	JUMLAH BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru, 2020-2024 (diolah)

Proporsi belanja modal Kota Pekanbaru mengalami penurunan signifikan dari 16,94% pada 2020 menjadi hanya 10,70% pada 2024, mengindikasikan pergeseran prioritas fiskal dari investasi infrastruktur ke belanja operasional. Tren penurunan ini terjadi secara konsisten setiap tahun, dengan penurunan terbesar terjadi pada periode 2022-2023 (13,17% menjadi 11,47%). Secara rinci, belanja infrastruktur dasar (jalan dan irigasi) turun dari 5,38% (2020) menjadi 2,59% (2024), dengan realisasi absolut anjlok 43,3% (Rp125,8 miliar menjadi Rp71,4 miliar). Hal ini berisiko mengganggu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk aksesibilitas publik. Sementara itu, belanja gedung dan bangunan merosot 58,7% secara proporsional (6,46% menjadi 2,67%), dengan nilai absolut turun 51,1% (Rp151,1 miliar menjadi Rp73,8 miliar), yang dapat berdampak pada pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Meskipun belanja peralatan dan mesin pada 2024 (4,86%) hampir setara dengan 2020 (4,32%), realisasi absolutnya meningkat 32,6% (Rp101 miliar menjadi Rp134 miliar), menunjukkan adanya fokus pada modernisasi peralatan. Di sisi lain, belanja tanah hampir hilang (0,60% menjadi 0,02%), dengan realisasi 2024 hanya Rp650 juta (turun 95,3% dari 2020), sehingga membatasi ekspansi ruang publik dan proyek strategis. Implikasinya, rasio belanja modal 2024 yang hanya 10,7% jauh di bawah standar kesehatan fiskal (30%), berpotensi menghambat target RPJMD dan mengurangi daya saing daerah.

Proporsi belanja tak terduga merosot drastis sebesar 97,7% dalam lima tahun (2,65% menjadi 0,06%). Realisasi absolut pada 2024 hanya Rp1,64 miliar atau 2,6% dari realisasi 2020 (Rp61,9 miliar). Pada 2022-2023, proporsinya bahkan nyaris nol (0,04%-0,03%), mengindikasikan minimnya fiskal buffer. Kondisi ini berisiko

mengurangi kapasitas respons krisis (bencana, wabah, gangguan sosial) dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian fiskal.

Terdapat ketidakkonsistenan dalam alokasi transfer, terutama dalam bantuan keuangan ke desa yang tidak dialokasikan sama sekali pada 2021-2024, berbeda dengan pola kabupaten yang biasanya mengalokasikan 18-25%. Sementara itu, transfer lainnya hanya muncul pada 2020 untuk partai politik (Rp1,07 miliar atau 0,05%) dan nihil di tahun-tahun berikutnya. Implikasinya, tidak adanya transfer ke desa/kelurahan berpotensi melemahkan program pemberdayaan berbasis komunitas dalam RPJMD. Kinerja anggaran Kota Pekanbaru menunjukkan fluktuasi ekstrem, termasuk defisit pada 2021. Ketidakstabilan ini mengindikasikan lemahnya perencanaan fiskal jangka panjang dan berpotensi memengaruhi keberlanjutan pembangunan daerah.

2.4.5.2.2. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kota Pekanbaru menunjukkan transformasi signifikan dalam pengelolaan belanja aparatur selama periode 2020-2023. Proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran (belanja + pembiayaan) mengalami penurunan konsisten dari 41,29% pada 2020 menjadi 33,27% di 2023, turun sebesar 8,02 poin persentase. Tren ini mencerminkan keberhasilan kebijakan efisiensi fiskal, di mana pertumbuhan nominal belanja pegawai yang terkendali (rata-rata 2,9% per tahun dari Rp841,4 miliar menjadi Rp917,7 miliar) mampu menciptakan ruang fiskal bagi belanja modal dan pelayanan publik, meskipun total pengeluaran daerah meningkat pesat.

Penurunan proporsi ini selaras dengan prinsip kesehatan fiskal Permendagri yang membatasi belanja aparatur di bawah 50%, sekaligus mengindikasikan peningkatan kematangan penganggaran berbasis kinerja. Capaian proporsi 33,27% di 2023 telah berada dalam rentang ideal (30-35%) untuk mempertahankan kapasitas kelembagaan tanpa mengorbankan investasi pembangunan. Namun, tantangan strategis muncul dari kenaikan nominal belanja pegawai yang lebih lambat dibanding inflasi kumulatif periode sama (sekitar 15%), berpotensi mengurangi daya beli aparatur sipil negara (ASN) dan menghambat rekrutmen tenaga strategis seperti guru dan tenaga kesehatan.

1. Untuk memitigasi risiko tersebut, rekomendasi kebijakan difokuskan pada restrukturisasi alokasi belanja aparatur melalui tiga pendekatan:
2. Pengalihan anggaran dari komponen low-impact (seperti tunjangan struktural) menuju insentif berbasis kinerja untuk profesi kritis;
3. Integrasi elektronifikasi pelayanan publik untuk mengurangi beban kerja administratif ASN;

Tabel II.175. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2024

Tahun	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Belanja Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Belanja Aparatur terhadap Pengeluaran
2020	2.341.181.180.840	2.342.181.180.840	99,96%
2021	2.318.795.888.378	2.318.795.888.378	100,00%
2022	2.492.666.952.346	2.495.516.952.346	99,89%
2023	2.748.798.260.184	2.758.798.260.184	99,64%
2024	2.761.348.389.059	2.761.348.389.059	100,00%

Catatan Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Adalah Belanja pegawai Tahun Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan

Pemantauan ketat rasio kesejahteraan ASN terhadap upah minimum regional guna mencegah penurunan motivasi. Transformasi ini menegaskan komitmen Pekanbaru dalam menyeimbangkan efisiensi fiskal dengan penguatan kapasitas birokrasi, menjadikan belanja aparatur bukan sebagai beban, melainkan investasi strategis untuk percepatan pencapaian target RPJMD.

2.4.5.2.3. Analisis Pembiayaan

Pengeluaran periodik dan mengikat serta prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka keberlangsungan pelayanan. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Pembiayaan daerah berfungsi sebagai instrumen penyeimbang fiskal yang mencakup penerimaan wajib dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Dalam konteks Kota Pekanbaru, mekanisme ini menunjukkan pola konservatif dengan ketergantungan tinggi pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai sumber tunggal pembiayaan (100%). Tren penerimaan pembiayaan mengalami penurunan signifikan (-12,50% per tahun), dari Rp15,29 miliar (2020) menjadi Rp9,03 miliar (2024), dengan volatilitas ekstrem seperti lonjakan 155% pada 2022 (Rp30,96 miliar) yang diikuti penurunan 53% di tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan hanya muncul secara sporadis untuk penyertaan modal daerah—dengan alokasi tidak konsisten sebesar Rp1 miliar (2020), Rp2,85 miliar (2022), dan Rp10 miliar (2023)—tanpa adanya pembentukan dana cadangan atau pelunasan utang, mencerminkan ketiadaan strategi investasi jangka panjang yang terukur.

Ketergantungan mutlak pada SILPA menciptakan dua kerentanan struktural: pertama, eksposur berlebihan terhadap volatilitas surplus anggaran; kedua, minimnya

diversifikasi sumber pembiayaan. Hal ini diperparah oleh rendahnya rasio penyertaan modal terhadap total pembiayaan (rata-rata 0,15% dari APBD), yang berimplikasi pada suboptimalisasi aset produktif. Akumulasi SAL yang tumbuh 22,68% per tahun tidak diimbangi alokasi efektif—82,6% dana menganggur (idle cash) tidak berkontribusi pada penguatan kapasitas fiskal. Kondisi ini membatasi kemampuan pendanaan proyek strategis RPJMD seperti infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan BUMD, terlihat dari rasio belanja modal stagnan di 10-11% (jauh di bawah standar 30%).

Tantangan utama terletak pada rendahnya rasio pembiayaan terhadap APBD (rata-rata 0,10%) yang tidak memadai untuk mitigasi guncangan fiskal, serta ketidakhadiran instrumen inovatif seperti obligasi daerah atau KPBU. Untuk mengatasi hal ini, tiga rekomendasi strategis diajukan:

1. Diversifikasi sumber pembiayaan melalui penerbitan green bond senilai Rp200-300 miliar untuk transportasi rendah karbon dan optimalisasi penerimaan kembali dana bergulir dari UMKM/BUMD;
2. Transformasi SAL menjadi aset produktif dengan mengalokasikan 20-30% untuk penyertaan modal di sektor strategis (energi terbarukan, properti) berbasis analisis ROI minimal 12%, serta pembentukan dana cadangan bencana;
3. Institusionalisasi kerangka investasi via peta jalan penyertaan modal lima tahunan yang terintegrasi dengan program prioritas RPJMD dan sistem pemantauan kinerja kuartalan.


Tabel II.176. Defisit Riil Anggaran Kota Pekanbaru 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	2.339.036.234.445	2.337.605.186.326	2.479.247.340.046	2.753.144.818.421	2.780.227.926.523	4,43
2	BELANJA	2.341.181.180.840	2.318.795.888.378	2.492.666.952.346	2.748.798.260.184	2.761.348.389.059	4,22
3	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	-	2.850.000.000	10.000.000.000	-	-
4	SURPLUS/DEFISIT	-2.144.946.395	18.809.297.948	-13.419.612.301	4.346.558.237	18.879.537.465	-

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru 2025

Pada pola pembiayaan Pekanbaru yang konservatif telah berhasil mempertahankan stabilitas fiskal jangka pendek, namun berisiko menghambat akselerasi pembangunan jangka menengah. Transformasi menuju model hibrida (60% SILPA + 30% obligasi + 10% KPBU) dapat menjadikan pembiayaan sebagai enabler pembangunan sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan PAD dan derajat otonomi fiskal. Dengan demikian, akumulasi dana daerah tidak hanya menjadi buffer pasif, melainkan katalis kemandirian keuangan yang berkelanjutan. Volatilitas fiskal patologis dan sindrom ketergantungan SILPA yang teridentifikasi sebelumnya secara empiris termanifestasi dalam komposisi penutupan defisit riil Kota Pekanbaru 2020-2024 (Tabel II.176), di mana mekanisme pembiayaan menunjukkan tiga anomali krusial:

Tabel II.177. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	PENDAPATAN	2.339.036.234.445	2.337.605.186.326	2.479.247.340.046	2.753.144.818.421	2.780.227.926.523	4,43
B	BELANJA	2.341.181.180.840	2.318.795.888.378	2.492.666.952.346	2.748.798.260.184	2.761.348.389.059	4,22
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	0	2.850.000.000	10.000.000.000	0	69,3*
	SURPLUS/DEFISIT (A-(B-C))	-2.144.946.395	18.809.297.948	-13.419.612.301	4.346.558.237	18.879.537.465	-
D	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.293.613.940	12.148.667.545	30.957.871.493	14.688.259.192	9.034.817.429	-12,39
	Penggunaan SILPA	15.293.613.940	12.148.667.545	30.957.871.493	14.688.259.192	9.034.817.429	-12,39
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	0	0	0	0	0	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (D+Defisit Riil)	13.148.667.545	30.957.965.493	17.538.259.192	19.034.817.429	27.914.354.894	20,39

Sumber BPKAD Kota Pekanbaru Tahun 2024



Kota Pekanbaru menunjukkan volatilitas fiskal patologis dalam lima tahun terakhir, ditandai fluktuasi ekstrem posisi anggaran: dari defisit riil Rp2,14 miliar (2020) ke surplus Rp18,81 miliar (2021), kembali defisit Rp13,42 miliar (2022), dan berakhir surplus tidak konsisten (2023-2024). Mekanisme penutupan defisit mengidap SILPA dependency syndrome—ketergantungan tunggal pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai mono-instrument tanpa diversifikasi ke asset divestment, debt financing, atau revenue anticipation. Patologi ini diperparah oleh rasio SILPA/APBD degeneratif (0,33% di 2023) yang jauh di bawah standar kesehatan fiskal (3-5%), serta idle cash stagnation di mana 87,2% akumulasi SAL (Sisa Anggaran Lebih) tidak diaktivasi menjadi aset produktif.

Anomali kebijakan pembiayaan tercermin dalam disjointed financing policy: penerimaan pembiayaan merosot 12,39%/tahun dengan kontribusi 100% dari SILPA, sementara pengeluaran pembiayaan bersifat ad hoc dan tidak strategis. Penyertaan modal daerah (regional capital injection) dilakukan sporadis tanpa roadmap ROI, diiringi ketiadaan pembentukan dana cadangan (reserve fund formation), pelunasan utang (debt repayment), atau skema public-private co-financing. Kerentanan sistemik terukur melalui tiga indikator kritis: (1) Fiscal Buffer Ratio 0,33% (status kritis; standar >3%), (2) Deficit Coverage Capacity 109,4% (status rentan; standar >150%), dan (3) Financing Flexibility 0% (status rigid; standar 20-40%). Kondisi ini menciptakan fiscal emergency response capacity minimal dan potensi opportunity cost pembangunan senilai Rp1,2 triliun akibat suboptimalisasi aset.

Transformasi mendesak diperlukan melalui pergeseran dari model SILPA-sentris ke Triple-Helix Financing:

1. Hybrid Instrument Framework dengan penerbitan municipal sustainability bond Rp500 miliar dan skema land value capture untuk proyek berbasis transit;
2. SILPA Optimisation Engine melalui alokasi 30% SAL ke Strategic Investment Fund (min ROI 12%) dan konversi 20% menjadi fiscal disaster buffer;
3. Asset-Liability Matching berbasis debt service coverage ratio (DSCR >1,5x) dan pembentukan sinking fund.

Implementasi harus didukung institusionalisasi pengawasan via Fiscal Risk Dashboard real-time dengan pemantauan cash flow volatility index dan investment return gap analysis. Simpulannya, pembiayaan Pekanbaru saat ini terjebak dalam akut SILPA dependency syndrome yang mengancam sustainabilitas fiskal. Transformasi ke model hibrida tripartit (SILPA 50% + obligasi 30% + KPBU 20%) akan mengubah pembiayaan dari residual balancing tool menjadi strategic development enabler,

memperkuat kapasitas fiskal menuju kemandirian berkelanjutan (sustainable fiscal autonomy).

Komposisi penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti pada Tabel dibawah ini

Tabel II.178. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tahun	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
2020	15.293.613.940	12.137.740.704
2021	12.148.667.545	30.957.965.493
2022	30.957.871.493	14.688.259.192
2023	14.688.259.192	9.034.817.429
2024	9.034.817.429	27.914.354.893,64

Sumber BPKAD Kota Pekanbaru Tahun 2024

Pengelolaan pembiayaan defisit Kota Pekanbaru selama 2020-2024 mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai instrumen utama penyeimbang fiskal, dengan pola kinerja yang fluktuatif. Tahun 2021 menjadi puncak efisiensi ketika SiLPA Rp12,15 miliar berhasil dikonversi menjadi surplus pembiayaan Rp30,96 miliar (rasio 154,8%), mencerminkan optimalisasi pascapandemi melalui percepatan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan penajaman belanja langsung. Namun, periode 2022-2023 menunjukkan tekanan fiskal signifikan: rasio konversi SiLPA-surplus anjlok ke 47,4% (2022) dan 61,5% (2023) akibat belanja tak tersangka seperti penanganan bencana dan kenaikan biaya operasional. Pemulihan dramatis terjadi di 2024 dengan kinerja fiskal terbaik: SiLPA terkecil (Rp9,03 miliar) menghasilkan surplus terbesar (Rp27,91 miliar, rasio 309%) berkat konsolidasi anggaran berbasis kinerja dan efisiensi belanja barang/jasa. Tren ini mengindikasikan semakin matangnya praktik penganggaran daerah meski volatilitas tetap menjadi tantangan.

Analisis sisa lebih perhitungan anggaran merupakan gambaran tentang pembentukan komposisi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dengan mengetahui SiLPA periode sebelumnya, dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA serta seberapa besar kontribusi komponen pembentuk SiLPA tersebut.

Tabel II.179. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah SiLPA		Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
	Rp	%	Rp	%
2020	12.137.740.704	100%	557.385.450	4,59%
2021	30.957.965.493	100%	501.424.749	1,62%

Tahun	Jumlah SiLPA		Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
	Rp	%	Rp	%
2022	14.688.259.192	100%	587.209.984	4,00%
2023	9.034.817.429	100%	200.196.681	2,22%
2024	27.914.354.893,64	100%	281586864,8	1,01%

Sumber : BPKAD Kota Pekanbaru Tahun 2024

Realisasi SiLPA 2020-2024 memperlihatkan kemajuan substansial dalam pengendalian kewajiban pihak ketiga sebagai komponen kritis pertanggungjawaban keuangan daerah. Proporsi kewajiban tertunda terhadap total SiLPA turun drastis dari 4,59% (2020) menjadi 1,01% (2024), didorong oleh inovasi tata kelola kas daerah seperti penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terintegrasi dan mekanisme e-payment untuk pembayaran kontraktor. Penurunan ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SiLPA—terutama di 2024 ketika proporsi kewajiban terendah (1,01%) berhasil menghasilkan realisasi SiLPA tertinggi (Rp27,91 miliar). Namun, akumulasi absolut kewajiban sebesar Rp2,13 miliar selama lima tahun mengungkap kerentanan sistemik, terutama dari belanja modal proyek multiyears yang kerap menimbulkan tunggakan pembayaran termin. Risiko ini diperparah oleh belum terpetakannya kewajiban kontinjensi dari kerjasama pemerintah-swasta (KPS) dalam laporan keuangan.

Tantangan struktural utama terletak pada inkonsistensi rasio konversi SiLPA-surplus (47,4%-309%) yang berpotensi mengganggu perencanaan pembiayaan jangka menengah (PPJM). Di sisi lain, meski proporsi kewajiban pihak ketiga menurun, potensi sengketa tagihan dari proyek infrastruktur masih membayangi opini WTP BPK. Untuk itu, rekomendasi kebijakan difokuskan pada: (1) transformasi SiLPA menjadi dana cadangan pembangunan dengan mengalokasikan 30% surplus untuk investasi strategis seperti revitalisasi aset tetap; (2) penguatan sistem akuisisi daerah melalui integrasi e-procurement dengan SIPKD untuk memangkas keterlambatan pembayaran; serta (3) penerapan kebijakan kewajiban teridentifikasi terkendali (KTT) yang membatasi proporsi kewajiban tertunda maksimal 1,5% dari APBD. Langkah ini perlu didukung sistem peringatan dini berbasis real-time liability dashboard guna mencegah akumulasi tunggakan.

Secara makro, keuangan daerah Kota Pekanbaru menunjukkan resiliensi fiskal yang terus menguat, ditopang oleh tiga pilar: (1) kapasitas pembiayaan defisit melalui optimalisasi SiLPA; (2) pengendalian utang jangka pendek dengan rasio utang/aset terjaga di bawah 6%; serta (3) dominasi aset produktif (infrastruktur) mencapai 88% total kekayaan. Capaian 2024 menjadi bukti keberhasilan konsolidasi anggaran berbasis teknologi, meski tantangan ke depan tetap kompleks—khususnya

menyangkut mitigasi volatilitas pendapatan dan penyelesaian kewajiban siluman (off-balance sheet liability). Keberlanjutan fiskal akan sangat bergantung pada kemampuan pemda mengonversi aset idle (seperti tanah Rp3.074 triliun) menjadi sumber PAD inovatif, sekaligus memperkuat kolaborasi fiskal dengan pemerintah pusat melalui Dana Insentif Daerah (DID) untuk proyek strategis.

2.4.5.3. Kerangka Pendanaan 2025-2029

2.4.5.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Analisis kerangka pendanaan dilakukan guna untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Kota Pekanbaru Tahun 2026-2030 sebagai berikut:

Tabel II.180. Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Pekanbaru Tahun 2026-2030

Uraian	2024 (Baseline)	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	2.780.228.449.089	3.285.456.137.907	3.453.378.949.884	3.616.346.236.181	3.778.492.839.999	3.940.974.810.488
Pendapatan Asli Daerah	923.858.966.790	1.477.842.652.333	1.640.405.344.090	1.820.849.931.939	2.021.143.424.453	2.243.469.201.143
Pendapatan Transfer	1.856.361.752.299	1.807.613.485.574	1.812.973.605.794	1.795.496.304.242	1.757.349.415.546	1.697.505.609.345
Lain-lain Pendapatan Sah	7.730.000	-	-	-	-	-
BELANJA	2.761.174.961.016	3.248.581.168.482	3.416.665.677.492	3.579.789.884.274	3.742.092.618.345	3.904.731.042.010
Belanja Operasi	2.464.282.916.739	2.734.496.750.668	2.866.778.820.857	2.991.646.153.845	3.113.051.892.930	3.231.964.634.859
Belanja Modal	295.254.308.448	504.036.254.814	539.318.792.651	577.071.108.137	617.466.085.706	660.688.711.706
Belanja Tidak Terduga	1.637.735.829	10.048.163.000	10.568.063.984	11.072.622.292	11.574.639.709	12.077.695.445
Transfer	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	19.053.488.074	36.874.969.425	36.713.272.392	36.556.351.907	36.400.221.654	36.243.768.478
PEMBIAYAAN NETTO	9.034.817.429	36.874.969.425	36.713.272.392	36.556.351.907	36.400.221.654	36.243.768.478
Penerimaan Pembiayaan	9.034.817.429	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	36.874.969.425	36.713.272.392	36.556.351.907	36.400.221.654	36.243.768.478
SILPA	28.088.305.503	-	-	-	-	-

Sumber: BAPENDA Kota Pekanbaru dan BPKAD Kota Pekanbaru Tahun 2025 (Data Diolah)

Proyeksi keuangan Kota Pekanbaru tahun 2026–2030 menunjukkan pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil dari Rp2,78 triliun (2024) menjadi Rp3,94 triliun (2030). Kenaikan ini menempatkan rata-rata pertumbuhan pendapatan sekitar 6,1% per tahun, didorong terutama oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari Rp923,8 miliar menjadi Rp2,243 triliun pada 2030. Laju pertumbuhan PAD yang relatif tinggi mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan upaya ekstensifikasi sumber penerimaan.

Di sisi lain, pendapatan transfer menunjukkan pola fluktuatif, bergerak dari Rp1,856 triliun pada 2024 menjadi Rp1,697 triliun pada 2030. Tren ini menandakan meningkatnya porsi kontribusi PAD terhadap total pendapatan, meskipun ketergantungan terhadap transfer pusat masih terlihat signifikan pada beberapa tahun proyeksi.

Dari sisi belanja, total belanja daerah tumbuh dari Rp2,761 triliun (2024) menjadi Rp3,904 triliun (2030). Belanja operasi tetap mendominasi struktur pengeluaran dengan komposisi sekitar 83-84%, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan rutin layanan publik, pemenuhan SPM, dan beban belanja pegawai. Sementara itu, belanja modal meningkat secara bertahap dari Rp295,2 miliar (2024) menjadi Rp660,6 miliar (2030). Meski meningkat, persinya terhadap total belanja masih berada di kisaran 16-17%, menunjukkan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur fisik masih terbatas. Kondisi fiskal daerah memperlihatkan surplus anggaran yang konsisten pada periode 2024–2030, dengan nilai surplus berkisar antara Rp19,05 miliar hingga Rp36,7 miliar per tahun. Surplus ini sepenuhnya dialokasikan untuk menutup kebutuhan pembiayaan netto, sehingga tidak menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).

Secara keseluruhan, proyeksi ini menggambarkan stabilitas fiskal yang terjaga, dengan dorongan kuat dari peningkatan PAD, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan porsi belanja modal serta mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

Untuk menyelaraskan proyeksi dengan arah kebijakan, rekomendasi krusial meliputi: diversifikasi PAD melalui pajak digital (e-commerce, ride-hailing) dan optimalisasi aset idle (tanah Rp3,074 triliun); rebalancing belanja modal dengan mengalokasikan 30% surplus untuk infrastruktur strategis (jalan, pengendalian banjir); serta penguatan cadangan fiskal sebesar 0,31% belanja tak terduga. Transformasi ini perlu didukung integrasi data Pekanbaru *Municipality in Figures 2025* dan indikator pembangunan manusia sebagai basis perencanaan berbasis bukti.

Proyeksi surplus konsisten 2026-2030 (Rp 36miliar) dan penurunan defisit pembiayaan hingga nol mencerminkan komitmen konsolidasi fiskal. Namun, tantangan utama adalah menjembatani kesenjangan antara target kebijakan seperti alokasi belanja berbasis SPM, penyertaan modal KPBU, dan pemberdayaan komunitas dengan realitas angka: belanja modal stagnan, cadangan darurat minim, dan ketergantungan fiskal struktural. Keberhasilan Pekanbaru mencapai otonomi fiskal berkelanjutan bergantung pada kemampuan menaikkan porsi belanja modal minimal 17% pada 2030, mengurangi ketergantungan transfer pusat di bawah 60%, serta menjamin realisasi anggaran proyek strategis tanpa terganggu *political cycle* seperti pemilu.

2.4.5.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Tabel II.181. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2025-2030

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	3.285.456.137.907	3.453.378.949.884	3.616.346.236.181	3.778.492.839.999	3.940.974.810.488
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	-	10.000.000.000	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
Total Penerimaan	3.285.456.137.907	3.461.873.680.537	3.610.047.538.457	3.762.799.166.613	3.911.636.708.871
Dikurangi:					
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	14.000.000.000	-	-	-
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib, Mengikat & Prioritas	3.248.581.168.482	3.416.665.677.492	3.565.751.176.132	3.742.092.618.345	3.904.731.042.010
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	26.874.969.425	22.713.272.392	50.595.060.049	36.400.221.654	36.243.768.478

Sumber: Bapenda Kota Pekanbaru dan BPKAD Kota Pekanbaru Tahun 2025

2.4.5.3.3. Skema Pembiayaan Lainnya

Dalam menghadapi tantangan fiskal dan tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Pekanbaru mengembangkan pendekatan inovatif dengan memanfaatkan beragam skema pembiayaan non-APBD. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran daerah sekaligus memperluas cakupan dan akselerasi pembangunan kota. Melalui strategi terintegrasi ini, berbagai program prioritas dibiayai dengan skema yang sesuai karakter dan tujuan masing-masing program.

Untuk program di bidang kebudayaan dan kesenian, strategi pendanaan didorong melalui kemitraan dengan perusahaan sektor migas dan pertambangan lewat alokasi dana CSR. Dukungan juga diperoleh dari hibah internasional melalui kerjasama dengan lembaga kebudayaan global, serta pengembangan dana bergulir yang bersumber dari penjualan merchandise dan tiket event. Selain itu, peran swasta di sektor pariwisata dioptimalkan melalui *sponsorship* untuk kegiatan promosi bersama. Pada program infrastruktur religi dan sosial, pendanaan diperkuat melalui pemanfaatan wakaf korporasi oleh lembaga keuangan syariah, hibah luar negeri dari bank pembangunan berbasis syariah

serta penggalangan dana masyarakat secara digital melalui platform crowdfunding untuk membiayai proyek-proyek sosial dengan nilai manfaat tinggi.

Di sektor pendidikan dan pengembangan SDM, skema beasiswa perusahaan melalui ikatan dinas BUMN/BUMD menjadi salah satu sumber utama. Selain itu, pendanaan berkelanjutan didukung dari hasil investasi dana abadi pendidikan, serta hibah riset nasional yang dialokasikan secara kompetitif oleh kementerian untuk pengembangan studi strategis. Untuk mendukung program lingkungan dan infrastruktur hijau, Pemerintah Kota Pekanbaru merancang penerbitan green bond berjaminan Pemerintah Pusat guna merehabilitasi ekosistem, sekaligus mengoptimalkan potensi carbon credit hasil reboisasi. Hibah lingkungan global dari lembaga internasional turut dimanfaatkan untuk pengembangan dan adopsi teknologi hijau.

Pada sektor transportasi dan pengelolaan sampah, implementasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dilakukan dengan model Build-Operate-Transfer (BOT) untuk membiayai proyek infrastruktur transportasi strategis. Program pengelolaan sampah dilakukan melalui kemitraan waste-to-energy dengan swasta, dan penerapan sistem retribusi digital berbagi hasil untuk layanan publik. Ekonomi kreatif dan UMKM juga mendapat perhatian khusus, antara lain melalui penyaluran modal ventura untuk pengembangan startup, penyediaan dana lumbung UMKM dari holding BUMN, serta pembiayaan berbasis microfinance syariah tanpa bunga untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

Dalam pemberdayaan masyarakat, strategi pendanaan diterapkan melalui skema matching fund antara pemerintah dan masyarakat/swasta, community grant berbasis kinerja, serta CSR teknologi untuk mendukung digitalisasi dan distribusi perangkat digital di tingkat akar rumput. Seluruh implementasi skema pembiayaan ini diperkuat oleh mekanisme pendukung seperti pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) untuk mengelola proyek KPBU secara profesional, lembaga dana abadi kreatif guna investasi berkelanjutan di sektor ekonomi kreatif, serta sistem monitoring digital berbasis SIPD-LKPD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Secara strategis, integrasi skema pembiayaan alternatif ini memberikan dampak signifikan bagi pengurangan beban APBD hingga 30-40%, meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat hingga 50% melalui *crowdfunding*, CSR, dan *matching fund*, serta menjamin keberlanjutan pembiayaan melalui mekanisme dana bergulir. Dengan demikian, Kota Pekanbaru membangun ekosistem pembiayaan inovatif yang mempercepat pencapaian target pembangunan tanpa membebani fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian finansial dan keberlanjutan pembangunan kota dalam jangka panjang.

2.4.5.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program prioritas*) sangat penting, maka diperlukan kebijakan Alokasi Anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan ditentukannya prioritas alokasi anggaran.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
2. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah (Janji Walikota) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga;
3. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

2.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi kekinian saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini.

Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi. Dalam perumusan masalah digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah dan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran.

Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah penyebab dari masalah yang dirinci, dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Penyelesaian permasalahan

pembangunan merupakan esensi dari tujuan dari pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap. Selain itu dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah harus merujuk pada permasalahan pembangunan, dimana permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks. Dengan kebijakan yang tepat maka dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan secara efektif dan efisien.

Penerapan rencana pembangunan daerah akan menimbulkan permasalahan karena adanya *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD dan RPJPD). Terjadinya gap tersebut juga karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil daerah saat penyusunan dokumen perencanaan. Upaya penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan sehingga penyelesaian secara cepat, tepat dan berkelanjutan dapat dilakukan. Oleh karena itu, Rumusan masalah menurut aspek dan fokus pembangunan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

2.5.1. Permasalahan Daerah

2.5.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru selama tahun 2011-2024 mengalami fluktuasi, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru dari tahun 2011-2024 tumbuh di atas 5%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sangat signifikan atau mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar -4,41 persen, sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Kota Pekanbaru. Terjadi pemulihan ekonomi yang berlanjut hingga mencapai 6,78 persen pada tahun 2022. Namun, hingga tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan turun menjadi 4,61 persen.
2. Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp. 171.306,52 triliun dan atas dasar harga konstan Tahun 2024 mencapai Rp.86.024,52 triliun. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2024 dihasilkan oleh sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yakni sebesar 30,79 persen. Selanjutnya sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 30,08 persen dan Industri Pengolahan sebesar 20,56 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada pada sektor transportasi dan

pergudangan (10,87 persen), kondisi ini membaik seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat serta kunjungan wisatawan mancanegara.

3. Persentase penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2024 sebesar 3,15 persen, naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,16 persen. Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2024 sebanyak 38.170 orang, naik dibandingkan tahun 2023 sebanyak 37.670 orang. Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin ini oleh karena adanya pemutusan hubungan kerja yang merupakan dampak Covid-19 yang melanda Indonesia dan khususnya Kota Pekanbaru.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. IPM Kota Pekanbaru periode pada tahun 2024 sebesar 84,26. Lebih besar dari IPM tahun 2023 yakni 83,67. Capaian IPM Kota Pekanbaru tahun 2024 tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Riau sebesar 75,67 dan IPM Indonesia sebesar 75,02. Peningkatan laju pertumbuhan IPM ini merupakan dampak dari keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
2. Umur Harapan Hidup Kota Pekanbaru dalam kurun waktu tahun 2017-2024 meningkat hingga mencapai 75,89 tahun. Angka ini berarti setiap bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 75,89 tahun. UHH Kota Pekanbaru tersebut meningkat sebanyak 0,34 tahun dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 75,55 tahun. Peningkatan UHH di Kota Pekanbaru ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.
3. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Pekanbaru tahun 2024 meningkat sebesar 0,26 tahun menjadi 15,84 tahun dari tahun sebelumnya sebesar 15,58 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 di Kota Pekanbaru memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,84 tahun atau setara dengan duduk pada bangku kuliah Diploma III.
4. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Pekanbaru pada tahun 2024 mencapai 11,96 tahun meningkat 0,02 tahun dari tahun 2024 yaitu sebesar 11,94. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Kota Pekanbaru yang lebih baik.
5. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 8,56%, kemudian mengalami menurun mencapai 4,63% pada tahun 2024. Tingkat

pengangguran di Kota Pekanbaru menempati urutan nomor 3 di Provinsi Riau pada tahun 2024. Namun tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 telah dapat ditekan sebesar 1,57% dari tahun 2023 yang disebabkan oleh penambahan angkatan kerja.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Globalisasi mengakibatkan perkembangan terhadap minat generasi muda akan seni budaya dan fasilitas seni masih belum optimal.
2. Masih lemahnya pembinaan dan pengelolaan grup kesenian.
3. Semakin berkurangnya perhatian generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam grup-grup kesenian.
4. Masih lemahnya pembinaan olahraga sehingga belum berkembang klub-klub olahraga di masyarakat yang berorientasi pada prestasi.

2.5.1.2. Aspek Pelayanan Umum

1. Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

1. Belum semua usia sekolah pendidikan dasar yang bersekolah.
2. Belum meratanya kualitas penyebaran sekolah, akibat belum semua sekolah yang terakreditasi A
3. Belum terpenuhi / meratanya persebaran jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan.
4. Belum semua tenaga pendidik memiliki sertifikat pendidik.
5. Optimalisasi yang perlu diperkuat sebagai indikator kompetensi untuk tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik.

B. Kesehatan

1. Masih tingginya jumlah kematian ibu dan bayi
2. Belum terpenuhinya prasarana layanan kesehatan terhadap jumlah penduduk (Puskesmas 1: 16.000)
3. Masih banyak terdapat penyakit menular
4. Masih rendahnya minat PUS pada penggunaan Metode Kontrasepsi
5. Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada balita
6. Masih rendahnya penerapan perilaku masyarakat dalam pemenuhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
7. Seluruh masyarakat Kota Pekanbaru belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan.
8. Belum tercapainya cakupan kesehatan semesta/Universal Health Coverage (UHC)
9. Turunnya kepesertaan Jamkesda dan stagnannya BPJS Non PBI dari tahun 2023 sampai 2024

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih banyak jalan kondisi rusak

2. Masih terdapat drainase yang belum berfungsi optimal (tertutup Ruko, pendangkalan dan sedimentasi drainase) dan drainase sekunder serta tersier yang terintegrasi dengan baik dengan drainase primer.
3. Alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun
4. Masih rendahnya persentase rumah tangga terlayani air perpipaan
5. Masih rendahnya persentase rumah tangga terlayani air limbah perpipaan domestik
6. Luasan ruang terbuka hijau Publik dan privat masih rendah
7. Masih tingginya jumlah kecelakaan.
8. Menurunnya kualitas dan kuantitas air baku disebabkan oleh berkurangnya daerah resapan air.
9. belum tersedianya pengolahan limbah plastik, B3, Limbah Industri dan Rumah Tangga yang dikelola secara Optimal.
10. Kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru yang rendah dalam penerapan Budaya 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yang berakibat meningkatnya sampah yang tertampung di TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) dan Pembuangan sampah yang terjadi di banyak titik secara sembarangan. Keterbatasan infrastruktur drainase dan adanya sedimentasi dan sampah di saluran air sehingga banyak saluran drainase tersumbat

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Kualitas air sungai di Kota Pekanbaru tercemar ringan hingga sedang.
2. Pencemaran udara yang disebabkan oleh dampak kebakaran hutan dan lahan oleh daerah sekitar
3. Timbulan sampah belum termanfaatkan secara ekonomis
4. Tingginya permintaan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap terpenuhinya kebutuhan primer berupa hunian/perumahan baru berbanding terbalik dengan kapasitas pemerintah dalam menyediakan dan memenuhi permintaan perumahan.
5. Tingginya tingkat pertumbuhan urbanisasi di daerah setiap tahunnya merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang merata. Selain itu, alokasi pemanfaatan tanah dan ruang yang tidak tepat mempengaruhi tata ruang suatu daerah sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah/ kemampuan daya lingkungan yang bersangkutan sehingga menciptakan permukiman kumuh.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Tingginya pencari kerja yang tidak diimbangi dengan peluang lapangan pekerjaan ditambah lagi meningkatnya urbanisasi yang cukup tinggi, mewujudkan situasi dan kondisi yang aman dan kondusif.
2. Pelayanan penegakan perda/ perkada masih dirasakan kurang, baik dari sisi jumlah kuantitas, kualitas, kecepatan, ketepatan pelayanan ketegasan maupun kondisi pemerataan pelayanan kantramtibmas di berbagai wilayah.

Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing wilayah RW dan RT. Maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar masyarakat mau terlibat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pemberdayaan linmas dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.

F. Sosial

1. Masih banyak jumlah masyarakat miskin dan jumlah PPKS
2. Masih rendahnya sistem layanan rujukan terpadu
3. Tingginya angkatan kerja belum diikuti oleh kesediaan lapangan kerja
4. Masih rendahnya pendaftar pelatihan yang lulus pelatihan mendapatkan sertifikat (rendahnya tenaga terampil yang tersertifikasi).

Masih terdapatnya kekerasan berbasis gender dan anak.

2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

1. Tingginya angkatan kerja belum diikuti oleh kesediaan lapangan kerja
2. Masih rendahnya pendaftar pelatihan yang lulus pelatihan mendapatkan sertifikat (rendahnya tenaga terampil yang tersertifikasi)
3. Masih Relatif Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus pada bidang-bidang usaha.
4. Masih rendahnya komitmen perusahaan untuk merekrut dan melindungi para tenaga kerja wanita dan penyandang disabilitas.
5. Masih banyaknya perusahaan yang tidak menginformasikan lowongan pekerjaan secara terbuka (*closed recruitment*)

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih terdapatnya kekerasan berbasis gender dan anak
2. Pemenuhan Hak-hak Anak, Melindungi Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi dan Perlakuan Salah lainnya pada Anak dan Remaja masih perlu ditingkatkan
3. Upaya Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, KDRT dan TPPO masih perlu ditingkatkan.

C. Pangan

1. Ketersediaan keanekaragaman cadangan pangan pemerintah masih rendah
2. Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
3. Masih rendahnya kemandirian pangan

D. Pertanahan

Masih adanya sengketa tanah yang ada di masyarakat yang disebabkan masyarakat kurang merawat dan memperhatikan kepemilikan atas tanah yang dimiliki, Memiliki sertifikat tanah atau surat SKT ganda serta Kesalahan mengukur luas tanah oleh lembaga terkait.

E. Lingkungan Hidup

1. Kualitas air sungai di Kota Pekanbaru tercemar ringan
2. Pencemaran udara dampak kebakaran hutan dan lahan di sekitar Kota Pekanbaru
3. Timbulan sampah belum termanfaatkan secara ekonomis

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Realisasi capaian persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak Belum maksimal
2. Masih kurangnya sosialisasi Penerapan Aktivasi pencapaian Identitas Kependudukan Digital (IKD)
3. Realisasi capaian persentase Pendataan Penduduk Non Permanen Belum maksimal

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui Rumah Ibadah.
2. Belum optimalnya peran LPM dalam mendukung pembangunan di tingkat Kelurahan di Kota Pekanbaru.
3. Belum meratanya indeks pembangunan Kelurahan di Kota Pekanbaru

H. Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

1. Keluarga Berkualitas (Tentram, Mandiri dan Bahagia) belum tercapai
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan Daerah.
3. Penyelenggaraan Upaya Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Secara Komprehensif belum maksimal.

I. Perhubungan

1. Kurangnya kualitas transportasi dan fasilitas ruang publik yang tidak memberikan rasa aman dan nyaman
2. Belum adanya kerangka kebijakan investasi untuk rehabilitasi kapasitas pelayanan infrastruktur yang rusak maupun pembangunan baru
3. Banyaknya kendaraan yang tidak layak jalan

4. Juru Parkir (Jukir) belum digaji melalui APBD sehingga potensi Retribusi yang tidak optimal karena jukir tidak sepenuhnya menyetorkan ke kas daerah, karena ada hak Jukir atas jasa yang diberikan
5. Jumlah Juru Parkir yang bekerja dilapangan tidak sesuai dengan jumlah Juru Parkir yang terdata di UPTD Pelayanan Parkir Kota Pekanbaru (masih banyak Jukir Liar dilapangan)
6. Juru Parkir yang bekerja masih dikendalikan oleh Oknum yang diluar kendali Dinas Perhubungan.

J. Komunikasi dan Informatika

1. Belum Terpenuhinya Jumlah Media yang Terverifikasi
2. Masih kurangnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung SPBE
3. Penerapan SPBE belum maksimal
4. Penyelenggaraan SPBE belum terintegrasi

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Kurangnya optimalnya pembinaan dan pendataan koperasi yang ada di Kota Pekanbaru
2. Kurang optimalnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru terkait manajemen pengelolaan.

L. Penanaman Modal

1. Belum tersusunnya dokumen *Investment Project Ready to offer* (IPRO) dan berbasis kebutuhan penanaman modal (investor needs)
2. Perubahan regulasi di tingkat pemerintah pusat berdampak pada seringnya perubahan penyusunan Standar Pelayanan dan SOP
3. Kemampuan masyarakat yang belum adaptif dalam penggunaan fasilitas pelayanan berbasis digital
4. Belum meratanya persebaran sinyal dan kemampuan memanfaatkan internet.
5. Rendahnya pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha berbasis OSS RBA serta Kepatuhan Pelaku Usaha dalam melakukan pelaporan LKPM secara berkala.

M. Kepemudaan dan Olahraga

1. Minimnya Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan;
2. Minimnya pembinaan organisasi kepemudaan (OKP) di Kota Pekanbaru;
3. Rendahnya kualitas penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda;
4. Belum Optimalnya Pembinaan Terhadap Organisasi Olahraga
5. Minimnya pembinaan pelatih olahraga atau guru olahraga
6. Minimnya cabang olahraga yang di bina
7. Belum tersediannya data Base Keolahragaan

8. Kurangnya persebaran sarana dan prasarana olahraga di lingkungan masyarakat.

N. Statistik dan Persandian

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Bidang Statistik
2. Kurangnya pemahaman dan Anggaran untuk Membangun Sistem Big Data
3. Belum Optimalnya Koordinasi Antara Koordinator, Pembina Data dan Walidata dalam Menjalankan Fungsi Forum Satu Data
4. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya ketersediaan data dan informasi.
5. Kurangnya Peralatan untuk Melakukan Tata Kelola Pengamanan Informasi dan Persandian
6. Belum Optimalnya Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

O. Kebudayaan

1. Sumber literasi Cagar Budaya dan Sejarah Adat dan Tradisi
2. Kurangnya SDM yang memahami tentang Objek Pemajuan Kebudayaan
3. Kebijakan dan Regulasi yang belum optimal

P. Perpustakaan

1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dimana target nasional 67,3 dan target daerah senilai 60 sedangkan capaian daerah 2022 senilai 63,52.
2. Peningkatan jumlah dan kualitas koleksi buku perpustakaan dan buku online.
3. Minat baca masyarakat (literasi buku) yang masih rendah.

Q. Kearsipan

1. Pengelolaan arsip daerah belum dilakukan secara optimal sesuai dengan NSPK dan aturan bidang kearsipan antara lain pemenuhan aspek kebijakan, kewajiban melaksanakan pembinaan, pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan aspek sumber daya kearsipan lainnya.
2. Belum Memiliki Depo Arsip
3. Kota Pekanbaru belum menerapkan sepenuhnya penyimpanan dan pengelolaan sistem arsip berbasis digital.
4. Masih Kurangnya Jumlah SDM di Bidang Arsip
5. Pengelolaan Arsip yang Belum Sesuai Standar

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Pariwisata

1. Pengembangan destinasi pariwisata yang belum optimal baik dari regulasi, pembangunan sarana dan prasarana, aksesibilitas dan konektivitas menuju tempat wisata.
2. Kurangnya minat Investor Asing / Investor Dalam Negeri di bidang pariwisata pada Kota Pekanbaru.
3. Pengelolaan objek wisata oleh masyarakat terutama dalam pengelolaan fasilitas umum pariwisata belum optimal.
4. Belum optimalnya penggalan potensi wisata dan ekonomi kreatif serta produk ekonomi beserta dengan produk turunannya;
5. Masih sedikitnya kajian strategis terkait desa wisata di Kota Pekanbaru.
6. Perilaku pasar sekarang lebih berbasis pada digitalisasi sehingga dibutuhkan upaya pengelolaan pemasaran yang berbasis teknologi digital (optimalisasi website, live video, online booking, media sosial : Tiktok, Instagram, Facebook)
7. Belum adanya Pusat Informasi Kepariwisata di Kota Pekanbaru
8. Program kerja pemerintah dalam memasarkan produk pariwisata belum optimal sehingga harus membutuhkan sinergisitas bersama organisasi dan asosiasi yang bergerak di Bidang Pariwisata agar produk - produk pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru dapat di kenal oleh wisatawan.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif terkendala oleh terbatasnya kualitas pelaku ekonomi kreatif menurut keahlian bidang maupun untuk menjalankan dan mengelola usaha.

B. Kelautan dan Perikanan

1. Persaingan lahan usaha budidaya ikan dengan peruntukan wilayah pemukiman, industry, pertambangan dan lainnya, sehingga ketersediaan lahan makin terbatas.
2. Penyediaan benih ikan masih terbatas/rendah baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun dari segi mutu (kualitas).
3. Minimnya modal usaha petani ikan dibandingkan dengan biaya produksi yang semakin meningkat.
4. Tingginya harga pakan dalam usaha budidaya ikan air Tawar.
5. Animo masyarakat konsumsi ikan air tawar masih rendah, sehingga kebutuhan ikan air tawar masih terbatas dan masih pada jenis ikan tertentu.
6. Kebutuhan akan kesediaan benih ikan air laut masih belum memadai karena masih tergantung dari hasil tangkapan dialam yang tidak menjamin

kecukupan jumlah dan kualitasnya, sementara unit pembenihan buatan (*hatchery*) ikan laut/pantai belum ada di Kota Pekanbaru.

C. Pertanian

1. Kota Pekanbaru bukan bercirikan pertanian, maka kontribusi atau share sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB masih tergolong kecil, dibandingkan sektor yang dominan yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 31,76 % dan sektor Kontruksi 30,10 persen dan sektor Industri Pengolahan 22,11 %.
2. Luas produksi pertanian masih rendah.

D. Perdagangan

1. Kurangnya pemantauan / monitoring terhadap harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang beredar di pasar
2. kurangnya penataan pasar dan pedagang yang layak
3. Kelangkaan akan stok BBM terutama penyaluran solar
4. Perlunya pengawasan akan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Tera -Tera Ulang pada alat timbangan yang rentan akan kecurangan

E. Perindustrian

1. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian
2. Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia
3. Rendahnya kerjasama (kemitraan) antara pelaku IKM dengan perusahaan-perusahaan berskala besar khususnya BUMN dan swasta nasional lainnya.

F. Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih berkurangnya Koordinasi bersama (ormas/LSM, VETERAN, FKUB ,FKDM, FPK,FKUB serta instansi vertikal terkait dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat).
2. Belum terkoordinir dengan baik Pemantauan Aktivitas Warga Negara Asing.
3. Pentingnya optimalisasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
4. Adanya Kasus Penyalahgunaan Napza/ Narkoba dan Miras di Kota Pekanbaru.
5. Perlu Optimalisasi terkait data berbasis Teknologi Informasi , sehingga perlu peningkatan profesionalisme aparat dan peningkatan partisipasi dan Akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pelayanan masyarakat (SKT ormas, Hibah).
6. Adanya ormas yang tidak terdaftar pada Pemerintah Daerah yang tidak sesuai aturan yang ada sehingga berpotensi meresahkan masyarakat.

7. Belum Optimalnya pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan partisipasi politik dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serta kurangnya Pemahaman tentang pendidikan Politik bagi Pemilih pemula.
8. Rendahnya partisipasi Perempuan di bidang Politik di Daerah.

4. Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

1. Hasil Evaluasi (RPJMD, RKPD dan lainnya) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
2. Koordinasi yang minim dalam pemenuhan terhadap sumber data yang lengkap dan akurat, yang dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
3. Kurangnya kesesuaian / keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

B. Keuangan

1. *Mandatory Spending* (Belanja Pegawai Maksimal 30% dari belanja daerah, Belanja Infrastruktur 40% dari Belanja Daerah) yang telah mengunci besaran anggaran untuk sektor tersebut mengakibatkan terbatasnya fleksibilitas penganggaran untuk membiayai sektor lain yang juga bermanfaat.
2. Pada pelaksanaan implementasi aplikasi baru terkait keuangan sulit dilakukan pemerintah daerah secara maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pembekalan yang diterima dan kesiapan perangkat pemerintah untuk mengoperasikan aplikasi tersebut.
3. Dalam penyusunan laporan keuangan daerah akan menghadapi kendala-kendala dimana tidak adanya integrasi antara aplikasi sebelumnya dengan SIPD dalam hal mentransfer data tahun sebelumnya.
4. Lemahnya koordinasi antar OPD dan stakeholder lainnya.
5. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
6. Belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang mengakibatkan jumlah silpa menjadi signifikan.
7. Verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah;
8. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru masih terbatas;

9. Pengajuan pencairan anggaran (SPP-SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik.
10. Pencatatan Barang Milik Daerah belum menggambarkan kondisi sebenarnya.
11. Riwayat perolehan atas tanah banyak yang tidak ditemukan.
12. Manajemen Aset belum dilaksanakan sepenuhnya.
13. Tingkat Pengamanan Barang Milik Daerah masih rendah.
14. Kurangnya perhatian khusus Kepala OPD dan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan

1. Terbatasnya kuota penyelenggara dan ketersediaan anggaran.
2. Belum dilaksanakan penilaian Potensi dan Kompetensi, serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
3. Belum terakselerasi dan penetapan standar kompetensi jabatan (manajerial, sosial kultural, teknis) untuk seluruh jabatan.
4. Belum tersusunnya kebutuhan Pengembangan Kompetensi secara ideal dan ketersediaan anggaran.
5. Kurangnya SDM Aparatur yang menguasai bidang IT.
6. Pembaruan data jabatan ASN belum maksimal.
7. Belum tingginya komitmen dalam penegakkan disiplin terkait pelanggaran Disiplin, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan ASN dalam penerapan reward dan punishment.

D. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan Kelitbangan di Kota Pekanbaru adalah masih terbatasnya kapasitas dan budaya inovatif di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.

E. Pengawasan

1. Persoalan independensi, integritas SDM APIP dan Kompetensi sumber daya manusia para APIP.
2. Tantangan sistemis dalam hal ketersediaan dan kualitas dukungan Peran APIP (SDM, anggaran, sarana prasarana termasuk berbasis IT, serta kelembagaan dan kewenangannya).
3. Belum terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada pimpinan OPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan UU no 15 tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 20 dan pasal 26 Pimpinan OPD tidak konsisten dan tidak taat terhadap regulasi yang berlaku terkait review.

4. Kurangnya komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN

F. Kewilayahan

1. Kurangnya koordinasi dalam membangun infrastruktur
2. Kurangnya dana, Kendala pembebasan lahan, Lembaga pembangun infrastruktur yang kurang berkompeten, Lambatnya penyusunan peraturan, Kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur.
3. Pemerataan Pembangunan Perlu dilakukan oleh Pemerintah Melalui Pemerintah Daerah/Provinsi dan Pusat, agar seluruh masyarakat ikut merasakan Pembangunan yang setara dengan daerah lainya. Misalnya : Masih minimnya Fasilitas Umum, Jalan Aspal dan jembatan yang masih rusak, serta pembangunan infrastruktur lainya yang belum memadai, sehingga hal ini mempengaruhi di sektor ekonomi masyarakat setempat yang seiring dengan perkembangan Teknologi yang semakin pesat.
4. Rehabilitasi Pembangunan gedung kantor Perlu dilakukan oleh Pemerintah Mengingat banyaknya Fasilitas sarana/Prasarana Kantor yang Telah Rusak, sehingga pelayan kepada Masyarakat menjadi Kurang Optimal.
5. Perlunya Peningkatan Sumberdaya Pembangunan oleh Pemerintah sehingga dapat memenuhi Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Kecamatan, Tenaga Kesehatan (Dokter & Bidan), SDM Kependidikan (Guru), Keagamaan (Guru Agama), Sosial dan Budaya. Serta memaksimalkan/mengaplikasikan penerapan Teknologi Informasi untuk mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Kerja dan Pelayanan Masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan dimasa lalu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pembangunan di masa lalu sudah menyelesaikan permasalahan pembangunan. Dari hasil evaluasi dan analisis gambaran umum kondisi daerah dan kegiatan penjangkaran informasi dengan perangkat daerah, maka masalah pokok, masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Pekanbaru diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.182. Akar Masalah, Masalah dan Masalah Pokok Pembangunan Kota Pekanbaru

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
SOSIAL			
1	Belum semua usia sekolah dasar yang bersekolah	Masih adanya anak usia sekolah dasar yang tidak mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi dan lingkungan	Masih rendahnya kualitas dan partisipasi pendidikan dasar.
2	Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan	Ketimpangan mutu layanan pendidikan antar wilayah	Belum meratanya mutu pendidikan dasar

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
3	Masih adanya jumlah kematian ibu dan bayi	Tingkat kepatuhan ibu hamil terhadap program kesehatan (ANC, imunisasi, gizi) masih rendah karena faktor sosial-budaya dan ekonomi.	Masih rendahnya literasi kesehatan dan kesadaran ibu hamil terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pemenuhan gizi, yang diperparah oleh hambatan sosial, budaya, dan ekonomi.
4	Belum terpenuhinya prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk (Puskesmas 1: 16.000)	Masih rendahnya akses terhadap kesehatan	Masih rendahnya kualitas Sumber Manusia
5	Masih terdapat penyakit menular	Masih rendahnya akses terhadap kesehatan	Masih rendahnya kualitas Sumber Manusia
6	Masih banyak jumlah masyarakat miskin dan jumlah PPKS	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat	Masih rendahnya kualitas Sumber Manusia
7	Masih rendahnya system layanan rujukan terpadu	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat	Masih rendahnya kualitas Sumber Manusia
8	Tingginya angkatan kerja belum diikuti oleh kesediaan lapangan kerja	Masih tingginya tingkat pengangguran	Masih rendahnya daya saing tenaga kerja
9	Masih rendahnya pendaftar pelatihan yang lulus pelatihan mendapatkan sertifikat	Masih tingginya tingkat pengangguran	Masih rendahnya daya saing tenaga kerja
10	Masih terdapatnya kekerasan berbasis gender dan anak	Belum terpenuhi jaminan hak anak	Belum optimalnya sistem perlindungan perempuan dan anak
11	Pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi dan migrasi	Meningkatnya tekanan terhadap penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, transportasi, perumahan) dan Penurunan kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya potensi banjir, kemacetan dan sampah.	Belum optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga menimbulkan tekanan pada infrastruktur, pelayanan dasar, dan tata ruang.
12	Rendahnya literasi keluarga dan kesehatan reproduksi akibat terbatasnya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan, khususnya di kalangan remaja dan pasangan muda.	Kurangnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur tentang perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.	Belum optimalnya edukasi dan promosi kesehatan reproduksi yang terstruktur dan berkelanjutan bagi remaja dan pasangan usia subur
13	Masih rendahnya atlet berprestasi dibanding jumlah atlet yang dibina	Masih rendahnya kualitas pembinaan atlet untuk berprestasi	Masih rendahnya daya saing olah raga
EKONOMI			
1	Konsumsi pangan belum beragam dan seimbang	Masih rendahnya skor pola pangan harapan	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
2	Masih rendahnya kemandirian pangan	Masih rendahnya skor pola pangan harapan	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
3	Masih rendahnya pembangunan kelurahan kategori cepat berkembang	Indek pembangunan kelurahan masih rendah	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
4	Masi rendahnya persentase koperasi aktif	Masih rendahnya daya saing koparesi	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
5	Banyak UMKM gagal bertahan dalam jangka panjang	Masih rendahnya daya saing UMKM	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
6	Peningkatan nilai investasi tidak diiringi dengan peningkatan daya serap tenaga kerja	Masih rendahnya daya saing tenaga kerja	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
7	Partisipasi dan kepemimpinan pemuda masih rendah	Masih rendahnya daya saing pemuda	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
8	Belum maksimalnya peran lembaga kebudayaan dalam melestarikan dan membina kebudayaan	Masih rendahnya upaya pelestarian budaya melayu	Belum optimalnya pelestarian terhadap budaya melayu dan ketahanan sosial budaya masyarakat
9	Belum adanya objek dan branding wisata unggulan Kota pekanbaru	Masih rendahnya upaya pelestarian budaya melayu	Belum optimalnya pelestarian terhadap budaya melayu dan ketahanan sosial budaya masyarakat
10	Masih rendahnya angka konsumsi ikan Kota Pekanbaru	Rendahnya produktivitas perekonomian masyarakat	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
11	Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan manca negara	Masih rendahnya daya tarik pariwisata	Masih rendahnya daya saing pariwisata
12	Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian	Masih rendahnya daya saing pertanian	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
13	Masih rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan pertahun	Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
14	Masih rendahnya neraca perdagangan	Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
15	Belum terpenuhinya standar pasar tradisional	Belum optimalnya pengelolaan pasar tradisional	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
16	Belum mampunya IKM menjadi tulang punggung ekonomi Kota Pekanbaru	Masih rendahnya daya saing IKM	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi
INFRASTRUKTUR DASAR DAN LINGKUNGAN			
1	Masih banyak jalan kondisi rusak	Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar strategis
2	Masih terdapat drainase yang belum berfungsi optimal	Masih terdapat genangan/banjir	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar strategis

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
	(tertutup Ruko, sampai dan sedimentasi)		
3	Alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun	Masih terdapat genangan /banjir	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar strategis
4	Masih rendahnya persentase rumah tangga terlayani air perpipaan	Masih rendahnya cakupan layanan air bersih perpipaan	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar strategis
5	Masih rendahnya persentase rumah tangga terlayani air limbah perpipaan domestik	Masih rendahnya cakupan layanan air limbah perpipaan domestik	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar strategis
6	Luasan ruang terbuka hijau Publik dan privat masih rendah	Belum terpenuhi luasan ruang terbuka hijau	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar strategis
7	Kualitas air sungai di Kota Pekanbaru tercemar ringan	Menurunnya indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup, kebencanaan dan perubahan iklim (BERKELANJUTAN)
8	Pencemaran udara dampak kebakaran hutan dan lahan	Menurunnya indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup, kebencanaan dan perubahan iklim (BERKELANJUTAN)
9	Timbulan sampah belum ekonomis dimanfaatkan secara	Menurunnya indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup, kebencanaan dan perubahan iklim (BERKELANJUTAN)
10	Berkurangnya jumlah angkutan umum	Belum optimalnya angkutan massal	Belum optimalnya pelayanan transportasi dalam kota
11	Masih tingginya jumlah kecelakaan	Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan dan rambu-rambu lalu lintas	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar strategis
TATA KELOLA			
1	Masih rendahnya tingkat waktu tanggap (response time rate)	Belum optimalnya penanganan kebakaran	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
2	Masih terdapat usia penduduk yang ber KTP belum mempunyai KTP	Belum terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Pekanbaru	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
3	Masih terdapat bayi yang lahir dan masyarakat belum memiliki akte kelahiran	Belum terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Pekanbaru	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
4	Masih rendahnya Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Belum optimalnya sistim informasi perangkat daerah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
5	Belum meratanya layanan perpustakaan	Belum optimalnya tata kelola perpustakaan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
6	Masih rendahnya perpustakaan yang memenuhi SNP	Belum optimalnya tata kelola perpustakaan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
7	Masih rendahnya pemanfaatan hasil keliitbangan	Belum optimalnya peran keliitbangan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
8	Diseminasi hasil penelitian/kajian belum memadai	Belum optimalnya peran kelitbangan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
9	Masih rendahnya tindak lanjut hasil temuan BPK	Belum optimalnya peran APIP	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Berdasarkan penjelasan permasalahan dan tabel di atas maka permasalahan pembangunan yang dominan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian daerah belum berkembang secara inklusif, maju, dan berdaya saing sehingga menghambat pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan

Perekonomian Pekanbaru menghadapi tantangan dalam mencapai inklusivitas dan daya saing, terutama karena ketergantungan pada beberapa sektor ekonomi tertentu yang rentan terhadap gejolak. Selain itu, daya saing industri lokal, baik manufaktur maupun jasa, masih cenderung rendah dibandingkan produk dan layanan dari luar daerah, menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi, masih kesulitan mendapatkan akses permodalan dan memperluas jangkauan pasar, membatasi potensi mereka untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar

Lebih lanjut, infrastruktur pendukung ekonomi seperti logistik, transportasi, dan energi masih belum sepenuhnya optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan sektor industri, jasa, dan perdagangan. Hal ini diperparah dengan kurangnya diversifikasi produk dan jasa yang dihasilkan, sehingga membatasi kemampuan Pekanbaru untuk menangkap peluang pasar baru dan mengurangi risiko ketergantungan pada komoditas tertentu.

2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berdaya Saing

Permasalahan utama dalam mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing di Pekanbaru adalah masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan yang belum merata, baik dari segi aksesibilitas maupun relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri. Hal ini berakibat pada keterampilan lulusan yang belum sesuai dengan pasar kerja, menyebabkan tingkat pengangguran terdidik dan kurangnya daya saing SDM lokal. Ditambah lagi, akses terbatas terhadap program pelatihan vokasi yang memadai semakin mempersempit peluang peningkatan kompetensi angkatan kerja, sementara kualitas kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan turut memengaruhi produktivitas dan daya saing SDM secara keseluruhan.

Selain itu, Pekanbaru juga menghadapi tantangan dalam menumbuhkan minat inovasi dan kreativitas di kalangan masyarakat. Lingkungan yang belum sepenuhnya kondusif untuk pengembangan ide-ide baru dan kurangnya dukungan terhadap riset dan pengembangan menjadi penghambat. Apabila permasalahan ini tidak diatasi, daya

saing Pekanbaru di masa depan akan terancam, mengingat SDM berkualitas adalah fondasi utama bagi kemajuan kota.

3. Masih rendahnya Pelestarian Budaya Melayu dan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat

Isu pelestarian budaya Melayu di Pekanbaru dihadapkan pada ancaman pudarnya nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi, yang seringkali membuat generasi muda kurang mengenal atau mengamalkan warisan leluhur. Ditambah lagi, kurangnya upaya promosi, revitalisasi, dan dokumentasi yang komprehensif terhadap seni, tradisi, dan warisan budaya Melayu, mengakibatkan kekayaan budaya ini berisiko hilang ditelan zaman. Hal ini berdampak pada ancaman terhadap identitas lokal dan potensi lunturnya karakteristik Pekanbaru sebagai kota berbudaya Melayu.

Selain aspek pelestarian, Pekanbaru juga menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan sosial budaya masyarakat, terutama terkait potensi kesenjangan sosial dan intoleransi di tengah kemajemukan. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan budaya dan pelestarian juga menjadi permasalahan, menunjukkan bahwa upaya pelestarian belum sepenuhnya menjadi gerakan kolektif. Peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sangat krusial untuk memastikan budaya Melayu tetap lestari dan menjadi perekat sosial.

4. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Dasar

Peningkatan kualitas infrastruktur dasar di Pekanbaru masih dihadapkan pada sejumlah masalah krusial. Kualitas jalan dan sistem drainase yang belum memadai seringkali menyebabkan banjir, kemacetan lalu lintas, dan kerusakan fasilitas umum lainnya, mengganggu aktivitas ekonomi dan kenyamanan warga. Selain itu, akses terhadap air bersih yang layak dan sistem sanitasi yang memadai masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat, berdampak langsung pada kesehatan publik dan kualitas hidup.

Tidak hanya itu, ketersediaan energi yang belum stabil dan infrastruktur transportasi publik yang belum terintegrasi serta menjangkau seluruh wilayah juga menjadi kendala. Hal ini diperparah dengan kesenjangan infrastruktur digital di berbagai area, yang menghambat akses informasi dan perkembangan ekonomi digital. Permasalahan infrastruktur ini secara langsung memengaruhi daya tarik investasi, efisiensi aktivitas bisnis, dan kualitas hidup penduduk Pekanbaru.

5. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Permasalahan lingkungan hidup di Pekanbaru sangat mendesak untuk diatasi, terutama terkait pencemaran udara akibat emisi kendaraan dan aktivitas industri, serta

pencemaran air dari limbah domestik dan industri yang mengancam kualitas sumber daya alam. Pengelolaan sampah yang belum optimal, dengan volume sampah yang terus meningkat namun sistem daur ulang dan penanganan yang belum efektif, turut memperparah kondisi lingkungan. Selain itu, kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat pembangunan yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan juga menjadi ancaman serius.

Di sisi lain, Pekanbaru juga sangat rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan/lahan (karhutla), yang diperparah oleh dampak perubahan iklim. Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mitigasi bencana semakin memperparah kondisi ini, membuat upaya menjaga kualitas lingkungan dan membangun resiliensi terhadap bencana menjadi lebih menantang.

6. Masih Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pekanbaru masih menghadapi beberapa kendala signifikan. Proses birokrasi yang panjang dan berbelit, kurangnya transparansi, serta potensi praktik korupsi masih menjadi tantangan serius yang menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Akibatnya, kualitas pelayanan publik belum optimal, seringkali lambat, kurang responsif, dan belum merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan masih relatif rendah, sehingga kebijakan yang dihasilkan terkadang kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan juga perlu ditingkatkan. Terakhir, kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA), baik dari segi kompetensi maupun integritas, perlu terus diperkuat agar mampu memberikan pelayanan terbaik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2.5.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat

dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Suatu isu strategis dirumuskan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan berpengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis memiliki ruang lingkup yang terkait dengan isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi dengan penjabaran isu strategis pada pembangunan daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

2.5.2.1. Isu Strategis Global

1. Demografi Global;

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global mempengaruhi kualitas keluarga.

2. Geopolitik dan Geoekonomi;

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Di bidang geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

3. Perkembangan Teknologi;

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur, sektor pendidikan, dan cara kerja pemerintah. Perkembangan teknologi dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara.

4. Urbanisasi Dunia;

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies Tekanan penduduk dan pemangunan perkotaan di negara emergig economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

5. Konstelasi Perdagangan Global;

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi negara maju yang tergabung dalam G7.

6. Tata Kelola Keuangan Global;

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktifitas penduduk Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang dutransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

7. Pertumbuhan Kelas Menengah;

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*).

8. Persaingan Sumber Daya Alam;

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (Energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meiningkat di masa mendatang Tingkat persaigan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor

permintaan dan penawaran, di antaranya efektifitas pengelolaan dan upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9. Perubahan Iklim;

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga irisi global-The Triple Planetari Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi sumber energi dunia menjadi kebijakan dan strategi global.

2.5.2.2. Isu Strategis Nasional

1. Ekonomi Indonesia tahun 2025 tetap solid berada di atas 5 persen. Ekonomi Indonesia masuk ke jajaran 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dengan kondisi di tengah ketidakpastian global yang terus terjadi, perekonomian nasional tetap terjaga, salah satunya karena permintaan domestik yang tetap kuat dan juga berlanjutnya pertumbuhan dan peningkatan investasi tumbuh sebesar 4,4 persen yang ditopang oleh Pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal.
2. Sebagian besar subsektor industri pengolahan mampu tumbuh positif. Subsektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Lima besar kontributor PDB adalah industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, industri alat angkutan, serta industri tekstil dan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan punya peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Industri mampu bertahan di zona ekspansi. Industri Pengolahan masih terus bertahan di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global. Hal ini tampak pada Indeks Kepercayaan Industri terus mengalami peningkatan hingga Juni 2024. Adapun ekspansi yang tinggi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki didorong oleh peningkatan pesanan baru yang cukup signifikan yaitu 3,21 poin dan penyerapan persediaan yang meningkat.
4. Investasi pemerintah dan swasta meningkat. Upaya peningkatan pemerintah dan swasta di daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
 - b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness*, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
 - c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah terutama untuk UKM.
 - d. Pengembangan mekanisme konsultasi pemerintah dan pelaku bisnis (terutama UKM).
5. Kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) didukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mencerminkan pulihnya sektor pariwisata, sementara devisa pariwisata yang meningkat menandakan kontribusi ekonomi yang signifikan. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan dampak positif, didukung oleh peningkatan tenaga kerja yang semakin kuat. Kinerja investasi pariwisata dan ekspor ekonomi kreatif menunjukkan kepercayaan dan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.
6. Penyaluran kredit tumbuh positif. Hasil survei menunjukkan responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit ke depan. Responden memprakirakan *outstanding* kredit sampai dengan akhir tahun 2024 terus tumbuh. Optimisme tersebut antara lain didorong oleh prospek kondisi moneter dan ekonomi serta relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

2.5.2.3. Isu Strategis Provinsi Riau

Long List Isu strategis pembangunan Provinsi Riau dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Menjamin semua individu memiliki akses dan kualitas Pendidikan yang inklusif untuk peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar
2. Kualitas dan pemerataan layanan Kesehatan serta pembudayaan masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan Perluasan akses Kesempatan Kerja yang responsif gender
5. Kemandirian, Keamanan dan ketahanan pangan daerah
6. Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal

7. Optimalisasi destinasi dan event wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan
8. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan
9. Kemandirian Desa yang berkelanjutan dan Inklusi
10. Pembangunan Kota yang Maju, Produktif dan Berkelanjutan
11. Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi
12. ASN yang professional berbasis merit sistem
13. Penyediaan Infrastruktur dasar yang handal dan memadai.
14. Integrasi antarmoda, transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas orang yang memenuhi aspek pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan berkeselamatan
15. Riau sebagai pusat kebudayaan melayu
16. Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
17. Persatuan, Kerukunan dan Stabilitas Daerah
18. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya Long List isu strategis Provinsi Riau dilakukan pengelompokan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang menjadi dasar perencanaan jangka menengah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 seperti yang termuat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.183. Isu Strategis Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

No	Long List Isu Strategis	Isu Strategis
1	Menjamin semua individu memiliki akses dan kualitas Pendidikan yang inklusif untuk peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2	Kualitas dan pemerataan layanan Kesehatan serta pembudayaan masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
3	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
4	Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan Perluasan akses Kesempatan Kerja yang responsif gender	
5	Kemandirian, Keamanan dan ketahanan pangan daerah	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
6	Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal	
7	Optimalisasi destinasi dan event wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan	

No	Long List Isu Strategis	Isu Strategis
8	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	
9	Kemandirian Desa yang berkelanjutan dan Inklusi	
10	Pembangunan Kota yang Maju, Produktif dan Berkelanjutan	
11	Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas
12	ASN yang professional berbasis merit sistem	
13	Penyediaan Infrastruktur dasar yang handal dan memadai.	Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya
14	Integrasi antarmoda, transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas orang yang memenuhi aspek pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan berkeselamatan	
15	Riau sebagai pusat kebudayaan melayu	Pusat Kebudayaan Melayu
16	Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
17	Persatuan, Kerukunan dan Stabilitas Daerah	
18	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2.5.2.4. Isu Strategis Kota Pekanbaru

Berdasarkan telaah analisis terhadap akar masalah dan masalah pokok pembangunan daerah di Kota Pekanbaru, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis di tingkat daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

A. Perekonomian

1. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan terhadap UMKM, IKM, ekonomi kreatif dan digital

Pemberdayaan UMKM di Pekanbaru masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain adalah Kurangnya kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM, sehingga sulit meningkatkan kualitas produk dan pengelolaan usaha, minimnya akses permodalan, yang membuat pelaku UMKM kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka, daya saing produk UMKM masih lemah, terutama dibandingkan produk impor dan dari daerah lain, rendahnya adopsi teknologi dan inovasi, termasuk pemasaran digital, karena keterbatasan perangkat dan pemahaman pelaku UMKM dan banyak pelaku UMKM yang belum terdata dan belum memenuhi standar perizinan, sehingga tidak mendapatkan pembinaan dan akses pasar yang optimal.

2. Belum optimalnya pemanfaatan Kawasan Industri Tenayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi

Kawasan Industri Tenayan di Kecamatan Tenayan Raya sebenarnya memiliki potensi besar karena umlah industri di kawasan ini merupakan yang terbesar di Pekanbaru, dengan 866 industri dari berbagai skala dan Sektor industri di kawasan ini

sudah menjadi sektor basis yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, pemanfaatannya belum maksimal karena Sektor industri ini masih berada di posisi ketiga dalam kontribusi pendapatan daerah, di bawah sektor kontraktor dan perdagangan dan belum ada pengembangan yang optimal untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, sehingga potensi peningkatan lapangan kerja dan daya saing investasi belum sepenuhnya terealisasi.

3. Masih belum optimalnya peningkatan investasi daerah

Investasi di Pekanbaru memang menunjukkan tren positif. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup banyak seperti kondisi keuangan daerah yang masih minus, dengan beban hutang BUMD yang cukup besar dan Infrastruktur kota yang masih banyak mengalami kerusakan, seperti jalan rusak dan masalah banjir, yang dapat mengurangi kenyamanan dan minat investor. Selain itu juga masih tingginya ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi, serta harapan pada dana CSR perusahaan untuk mendukung pembangunan kota

4. Belum optimalnya potensi pariwisata dan ekonomi MICE Tingginya tingkat pengangguran

Pekanbaru memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) karena terdapat banyak hotel dan fasilitas pendukung, serta Bandara Syarif Kasim II sebagai pintu masuk wisatawan. Sektor MICE dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang tinggi karena menyasar wisatawan dengan daya beli tinggi. Namun, pengembangan sektor ini masih terkendala oleh Kurangnya promosi yang efektif dan keterbatasan anggaran. Selain itu adanya hambatan eksternal seperti kabut asap yang sering melanda serta masih perlunya peningkatan kualitas layanan, infrastruktur, dan sinergi antar-stakeholder untuk mengoptimalkan potensi wisata dan MICE

B. Sumber Daya Manusia

1. Akses dan Kualitas Pendidikan yang belum merata

Di Kota Pekanbaru Terdapat disparitas signifikan antara sekolah negeri-swasta dan antarwilayah. Keluarga kurang mampu seringkali tidak bisa mengakses sekolah berkualitas meski angka partisipasi kasar (APK) terbilang tinggi. Kota Pekanbaru masih kekurangan gedung SD dan SMP, terutama di daerah kantong kemiskinan. Keterbatasan fasilitas sekolah negeri menyebabkan banyak anak tidak tertampung dalam sistem Pendidikan.

2. Mutu layanan kesehatan yang belum optimal dan merata

Fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas masih belum berfungsi secara optimal, serta keterbatasan alat medis dan obat-obatan. Rasio dokter dan tenaga

kesehatan masih kecil, dan hanya terkonsentrasi di beberapa kecamatan utama sementara kecamatan lain masih kekurangan tenaga medis. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas deteksi dini, penanganan kasus, dan pemulihan pasien, khususnya dalam menghadapi penyakit menular dan tidak menular yang terus meningkat. Secara epidemiologis, penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberkulosis (TBC), dan HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius. Tingginya angka kasus DBD di beberapa kecamatan, serta prevalensi TBC. Di sisi lain, penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, seiring dengan perubahan gaya hidup, pola makan, dan kurangnya aktivitas fisik masyarakat

3. Bonus demografi

Bonus demografi selain menguntungkan namun juga menyebabkan munculnya beberapa masalah, seperti masalah lapangan pekerjaan, pemukiman, selain itu juga tidak diimbangi peningkatan kualitas lulusan sekolah, yang berpotensi menciptakan generasi produktif dengan kompetensi terbatas.

4. Kualitas dan daya saing tenaga kerja yang perlu ditingkatkan lagi

Sistem pendidikan yang belum merata menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang belum sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu Minimnya program pelatihan berbasis kebutuhan riil menyebabkan angkatan kerja kurang mampu bersaing di pasar regional dan nasional.

C. Infrastruktur

1. Masih banyak jalan kondisi rusak

Kondisi jalan mantap masih perlu ditingkatkan.

2. Belum optimalnya sistem layanan transportasi angkutan massal dan barang.

Sistem transportasi massal di Pekanbaru, khususnya layanan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP), masih belum optimal. Hal ini dikarenakan Ketidakpastian jadwal kedatangan bus, sehingga masyarakat sering menunggu lama di halte. Fasilitas halte yang rusak, kotor, dan banyak yang terbengkalai, sehingga mengurangi kenyamanan dan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Rute TMP yang belum menjangkau seluruh wilayah dan tempat tujuan penting, serta kurangnya feeder sebagai angkutan penunjang. Serta Kapasitas bus yang terbatas dan pelayanan yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tetap memilih kendaraan pribadi, yang berkontribusi pada kemacetan lalu lintas di Pekanbaru.

3. Masih kurangnya penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman yang berkualitas

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Pekanbaru belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur ini belum merata seperti masih banyaknya jalan di wilayah pinggiran kota yang rusak parah dan belum diperbaiki, sehingga membahayakan pengguna jalan. Selain itu, terdapat juga drainase yang sempit dan tidak berfungsi optimal yang menyebabkan genangan dan banjir saat hujan turun. Perumahan dan permukiman kumuh juga masih ditemukan di beberapa kelurahan, dengan fasilitas lingkungan yang kurang memadai.

4. Bencana banjir yang semakin parah serta lemahnya tata Kelola persampahan

Banjir di Pekanbaru semakin parah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, jumlah korban terdampak banjir meningkat drastis hingga mencapai 17 ribu jiwa, dengan ribuan rumah terendam dan warga harus mengungsi ke tenda-tenda darurat. Penyebab utama banjir meliputi Curah hujan tinggi dan meluapnya sungai di sekitar wilayah permukiman; Sistem drainase yang buruk, tersumbat sampah, dan tidak mampu menampung debit air hujan. Selain itu, tata kelola persampahan di Pekanbaru juga masih bermasalah. Sampah sering berserakan di berbagai titik kota akibat pola buang sampah yang tidak tertib dan pengelolaan yang belum optimal sehingga perlu perhatian khusus untuk memperbaiki sistem pengangkutan dan pembuangan sampah secara lebih efektif.

5. Masih kurang nya ruang terbuka public

Ruang terbuka publik di Pekanbaru masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial. Keterbatasan ruang terbuka juga memperparah masalah lingkungan, seperti banjir dan suhu udara yang meningkat akibat berkurangnya area resapan air dan ruang hijau. Upaya penambahan dan revitalisasi ruang terbuka publik harus menjadi prioritas dalam perencanaan kota agar Pekanbaru menjadi kota yang lebih layak huni dan ramah lingkungan.

D. Kesejahteraan Sosial

1. Tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan serta meningkatnya gelandangan, pengemis, dan eksploitasi anak.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Pekanbaru masih cukup tinggi. Berdasarkan Data Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (ULPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa terdapat ratusan kasus kekerasan, dengan kasus pencabulan dan pengabaian hak anak mendominasi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, terdapat kasus penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, hingga anak berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, eksploitasi anak sebagai pengemis di jalanan juga meningkat. Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan

anggaran, sehingga penanganan belum optimal. Kurangnya shelter atau rumah aman bagi korban juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan maksimal.

2. Maraknya penyakit Masyarakat (Narkoba, Miras, Judi Online, Pencurian dan Prostitusi).

Penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras (miras), judi online, pencurian, dan prostitusi semakin marak di Pekanbaru. Hal ini berdampak buruk pada keamanan, ketertiban, serta moral masyarakat, khususnya generasi muda. Penyakit masyarakat ini juga berkontribusi terhadap tingginya angka kriminalitas dan kerentanan sosial, serta memperburuk citra kota. Penanganan yang dilakukan pemerintah bersama aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi korban.

3. Maraknya pungli yang menghambat tumbuhnya investasi daerah

Praktik pungutan liar (pungli) di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan sampah dan layanan perizinan investasi, menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan investasi di Pekanbaru. Pemerintah Kota telah menerima banyak laporan terkait pungli yang dilakukan oleh oknum, baik yang mengaku sebagai petugas resmi maupun tidak. Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat dan pemerintah, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Pekanbaru. Sebagai respons, Satgas Saber Pungli Provinsi Riau telah memperkenalkan aplikasi Si Duli (Sistem Pengaduan/Pelaporan Terpadu Saber Pungli) untuk memudahkan masyarakat melaporkan dan memantau kasus pungli, khususnya di sektor investasi. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen mendukung implementasi sistem ini agar tercipta iklim investasi yang lebih transparan dan kondusif. Namun, upaya pemberantasan pungli masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan, penindakan, dan perubahan budaya birokrasi.

E. Budaya

1. Belum Optimalnya Pelestarian dan Pemberdayaan Budaya Melayu

Pelestarian dan pemberdayaan budaya Melayu di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah meliputi sosialisasi nilai-nilai budaya, pengembangan seni dan budaya daerah, serta pengembangan kebudayaan dan pariwisata berbasis Melayu. Namun, pelaksanaan di lapangan belum optimal karena Pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dana untuk mendukung program pelestarian budaya. Selain itu, Pekanbaru belum memiliki tim cagar budaya, museum, maupun panggung pertunjukan sendiri yang representatif untuk mendukung pelestarian dan ekspresi budaya Melayu. Peran Lembaga Adat Melayu belum dioptimalkan secara maksimal dalam pengembangan dan pelestarian budaya, padahal eksistensi lembaga tersebut sangat penting untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap identitas budaya Melayu.

2. Minimnya Integrasi Pembangunan Kebudayaan dalam Kebijakan Daerah

Integrasi pembangunan kebudayaan ke dalam kebijakan daerah masih minim, terlihat dari kurangnya Sinergi antara dinas kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan lembaga adat belum berjalan optimal. Padahal, integrasi lintas sektor sangat penting untuk membangun ekosistem budaya yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu Diperlukan juga regulasi yang lebih spesifik dan implementatif agar pembangunan kebudayaan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam program, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah.

F. Tata Kelola Pemerintahan

1. Kapasitas fiskal dan kemandirian fiskal yang rendah

Kapasitas fiskal Kota Pekanbaru masih terbatas, sehingga kemandirian fiskal dalam membiayai pembangunan daerah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan yang cukup tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, Pendapatan asli daerah (PAD) juga belum maksimal, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun sumber pendapatan lainnya. Perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah agar mampu mengoptimalkan potensi pendapatan dan efisiensi belanja. Karena jika tidak dilakukan maka hal ini dapat membatasi ruang gerak pemerintah kota dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, sehingga perlu upaya peningkatan kapasitas fiskal melalui penguatan PAD dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

2. Masih belum optimalnya kinerja ASN dalam pelayanan publik.

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pekanbaru dalam memberikan pelayanan publik masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain:

1. Kemampuan dan kompetensi ASN dalam teknologi informasi masih terbatas, sehingga pelayanan berbasis online belum berjalan maksimal.
2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik di beberapa kantor kecamatan masih kurang memadai.
3. Masih ditemukan kurangnya kedisiplinan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
4. Motivasi dan sikap pelayanan ASN perlu ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, ramah, dan efektif.

3. Belum optimalnya tata kelola parkir dan persampahan

Sistem pengelolaan parkir belum terintegrasi dan belum optimal dalam pengawasan sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah. Selain itu Pengelolaan sampah masih bermasalah, dengan adanya laporan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan sampah yang menghambat efektivitas layanan dan

menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Infrastruktur dan sarana pengelolaan sampah belum memadai untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat, sehingga berdampak pada kebersihan dan kesehatan lingkungan. Upaya perbaikan tata kelola parkir dan persampahan perlu dilakukan secara terpadu dengan pengawasan ketat, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan teknologi yang mendukung efisiensi pengelolaan.

4. Belum optimalnya tata kelola pasar

Pengelolaan pasar tradisional di Pekanbaru masih menghadapi kendala seperti Manajemen pasar yang belum profesional dan transparan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan pedagang dan pengunjung; Fasilitas pasar yang kurang memadai, termasuk kebersihan, keamanan, dan kenyamanan serta masih adanya praktik pungli dan ketidakjelasan dalam pengelolaan retribusi pasar yang menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi tata kelola pasar dengan memperbaiki sistem manajemen, meningkatkan fasilitas, serta memberantas praktik pungli agar pasar dapat berfungsi sebagai pusat ekonomi yang sehat dan berdaya saing

Berdasarkan isu strategis di atas maka dapat disimpulkan isu strategis secara global, nasional, Provinsi dan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel II.184. Isu Strategis Kota Pekanbaru

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Letak Geografis yang strategis Potensi Ekonomi Potensi Pariwisata Identitas Budaya Potensi Infrastruktur	Perekonomian daerah belum berkembang secara inklusif, maju, dan berdaya saing sehingga menghambat pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berdaya Saing Masih rendahnya Pelestarian Budaya Melayu dan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Rendahnya Kualitas Infrastruktur Dasar Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Masih Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan	Akses terhadap sumber air bersih dan sanitasi permukiman layak tergolong rendah; Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur air limbah, limbah B3 dan pengelolaan sampah; Tingkat pengangguran terbuka dan setengah terbuka yang masih tinggi; Pengelolaan konservasi sumber daya air tanah, air permukaan serta rehabilitasi lahan kritis belum optimal; Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur jalan lokal primer dan sistem drainase perkotaan; Belum adanya sistem jaringan transportasi publik yang terintegrasi.	Perdamaian dan Keamanan Pelemahan ekonomi dunia dan perang dagang Pembiayaan untuk Pembangunan Aksi Iklim Kesenjangan Gender	Ekonomi Indonesia tahun 2025 tetap solid berada di atas 5 persen. Sebagian besar subsektor industri pengolahan mampu tumbuh positif. Industri mampu bertahan di zona ekspansi. Investasi pemerintah dan swasta meningkat Kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) didukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Efisiensi anggaran Penyaluran kredit tumbuh positif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas Pusat Kebudayaan Melayu Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Perekonomian inklusif yang maju dan berdaya saing berbasis industri manufaktur, jasa dan perdagangan Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Pelestarian budaya melayu dan ketahanan sosial budaya masyarakat Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur dasar Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sumber: Hasil Analisis



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI DAN MISI

3.1.1. Visi

Visi adalah gambaran umum tentang tujuan dan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2025 – 2029 dengan durasi 5 (lima) tahun ke depan memuat visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang mendapat mandat rakyat memimpin Kota Pekanbaru sebagai arah kebijakan pembangunan. Visi ini berpedoman pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2025 – 2045 dimana RPJMD ini merupakan penggalan pertama dalam rangkaian pembangunan 25 tahun ke depan, juga selaras dengan visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 serta visi Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang memuat Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru periode Tahun 2025 – 2029 adalah:

PEKANBARU BERBUDAYA, MAJU DAN SEJAHTERA

Visi Kota Pekanbaru untuk pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 memiliki makna kebudayaan melayu, maju dan Sejahtera dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel III.1. Penyusunan Penjelasan Visi Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera	Berbudaya	Berbudaya bermakna memahami dan berperilaku sesuai nilai-nilai budaya melayu yang bercirikan agamis, kolaboratif, adaptif, dan berintelektual.
	Maju	Maju bermakna pembangunan di Kota Pekanbaru menuju arah berkemajuan dalam bidang ekonomi yang didukung oleh infrastruktur yang handal dan lungkungan

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	Sejahtera	hidup yang berkualitas serta SDM yang unggul. Sejahtera bermakna pembangunan di Kota Pekanbaru menuju kondisi hidup layak, aman, dan bermartabat melalui ekonomi yang adil dan merata, tersedianya lapangan kerja serta peluang usaha dan investasi yang luas, serta jaminan kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis

Keselarasan antara visi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 dengan visi RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.2. Penyelarasan antara Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029	Visi RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2045	Visi RPJMD Provinsi Riau 2025-2029	Visi RPJMN Tahun 2025-2029
Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera	Kota Agamis, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan	Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Sumber: RPJPD Kota Pekanbaru, RPJMD Provinsi Riau dan RPJMN

3.1.2. Misi

Misi merupakan rumusan strategis yang menggambarkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi menjadi acuan utama merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi hingga program prioritas daerah selama jangka waktu lima tahun kedepan.

Terdapat enam misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pekanbaru dalam mewujudkan visi kota pekanbaru tahun 2025-2029. Misi Pembangunan 5 (lima) tahunan Kota Pekanbaru 2025-2029 adalah:

1. Menjadikan Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Jati Diri Kota Pekanbaru
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berdaya Saing, Berakhlak, dan Berbudaya
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif, Bersih, Melayani dan Amanah
4. Meningkatkan Aksesabilitas Infrastruktur Perkotaan dan Konektifitas Transportasi Publik yang Handal, Aman, Nyaman dan Ramah Lingkungan
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera melalui Ekonomi yang Adil dan Merata

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi 1: Menjadikan Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Jati Diri Kota Pekanbaru

Menjadikan nilai dan resam melayu sebagai jati diri bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam keagamaan, persatuan, kerjasama dan tata krama dalam keberagaman budaya masyarakat Kota Pekanbaru.

Nilai Budaya Melayu menjadi konsepsi yang hidup dalam pikiran masyarakat melayu berupa nilai yang melekat, norma, dan resam melayu membentuk identitas, perilaku dan interaksi sosial dalam kehidupan dengan nilai pentingnya keagamaan, kesatuan dan kebersamaan, toleransi dan hormat, saling menolong dan kerjasama, kearifan lokal, tunjuk ajar, sederhana dan mawas diri, kesopanan dan tata krama.

Ketahanan Sosial Budaya menjadi kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan dan praktik budaya dengan menjaga kerukunan sosial, keberagaman budaya dan identitas nasional bercirikan dinamis, tangguh dan ulet dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan dalam kehidupan.

Misi 2 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berdaya Saing, Berakhlak, dan Berbudaya

Pembangunan Kota Pekanbaru diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, berakhlak dan berbudaya dalam mewujudkan pekanbaru yang berbudaya, maju dan sejahtera.

SDM unggul adalah individu atau kelompok yang memiliki kapasitas kompetensi tinggi, baik secara intelektual, emosional, spiritual, maupun keterampilan teknis. Dalam konteks pembangunan daerah, SDM unggul mencakup manusia yang sehat secara fisik dan mental, terdidik secara formal maupun nonformal, serta mampu berpikir kritis, kreatif, dan solutif dalam menghadapi tantangan lokal dan global. Menurut Human Capital Theory, investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu, SDM unggul di Kota Pekanbaru adalah masyarakat yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman, menguasai teknologi informasi, serta mampu berinovasi dan menciptakan nilai tambah bagi lingkungannya, dan pada saat yang sama mampu mempertahankan nilai dan identitas budaya melayu. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem pendukung yang kondusif melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar, serta fasilitas pengembangan potensi masyarakat sepanjang hayat.

SDM berdaya saing adalah individu yang mampu bertahan, berkembang, dan unggul dalam persaingan dunia kerja maupun lingkungan sosial yang kompetitif, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kompetensi utama SDM berdaya saing meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan komunikasi lintas budaya, kolaborasi, serta literasi digital. World Economic Forum (2020) menekankan pentingnya 21st-century skills—seperti communication, critical thinking, creativity, collaboration, problem solving, adaptability, dan entrepreneurial mindset—dalam menciptakan tenaga kerja yang kompetitif. Dalam konteks Pekanbaru sebagai kota perdagangan dan jasa, pengembangan daya saing SDM diarahkan pada sinkronisasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha, melalui link and match kurikulum, pelatihan industri, serta sertifikasi kompetensi. SDM berdaya saing tidak hanya mengandalkan ijazah formal, tetapi juga memiliki portofolio keterampilan yang terukur dan siap pakai dalam dinamika ekonomi global yang semakin digital dan berbasis inovasi.

SDM berakhlak adalah manusia yang menjadikan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Akhlak mencakup kejujuran, tanggung jawab, empati, disiplin, dan integritas. Dalam perspektif pembangunan manusia, aspek moralitas memiliki korelasi erat dengan integritas birokrasi, harmoni sosial, serta ketahanan budaya. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Melayu menjadi fondasi penting dalam membentuk SDM berakhlak di Kota Pekanbaru. Pemerintah daerah perlu memperkuat pendidikan nilai secara terintegrasi, baik dalam kurikulum formal maupun program pembinaan masyarakat. SDM yang berakhlak akan berkontribusi pada tatanan sosial yang sehat, menghindarkan dari praktik koruptif dan disfungsi sosial, serta memperkuat identitas kolektif masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menempatkan dimensi etika sebagai bagian dari kualitas kehidupan yang bermakna.

SDM berbudaya adalah individu yang memiliki pemahaman, penghargaan, dan keterlibatan aktif terhadap nilai-nilai budaya lokal dan nasional, serta menjadikannya sebagai rujukan dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks Pekanbaru yang berakar kuat pada budaya Melayu dan multikulturalisme perkotaan, SDM berbudaya mampu menjaga harmoni antar kelompok, melestarikan seni tradisi, dan membumikan nilai-nilai lokal dalam dinamika kehidupan modern. Pendidikan kebudayaan harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan formal maupun informal untuk memperkuat identitas kultural generasi muda. UNESCO menyatakan bahwa budaya adalah pilar keempat pembangunan berkelanjutan, karena ia membentuk cara berpikir dan bertindak manusia secara kolektif. Oleh karena itu, penguatan SDM berbudaya di Pekanbaru memerlukan revitalisasi warisan budaya, pemberdayaan

komunitas seni, serta pemanfaatan media digital untuk mempromosikan budaya lokal secara inklusif dan kreatif. SDM berbudaya bukan sekadar pelestari tradisi, tetapi juga inovator nilai dalam masyarakat modern.

Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif, Bersih, Melayani, dan Amanah

Transformasi pemerintahan merupakan proses perubahan sistematis dan terukur dalam tata kelola birokrasi menuju model yang lebih adaptif, digital, partisipatif, dan berbasis kinerja untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas kebijakan.

Proses perubahan ini terjadi secara mendasar dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kapasitas institusional, kualitas pelayanan, serta responsivitas terhadap dinamika sosial. Perubahan ini mencakup adopsi teknologi digital, restrukturisasi sistem birokrasi, dan penguatan partisipasi publik secara sistematis. Ukuran keberhasilan transformasi dapat dilihat dari peningkatan efisiensi layanan, transparansi kebijakan, serta akuntabilitas kinerja aparatur. Dengan pendekatan transformatif, pemerintah didorong menjadi lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil untuk memenuhi tuntutan tata kelola yang modern dan berintegritas.

Pemerintahan yang bersih adalah penyelenggaraan kekuasaan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Ciri utamanya meliputi transparansi dalam pengambilan keputusan, pengawasan yang efektif, serta sistem pengelolaan sumber daya yang efisien dan dapat diaudit. Untuk mencapainya, diperlukan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, penerapan teknologi informasi, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan.

Pemerintahan yang melayani merupakan bentuk tata kelola yang menempatkan kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan publik. Ciri utamanya adalah aksesibilitas, kecepatan, kepastian, dan kualitas layanan yang dapat diukur melalui standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan aparatur yang kompeten, sistem pelayanan yang terintegrasi secara digital, serta mekanisme umpan balik yang responsif dan berkelanjutan.

Pemerintahan yang amanah menjadi komitmen penyelenggaraan kekuasaan yang dilandasi integritas, tanggung jawab, dan komitmen untuk mengelola kekuasaan demi kepentingan publik secara jujur dan adil. Karakteristik utamanya mencakup akuntabilitas kinerja, kepatuhan terhadap hukum, serta kepercayaan masyarakat yang diukur melalui indikator transparansi dan indeks persepsi publik. Untuk mencapainya, dibutuhkan kepemimpinan yang etis, sistem pengawasan yang efektif, serta budaya birokrasi yang menjunjung nilai moral dan pelayanan.

Misi 4: Meningkatkan Aksesabilitas Infrastruktur Perkotaan dan Konektifitas Transportasi Publik yang Handal, Aman, Nyaman dan Ramah Lingkungan

Misi ini diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus pembangunan mencakup peningkatan kualitas dan jangkauan jalan kota, sistem drainase yang terpadu, penguatan ruang terbuka hijau, serta pengembangan kawasan permukiman yang tertata dan terintegrasi.

Di sektor transportasi, pengembangan sistem transportasi publik menjadi prioritas utama. Pemerintah Kota berkomitmen untuk membangun transportasi massal yang terintegrasi, efisien, ramah lingkungan, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Konektivitas antarwilayah akan ditingkatkan melalui perencanaan jaringan transportasi multimoda yang mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang secara optimal.

Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air menjadi bagian penting dari misi ini, khususnya dalam upaya penyediaan air bersih yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Investasi dan inovasi akan diarahkan pada peningkatan layanan air minum, pengelolaan air limbah, serta pelestarian sumber daya air untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur juga mencakup penyediaan jaringan listrik dan energi yang andal serta terjangkau, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, kegiatan industri, dan kenyamanan masyarakat. Di era digital, penguatan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi juga menjadi prioritas untuk mendukung transformasi kota yang maju dan modern.

Misi 5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Misi ini mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, pengurangan emisi gas rumah kaca, penguatan kapasitas adaptasi masyarakat dan ekosistem terhadap perubahan iklim, serta integrasi kebijakan mitigasi dan adaptasi dalam pembangunan nasional untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan tahan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Misi ini juga sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, sehingga mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 6: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera melalui Ekonomi yang Adil dan Merata

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan struktur ekonomi daerah yang kokoh, berdaya saing, dan inklusif melalui pemerataan pembangunan ekonomi serta

peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara adil. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB, namun juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Misi ini berlandaskan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan serta selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan).

Tabel III.3. Keselarasan Misi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029	Misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045	Misi RPJMN Indonesia Tahun 2025-2029
Menjadikan Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Jati Diri Kota Pekanbaru	Misi 7 : Mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai Alat Pemersatu dan Perwujudan Nilai Nilai Kearifan Lokal serta Mendorong Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman dan Adil untuk Semua	Asta cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Asta cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
Mewujudkan Sumber daya Manusia Unggul, Berdaya Saing, Berakhlak, dan Berbudaya	Misi 2: Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan	Asta cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif, Bersih, Melayani dan Amanah	Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju World Class Government	Asta cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
Meningkatkan Aksesabilitas Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Transportasi Publik yang Handal, Aman, Nyaman dan Ramah Lingkungan	Misi 3 : Memperkuat Infrastruktur yang Handal Guna Kemudahan Akses, Pelayanan Masyarakat dan Perekonomian serta Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah	Asta cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur Asta cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan	Asta cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Misi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029	Misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045	Misi RPJMN Indonesia Tahun 2025-2029
Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera melalui Ekonomi yang Adil dan Merata	Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan	Asta cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Asta cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur Asta cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Asta cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Sumber: RPJMD Provinsi Riau dan RPJMN

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan di capai dalam berdasarkan misi dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang lebih terukur dan spesifik, menggambarkan hasil atau kondisi yang ingin dicapai melalui kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran dapat membantu mengarahkan sumberdaya dan tindakan yang bersifat operasional serta menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi capai tujuan yang telah di tetapkan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil perumusan capaian strategis yang mencerminkan tingkat keberhasilan kinerja pembangunan dan berfungsi sebagai dasar dalam menyusun arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam konteks Kota Pekanbaru, tujuan dan sasaran dirumuskan melalui analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis jangka menengah Kota Pekanbaru. Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru menjadi landasan untuk perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) seluruh Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran ini merupakan dasar bagi pemilihan berbagai strategi pembangunan serta sarana untuk mengevaluasi efektivitas pilihan-pilihan tersebut. Tujuan dalam RPJMD Kota Pekanbaru adalah kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, yang disusun secara teknokratik, partisipatif, dan politis, melalui proses perumusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang berfungsi untuk menilai keberhasilan dan sebagai alat pengendalian serta evaluasi pelaksanaan RPJMD. Evaluasi dilakukan setiap tahun melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memantau progres dan memastikan keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan target IKU mengacu pada sasaran visi dan misi Kota Pekanbaru, serta indikator utama pembangunan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2025-2045. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara pencapaian visi dan misi RPJPD dalam setiap periode lima tahunan.

Pada tahapan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, kinerja sasaran utama visi dan sasaran pokok pembangunan mengacu pada target-target tahun 2030 yang ditetapkan dalam RPJPD. Target kinerja sasaran utama dan indikator utama pembangunan RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2045 akan dijabarkan secara rinci dalam dokumen RPJMD untuk memastikan pencapaian yang terukur dan terarah.

Tabel III.4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera										
1. Menjadikan Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Jati Diri Kota Pekanbaru	1.1. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang adaptif		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	n/a	59,00	59,75	60,50	61,25	62,00	62,75
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,91	95,10	95,20	95,50	95,70	95,90	96,00
		1.1.1. Meningkatkan pemahaman, pelestarian, dan pemanfaatan Budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	n/a	71	71,75	72,50	73,25	74,00	74,75
			Nilai Warisan Budaya	n/a	50	50,75	51,50	52,25	53,00	53,75
			Nilai Ekspresi Budaya	n/a	39	39,75	40,50	41,25	42,00	42,75
		1.1.2. Meningkatkan ketahanan sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	66,4	70,66 - 70,67	70,97	71,29	71,61	71,93	72,25
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	n/a	70,1	70,69	71,89	72,66	73,78	74,8
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berdaya Saing, Berakhlak, dan Berbudaya	2.1. Meningkatkan Kualitas, Aksesibilitas dan Pemerataan layanan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	84,26	84,54 - 84,62	84,91 - 85,17	85,38 - 85,73	85,86 - 86,29	86,34 - 86,86	86,83 - 87,44
			2.1.1. Terwujudnya Kesehatan untuk semua	75,89	76,04	76,27	76,50	76,73	76,96	77,19

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera										
	Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,5	14,40	14,30	14,20	14,00	13,90	13,80
		2.1.2. Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	11,96	12,08 - 12,13	12,11	12,13	12,16	12,19	12,22
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,84	15,85	15,88	15,91	15,95	15,98	16,00
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	74,90	75,00	75,10	75,20	75,30	75,40	75,50
		2.1.3. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Indeks Perlindungan Sosial	69	71,00	71,80	72,40	74,00	74,80	75,00
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif, Bersih, Melayani dan Amanah	3.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transformatif		Nilai RB	78,29 (BB)	78,35 (BB)	78,95 (BB)	79 (BB)	79,25 (BB)	79,80 (BB)	80 (A)
		3.1.1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan digital,	Indeks Pelayanan Publik	91,95	92,2	92,60	93,00	93,40	93,80	94,20
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,14	90,5	90,90	91,30	91,70	92,10	92,50

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera										
		akuntabel, berintegritas serta pelayanan publik yang prima	Indeks Pemerintah Digital	n/a	n/a	3,70	3,85	4,00	4,20	4,40
			Nilai SAKIP	67	67,8	68,3	68,9	69,4	69,8	70
		3.1.2. Meningkatnya ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	68,38	70,09	71,84	73,64	75,48	76,61	77,76
4. Meningkatkan Aksesabilitas Infrastruktur Perkotaan dan Konektifitas Transportasi Publik yang Handal, Aman, Nyaman dan Ramah Lingkungan	4.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi perkotaan serta daya dukung kota yang berorientasi peningkatan kualitas lingkungan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	n/a	83,83	84,93	85,20	86,31	87,50	88,00
		4.1.1. Meningkatnya daya dukung kota dalam persediaan infrastruktur yang handal	Persentase kesesuaian tata ruang	n/a	40	60,00	70,00	80,00	85,00	95,00
		4.1.2. Terwujudnya Infrastruktur perkotaan berkualitas	Indeks kualitas layanan infrastruktur	n/a	65,02	69,17	72,50	73,80	75,00	78,00
		4.1.3. Terwujudnya Transportasi publik yang berkualitas, handal dan	Persentase Layanan Transportasi Publik	n/a	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera										
		ramah lingkungan dan terintegrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Transportasi Publik	79,59	81,5	82,50	83,20	83,80	84,60	85,00
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	5.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	n/a	62,77	63,75	67,96	69,93	69,66	71,35
		5.1.1. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	56,97	61,15	61,63	62,11	62,60	63,09	63,59
		5.1.2. Terwujudnya peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penguatan sistem mitigasi dan adaptasi yang efektif dan terintegrasi	Indeks Risiko Bencana Daerah	125,67	125,07	122,87	120,72	118,60	116,52	114,47
			Indeks Ketahanan Daerah	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera melalui Ekonomi yang Adil dan Merata	6.1. Terwujudnya ekonomi inklusif		PDRB Per Kapita	166.856	181.140	193.996	206.851	219.707	232.563	245.418
			Pertumbuhan ekonomi	4,61	4,5 - 5,00	4,8 - 5,2	5 ,00 - 5,3	5 ,1 - 5,5	5 ,2 - 5,6	5,3 - 5,9
			Indeks Daya Saing Daerah	4,21	4,24	4,28	4,31	4,35	4,38	4,42

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera										
		6.1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kota (%)	15,40	15,51	15,62	15,73	15,84	15,95	16,06
			Rasio Kewirausahaan Daerah	4,07	4,70	4,87	5,04	5,22	5,41	5,60
		6.1.2. Terciptanya Lapangan Kerja, Lapangan Usaha dan Peluang Investasi yang Lebih Luas.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	76,05	76,28	76,52	76,75	76,98	77,22	77,45
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,63	4,52 - 4,45	4,47 - 4,3	4,29 - 4,02	3,97 - 3,6	3,54 - 3,25	3,25 - 2,98
		6.1.3. Terwujudnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin	Tingkat kemiskinan (%)	3,00 - 2,78	3,1-2,9	3,08-2,8	3,0-2,8	2,7-2,15	2,22 - 1,95	2,03- 1,75
			Rasio Gini	0,353	0,345 - 0,342	0,337 - 0,333	0,330 - 0,325	0,323 - 0,317	0,316 - 0,31	0,310 - 0,303
		6.1.4. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks ketahanan pangan	92,20	92,25	92,43	92,67	92,90	93,14	93,38
		6.1.5. Terwujudnya stabilitas harga kebutuhan pokok yang berkualitas dan terjangkau	Tingkat Inflasi (%)	1,24	2-2,5	2-2,5	2-2,5	2-2,5	2-2,5	2-2,5

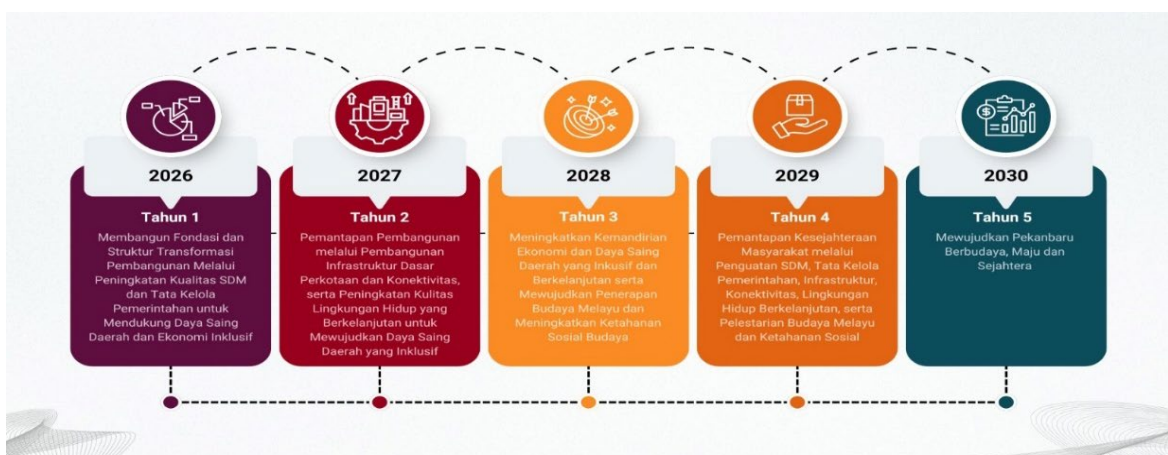
3.3. STRATEGI, DAN PROGRAM PRIORITAS

3.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Pekanbaru mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Sedangkan arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah merupakan consecutive process dan saling berhubungan satu dengan lainnya.

Pelaksanaan strategi pembangunan lebih efektif dengan merasionalkan pilihan strategi, diperlukan tematik dan fokus pembangunan sesuai dengan tahapan pelaksanaannya. Penekanan tema dan fokus pembangunan setiap tahun pelaksanaan RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Tematik dan fokus pembangunan tahunan tersebut, lebih terarah diperlukan tema pembangunan lima tahunan yang memiliki keterkaitan yang erat dan selaras dengan visi dan misi RPJMD Kota Pekanbaru.



Sumber: Hasil Analisis

Gambar III.1. Pentahapan pembangunan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2026-2030

1. Pentahapan Pembangunan Tahun 2026

Tahap awal pembangunan difokuskan pada penguatan pondasi transformasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta reformasi tata kelola pemerintahan. Upaya ini mencakup peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, pembangunan budaya kerja ASN yang profesional dan berintegritas, serta pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahap ini juga dimulai pembangunan kapasitas kelembagaan serta penataan kebijakan yang mendukung daya saing daerah dan ekonomi inklusif sebagai landasan pembangunan tahun-tahun berikutnya.

2. Pentahapan Pembangunan Tahun 2027

Memasuki tahun kedua, pembangunan difokuskan pada pemantapan infrastruktur dasar perkotaan seperti jalan, jembatan, sistem air minum, drainase, transportasi publik, dan akses hunian layak. Selain itu, pembangunan berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui tata kelola persampahan, pengendalian limbah B3, peningkatan ruang terbuka hijau, serta penguatan sistem mitigasi bencana. Tahap ini menjadi penopang transformasi SDM dan kelembagaan yang telah dibangun di tahun sebelumnya agar dapat mendorong daya saing yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Pentahapan Pembangunan Tahun 2028

Tahap ketiga diarahkan pada penguatan sektor ekonomi produktif melalui peningkatan daya saing UMKM, pengembangan koperasi, transformasi ekonomi digital dan kreatif, serta penguatan investasi daerah. Selaras dengan itu, pelestarian dan pelebagaan nilai-nilai budaya Melayu mulai diarusutamakan dalam tata kelola sosial dan pemerintahan. Penguatan ketahanan sosial, kesetaraan gender, serta pemenuhan hak perempuan dan anak diperkuat untuk menjaga kohesi sosial di tengah pertumbuhan ekonomi yang semakin dinamis.

4. Pentahapan Pembangunan Tahun 2029

Pembangunan pada tahap ini difokuskan untuk memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai dari tahun-tahun sebelumnya. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas SDM, efektivitas tata kelola pemerintahan, optimalisasi infrastruktur dan konektivitas, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pelestarian budaya Melayu dan ketahanan sosial masyarakat tetap menjadi prioritas dalam rangka menjaga identitas dan harmoni sosial dalam pembangunan daerah.

5. Pentahapan Pembangunan Tahun 2030

Sebagai tahun akhir dari periode pembangunan jangka menengah daerah, seluruh capaian pembangunan dikonsolidasikan untuk mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai kota yang berbudaya, maju, dan sejahtera. Pencapaian dalam

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, tata kelola pemerintahan yang profesional, infrastruktur dan konektivitas yang merata, ekonomi lokal yang tangguh, serta pelestarian budaya Melayu yang terintegrasi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Tahun 2030 juga menjadi tahap penguatan dan penyempurnaan dari seluruh proses pembangunan yang telah dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan. Selain itu, tahun ini merupakan fase transisi strategis sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030, serta menjadi dasar perencanaan bagi kepala daerah terpilih periode 2030–2034 guna menjamin kesinambungan arah pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai penjabaran misi kepala daerah ke dalam bentuk rangkaian kerja yang sistematis dan terarah. Arah kebijakan disusun secara selaras dengan strategi pembangunan daerah guna memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan operasional. Selanjutnya dilakukan perumusan arah kebijakan Kota Pekanbaru.

Tabel III.5. Perumusan Arah Kebijakan Kota Pekanbaru

VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera		
1. Menjadikan Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Jati Diri Kota Pekanbaru	Optimalisasi pelestarian dan pemanfaatan budaya Melayu sebagai identitas dan daya saing Kota Pekanbaru.	
	Memperkuat perlindungan dan pengelolaan cagar budaya sebagai aset sejarah dan sumber daya budaya daerah.	
	Mewujudkan Kohesivitas Sosial yang kuat dan berkelanjutan	
	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui penguatan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat	
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berdaya Saing, Berakhlak, dan Berbudaya	Mewujudkan usia harapan hidup yang tinggi	
	Mewujudkan derajat pendidikan yang tinggi	
	Meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat	
	Penguatan peran pemuda dalam pembangunan	
	Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan dan disabilitas	
	Penguatan dana sosial syariah guna mendukung perlindungan sosial yang adaptif	
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif, Bersih, Melayani dan Amanah	Mewujudkan profesionalitas ASN yang tinggi	
	Mewujudkan layanan publik prima	
	Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital	
	Meningkatkan kualitas proses bisnis pemerintahan	
	Peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	
4. Meningkatkan Aksesabilitas Infrastruktur Perkotaan dan Konektifitas Transportasi Publik yang Handal, Aman, Nyaman dan Ramah Lingkungan	Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan yang berkelanjutan serta penguatan infrastruktur teknologi informasi perkotaan	
	Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang terintegrasi	
	Meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya air dan drainase perkotaan yang terintegrasi dan berkualitas dalam	

VISI/MISI (1)	ARAH KEBIJAKAN (2)	KET (3)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera		
	rangka mendukung pengendalian banjir dan ketahanan wilayah	
	Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau serta percepatan penanganan permukiman kumuh secara terpadu.	
	Mewujudkan transportasi publik yang berkualitas, handal, ramah lingkungan dan merata	
	Terwujudnya jaringan transportasi antarmoda yang terintegrasi dan mendukung mobilitas wilayah	
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	
	Meningkatkan kualitas sumber daya air melalui perluasan pengolahan air limbah domestik, pengendalian beban pencemar dari kegiatan usaha, penguatan pengelolaan sampah, serta konservasi sempadan sungai secara berkelanjutan	
	Meningkatkan kualitas udara perkotaan melalui pengendalian emisi transportasi dan industri, pencegahan pembakaran terbuka, serta penguatan sistem pemantauan dan peringatan dini secara real-time	
	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera melalui Ekonomi yang Adil dan Merata	Meningkatkan kontribusi sub sektor jasa, perdagangan dan industri manufaktur dalam PDRB	
	Mewujudkan kelembagaan koperasi yang kuat, daya saing UMKM yang tinggi dan berkembangnya ekonomi kreatif	
	Meningkatkan literasi, inklusi, dan akses layanan keuangan yang aman, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat, UMKM, dan kelompok rentan melalui sinergi lintas OPD dan lembaga keuangan guna mendukung kemandirian ekonomi daerah	
	Menjamin Keadilan Akses Terhadap Kesempatan Kerja	
	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	
	Peningkatan Akses Layanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	
	Peningkatan ketahanan pangan daerah	
	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	
	Penguatan stabilisasi harga kebutuhan pokok	

Sumber: Hasil Analisis

Selain itu, penentuan arah kebijakan dan strategi yang akan menjadi panduan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, strategi dirumuskan dengan memformulasikan short term outcome menjadi dasar bagi penentuan program prioritas pembangunan. Sedangkan arah kebijakan diformulasikan melalui intermediate term outcome sebagai media untuk melihat tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam hal ini, masing-masing arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan sebagai cara untuk memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam tujuan/sasaran. Dengan demikian, alur perencanaan yang dimulai dari penetapan visi dan misi, sampai kepada tujuan, sasaran, penetapan indikator tujuan/sasaran,



penetapan arah kebijakan, penetapan strategi hingga ke level program menjadi jelas arahnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029, berikut disajikan arah kebijakan dan strategi dalam mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Tabel III.6. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekanbaru 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
1. Menjadikan Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Jati Diri Kota Pekanbaru	1.1 Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang adaptif		-Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) -Indeks Pembangunan Gender		
		1.1.1 Meningkatnya pemahaman, pelestarian, dan pemanfaatan Budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari	1.1.1.1 Indeks Ketahanan Sosial Budaya 1.1.1.2 Nilai Warisan Budaya 1.1.1.3 Nilai Ekspresi Budaya	Optimalisasi pelestarian dan pemanfaatan budaya Melayu sebagai identitas dan daya saing Kota Pekanbaru.	Meningkatkan edukasi, pelestarian, dan promosi budaya Melayu dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.
				Memperkuat perlindungan dan pengelolaan cagar budaya sebagai aset sejarah dan sumber daya budaya daerah.	Meningkatkan inventarisasi, konservasi, dan pengawasan terhadap cagar budaya secara berkelanjutan.
		1.1.2 Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	1.1.2.1 Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) 1.1.2.2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Mewujudkan Kohesivitas Sosial yang kuat dan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga, Kesenjangan Gender dan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berdaya Saing, Berakhlak, dan Berbudaya	2.1. Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas dan Pemerataan layanan Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu		- Indeks Pembangunan Manusia		
		2.1.1. Terwujudnya Kesehatan untuk semua	2.1.1.1 Umur Harapan Hidup (Tahun)		Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera							
			2.1.1.2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Mewujudkan usia harapan hidup yang tinggi	Peningkatan Gizi Ibu dan Anak		
			2.1.2. Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas yang Merata		2.1.2.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun) 2.1.2.2 Harapan Lama Sekolah (tahun) 2.1.2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Mewujudkan derajat pendidikan yang tinggi	Peningkatan kualitas hidup lansia
							Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pembudayaan perilaku hidup sehat secara menyeluruh, termasuk penanganan TBC dan penguatan layanan kesehatan jiwa.
		Meningkatkan Akses dan Partisipasi Anak Usia Sekolah yang inklusif					
		Penguatan Kurikulum Pendidikan yang Relevan, Adaptif, dan Bermutu					
		Peningkatan Kompetensi, Kualitas, serta Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan					
		Pengembangan dan Pemerataan Kualitas Lembaga Pendidikan di Seluruh Wilayah					
		Pelestarian Bahasa serta Sastra Daerah sebagai Warisan Budaya					
		Meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat	Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah Sesuai Standar Nasional untuk Mendukung Literasi Masyarakat				

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
					Pelestarian Koleksi Khas Daerah dan Naskah Kuno sebagai Identitas dan Warisan Budaya Lokal
					Penguatan Kapasitas Perpustakaan dan Profesionalisme Pustakawan
					Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan inovasi pemuda
					Dukungan terhadap kelembagaan dan jaringan organisasi kepemudaan
		2.1.3. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	2.1.3.1 Indeks Perlindungan Sosial	Penguatan peran pemuda dalam pembangunan	Penguatan pembinaan dan prestasi atlet muda untuk peningkatan daya saing keolahragaan daerah
					Penguatan Sistem Perlindungan Sosial Adaptif bagi Kelompok Rentan
					Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan kesejahteraan sosial
					Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan kelompok rentan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
					melalui rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan
				Penguatan dana sosial syariah guna mendukung perlindungan sosial yang adaptif	Fasilitasi koordinasi dengan BAZNAS dan lembaga amil zakat dalam pengelolaan ZISWAF. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola ZISWAF di tingkat kota. Penguatan literasi dan edukasi masyarakat terkait ZISWAF dan keuangan syariah. Optimalisasi pemanfaatan dana sosial syariah untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif, Bersih, Melayani dan Amanah	3.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transformatif	3.1.1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan digital, akuntabel, berintegritas serta pelayanan publik yang prima	Nilai RB 3.1.1.1 Indeks Pelayanan Publik 3.1.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3.1.1.3 Indeks Pemerintah Digital 3.1.1.4 Nilai Sakip	Mewujudkan profesionalitas ASN yang tinggi	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas ASN Secara Berkelanjutan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Transformasi Budaya Kerja ASN yang Profesional dan Berintegritas Digitalisasi Sistem Kerja ASN (Smart ASN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
					Penguatan Kepemimpinan ASN dan Manajemen Talenta
				Mewujudkan layanan publik prima	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
					Perluasan akses dan pemerataan layanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
					Meningkatkan kualitas proses bisnis pemerintahan
				Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi dan Efisien
					Penguatan tatakelola informasi dan komunikasi publik berbasis digital yang terintegrasi dan real-time
				Meningkatkan kualitas proses bisnis pemerintahan	Penguatan dan sinkronisasi kualitas perencanaan pembangunan daerah
					Peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
4. Meningkatkan Aksesabilitas Infrastruktur Perkotaan dan Konektifitas Transportasi Publik yang Handal, Aman, Nyaman dan Ramah Lingkungan	4.1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi perkotaan serta daya dukung kota yang berorientasi peningkatan kualitas lingkungan	3.1.2. Meningkatnya ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah	3.1.2.1 Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kemandirian fiskal
					Meningkatny kualitas persidangan dan kajian peraturan daerah serta kualitas penganggaran dan pengawasan
		4.1.1. Meningkatnya daya dukung kota dalam persediaan infrastruktur yang handal	4.1.1.1 Persentase kesesuaian tata ruang	Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan yang berkelanjutan serta penguatan infrastruktur teknologi informasi perkotaan	Pembangunan ekosistem riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil kelitbangan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah
					Penguatan tata kelola pertahanan
4. Meningkatkan Aksesabilitas Infrastruktur Perkotaan dan Konektifitas Transportasi Publik yang Handal, Aman, Nyaman dan Ramah Lingkungan	4.1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi perkotaan serta daya dukung kota yang berorientasi peningkatan kualitas lingkungan	4.1.2. Terwujudnya Infrastruktur perkotaan berkualitas	4.1.2.1 Indeks kualitas layanan infrastruktur	Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang terintegrasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan tata ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan.
					Mewujudkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perkotaan
		4.1.2. Terwujudnya Infrastruktur perkotaan berkualitas	4.1.2.1 Indeks kualitas layanan infrastruktur	Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang terintegrasi	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur perkotaan.
					Peningkatan kualitas jalan dan jembatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
					Mewujudkan infrastruktur strategis perkotaan yang berkualitas dan ramah lingkungan
					Mewujudkan pengembangan dan penataan kawasan Kota Pekanbaru yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan
				Meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya air dan drainase perkotaan yang terintegrasi dan berkualitas dalam rangka mendukung pengendalian banjir dan ketahanan wilayah	Mewujudkan SPAM Jaringan Perpipaan yang aman
					Dukungan terhadap pemanfaatan SPAM Regional Pekan Kampar
					Pengendalian banjir di kawasan perkotaan dan wilayah rawan genangan melalui sistem drainase terpadu dan berbasis mitigasi risiko
					Naturalisasi sungai dan pengembangan sistem drainase ramah lingkungan untuk menciptakan kawasan perkotaan yang bebas banjir dan berkelanjutan.
					Mewujudkan Sistem Jaringan Sumber Daya Air & Drainase yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
					Peningkatan Sambungan Rumah (SR) yang terhubung ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara terintegrasi di seluruh wilayah
					Peningkatan sanitasi aman
				Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau serta percepatan penanganan permukiman kumuh secara terpadu.	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
					Peningkatan kualitas pemukiman Masyarakat yang berkelanjutan
					Mengurangi kawasan kumuh perkotaan
		4.1.3. Terwujudnya Transportasi publik yang berkualitas, handal dan ramah lingkungan dan terintegrasi	4.1.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Transportasi Publik	Mewujudkan transportasi publik yang berkualitas, handal, ramah lingkungan dan merata	Meningkatkan cakupan dan keterjangkauan transportasi publik yang terintegrasi. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik berbasis digital dan teknologi ramah lingkungan. Peningkatan konektivitas transportasi menuju kawasan produksi, kawasan strategis, dan pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
	5.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	5.1.1. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	5.1.1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Tata kelola persampahan yang efektif, terintegrasi dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah (ekonomi sirkular)
					Fasilitasi pemanfaatan potensi dan optimalisasi pengelolaan limbah serta penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT)
					Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang berkelanjutan
					Meningkatkan keanekaragaman hayati
					Meningkatkan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		5.1.2. Terwujudnya peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penguatan sistem mitigasi dan adaptasi yang	5.1.2.1. Indeks Risiko Bencana Daerah 5.1.2.2. Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
					Meningkatkan penanganan bencana pada saat tanggap darurat
					Meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca bencana

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	ARAH KEBIJAKAN (5)	STRATEGI (6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera melalui Ekonomi yang Adil dan Merata	6.1. Terwujudnya ekonomi inklusif	efektif dan terintegrasi			
			- PDRB Perkapita - Pertumbuhan Ekonomi		
		6.1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	6.1.1.1. Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatkan kontribusi sub sektor jasa, perdagangan dan industri manufaktur dalam PDRB	Peningkatan daya saing industri dan optimalisasi kawasan industri tenayan
			6.1.1.2. Kontribusi PDRB Kota (%)		Peningkatan nilai tambah perdagangan dan jasa yang inklusif
			6.1.1.3. Rasio Kewirausahaan Daerah	Mewujudkan kelembagaan koperasi yang kuat, daya saing UMKM yang tinggi dan berkembangnya ekonomi kreatif	Peningkatan UMKM yang berdayasaing dan Tumbuhnya Wirausaha Muda Baru
					Penguatan Ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih
					Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing koperasi serta peningkatan peran koperasi dalam perekonomian
					Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif
					Penguatan sistem ekonomi syariah berbasis masyarakat
					Terbangunnya ekosistem ekonomi digital dan ekonomi kreatif dalam

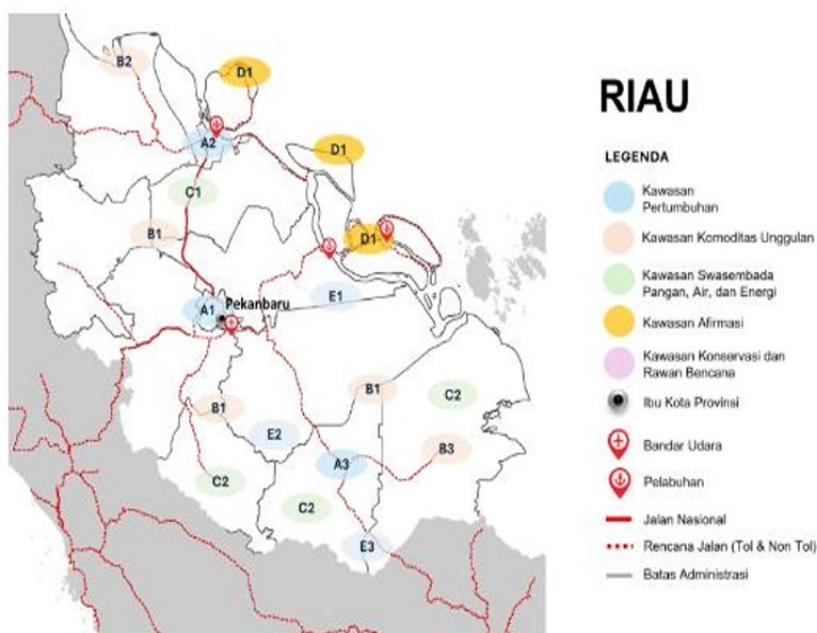
VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
		6.1.2. Terciptanya Lapangan Kerja, Lapangan Usaha dan Peluang Investasi yang Lebih Luas.	6.1.2.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 6.1.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Menjamin Keadilan Akses Terhadap Kesempatan Kerja Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan
					Peningkatan kesempatan kerja yang berkeadilan serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas tenaga kerja
					Peningkatan Kemudahan Berusaha
					Promosi Investasi Daerah yang Proaktif dan Terfokus
					Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
					Penguatan Lembaga Penunjang Investasi Daerah
					Transparansi dan Kepastian Hukum bagi Investor
					Integrasi Perencanaan Investasi dalam Dokumen Pembangunan Daerah
					Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin
					Pemberdayaan ekonomi Masyarakat miskin
		6.1.3. Terwujudnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin	6.1.3.1. Tingkat kemiskinan (%) 6.1.3.2. Rasio Gini	Peningkatan Akses Layanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
		6.1.4. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	6.1.4.1. Indeks Ketahanan Pangan	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketersediaan pangan, penguatan akses dan pemanfaatan serta stabilitas harga pangan
				Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	Peningkatan produksi pertanian dan perikanan modern berbasis sumber daya lokal, inklusi dan berkelanjutan
		6.1.5. Terwujudnya stabilitas harga kebutuhan pokok yang berkualitas dan terjangkau	6.1.5.1. Inflasi	Penguatan stabilisasi harga kebutuhan pokok	Penguatan Sistem Distribusi dan Rantai Pasok Kebutuhan Pokok
					Pengendalian Harga melalui Pengawasan Pasar

3.3.2. Arah Kebijakan Wilayah

3.3.2.1. Arah Pembangunan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Arahan Pengembangan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan pembangunan wilayah melalui pendekatan kawasan pertumbuhan. Dalam konteks ini, Kota Pekanbaru diposisikan sebagai simpul utama penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan, konektivitas antarwilayah, dan integrasi pusat-pusat pelayanan. Penetapan Kota Pekanbaru sebagai bagian dari kawasan pertumbuhan juga mempertimbangkan potensi ekonomi, posisi geografis, serta kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan demikian, pengembangan wilayah di Kota Pekanbaru diarahkan untuk memperkuat daya saing kawasan, mendorong investasi, serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan regional secara terintegrasi dan berkelanjutan.



Sumber: RPJMN 2025-2029

Gambar III.2. Arah Pembangunan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029

Tabel III.7. Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi Pengembangan Daerah Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Perkotaan Pekanbaru	1. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pekanbaru, antara lain melalui:

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		a. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu b. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau c. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan d. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
2.	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Kawasan Perkotaan Pekanbaru melalui pembangunan BRT.	
3.	Pengembangan koridor industri Pekanbaru Dumai.	
4.	Pengembangan SPAM Regional Pekanbaru Kampar .	
5.	Pembangunan TPST Regional Pekanbaru Kampar-Pelalawan.	
6.	Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pekanbaru (PHTC).	
7.	Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Pekanbaru.	
8.	Pembangunan Jembatan Siak V dan Pekanbaru East Outer Ring Road Trase IV.	
9.	Pembangunan Jalan Tol Lingkar Barat Pekanbaru (Menghubungkan Tol Pekanbaru-Dumai, Tol Pekanbaru-Padang, dan Tol Pekanbaru-Rengat).	
10.	Peningkatan 6A pada koridor pariwisata Muaratakus-Pekanbaru-Siak (Revitalisasi dan Penataan Waterfront Sungai Siak di Pekanbaru dan Siak Sri Inderapura, Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian Muaratakus, serta UrbanRenewal Kota Tua Pekanbaru dan Kawasan Istana Siak).	
11.	Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang dan Jalan Tol Pekanbaru– Rengat–Jambi.	
12.	Preservasi jalan ruas Pekanbaru–Teluk Kuantan.	

Sumber: RPJMN 2025-2029

3.3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi dengan Pendekatan Spasial Provinsi Riau di Kota Pekanbaru

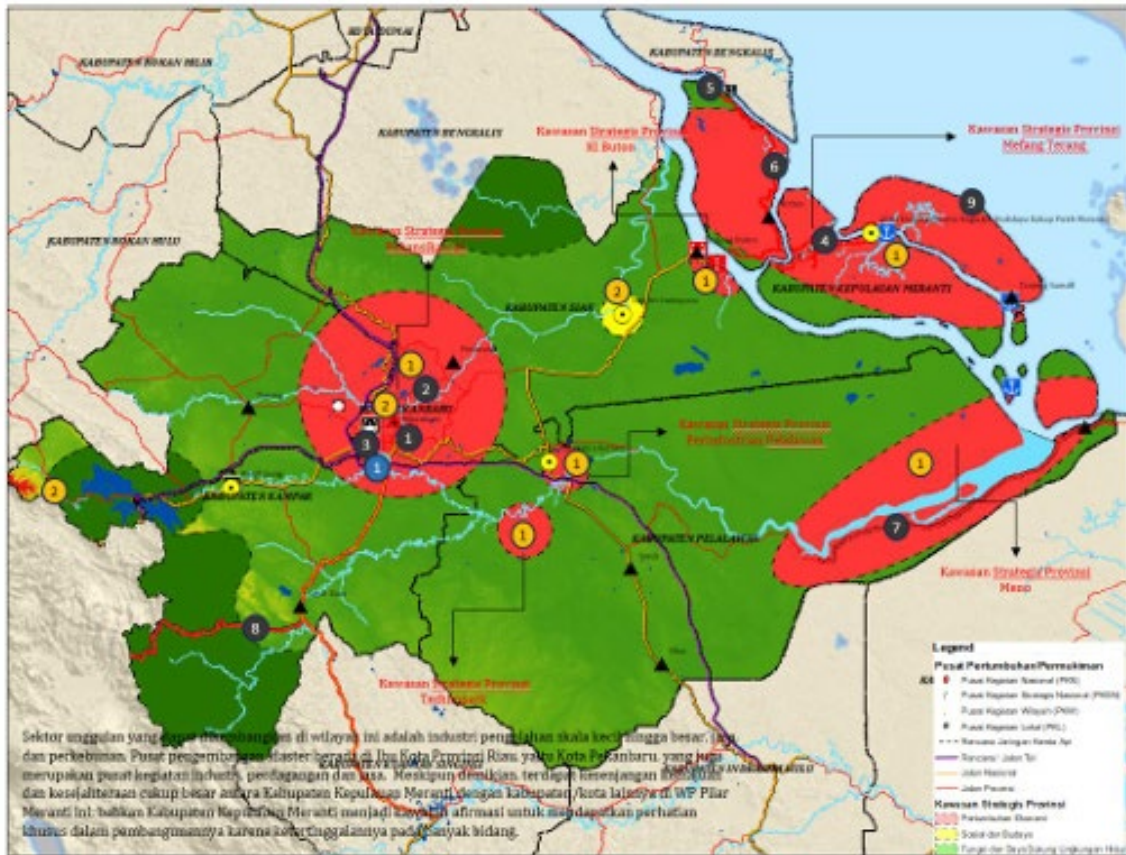
Arah pembangunan kewilayahan difokuskan pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan air baku, pengelolaan lingkungan, pengembangan ekonomi, dan pengembangan kawasan strategi provinsi. Pengembangan kewilayahan meliputi Bernilai, Pilar Meranti, dan Gasing sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2025-2029

Gambar III.3. Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Riau

Kota Pekanbaru merupakan bagian integral dari Wilayah Pengembangan (WP) Pilar Meranti yang ditetapkan sebagai kawasan strategis dalam arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029. WP Pilar Meranti berfokus pada pengembangan pusat perdagangan dan jasa, agrobisnis, serta agroindustri berbasis inovasi, teknologi, dan prinsip keberlanjutan. Dalam struktur wilayah, Kota Pekanbaru berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama, tetapi juga sebagai penggerak konektivitas dan integrasi wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak, dan Kepulauan Meranti. Dengan peran strategis ini, Kota Pekanbaru difungsikan sebagai kawasan metropolitan Provinsi Riau yang menjadi pusat pengembangan klaster industri, jasa, dan perdagangan. Keberadaan Kota Pekanbaru mendukung pertumbuhan sektor unggulan seperti industri pengolahan skala kecil hingga besar dan komoditas perkebunan yang tersebar di wilayah hinterland.



Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2025-2029

Gambar III.4. Peta Wilayah Pengembangan Kampar, Pekanbaru, Pelalawan, Siak, dan Kepulauan Meranti (WP Pilar MERANTI)

1. Kebijakan untuk Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi:
 - a. Pengembangan Kawasan Perkotaan Pekanbaru
 - Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Kawasan Perkotaan Pekanbaru melalui pembangunan BRT
 - Pembangunan Jembatan Siak V dan Pekanbaru East Outer Ring Road Trase IV
 - Pembangunan Jalan Tol Lingkar Barat Pekanbaru (Menghubungkan Tol Pekanbaru-Dumai, Tol Pekanbaru Padang, dan Tol Pekanbaru-Rengat)
 - Pembangunan fly over Simpang Garuda Sakti – Panam dan Peningkatan pelebaran Jalan Kubang-Garuda Sakti Pekanbaru
 - b. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Kawasan Perkotaan Pekanbaru melalui pembangunan BRT
 - c. Pembangunan Jembatan Siak V dan Pekanbaru East Outer Ring Road Trase IV
 - d. Pembangunan Jalan Tol Lingkar Barat Pekanbaru (Menghubungkan Tol Pekanbaru-Dumai, Tol Pekanbaru Padang, dan Tol Pekanbaru-Rengat)

- e. Pembangunan fly over Simpang Garuda Sakti – Panam dan Peningkatan pelebaran Jalan Kubang-Garuda Sakti Pekanbaru
- f. Pengendalian banjir kota Pekanbaru
- g. Persiapan pembangunan Bandara Udara baru
- h. Penyiapan jalur kereta barang penunjang industri dan perekonomian masyarakat
- i. Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah
2. Kebijakan untuk Pemenuhan kebutuhan air baku melalui:
 - b. Pengembangan SPAM Regional Pekanbaru-Kampar
3. Kebijakan Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan TPST Regional Pekanbaru-Kampar-Pelalawan
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
4. Kebijakan untuk pengembangan ekonomi di wilayah ini diarahkan untuk:
 - a. Pengembangan industri hilir pertanian pada skala kecil hingga besar yang berbasis inovasi dan teknologi berkelanjutan Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan daya saing pelaku usaha lokal
 - b. Pengembangan pariwisata terintegrasi pada koridor pariwisata
 - c. Muaratakus-Pekanbaru-Siak (Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian Muaratakus)
 - d. Pengembangan Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru adalah Kawasan Perkotaan Pekansikawan

3.3.2.3. Arah Kebijakan Wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan RTRW Pekanbaru 2020-2040

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru 2020-2040 luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 605,94 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) sebesar 1.278,72 Ha, Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) sebesar 1.750,64 Ha, Kawasan Pertanian sebesar 9.047,19Ha yang terdiri dari Kawasan Tanaman Pangan sebesar 324,57 Ha, Kawasan Holtikultura sebesar 1.062,13Ha dan Kawasan Perkebunan sebesar 7.654,49 Ha. Sedangkan Kawasan Pertambangan dan Energi: Kawasan Pembangkit Listrik sebesar 70,80 Ha, Kawasan Perikanan sebesar 350,88 Ha, Kawasan Peruntukan Industri sebesar 2.931,83 Ha, Kawasan Pariwisata sebesar 2.004,00 Ha, Kawasan Perumahan sebesar 27,904,15 Ha, Kawasan Perdagangan dan Jasa sebesar 8.639,53 Ha, Kawasan Perkantoran sebesar 1.130,46 Ha, Kawasan Peribadatan sebesar 15,54 Ha, Kawasan Pendidikan sebesar 676,02 Ha, Kawasan Kesehatan sebesar 41,28 Ha, Kawasan Olahraga sebesar 109,54 Ha, dan Kawasan Kawasan Transportasi sebesar 307,87 Ha. Berikut adalah pengembangan

Kota Pekanbaru berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru 2020-2040 adalah sebagai berikut:

Tabel III.8. Pola Ruang Wilayah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Konsentrasi Kawasan
1	Kecamatan Bina Widya	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Kawasan Kesehatan Kawasan Olah Raga
2	Kecamatan Bukit Raya	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Hutan Produksi Kawasan Perkantoran Kawasan Kesehatan
3	Kecamatan Kulim	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Kawasan Perkebunan Kawasan Perikanan Kawasan Olah Raga Kawasan Transfortasi
4	Kecamatan Lima Puluh	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Kawasan Perkantoran Kawasan Kesehatan Kawasan Transfortasi
5	Kecamatan Marpoyan Damai	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Kesehatan Kawasan Transfortasi
6	Kecamatan Payung Sekaki	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Kawasan Hutan Produksi Kawasan Tanaman Pangan Kawasan Holtikultura Kawasan Perkantoran Kawasan Transfortasi
7	Kecamatan Pekanbaru Kota	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Kawasan Peribadatan Kawasan Kesehatan Kawasan Perkantoran
8	Kecamatan Rumbai	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Kawasan Hutan Produksi Kawasan Tanaman Pangan Kawasan Holtikultura Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Pariwisata Kawasan Perkantoran Kawasan Olah Raga
9	Kecamatan Rumbai Barat	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Hutan Produksi

No	Kecamatan	Kosentrasi Kawasan
		Kawasan Holtikultura Kawasan Perkebunan Kawasan Perikanan Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Pariwisata Kawasan Perkantoran
10	Kecamatan Rumbai Timur	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Hutan Produksi Kawasan Tanaman Pangan Kawasan Holtikultura Kawasan Perkebunan Kawasan Perikanan Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Pariwisata Kawasan Perkantoran
11	Kecamatan Sail	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Kawasan Perkantoran Kawasan Kesehatan Kawasan Olah Raga
12	Kecamatan Senapelan	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Kawasan Kesehatan
13	Kecamatan Sukajadi	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Kawasan Perkantoran Kawasan Kesehatan
14	Kecamatan Tenayan Raya	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Hutan Produksi Kawasan Perkebunan Kawasan Pembangkit Listrik Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Pariwisata Kawasan Perkantoran
15	Kecamatan Tuah Madani	Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pendidikan Hutan Produksi Kawasan Kesehatan

Sumber: RTRW Kota Pekanbaru 2020-2040

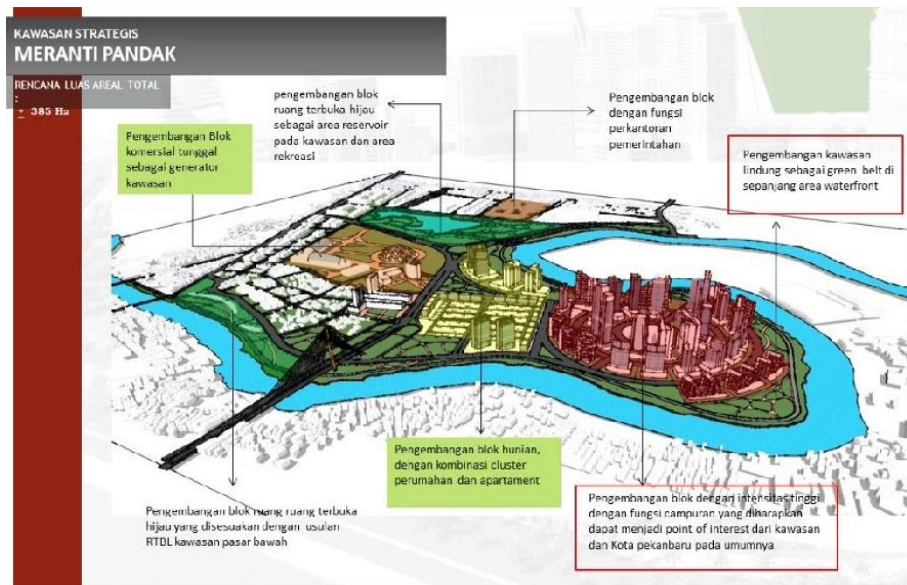
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040, maka kawasan strategis di kota Pekanbaru ditetapkan sebagai berikut:

A. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1. Kawasan Meranti Pandak

Kawasan Meranti Pandak dengan tema pusat bisnis kota. Kawasan ini memiliki lokasi yang strategis karena berada tepat di seberang kawasan perdagangan Pasar Pusat dan akan terhubung dengan adanya Jembatan Siak IV. Pemerintah Kota

Pekanbaru dalam rangka meningkatkan pembangunan dan nilai ekonomi wilayah sekitar Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir (Kecamatan Rumbai Barat dan Rumbai Timur) telah menyusun strategi pengembangan wilayah dengan menyusun penataan blok pada wilayah Kelurahan Meranti Pandak.



Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

Gambar III.5. Peta Kawasan Meranti Pandak

2. Kawasan Bandar Raya Payung Sekaki

Kawasan ini berada di Kecamatan Payung Sekaki. Kecamatan Payung Sekaki memiliki arahan sebagai peruntukkan Kawasan Pergudangan Terbatas, Kawasan Olahraga, Kawasan Terminal, Kawasan Perdagangan, dan Jasa. Kawasan ini memiliki pusat terminal bus lintas kota. Selain itu, juga sudah ada beberapa pergudangan yang beroperasi. Kawasan Payung Sekaki juga merupakan titik pertemuan antara jalan-jalan besar di Kota Pekanbaru, salah satunya adalah Jalan Lintas Sumatera. Kawasan Superblok ini sudah terdapat Stadion Utama Riau yang telah beroperasi. Stadion ini juga terhubung dengan Universitas Riau (UNRI). Superblok Payung Sekaki direncanakan untuk didominasi oleh Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang jalannya. Kawasan ini juga memiliki zona untuk pendidikan tinggi sehingga ada potensi keramaian. Selain itu, juga terdapat kawasan untuk perkantoran dan permukiman.



Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

Gambar III.6. Peta Kawasan Bandar Raya Payung Sekaki

3. Kawasan Komersial Hijau Setia Maharaja

Kawasan Strategis Setia Maharaja merupakan kawasan yang terdapat Lapangan Purna MTQ Pekanbaru. Kawasan ini berada di Kecamatan Bukit Raya, yang diarahkan sebagai tempat Kawasan Permukiman, Kawasan Perkantoran, Kawasan Perdagangan dan Jasa. Kawasan ini meliputi blok Jl. Jenderal Sudirman - Jl.Dt. Setia Maharaja, Jl. Citra/Labersa, Jl. Unggas seluas kurang lebih 1.000 Ha dengan tema kawasan adalah untuk menampung kegiatan komersial yang dilengkapi dengan taman kota. Kawasan ini direncanakan dapat menjadi tempat untuk berinvestasi untuk kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa. Kawasan ini juga diperuntukkan untuk tempat hunian, sehingga adanya potensi permintaan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan kawasan Dt Setia Maharaja akan di wujudkan sebagai pusat perdagangan dan jasa serta perkantoran dan super blok. Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat menjadi pusat bisnis terkemuka di Kota Pekanbaru. Jika ditinjau dari lokasinya, kawasan ini berada di simpul jalan yang memiliki kegiatan ekonomi yang kuat, yaitu pertemuan Jalan Arifin Ahmad dan Jalan Jendral Sudirman, maka dari itu kawasan strategis ini merupakan kawasan yang menjanjikan sebagai tempat untuk berinvestasi.



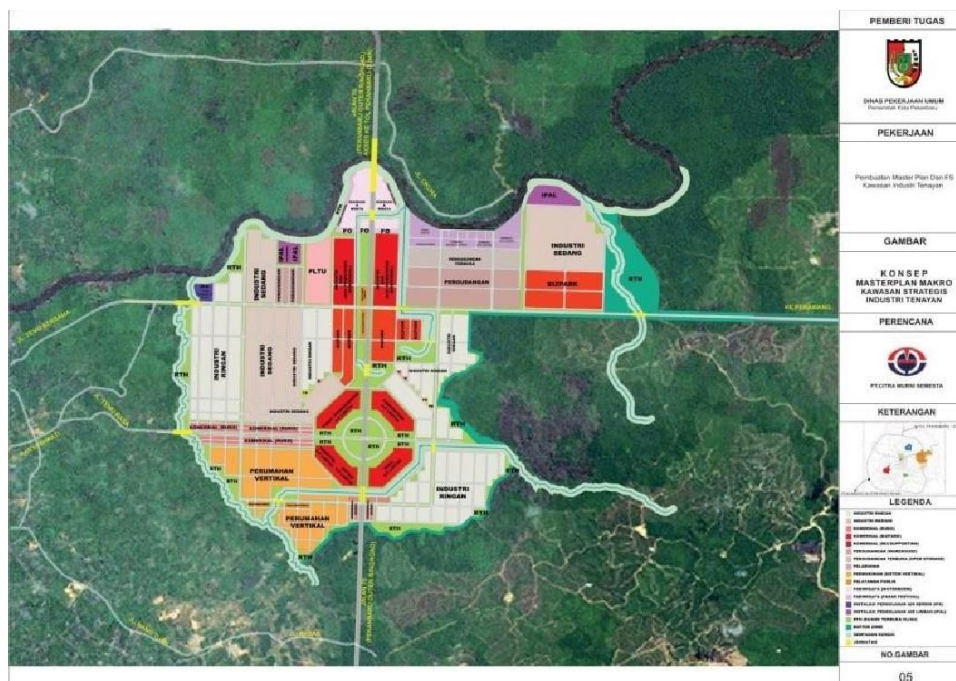
Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

Gambar III.7. Peta Kawasan Komersial Hijau (Setia Maharaja)

4. Kawasan Perkantoran dan Bisnis

Pengembangan kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru salah satunya berfungsi sebagai pemerataan kegiatan pembangunan. Penetapan Kawasan perkantoran pemerintahan di Kecamatan Tenaya Raya juga memiliki filosofis tersebut. Sehingga kawasan Kecamatan Tenayan Raya dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Untuk pengembangan kawasan tersebut tidak hanya untuk perkantoran pemerintahan namun juga untuk kawasan perkantoran secara umum serta menjadi pusat perdagangan dan jasa dan dikembangkannya superblock di kawasan tersebut.

Dalam rangka memberikan ruang bagi pengembangan industri di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota telah mempersiapkan lahan seluas 1.550 Ha, di Kawasan Tenayan Raya yang diperuntukkan sebagai kawasan industri yang disebut dengan Kawasan Industri Tenayan Kota Pekanbaru. Kawasan Industri Tenayan Kota Pekanbaru menjadi bagian pengembangan kawasan industri strategis prioritas RPJMN 2020-2024. Keberadaan Kawasan Industri Tenayan telah diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040.



Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

Gambar III.8. Peta Kawasan Industri Tenayan (KIT)

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Pekanbaru menunjuk PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pekanbaru sebagai pengelola Kawasan Industri Tenayan. Kawasan Industri ini diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar Rp. 28 Triliun, dan berpotensi menyerap 155.000 tenaga kerja, dengan prediksi penerimaan Negara sebesar Rp.14,5 triliun per tahun. Keberadaan Kawasan Industri tenayan ke depan sekaligus sebagai peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat, dengan munculnya kawasan perkotaan baru berikut dibarengi dengan munculnya lapangan pekerjaan baru.

Untuk menunjang operasional Kawasan Industri Tenayan, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memulai tahap awal pembangunan Jalan Lingkar Kota sepanjang 28,80 Km, yang terdiri dari segmen :

- Pintu Tol Pekanbaru – Dumai menuju Rencana Jembatan Siak V sepanjang 12,90 Km;
- Rencana Jembatan Siak V – Jalan Badak, sepanjang 7,80 Km;
- Jalan Badak – Jalan Lintas Timur, sepanjang 3,60 Km;
- Jalan lintas Timur – Batas Kabupaten Kampar, sepanjang 4,50 Km.

Progres sampai dengan saat ini terdiri dari pembebasan lahan (70%) dan pembukaan badan jalan, serta pada beberapa lokasi telah dilaksanakan pembangunan konstruksi perkerasan jalan. Keberadaan Jalan Lingkar ini akan berfungsi untuk menghubungkan Kawasan Industri Tenayan dengan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai (sudah beroperasi) dan dengan Jalan Tol Pekanbaru – Jambi yang saat ini sedang tahap pembebasan lahan. Disamping itu, juga berfungsi untuk pengembangan Kota Pekanbaru di masa mendatang.

B. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan Kota Lama Senapelan, Meliputi Kawasan dengan batasan wilayah Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Riau, Jl. Panglima Undan, Sungai Siak. Sub Tema Kawasan kota lama lini meliputi pengembangan sektor pariwisata, ekonomi dan budaya, diantaranya:

1. Kampung Bandar dengan tema perlindungan sejarah dan wisata religi. Kampung Bandar dengan Mesjid Raya Pekanbaru sebagai titik utama (centralpoint) juga merupakan kawasan cagar budaya karena merupakan bagian dalam perjalanan awal terbentuknya Kota Pekanbaru.
2. Kampung Dalam dengan tema wisata belanja dan budaya.

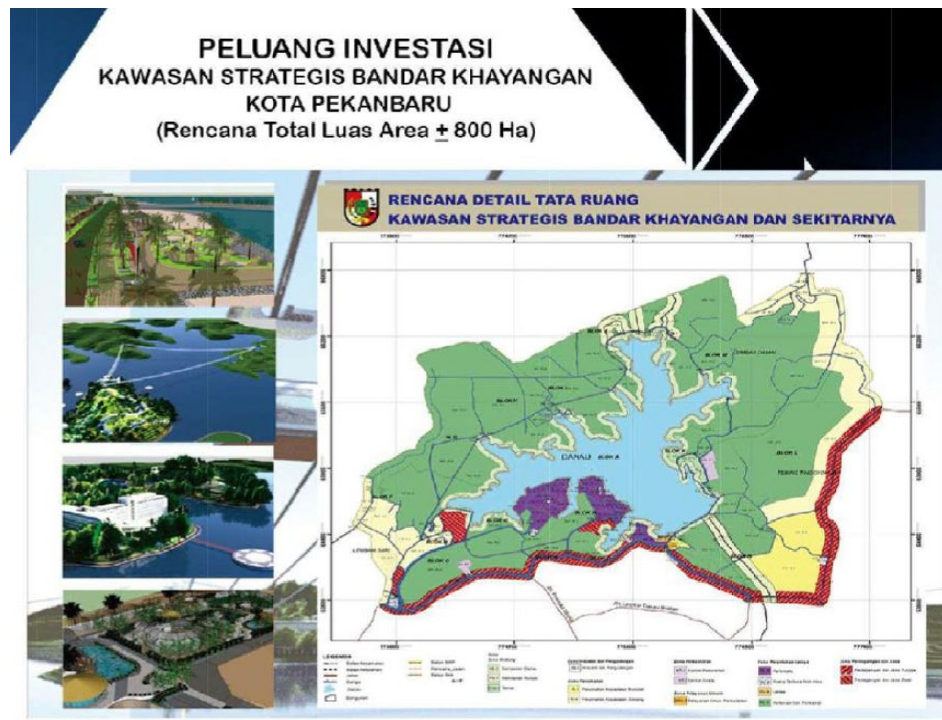
Bersebelahan dengan sub kawasan Kampung Bandar, Kampung Dalam merupakan sub kawasan yang memiliki hubungan sejarah dengan Mesjid Raya Pekanbaru. Keberadaan Pasar Wisata Pasar Bawah menjadi titik utama kawasan mengusung sejarah sebagai salah satu pasar barang-barang impor dengan harga “miring”. Saat ini pasar tersebut telah mengalami transformasi bentuk menjadi lebih modern dan menyediakan barang-barang dari dalam dan luar negeri (negeri jiran).

C. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Sekitar Danau Bandar Khayangan, Danau Bandar Khayangan yang terletak di Kecamatan Rumbai Timur berada di sebuah tanjung pada sebuah danau yang dibuat dengan membendung aliran air. Danau Bandar Khayangan dijadikan ikon unggulan wisata di Kota Pekanbaru sebagai sebuah kawasan untuk berwisata bagi penduduk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Konsep dari Kawasan Wisata Bandar Khayangan adalah Taman hiburan / kawasan untuk semua orang. Luas area Lahan Danau Bandar Khayangan sebesar 800 hektar dengan fasilitas yang tersedia di Kawasan Danau Bandar Khayangan adalah sebagai berikut:

- a. Hotel, cafe serta pusat souvenir
- b. Zona taman air, Zona Jet coaster, Zona rumah kaca, Zona taman bermain, Zona Bungalow, Zona Gokart, Zona restoran dan roda putar, Zona pemancingan, Zona pemancingan, Zona petualangan/outbond, Zona piknik dan Zona pusat jajan.

Kawasan Danau Buatan Bandar Khayangan meliputi kawasan danau dan sekitarnya dengan radius kurang lebih 500 m ke arah darat. Kawasan ini termasuk kawasan strategis dengan fungsi ekologi dengan tujuan utama mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan danau. Selain itu, pemanfaatan yang diperkenankan pada kawasan ini adalah kegiatan pariwisata dan permukiman terbatas yang diatur lebih lanjut dalam rencana rinci/detail serta peraturan zonasi.



Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

Gambar III.9. Peluang Investasi Kawasan Bandar Khayangan

3.4. Program Prioritas Kota Pekanbaru

Program Prioritas merupakan instrumen strategis yang disusun dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, melalui proses cascading kinerja dari level visi, misi, tujuan, hingga sasaran ke dalam bentuk program dan kegiatan operasional. Sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program prioritas menjadi alat operasional utama yang menjamin konsistensi antara perencanaan strategis dan implementasi anggaran. Dengan demikian, program ini tidak hanya mencerminkan fokus pembangunan yang strategis, tetapi juga mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral dalam satu kerangka pembangunan yang terpadu dan berorientasi pada hasil. Setiap program dirancang untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja utama di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Untuk itu, penetapan program prioritas menjadi fondasi penting dalam penguatan arah kebijakan pembangunan Kota Pekanbaru yang berorientasi pada pencapaian visi **“Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera.”**

Tabel III.9. Merumuskan Program Prioritas Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera					
1. Menjadikan Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Jati Diri Kota Pekanbaru	1.1 Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang adaptif	1.1.1 Meningkatnya pemahaman, pelestarian, dan pemanfaatan Budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari		-Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) -Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
			Meningkatnya pemahaman dan pengamalan budaya melayu	1.1.1.1 Indeks Ketahanan Sosial Budaya 1.1.1.2 Nilai Warisan Budaya 1.1.1.3 Nilai Ekspresi Budaya	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase warisan budaya yang dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Budaya Tak Benda yang dilestarikan	
			Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		1.1.2 Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk mewujudkan kohesivitas sosial yang kuat dan berkelanjutan	1.1.2.1 Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) 1.1.2.2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	- Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Program perlindungan perempuan
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang komprehensif	Program Peningkatan Kualitas Keluarga



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase kelurahan layak anak yang terbentuk	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) 2. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Program Pengendalian Penduduk
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase penanganan konflik di tengah masyarakat	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia	2.1. Meningkatkan Kualitas, Aksesibilitas			Indeks Pembangunan Manusia	

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM (6)
Unggul, Berdaya Saing, Berakhlak, dan Berbudaya	dan Pemerataan layanan Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu	2.1.1. Terwujudnya Kesehatan untuk semua	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2.1.1.1 Umur Harapan Hidup (Tahun) 2.1.1.2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	-Jumlah Kematian Ibu -Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		2.1.2. Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas yang Merata	Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1.2.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun) 2.1.2.2 Harapan Lama Sekolah (tahun)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2.1.2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	- Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (%) - Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%) - Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidkan	-Indeks Pemerataan Guru -Persentase Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	Program Pembinaan Perpustakaan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang masuk pelatda	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		2.1.3. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Terpenuhinya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, rentan dan disabilitas	2.1.3.1 Indeks Perlindungan Sosial	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	Program Pemberdayaan Sosial

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM (6)
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	-Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif, Bersih, Melayani dan Amanah	3.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transformatif	3.1.1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan digital, akuntabel, berintegritas serta pelayanan publik yang prima		Reformasi Birokrasi	
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan prima	3.1.1.1 Indeks Pelayanan Publik 3.1.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3.1.1.3 Indeks Pemerintah Digital 3.1.1.4 Nilai SAKIP	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase kualitas pengelolaan kepegawaian daerah	Program Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital 2. Persentase kepemilikan kartu identitas anak	Program pendaftaran penduduk
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	- Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan - Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan - Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan - Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perkantoran yang terlayani dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	-Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD -Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Menurunnya terjadinya tindak penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya tata kelola anggaran	-Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD -Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Program Pengelolaan keuangan daerah
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	-Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar -Persentase penurunan silpa	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan Nilai Aset tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	
		3.1.2. Meningkatkan ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	3.1.2.1 Indeks Inovasi Daerah	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase kajian dan rekomendasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan, pengembangan potensi unggulan dan penyelesaian permasalahan daerah	Program Penelitian dan pengembangan Daerah
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase riset dan Inovasi yang difasilitasi	Program Riset dan Inovasi Daerah

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM (6)
4. Meningkatkan Aksesabilitas Infrastruktur Perkotaan dan Konektifitas Transportasi Publik yang Handal, Aman, Nyaman dan Ramah Lingkungan	4.1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi perkotaan serta daya dukung kota yang berorientasi peningkatan kualitas lingkungan			Indeks Pembangunan Infrastruktur	
			4.1.1. Meningkatnya daya dukung kota dalam persediaan infrastruktur yang handal	4.1.1.1 Persentase kesesuaian tata ruang	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Program Penatagunaan Tanah
		4.1.2. Terwujudnya Infrastruktur perkotaan berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	4.1.2.1 Indeks kualitas layanan infrastruktur	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang Memperoleh akses air minum layak	Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Program penataan bangunan gedung
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Kumuh Yang Ditata	Program Kawasan Permukiman
			Terpenuhinya Rumah layak Huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Terdampak Relokasi Program, Pemerintah	Program Pengembangan Perumahan
			Meningkatnya Lingkungan Yang Sehat	Persentase Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dan Aman Yang Didukung PSU		
		4.1.3. Terwujudnya Transportasi publik yang berkualitas, handal dan ramah lingkungan dan terintegrasi	Meningkatnya layanan transportasi darat yang berkualitas	4.1.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Transportasi Publik	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	-Rasio Konektivitas darat -Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	5.1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	
		5.1.1. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	5.1.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	
			Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	-Indeks kualitas air -Indeks kualitas udara	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (kehati)
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5.1.2. Terwujudnya peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penguatan sistem mitigasi dan adaptasi yang efektif dan terintegrasi	Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	5.1.2.1. Indeks Risiko Bencana Daerah 5.1.2.2. Indeks Ketahanan Daerah	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Program Penanganan Bencana
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera melalui Ekonomi yang Adil dan Merata	6.1 Terwujudnya ekonomi inklusif			- PDRB Per Kapita - Pertumbuhan Ekonomi	
		6.1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya ekonomi daerah yang berdaya saing	6.1.1.1 Indeks Daya Saing Daerah	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				6.1.1.2 Kontribusi PDRB Kota (%) 6.1.1.3 Rasio Kewirausahaan Daerah	
			Meningkatnya realisasi pembangunan perindustrian	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan pembangunan industri
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Pertumbuhan wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UMKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Program Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		6.1.2. Terciptanya Lapangan Kerja, Lapangan Usaha dan Peluang Investasi yang Lebih Luas.	Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang investasi	6.1.2.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 6.1.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	
			Meningkatnya produktivitas Tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Program Hubungan Industrial
			Meningkatnya penempatan Tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal
		6.1.3. Terwujudnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin	Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial	6.1.3.1 Tingkat kemiskinan (%) 6.1.3.2 Rasio Gini	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		6.1.4. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6.1.4.1 Indeks ketahanan pangan	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Jumlah kelompok tani aktif	Program Penyuluhan pertanian
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		6.1.5. Terwujudnya stabilitas harga kebutuhan pokok yang berkualitas dan terjangkau	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	6.1.5.1 Tingkat Inflasi (%)	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Meningkatnya pelaksanaan kebijakan perekonomian	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian	Program perekonomian dan pembangunan

Pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah merupakan perwujudan langsung dari implementasi visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang diarahkan untuk merealisasikan program unggulan secara sistematis, terstruktur, dan terukur. Program prioritas disusun sebagai respons terhadap kebutuhan strategis masyarakat, sekaligus sebagai instrumen operasional dalam mewujudkan janji politik kepala daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD. Penyusunan program prioritas dilakukan melalui proses sinkronisasi dan

harmonisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, serta isu-isu strategis daerah, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, potensi sumber daya daerah, dan kesiapan kelembagaan perangkat daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, menghindari tumpang tindih program, serta mendorong pencapaian target pembangunan yang tepat sasaran.

Keterkaitan antara program prioritas dan program unggulan kepala daerah dituangkan secara eksplisit dalam bentuk matriks penyelarasan yang termuat dalam dokumen RPJMD. Matriks tersebut berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, matriks ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program prioritas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban teknokratis, tetapi juga memperkuat integrasi antara arah kebijakan strategis daerah dan harapan masyarakat secara luas dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel III.10. Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1	Pekan Budaya Melayu Se-Dunia	1. Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
2	Revitalisasi Masjid Paripurna	1. Program Penataan Bangunan Gedung	PUPR
		2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	KESRA
3	Bantuan Pendidikan S1 dan S2	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	KESRA
		2. Program Kepegawaian Daerah (Khusus ASN)	BKPSDM
4	Bantuan Pendidikan 1000 Doktor (S3) Baru	1. Program Kesejahteraan Rakyat	KESRA
		2. Program Kepegawaian Daerah (Khusus ASN)	BKPSDM
5	Program 10.000 Hafidz Baru	Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	KESRA
6	Penyediaan Bosda Bagi SD Dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
7	Hibah Revitalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran/MGMP Untuk Guru	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
8	Fasilitas Olahraga Dan Seni Setiap Kecamatan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dispora
9	Naturalisasi Sungai Dan Drainase Bebas Banjir, Penanaman Sejuta Pohon	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
		2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
		3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLHK
10	100 Km Jalan Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	OPD Penanggung Jawab
11	Transportasi Massal Terintegrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
12	Penambahan Gizi Gratis Bagi Anak Pelajar SD Dan SMP	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	Dinas Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan
13	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai 14 Bulan	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
14	Digitalisasi Pengelolaan Parkir	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ; Nb. Pendetailan : pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD ; Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perparkiran	Dishub
15	Penambahan Taman Hijau Kota Dan Kolam Retensi Banjir Setiap Kecamatan	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DLHK Dinas PUPR
16	Modernisasi Pengelolaan Dan Pengolahan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	DLHK
17	Bantuan Biaya Menikah	Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	KESRA
18	Santunan Kematian	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
19	Membangun Pekanbaru Kreatif Hub	1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Disperindag Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20	Penyediaan Pasar Induk Dan Penambahan Pasar Tradisional Modern	Program Peningkatan Distribusi Perdagangan	Disperindag
21	1000 Wirausaha Muda Baru	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Program Pemberdayaan UMKM 3. Program Program Pengembangan UMKM	Dispورا Dinas Koperasi & UMKM
22	Program Pemberdayaan Masyarakat 100 Juta Per RW / Program Pembangunan 100 juta Per RW	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua OPD (khusus pada Sub Bidang Urusan Infrastruktur dan Kewilayahan menggunakan Pendekatan Usulan yang sering disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, yakni indikasi Program kepada OPD Dinas Perkim dan Dishub) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan
23	Pemberian Android Untuk RT & RW	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kecamatan



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah ditetapkan untuk dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga tahun 2030, sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029. Penetapan ini mencerminkan upaya strategis dalam menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah, di mana program tahun 2030 diposisikan sebagai fondasi awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang menjadi tanggung jawab kepala daerah periode selanjutnya, yakni 2030–2034. Dengan demikian, tahun 2030 bukan sekadar penutup periode RPJMD saat ini, melainkan juga menjadi jembatan menuju kesinambungan agenda pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD.

Di sisi lain, program tahun anggaran 2025 tidak dicantumkan dalam RPJMD karena telah menjadi bagian dari dokumen penganggaran resmi, yaitu APBD Tahun Anggaran 2025. Walaupun demikian, pelaksanaan dan kinerja program pada tahun 2025 tetap berada dalam lingkup pertanggungjawaban kepala daerah terpilih periode 2025–2029, sehingga capaian tahun pertama tetap menjadi basis evaluasi awal.

Adapun keseluruhan program Perangkat Daerah yang dicantumkan dalam RPJMD merupakan kumpulan program strategis yang bersumber dari Bab IV Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah, termasuk di dalamnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Penyusunan program-program tersebut harus diselaraskan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial guna memastikan keterpaduan antar program dan pencapaian sasaran pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Adapun indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan Daerah tahun 2025–2030 disajikan pada Tabel IV.1.



Tabel IV.1. Program Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					857.901.829.769,000		883.691.209.504,000		909.480.589.239,000		934.532.086.355,000		944.342.519.210,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					573.883.090.614,000		577.785.368.382,000		582.182.113.832,000		581.502.762.557,000		583.502.762.557,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	573.883.090.614,000	100	577.785.368.382,000	100	582.182.113.832,000	100	581.502.762.557,000	100	583.502.762.557,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					253.504.633.591,000		275.391.735.558,000		296.784.369.843,000		322.515.218.234,000		330.325.651.089,000	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan (Angka)	57,99	64,48	70,97	253.504.633.591,000	71,73	275.391.735.558,000	72,49	296.784.369.843,000	73,25	322.515.218.234,000	74,02	330.325.651.089,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (%)	61,92	65,10	68,29		71,47		74,51		77,55		80,59		1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	99,11	99,21	99,30		99,40		99,50		99,59		99,69		1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					30.514.105.564,000		30.514.105.564,000		30.514.105.564,000		30.514.105.564,000		30.514.105.564,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendididkan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	-	72,39	77,46	30.514.105.564,000	82,88	30.514.105.564,000	88,68	30.514.105.564,000	94,89	30.514.105.564,000	100,00	30.514.105.564,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	-	43,22	44,08		44,96		45,86		46,78		47,72		1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					429.324.601.802,000		451.538.242.514,000		473.751.883.226,000		495.965.523.938,000		518.179.164.650,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					267.473.533.621,000		281.312.854.616,000		293.781.141.544,000		307.684.838.351,000		321.544.416.541,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	267.473.533.621,000	100	281.312.854.616,000	100	293.781.141.544,000	100	307.684.838.351,000	100	321.544.416.541,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					157.547.076.000,000		165.698.703.293,000		173.609.769.838,000		181.480.997.262,000		189.368.504.689,000	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	14	14	13	157.547.076.000,000	11	165.698.703.293,000	10	173.609.769.838,000	9	181.480.997.262,000	7	189.368.504.689,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	14,6	14,4	14,3		14,2		14		13,9		13,8		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.912.285.522,000		2.011.228.893,000		2.107.252.370,000		2.202.792.285,000		2.298.529.804,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	80	80	85	1.912.285.522,000	85	2.011.228.893,000	90	2.107.252.370,000	95	2.202.792.285,000	100	2.298.529.804,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					1.364.592.594,000		1.435.197.842,000		1.503.719.474,000		1.571.896.040,000		1.640.213.616,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	60	60	60	1.364.592.594,000	65	1.435.197.842,000	65	1.503.719.474,000	70	1.571.896.040,000	75	1.640.213.616,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.027.114.065,000		1.080.257.870,000		2.750.000.000,000		3.025.000.000,000		3.327.500.000,000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	60	60	65	1.027.114.065,000	70	1.080.257.870,000	75	2.750.000.000,000	80	3.025.000.000,000	85	3.327.500.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					257.087.735.370,000		282.372.604.966,000		290.470.289.191,000		299.380.443.463,000		312.945.665.196,000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39.825.169.975,000		41.885.760.059,000		43.885.540.555,000		45.875.250.412,000		47.869.075.572,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	39.825.169.975,000	100	41.885.760.059,000	100	43.885.540.555,000	100	45.875.250.412,000	100	47.869.075.572,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					18.425.174.661,000		19.378.509.756,000		20.303.711.204,000		21.224.253.456,000		22.146.699.659,000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	100	100	100	18.425.174.661,000	100	19.378.509.756,000	100	20.303.711.204,000	100	21.224.253.456,000	100	22.146.699.659,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					26.858.996.101,000		33.058.012.457,000		33.616.950.768,000		34.458.467.274,000		39.303.792.575,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum layak (%)	100	100	100	26.858.996.101,000	100	33.058.012.457,000	100	33.616.950.768,000	100	34.458.467.274,000	100	39.303.792.575,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					35.993.758.623,000		37.863.071.635,000		38.071.317.640,000		38.069.450.373,000		40.071.715.830,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	100	100	100	35.993.758.623,000	100	37.863.071.635,000	100	38.071.317.640,000	100	38.069.450.373,000	100	40.071.715.830,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					7.805.343.914,000		8.209.199.422,000		8.601.136.846,000		8.991.100.524,000		9.381.870.760,000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	7.805.343.914,000	100	8.209.199.422,000	100	8.601.136.846,000	100	8.991.100.524,000	100	9.381.870.760,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					18.479.974.135,000		19.436.144.604,000		20.364.097.752,000		21.477.227.432,000		22.212.567.555,000	
Meningkatnya kualitas bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	18.479.974.135,000	100	19.436.144.604,000	100	20.364.097.752,000	100	21.477.227.432,000	100	22.212.567.555,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					106.774.703.794,000		119.465.970.700,000		122.404.741.561,000		125.915.784.145,000		128.444.614.204,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	100	100	100	106.774.703.794,000	100	119.465.970.700,000	100	122.404.741.561,000	100	125.915.784.145,000	100	128.444.614.204,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					529.236.289,000		556.619.450,000		583.194.513,000		609.635.748,000		636.131.670,000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	100	100	100	529.236.289,000	100	556.619.450,000	100	583.194.513,000	100	609.635.748,000	100	636.131.670,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.395.377.878,000		2.519.316.883,000		2.639.598.352,000		2.759.274.099,000		2.879.197.371,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%)	100	100	100	2.395.377.878,000	100	2.519.316.883,000	100	2.639.598.352,000	100	2.759.274.099,000	100	2.879.197.371,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					175.200.000.000,000		176.000.000.000,000		176.800.000.000,000		177.600.000.000,000		178.400.000.000,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.273.572.310,000		18.482.844.734,000		19.365.283.834,000		20.243.279.083,000		21.123.090.284,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	15.273.572.310,000	100	18.482.844.734,000	100	19.365.283.834,000	100	20.243.279.083,000	100	21.123.090.284,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					3.871.374.226,000		5.993.314.050,000		6.279.456.942,000		6.564.158.856,000		6.849.449.617,000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Terdampak Relokasi Program, Pemerintah (%)	100	100	100	3.871.374.226,000	100	5.993.314.050,000	100	6.279.456.942,000	100	6.564.158.856,000	100	6.849.449.617,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					22.528.139.837,000		18.180.953.821,000		20.300.000.000,000		20.700.000.000,000		20.900.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Kumuh Yang Ditata (%)	100	100	100	22.528.139.837,000	100	18.180.953.821,000	100	20.300.000.000,000	100	20.700.000.000,000	100	20.900.000.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.478.244.000,000		1.650.000.000,000		2.226.143.994,000		2.050.000.000,000		2.050.000.000,000	
Meningkatnya kualitas permukiman di luar kawasan kumuh yang ditangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Diluar Pemukiman Kumuh Yang Ditangani (%)	100	100	100	1.478.244.000,000	100	1.650.000.000,000	100	2.226.143.994,000	100	2.050.000.000,000	100	2.050.000.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					132.008.234.177,000		131.648.408.400,000		128.529.115.230,000		127.942.562.061,000		127.377.460.099,000	
Meningkatnya Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung PSU	Persentase Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung PSU (%)	18	21	24	132.008.234.177,000	27	131.648.408.400,000	30	128.529.115.230,000	33	127.942.562.061,000	36	127.377.460.099,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					40.435.450,000		44.478.995,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	100	100	40.435.450,000	100	44.478.995,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLUNDUNGAN MASYARAKAT					73.906.140.220,000		80.665.622.067,000		82.769.952.116,000		84.874.282.165,000		86.978.612.214,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					65.374.262.221,000		71.400.731.407,000		72.596.988.543,000		76.257.966.780,000		78.261.347.350,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	27.407.377.801,000	100	28.891.390.067,000	100	30.295.402.333,000	100	31.603.600.000,000	100	32.604.200.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	22.707.868.536,000	100	28.454.341.340,000	100	28.033.805.640,000	100	30.033.805.640,000	100	30.783.805.640,000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	92	95	95	15.259.015.884,000	95	14.055.000.000,000	95	14.267.780.570,000	96	14.620.561.140,000	96	14.873.341.710,000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.274.232.000,000		1.274.232.000,000		1.354.232.000,000		1.530.046.599,000		2.013.458.865,000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	1.274.232.000,000	100	1.274.232.000,000	100	1.354.232.000,000	100	1.530.046.599,000	100	2.013.458.865,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.888.203.546,000		3.445.000.000,000		3.585.000.000,000		3.585.000.000,000		3.685.000.000,000	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	1.888.203.546,000	100	3.445.000.000,000	100	3.585.000.000,000	100	3.585.000.000,000	100	3.685.000.000,000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					5.369.442.453,000		4.545.658.660,000		5.233.731.573,000		3.501.268.786,000		3.018.805.999,000	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	5.369.442.453,000	100	4.545.658.660,000	100	5.233.731.573,000	100	3.501.268.786,000	100	3.018.805.999,000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					18.299.523.852,000		19.246.357.662,000		20.193.191.471,000		21.140.025.280,000		22.086.859.089,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.673.158.044,000		9.538.299.947,000		10.758.581.580,000		11.043.873.370,000		11.451.307.179,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	8.673.158.044,000	100	9.538.299.947,000	100	10.758.581.580,000	100	11.043.873.370,000	100	11.451.307.179,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.089.349.814,000		1.152.665.322,000		1.203.556.342,000		1.298.556.342,000		1.373.956.342,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	84	85	86	1.089.349.814,000	87	1.152.665.322,000	87	1.203.556.342,000	88	1.298.556.342,000	88	1.373.956.342,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0,000		0,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	0,000	100	0,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					872.515.423,000		1.359.454.602,000		1.612.015.758,000		2.044.557.777,000		2.296.557.777,000	
meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dasar (%)	100	100	100	872.515.423,000	100	1.359.454.602,000	100	1.612.015.758,000	100	2.044.557.777,000	100	2.296.557.777,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					6.596.242.127,000		5.766.578.950,000		5.338.578.950,000		5.393.578.950,000		5.598.578.950,000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	88	89	90	6.596.242.127,000	90	5.766.578.950,000	90	5.338.578.950,000	90	5.393.578.950,000	90	5.598.578.950,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.068.258.444,000		1.429.358.841,000		1.230.458.841,000		1.309.458.841,000		1.316.458.841,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	1.068.258.444,000	100	1.429.358.841,000	100	1.230.458.841,000	100	1.309.458.841,000	100	1.316.458.841,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					15.117.059.650,000		15.200.000.000,000		15.282.940.350,000		15.365.880.700,000		15.448.821.050,000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.384.975.723,000		9.387.916.073,000		9.386.424.305,000		9.174.538.853,000		9.272.119.336,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	9.384.975.723,000	100	9.387.916.073,000	100	9.386.424.305,000	100	9.174.538.853,000	100	9.272.119.336,000	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					117.008.000,000		137.008.000,000		143.858.400,000		151.051.320,000		158.603.886,000	
Persentase Kegiatan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	-	100	100	117.008.000,000	100	137.008.000,000	100	143.858.400,000	100	151.051.320,000	100	158.603.886,000	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					792.044.500,000		832.044.500,000		873.646.725,000		917.329.061,000		963.195.515,000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	4,00	4,00	4,00	792.044.500,000	4,20	832.044.500,000	4,25	873.646.725,000	4,30	917.329.061,000	4,35	963.195.515,000	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.420.958.442,000		1.440.958.442,000		1.459.921.560,000		1.532.917.638,000		1.609.563.519,000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	55,48	48,00	56,00	1.420.958.442,000	58,00	1.440.958.442,000	60,00	1.459.921.560,000	62,00	1.532.917.638,000	64,00	1.609.563.519,000	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					3.402.072.985,000		3.402.072.985,000		3.419.089.360,000		3.590.043.828,000		3.445.338.794,000	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	-	3.000	4.000	3.402.072.985,000	5.500	3.402.072.985,000	7.500	3.419.089.360,000	10.000	3.590.043.828,000	13.000	3.445.338.794,000	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					11.390.564.813,000		12.178.408.363,000		12.924.312.932,000		13.720.217.502,000		14.348.122.071,000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.333.057.223,000		9.515.408.363,000		9.836.312.932,000		10.107.217.502,000		10.388.122.071,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	9.333.057.223,000	100	9.515.408.363,000	100	9.836.312.932,000	100	10.107.217.502,000	100	10.388.122.071,000	2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					288.596.400,000		345.000.000,000		505.000.000,000		685.000.000,000		720.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	21,64	21,64	22,50	288.596.400,000	23,80	345.000.000,000	26,18	505.000.000,000	28,80	685.000.000,000	31,68	720.000.000,000	2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	53,50	0	54,50		54,99		56,09		57,22		58,36		2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					409.612.277,000		565.000.000,000		600.000.000,000		660.000.000,000		750.000.000,000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	409.612.277,000	100	565.000.000,000	100	600.000.000,000	100	660.000.000,000	100	750.000.000,000	2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					211.076.220,000		365.000.000,000		435.000.000,000		495.000.000,000		650.000.000,000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang komprehensif (%)	5	5	5	211.076.220,000	10	365.000.000,000	15	435.000.000,000	20	495.000.000,000	25	650.000.000,000	2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					60.024.528,000		65.000.000,000		65.000.000,000		90.000.000,000		125.000.000,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan data terpilah gender dan anak (%)	50	50	50	60.024.528,000	75	65.000.000,000	75	65.000.000,000	75	90.000.000,000	100	125.000.000,000	2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					373.307.870,000		520.000.000,000		630.000.000,000		743.000.000,000		775.000.000,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase kelurahan layak anak yang terbentuk (%)	19	19	19	373.307.870,000	38	520.000.000,000	57	630.000.000,000	77	743.000.000,000	100	775.000.000,000	2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					714.890.295,000		803.000.000,000		853.000.000,000		940.000.000,000		940.000.000,000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	714.890.295,000	100	803.000.000,000	100	853.000.000,000	100	940.000.000,000	100	940.000.000,000	2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					10.315.885.968,000		11.632.258.611,000		12.948.631.255,000		15.265.003.898,000		17.581.376.542,000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.436.783.506,000		8.600.000.000,000		9.432.416.825,000		10.698.789.468,000		11.990.162.112,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	8.436.783.506,000	100	8.600.000.000,000	100	9.432.416.825,000	100	10.698.789.468,000	100	11.990.162.112,000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					79.388.650,000		204.969.410,000		265.000.000,000		430.000.000,000		550.000.000,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	46,33	80	80	79.388.650,000	85	204.969.410,000	90	265.000.000,000	95	430.000.000,000	100	550.000.000,000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.287.827.171,000		2.109.619.675,000		2.351.214.430,000		2.856.214.430,000		3.456.214.430,000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	82,66	82,66	83,56	1.287.827.171,000	84,01	2.109.619.675,000	84,47	2.351.214.430,000	84,97	2.856.214.430,000	85,40	3.456.214.430,000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					353.670.920,000		487.669.526,000		670.000.000,000		825.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2,41	2,41	2,31	353.670.920,000	2,21	487.669.526,000	2,11	670.000.000,000	2,01	825.000.000,000	1,91	1.000.000.000,000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					158.215.721,000		230.000.000,000		230.000.000,000		455.000.000,000		585.000.000,000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	80	80	85	158.215.721,000	87,5	230.000.000,000	90	230.000.000,000	95	455.000.000,000	100	585.000.000,000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					13.941.420.358,000		15.304.106.547,000		16.666.792.737,000		18.029.478.926,000		19.392.165.116,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.895.121.383,000		6.484.633.521,000		9.572.615.190,000		10.250.820.599,000		10.831.337.639,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	5.895.121.383,000	100	6.484.633.521,000	100	9.572.615.190,000	100	10.250.820.599,000	100	10.831.337.639,000	2.10.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					2.229.141.860,000		2.452.056.046,000		1.885.058.555,000		2.040.116.006,000		2.148.644.403,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	50	55	100	2.229.141.860,000	100	2.452.056.046,000	100	1.885.058.555,000	100	2.040.116.006,000	100	2.148.644.403,000	2.10.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					0,000		350.000.000,000		385.000.000,000		423.500.000,000		465.850.000,000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	0	0	100	0,000	100	350.000.000,000	100	385.000.000,000	100	423.500.000,000	100	465.850.000,000	2.10.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					5.817.157.115,000		6.017.416.980,000		4.824.118.992,000		5.315.042.321,000		5.946.333.074,000	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi penegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	90,07	98,12	100	5.817.157.115,000	100	6.017.416.980,000	100	4.824.118.992,000	100	5.315.042.321,000	100	5.946.333.074,000	2.10.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					115.636.402.495,000		126.783.718.483,000		137.931.034.472,000		149.078.350.460,000		160.225.666.449,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.675.292.465,000		29.690.945.585,000		32.690.945.585,000		32.690.945.585,000		33.838.261.573,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	80	82	84	27.675.292.465,000	86	29.690.945.585,000	88	32.690.945.585,000	90	32.690.945.585,000	92	33.838.261.573,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					1.127.686.080,000		1.369.157.410,000		847.927.770,000		847.927.770,000		847.927.770,000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	80	81	82	1.127.686.080,000	83	1.369.157.410,000	84	847.927.770,000	85	847.927.770,000	86	847.927.770,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					6.809.113.450,000		6.423.091.240,000		6.413.415.280,000		6.408.922.870,000		7.215.634.910,000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	80	81	82	6.809.113.450,000	83	6.423.091.240,000	84	6.413.415.280,000	85	6.408.922.870,000	86	7.215.634.910,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80	82	84		86		88		90		92		2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					14.433.832.580,000		36.891.393.700,000		36.891.393.700,000		36.891.393.700,000		36.891.393.700,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	80	81	82	14.433.832.580,000	83	36.891.393.700,000	84	36.891.393.700,000	85	36.891.393.700,000	86	36.891.393.700,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					452.242.600,000		529.901.700,000		529.901.700,000		529.901.700,000		529.901.700,000	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					2.645.604.810,000		1.416.651.580,000		1.416.651.580,000		1.416.651.580,000		1.416.651.580,000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	80	81	82	2.645.604.810,000	83	1.416.651.580,000	84	1.416.651.580,000	85	1.416.651.580,000	86	1.416.651.580,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					296.364.470,000		102.665.040,000		102.665.040,000		102.665.040,000		102.665.040,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	80	81	82	296.364.470,000	83	102.665.040,000	84	102.665.040,000	85	102.665.040,000	86	102.665.040,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					245.795.290,000		252.648.060,000		252.648.060,000		252.648.060,000		252.648.060,000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	80	81	82	245.795.290,000	83	252.648.060,000	84	252.648.060,000	85	252.648.060,000	86	252.648.060,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					61.950.470.750,000		50.107.264.168,000		58.785.485.757,000		69.937.294.155,000		79.130.582.116,000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	39,70	39,70	41,70	61.950.470.750,000	43,70	50.107.264.168,000	45,70	58.785.485.757,000	47,70	69.937.294.155,000	49,70	79.130.582.116,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					23.010.478.189,000		24.201.061.009,000		25.391.643.829,000		26.582.226.649,000		27.772.809.469,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.802.502.549,000		22.621.335.969,000		23.441.768.789,000		24.285.219.109,000		25.090.608.569,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	95,78	95,78	100	21.802.502.549,000	100	22.621.335.969,000	100	23.441.768.789,000	100	24.285.219.109,000	100	25.090.608.569,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					270.000.600,000		285.750.000,000		304.150.000,000		323.207.500,000		419.075.860,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	25,00	30,00	32,00	270.000.600,000	34,00	285.750.000,000	36,00	304.150.000,000	38,00	323.207.500,000	40,00	419.075.860,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	61,06	62,00	62,50		62,75		62,85		63,00		63,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					335.000.000,000		365.000.000,000		390.000.000,000		415.000.000,000		440.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100,00	100,00	100,00	335.000.000,000	100,00	365.000.000,000	100,00	390.000.000,000	100,00	415.000.000,000	100,00	440.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					527.975.040,000		846.475.040,000		1.164.975.040,000		1.428.975.040,000		1.693.125.040,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100,00	100,00	100,00	527.975.040,000	100,00	846.475.040,000	100,00	1.164.975.040,000	100,00	1.428.975.040,000	100,00	1.693.125.040,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					75.000.000,000		82.500.000,000		90.750.000,000		129.825.000,000		130.000.000,000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100,00	100,00	100,00	75.000.000,000	100,00	82.500.000,000	100,00	90.750.000,000	100,00	129.825.000,000	100,00	130.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3.991.938.980,000		4.000.000.000,000		4.050.000.000,000		4.050.000.000,000		4.218.000.000,000	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					71.938.980,000		80.000.000,000		130.000.000,000		130.000.000,000		198.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan	Persentase aparatur kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	50	50	100	71.938.980,000	100	80.000.000,000	100	130.000.000,000	100	130.000.000,000	100	198.000.000,000	2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					3.920.000.000,000		3.920.000.000,000		3.920.000.000,000		3.920.000.000,000		4.020.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) (%)	100	100	100	3.920.000.000,000	100	3.920.000.000,000	100	3.920.000.000,000	100	3.920.000.000,000	100	4.020.000.000,000	2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN					22.525.800.000,000		23.777.192.641,000		25.028.585.281,000		26.279.977.922,000		27.531.370.563,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.803.127.274,000		6.996.221.204,000		7.956.585.281,000		9.427.231.827,000		8.372.327.941,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	6.803.127.274,000	100	6.996.221.204,000	100	7.956.585.281,000	100	9.427.231.827,000	100	8.372.327.941,000	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.076.990.607,000		1.010.000.000,000		793.000.000,000		970.000.000,000		1.790.000.000,000	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	7,4	7,2	7,1	1.076.990.607,000	7,1	1.010.000.000,000	7,0	793.000.000,000	6,8	970.000.000,000	6,8	1.790.000.000,000	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,08	2,04	2,02		2,02		2,00		2,00		2,00		2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					10.501.162.631,000		11.353.000.000,000		11.199.000.000,000		11.502.746.095,000		12.336.000.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	70,76	71,06	72,05	10.501.162.631,000	73,00	11.353.000.000,000	73,03	11.199.000.000,000	74,02	11.502.746.095,000	75,00	12.336.000.000,000	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	5,8	5,3	5,2		5,1		4,8		4,6		4,5		2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4.144.519.488,000		4.417.971.437,000		5.080.000.000,000		4.380.000.000,000		5.033.042.622,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	12,98	13,05	14,00	4.144.519.488,000	14,65	4.417.971.437,000	15,50	5.080.000.000,000	16,02	4.380.000.000,000	16,55	5.033.042.622,000	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					175.750.000.000,000		181.022.500.000,000		186.453.175.000,000		192.046.770.250,000		197.808.173.358,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					157.592.689.861,000		161.557.712.535,000		163.356.510.018,000		165.661.681.510,000		164.443.694.619,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	157.592.689.861,000	100	161.557.712.535,000	100	163.356.510.018,000	100	165.661.681.510,000	100	164.443.694.619,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					17.190.180.184,000		18.497.657.510,000		21.992.822.031,000		25.513.351.740,000		32.492.741.739,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	80	81	82	17.190.180.184,000	83	18.497.657.510,000	84	21.992.822.031,000	85	25.513.351.740,000	87	32.492.741.739,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	71	73	76		78		80		81		83		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					967.129.955,000		967.129.955,000		1.103.842.951,000		871.737.000,000		871.737.000,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai	Konektivitas Laut (Unit)	80	80	80	967.129.955,000	80	967.129.955,000	80	1.103.842.951,000	80	871.737.000,000	80	871.737.000,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					16.552.726.793,000		16.986.143.752,000		17.637.622.349,000		18.288.212.896,000		18.958.825.006,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.627.767.134,000		10.942.134.900,000		11.438.698.202,000		11.930.254.096,000		12.536.794.890,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	10.627.767.134,000	100	10.942.134.900,000	100	11.438.698.202,000	100	11.930.254.096,000	100	12.536.794.890,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.523.679.959,000		3.594.653.558,000		3.676.088.194,000		3.759.437.769,000		3.797.032.147,000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	75	78	80	3.523.679.959,000	85	3.594.653.558,000	90	3.676.088.194,000	93	3.759.437.769,000	95	3.797.032.147,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.401.279.700,000		2.449.355.294,000		2.522.835.953,000		2.598.521.031,000		2.624.997.969,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, informasi, Statistik dan Persandian (%)	100	100	100	2.401.279.700,000	100	2.449.355.294,000	100	2.522.835.953,000	100	2.598.521.031,000	100	2.624.997.969,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					12.728.549.616,000		14.515.878.282,000		13.933.206.947,000		13.450.535.613,000		13.967.864.279,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.502.513.818,000		8.113.583.475,000		8.000.356.093,000		8.015.438.695,000		8.123.619.624,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	7.502.513.818,000	100	8.113.583.475,000	100	8.000.356.093,000	100	8.015.438.695,000	100	8.123.619.624,000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					204.335.725,000		224.769.298,000		536.991.720,000		381.741.030,000		426.490.340,000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	4,00	4,00	4,30	204.335.725,000	4,50	224.769.298,000	4,70	536.991.720,000	4,90	381.741.030,000	5,00	426.490.340,000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					492.763.403,000		542.039.743,000		500.846.282,000		542.583.473,000		584.320.663,000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	40,59	41,68	42,25	492.763.403,000	43,15	542.039.743,000	44,27	500.846.282,000	45,34	542.583.473,000	46,56	584.320.663,000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					169.991.250,000		186.990.375,000		298.284.257,000		312.809.047,000		327.929.937,000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	43,44	47,22	47,64	169.991.250,000	48,06	186.990.375,000	48,47	298.284.257,000	48,87	312.809.047,000	49,26	327.929.937,000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					931.358.445,000		1.678.149.720,000		790.302.355,000		553.971.264,000		750.430.592,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	5,84	8,06	22,80	931.358.445,000	38,92	1.678.149.720,000	46,98	790.302.355,000	55,04	553.971.264,000	63,09	750.430.592,000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					345.653.200,000		362.935.860,000		381.082.653,000		400.136.786,000		310.143.625,000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	25,44	25,65	25,85	345.653.200,000	26,05	362.935.860,000	26,25	381.082.653,000	26,45	400.136.786,000	26,65	310.143.625,000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.722.178.666,000		1.854.615.051,000		1.613.934.242,000		1.696.472.738,000		1.781.200.003,000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	1,11	1,29	1,81	1.722.178.666,000	2,12	1.854.615.051,000	2,28	1.613.934.242,000	2,42	1.696.472.738,000	2,54	1.781.200.003,000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2,41	4,29	4,36		4,38		4,42		4,45		4,50		2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.359.755.109,000		1.552.794.760,000		1.811.409.345,000		1.547.382.580,000		1.663.729.495,000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	1,44	1,55	2,47	1.359.755.109,000	2,61	1.552.794.760,000	2,74	1.811.409.345,000	2,86	1.547.382.580,000	2,97	1.663.729.495,000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					25.883.801.675,000		27.523.052.834,000		28.562.303.994,000		29.901.555.153,000		31.240.806.312,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.382.928.722,000		25.783.055.081,000		26.796.817.158,000		27.936.902.594,000		28.927.352.121,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	24.382.928.722,000	100	25.783.055.081,000	100	26.796.817.158,000	100	27.936.902.594,000	100	28.927.352.121,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					642.913.570,000		238.784.300,000		238.784.300,000		238.784.300,000		555.834.460,000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	642.913.570,000	100	238.784.300,000	100	238.784.300,000	100	238.784.300,000	100	555.834.460,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					260.000.000,000		636.927.970,000		737.927.970,000		911.720.767,000		892.892.843,000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	50	50	50	260.000.000,000	10	636.927.970,000	10	737.927.970,000	10	911.720.767,000	10	892.892.843,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					236.316.038,000		431.316.038,000		332.816.038,000		335.391.038,000		338.094.788,000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	82	84	86	236.316.038,000	88	431.316.038,000	90	332.816.038,000	92	335.391.038,000	94	338.094.788,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					261.643.345,000		332.969.445,000		342.958.528,000		360.106.454,000		396.117.100,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	80	80	80	261.643.345,000	80	332.969.445,000	80	342.958.528,000	80	360.106.454,000	80	396.117.100,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.000.000,000		100.000.000,000		113.000.000,000		118.650.000,000		130.515.000,000	
Meningkatnya pemafaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	95	95	95	100.000.000,000	95	100.000.000,000	95	113.000.000,000	95	118.650.000,000	95	130.515.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					20.814.046.925,000		21.873.005.119,000		22.931.963.473,000		23.990.921.748,000		25.049.880.022,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.353.903.226,000		11.966.847.051,000		12.193.147.063,000		12.727.000.000,000		12.892.000.000,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	11.353.903.226,000	100	11.966.847.051,000	100	12.193.147.063,000	100	12.727.000.000,000	100	12.892.000.000,000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.561.837.855,000		1.568.021.640,000		1.995.000.000,000		2.210.000.000,000		2.420.000.000,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Nilai)	4,2	6,0	5,8	1.561.837.855,000	5,6	1.568.021.640,000	5,5	1.995.000.000,000	5,4	2.210.000.000,000	5,2	2.420.000.000,000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					7.348.305.844,000		7.783.136.428,000		8.193.816.410,000		8.503.921.748,000		9.137.880.022,000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang masuk Pelatda (%)	43,00	48,00	57,00	7.348.305.844,000	66,00	7.783.136.428,000	71,00	8.193.816.410,000	73,00	8.503.921.748,000	77,00	9.137.880.022,000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					550.000.000,000		555.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	53,06	54,23	55,41	550.000.000,000	56,58	555.000.000,000	57,76	550.000.000,000	58,93	550.000.000,000	60,11	600.000.000,000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					651.071.300,000		896.974.842,000		923.884.087,000		951.600.609,000		961.116.616,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					651.071.300,000		896.974.842,000		923.884.087,000		951.600.609,000		961.116.616,000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,89	3,3	3,6	651.071.300,000	3,9	896.974.842,000	4,2	923.884.087,000	4,4	951.600.609,000	4,6	961.116.616,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					87.986.700,000		89.746.434,000		92.438.827,000		95.211.992,000		96.164.112,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					87.986.700,000		89.746.434,000		92.438.827,000		95.211.992,000		96.164.112,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	204	230	260	87.986.700,000	290	89.746.434,000	320	92.438.827,000	350	95.211.992,000	380	96.164.112,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					13.178.446.840,000		13.484.280.627,000		14.292.164.006,000		15.387.337.061,000		16.296.408.104,000	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.049.652.745,000		8.153.553.062,000		8.511.363.818,000		8.801.587.061,000		8.991.408.104,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	75	75	75	8.049.652.745,000	75	8.153.553.062,000	75	8.511.363.818,000	75	8.801.587.061,000	75	8.991.408.104,000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					4.514.050.621,000		4.582.009.744,000		4.905.800.188,000		5.605.750.000,000		6.245.000.000,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	20	25	30	4.514.050.621,000	35	4.582.009.744,000	40	4.905.800.188,000	45	5.605.750.000,000	50	6.245.000.000,000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					272.680.671,000		308.448.738,000		350.000.000,000		380.000.000,000		390.000.000,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenia tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	65	65	66	272.680.671,000	67	308.448.738,000	68	350.000.000,000	69	380.000.000,000	70	390.000.000,000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					342.062.803,000		440.269.083,000		525.000.000,000		600.000.000,000		670.000.000,000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	65	65	66	342.062.803,000	67	440.269.083,000	68	525.000.000,000	69	600.000.000,000	70	670.000.000,000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	65	65	66		67		68		69		70		2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					12.124.534.751,000		13.936.607.040,000		15.707.000.000,000		17.648.144.678,000		19.707.020.000,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.826.675.291,000		12.995.641.564,000		14.342.000.000,000		15.863.000.000,000		17.704.000.000,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	11.826.675.291,000	100	12.995.641.564,000	100	14.342.000.000,000	100	15.863.000.000,000	100	17.704.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					242.924.230,000		785.328.396,000		1.155.000.000,000		1.515.144.678,000		1.698.000.000,000	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegembiraan membaca masyarakat (Nilai)	66,27	67,00	67,50	242.924.230,000	68,00	785.328.396,000	68,50	1.155.000.000,000	69,00	1.515.144.678,000	69,50	1.698.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					54.935.230,000		155.637.080,000		210.000.000,000		270.000.000,000		305.020.000,000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	5	6,67	8,33	54.935.230,000	10	155.637.080,000	11,67	210.000.000,000	13,33	270.000.000,000	15	305.020.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					149.303.470,000		492.000.000,000		876.375.859,000		1.090.000.000,000		1.185.893.497,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					109.333.790,000		342.000.000,000		715.000.000,000		880.000.000,000		990.000.000,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	100	100	100	109.333.790,000	100	342.000.000,000	100	715.000.000,000	100	880.000.000,000	100	990.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					39.969.680,000		150.000.000,000		161.375.859,000		210.000.000,000		195.893.497,000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100	100	100	39.969.680,000	100	150.000.000,000	100	161.375.859,000	100	210.000.000,000	100	195.893.497,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					562.121.751,000		618.333.926,000		1.768.109.936,000		2.950.972.256,000		4.101.359.115,000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					179.871.879,000		197.859.067,000		250.000.000,000		736.250.000,000		1.260.000.000,000	
Meningkatnyaproduksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	99,15	100	100,20	179.871.879,000	100,50	197.859.067,000	100,80	250.000.000,000	101	736.250.000,000	101,30	1.260.000.000,000	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					278.166.475,000		305.983.123,000		961.816.000,000		1.602.798.928,000		2.091.359.115,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	9.824,79	9.825	9.830	278.166.475,000	9.835	305.983.123,000	9.840	961.816.000,000	9.845	1.602.798.928,000	9.850	2.091.359.115,000	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					104.083.397,000		114.491.736,000		556.293.936,000		611.923.328,000		750.000.000,000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	45,53	45,70	45,99	104.083.397,000	46,22	114.491.736,000	46,45	556.293.936,000	46,68	611.923.328,000	46,91	750.000.000,000	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.782.871.055,000		1.914.710.323,000		2.544.500.000,000		2.887.000.000,000		3.415.602.012,000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					393.089.546,000		460.000.000,000		775.000.000,000		935.000.000,000		1.185.000.000,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	65	65	5	393.089.546,000	5	460.000.000,000	5	775.000.000,000	5	935.000.000,000	5	1.185.000.000,000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					789.736.657,000		809.710.323,000		852.500.000,000		910.000.000,000		960.000.000,000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	65	65	70	789.736.657,000	75	809.710.323,000	80	852.500.000,000	85	910.000.000,000	90	960.000.000,000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					145.000.000,000		160.000.000,000		300.000.000,000		370.000.000,000		465.602.012,000	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	65	65	70	145.000.000,000	75	160.000.000,000	80	300.000.000,000	85	370.000.000,000	90	465.602.012,000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA					455.044.852,000		485.000.000,000		617.000.000,000		672.000.000,000		805.000.000,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	65	65	70	455.044.852,000	75	485.000.000,000	80	617.000.000,000	85	672.000.000,000	90	805.000.000,000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					16.126.769.637,000		19.306.734.475,000		21.393.135.478,000		23.446.450.171,000		25.532.240.325,000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.217.600.776,000		15.482.572.475,000		16.834.990.678,000		18.610.975.772,000		21.755.806.325,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	13.217.600.776,000	100	15.482.572.475,000	100	16.834.990.678,000	100	18.610.975.772,000	100	21.755.806.325,000	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					0,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase jumlah bibit ternak yang memenuhi standar mutu (%)	100	100	100	0,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.272.137.200,000		1.799.350.800,000		2.329.285.800,000		2.212.214.400,000		500.000.000,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi (%)	0	0	50	1.272.137.200,000	50	1.799.350.800,000	50	2.329.285.800,000	50	2.212.214.400,000	50	500.000.000,000	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					560.165.798,000		629.711.000,000		700.749.000,000		851.500.000,000		1.032.000.000,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	71,43	71,97	72,51	560.165.798,000	73,05	629.711.000,000	73,60	700.749.000,000	74,15	851.500.000,000	74,71	1.032.000.000,000	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					30.790.440,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	0	0	100	30.790.440,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					96.230.870,000		130.000.000,000		135.000.000,000		140.000.000,000		145.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha	Jumlah izin usaha pertanian (Dokumen)	0	0	15	96.230.870,000	20	130.000.000,000	25	135.000.000,000	30	140.000.000,000	35	145.000.000,000	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					949.844.553,000		1.065.100.200,000		1.193.110.000,000		1.431.759.999,000		1.899.434.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Jumlah kelompok tani aktif (Kelompok Tani)	411	413	415	949.844.553,000	417	1.065.100.200,000	419	1.193.110.000,000	421	1.431.759.999,000	423	1.899.434.000,000	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					22.753.236.656,000		23.142.985.132,200		23.944.572.576,200		24.746.160.020,200		25.547.747.464,200	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.385.958.042,000		13.042.985.132,200		13.398.172.576,200		13.646.160.020,200		13.947.747.464,200	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	0	100	100	14.385.958.042,000	100	13.042.985.132,200	100	13.398.172.576,200	100	13.646.160.020,200	100	13.947.747.464,200	3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					261.986.350,000		401.603.755,000		476.448.000,000		608.948.000,000		656.933.440,000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	75	80	261.986.350,000	85	401.603.755,000	90	476.448.000,000	95	608.948.000,000	100	656.933.440,000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					5.508.879.186,000		6.700.000.000,000		6.850.000.000,000		7.000.000.000,000		7.150.000.000,000	
Meningkatnya kualitas saran perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	75	80	5.508.879.186,000	85	6.700.000.000,000	90	6.850.000.000,000	95	7.000.000.000,000	100	7.150.000.000,000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.362.744.716,000		1.407.680.000,000		1.543.552.000,000		1.631.052.000,000		1.743.066.560,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	0	80	85	1.362.744.716,000	90	1.407.680.000,000	95	1.543.552.000,000	95	1.631.052.000,000	100	1.743.066.560,000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					484.570.892,000		770.000.000,000		826.400.000,000		1.010.000.000,000		1.200.000.000,000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	0	86	88	484.570.892,000	90	770.000.000,000	92	826.400.000,000	94	1.010.000.000,000	95	1.200.000.000,000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					749.097.470,000		820.716.245,000		850.000.000,000		850.000.000,000		850.000.000,000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	85	75	749.097.470,000	80	820.716.245,000	85	850.000.000,000	90	850.000.000,000	95	850.000.000,000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.638.161.033,000		2.200.000.000,000		2.350.000.000,000		2.500.000.000,000		2.650.000.000,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.541.095.632,000		2.035.000.000,000		2.185.000.000,000		2.285.000.000,000		2.370.000.000,000	
Meningkatnya realisasi pembangunan perindustrian	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	0	20	20	1.541.095.632,000	20	2.035.000.000,000	20	2.185.000.000,000	20	2.285.000.000,000	20	2.370.000.000,000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					30.244.440,000		35.000.000,000		35.000.000,000		55.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	20	20	30.244.440,000	20	35.000.000,000	20	35.000.000,000	20	55.000.000,000	20	75.000.000,000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					66.820.961,000		130.000.000,000		130.000.000,000		160.000.000,000		205.000.000,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan informasi perindustrian	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	0	20	20	66.820.961,000	20	130.000.000,000	20	130.000.000,000	20	160.000.000,000	20	205.000.000,000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					179.525.565.000,000		185.037.079.558,000		190.548.594.116,000		196.060.108.674,000		201.571.623.232,000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					127.886.454.660,000		131.926.868.032,000		135.810.947.178,000		139.729.269.987,000		143.636.089.521,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	0	100	100	127.886.454.660,000	100	131.926.868.032,000	100	135.810.947.178,000	100	139.729.269.987,000	100	143.636.089.521,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					45.286.941.206,000		46.574.793.884,000		48.017.062.901,000		49.421.157.719,000		50.816.150.129,000	
Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Penyampaian Laporan Kinerja yang tepat waktu (%)	0	100	100	2.674.112.700,000	100	2.753.763.820,000	100	2.913.622.969,000	100	2.998.118.033,000	100	3.082.065.335,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	0	78	85	36.517.993.273,000	86	38.780.397.270,000	87	39.916.628.790,000	87	41.085.811.023,000	88	42.247.413.731,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	0	100	100	2.894.551.817,000	100	1.745.025.736,000	100	1.795.631.481,000	100	1.847.704.793,000	100	1.899.440.526,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	0	77	85	3.200.283.416,000	86	3.295.607.058,000	87	3.391.179.661,000	88	3.489.523.870,000	89	3.587.230.537,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					6.352.169.134,000		6.535.417.642,000		6.720.584.037,000		6.909.680.968,000		7.119.383.582,000	
Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian (%)	0	100	100	1.541.511.380,000	100	1.587.426.838,000	100	1.633.462.215,000	100	1.680.832.617,000	100	1.727.895.929,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan SDA (%)	0	100	100	756.240.760,000	100	772.808.946,000	100	789.420.404,000	100	806.513.595,000	100	823.495.974,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Tender Pengadaan Barang dan Jasa yang Terlaksana (%)	0	90	95	3.215.831.124,000	100	3.311.617.870,000	100	3.407.654.787,000	100	3.506.476.774,000	100	3.604.658.122,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	78	80	83	838.585.870,000	86	863.563.988,000	89	890.046.631,000	92	915.857.982,000	95	963.333.557,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					193.101.922.057,000		203.093.189.036,000		213.084.456.015,000		223.075.722.994,000		233.066.989.973,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					84.371.258.892,000		88.736.692.526,000		93.102.094.121,000		97.467.558.205,000		101.833.032.669,000	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	84.371.258.892,000	100	88.736.692.526,000	100	93.102.094.121,000	100	97.467.558.205,000	100	101.833.032.669,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					108.730.663.165,000		114.356.496.510,000		119.982.361.894,000		125.608.164.789,000		131.233.957.304,000	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundangan-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	1.485.549.342,000	100	1.562.413.153,000	100	1.639.276.069,000	100	1.716.140.084,000	100	1.793.004.283,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	107.245.113.823,000	100	112.794.083.357,000	100	118.343.085.825,000	100	123.892.024.705,000	100	129.440.953.021,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					20.554.074.613,000		21.617.560.905,000		22.681.047.197,000		23.744.533.490,000		24.808.019.782,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.937.110.299,000		14.914.524.689,000		15.536.770.695,000		16.298.305.757,000		16.833.080.803,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	13.937.110.299,000	100	14.914.524.689,000	100	15.536.770.695,000	100	16.298.305.757,000	100	16.833.080.803,000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					4.611.175.664,000		4.572.433.298,000		4.531.865.261,000		4.820.841.297,000		4.877.723.092,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	4.611.175.664,000	100	4.572.433.298,000	100	4.531.865.261,000	100	4.820.841.297,000	100	4.877.723.092,000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.005.788.650,000		2.130.602.918,000		2.612.411.241,000		2.625.386.436,000		3.097.215.887,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	1.063.422.800,000	100	1.191.037.673,000	100	1.458.147.606,000	100	1.458.147.606,000	100	1.580.127.397,000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	567.198.080,000	100	446.880.698,000	100	612.310.635,000	100	612.310.635,000	100	711.089.991,000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	375.167.770,000	100	492.684.547,000	100	541.953.000,000	100	554.928.195,000	100	805.998.499,000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					192.408.506.920,000		203.679.179.534,000		214.949.852.148,000		223.438.538.493,000		226.742.676.677,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					122.624.156.904,000		122.825.489.726,000		122.039.504.575,000		123.314.649.714,000		124.875.041.949,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	31.444.575.758,000	100	30.685.893.804,000	100	29.065.396.392,000	100	29.532.806.905,000	100	30.313.581.042,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	91.179.581.146,000	100	92.139.595.922,000	100	92.974.108.183,000	100	93.781.842.809,000	100	94.561.460.907,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					56.036.666.530,000		66.512.649.097,000		77.880.117.862,000		84.413.916.464,000		85.582.194.793,000	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	33,81	30	30	4.315.351.120,000	30	4.746.886.232,000	30	4.960.496.113,000	30	5.227.866.853,000	30	5.332.424.189,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	16,74	25	30		40		40		40		40		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	39	35	35	1.376.576.930,000	35	1.514.234.621,000	35	1.582.375.179,000	35	1.667.665.199,000	35	1.701.018.504,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	70,13	85,39	89,66		89,77		89,88		89,99		90,10		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	50.344.738.480,000	100	60.251.528.244,000	100	71.337.246.570,000	100	77.518.384.412,000	100	78.548.752.100,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.496.677.900,000		3.779.984.847,000		4.033.621.054,000		4.251.033.230,000		4.336.053.894,000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	8,11	8,15	8,29	3.496.677.900,000	8,47	3.779.984.847,000	8,65	4.033.621.054,000	8,83	4.251.033.230,000	9,01	4.336.053.894,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					10.251.005.586,000		10.561.055.864,000		10.996.608.657,000		11.458.939.085,000		11.949.386.041,000	
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	-	-	100	1.357.987.040,000	100	1.423.386.392,000	100	1.492.055.711,000	100	1.564.158.495,000	100	1.639.866.421,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	29,40	41,34	34,21	8.627.978.156,000	34,14	8.859.377.063,000	34,20	9.212.345.917,000	34,34	9.587.963.210,000	34,55	9.987.361.371,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	-	-	100	265.040.390,000	100	278.292.409,000	100	292.207.029,000	100	306.817.380,000	100	322.158.249,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					20.819.172.209,000		21.423.926.814,000		22.102.054.837,000		22.763.519.114,000		23.330.692.591,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.636.525.629,000		17.181.280.234,000		17.849.408.257,000		18.500.872.534,000		19.058.046.011,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	16.636.525.629,000	100	17.181.280.234,000	100	17.849.408.257,000	100	18.500.872.534,000	100	19.058.046.011,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					4.182.646.580,000		4.242.646.580,000		4.252.646.580,000		4.262.646.580,000		4.272.646.580,000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah (%)	72,92	73	73,45	4.182.646.580,000	73,50	4.242.646.580,000	73,60	4.252.646.580,000	73,70	4.262.646.580,000	73,80	4.272.646.580,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					5.093.006.110,000		4.883.825.374,000		4.601.271.220,000		4.335.380.812,000		4.163.781.204,000	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					5.093.006.110,000		4.883.825.374,000		4.601.271.220,000		4.335.380.812,000		4.163.781.204,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar (%)	80,92	81,20	81,30	5.093.006.110,000	81,40	4.883.825.374,000	81,50	4.601.271.220,000	81,60	4.335.380.812,000	81,70	4.163.781.204,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					12.490.244.145,000		12.700.029.298,000		12.909.814.451,000		12.119.599.604,000		12.329.384.757,000	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.735.614.152,000		9.603.500.000,000		9.837.500.000,000		9.019.599.604,000		9.249.384.757,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	9.735.614.152,000	100	9.603.500.000,000	100	9.837.500.000,000	100	9.019.599.604,000	100	9.249.384.757,000	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.374.629.993,000		1.996.529.298,000		1.972.314.451,000		2.000.000.000,000		1.980.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase kajian dan rekomendasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan, pengembangan potensi unggulan dan penyelesaian permasalahan daerah (%)	66	65	66	1.374.629.993,000	67	1.996.529.298,000	68	1.972.314.451,000	69	2.000.000.000,000	70	1.980.000.000,000	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.380.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000	
meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase riset dan Inovasi yang difasilitasi (%)	66	65	66	1.380.000.000,000	67	1.100.000.000,000	68	1.100.000.000,000	69	1.100.000.000,000	70	1.100.000.000,000	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					21.601.440.472,000		22.666.531.369,000		23.731.622.266,000		24.796.713.163,000		25.861.304.059,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.381.161.952,000		20.392.052.849,000		20.935.302.266,000		21.824.977.507,000		22.784.184.059,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	80	100	100	19.381.161.952,000	100	20.392.052.849,000	100	20.935.302.266,000	100	21.824.977.507,000	100	22.784.184.059,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.766.300.000,000		1.766.300.000,000		2.210.000.000,000		2.210.000.000,000		2.210.000.000,000	
Menurunnya terjadinya tindak penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanlajut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	75	76	76	1.766.300.000,000	77	1.766.300.000,000	78	2.210.000.000,000	79	2.210.000.000,000	80	2.210.000.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					453.978.520,000		508.178.520,000		586.320.000,000		761.735.656,000		867.120.000,000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	453.978.520,000	Terintegrasi (Integrated)	508.178.520,000	Terintegrasi (Integrated)	586.320.000,000	Terintegrasi (Integrated)	761.735.656,000	Terintegrasi (Integrated)	867.120.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
7.01 - KECAMATAN					223.487.649.413,000		252.033.495.036,000		277.905.180.637,000		303.774.866.238,000		329.586.551.934,000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					155.936.560.938,000		174.029.272.345,000		186.183.433.249,000		209.443.511.787,000		228.152.438.013,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	11.895.847.442,000	100	12.671.388.802,000	100	13.488.494.438,000	100	14.642.048.885,000	100	15.969.303.333,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SUKAJADI
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	9.833.194.956,000	100	10.473.500.000,000	100	11.525.400.000,000	100	12.730.445.955,000	100	13.347.329.622,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEKANBARU KOTA
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	7.881.072.778,000	100	8.949.756.056,000	100	9.757.297.700,000	100	10.718.867.470,000	100	11.854.154.217,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SAIL
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	8.936.171.849,000	100	10.249.300.000,000	100	11.128.332.607,000	100	12.243.857.964,000	100	13.203.054.066,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN LIMAPULUH
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	8.419.826.426,000	100	11.733.685.046,000	100	12.785.349.068,000	100	15.181.226.324,000	100	16.477.103.580,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN BUKITRAYA
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	0	100	100	11.035.473.485,000	100	12.353.537.814,000	100	12.984.863.244,000	100	14.283.349.568,000	100	15.711.684.525,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BINAWIDYA
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	86	100	100	12.311.116.537,000	100	13.734.242.352,000	100	14.286.707.719,000	100	16.522.116.488,000	100	18.509.638.453,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	91,35	100	100	12.514.756.084,000	100	14.231.480.472,000	100	16.198.597.054,000	100	18.161.570.628,000	100	20.123.347.073,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN TENAYAN RAYA
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	92	95	95	11.926.398.026,000	95	12.090.553.324,000	95	12.238.467.466,000	95	13.678.381.246,000	95	14.437.848.106,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	86,67	100	100	10.624.963.183,000	100	11.751.378.223,000	100	12.152.539.512,000	100	14.445.576.610,000	100	15.828.938.568,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN RUMBAI
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	10.689.947.481,000	100	11.413.934.181,000	100	11.827.571.917,000	100	13.309.233.749,000	100	14.252.806.982,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN TUAH MADANI
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	93,66	100	100	9.499.719.500,000	100	10.426.096.639,000	100	11.505.478.930,000	100	12.916.800.000,000	100	13.906.800.000,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN KULIM
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	95	100	100	9.928.765.074,000	100	11.195.573.217,000	100	11.366.352.293,000	100	13.235.548.614,000	100	14.635.312.648,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN RUMBAI TIMUR
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	10.009.121.503,000	100	11.066.626.005,000	100	11.991.727.486,000	100	13.170.200.872,000	100	14.432.795.826,000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN RUMBAI BARAT
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	10.430.186.614,000	100	11.688.220.214,000	100	12.946.253.815,000	100	14.204.287.414,000	100	15.462.321.014,000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SENAPELAN
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					622.646.450,000		1.128.279.288,000		1.838.852.979,000		2.396.090.963,000		3.174.491.325,000	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	85	100	100	14.931.466,000	100	35.000.000,000	100	70.000.000,000	100	74.000.000,000	100	120.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SUKAJADI
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	80	80	80	15.000.000,000	80	50.000.000,000	80	100.000.000,000	80	145.000.000,000	80	169.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEKANBARU KOTA
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	2.959.000,000	100	3.254.900,000	100	12.000.000,000	100	13.200.000,000	100	14.520.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SAIL





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Publik yang dilaksanakan (%)													
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	50.000.000,000	100	60.000.000,000	100	105.000.000,000	100	105.000.000,000	100	180.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN LIMAPULUH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	85	90	85	15.000.000,000	90	16.809.220,000	85	18.618.440,000	85	20.427.661,000	85	22.236.881,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SENAPELAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	85	85	86	39.302.565,000	87	43.232.822,000	88	57.227.436,000	89	70.227.436,000	90	90.227.436,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN RUMBAI BARAT
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	12.500.000,000	100	35.786.766,000	100	200.000.000,000	100	220.000.000,000	100	240.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN BUKITRAYA
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	85	100	100	15.142.215,000	100	16.656.437,000	100	38.322.080,000	100	42.154.288,000	100	46.369.717,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BINAWIDYA
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	0	90	58	11.228.860,000	58	12.500.000,000	58	45.000.000,000	58	105.000.000,000	60	170.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	0	100	100	28.112.600,000	100	28.112.600,000	100	29.928.240,000	100	35.913.888,000	100	43.096.666,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN TENAYAN RAYA
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	0	90	90	130.718.379,000	90	300.000.000,000	90	330.000.000,000	90	346.500.000,000	90	349.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	176.111.365,000	100	266.111.365,000	100	286.111.365,000	100	306.111.365,000	100	326.111.365,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN RUMBAI
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	90	90	90	0,000	95	32.811.428,000	95	303.641.668,000	100	564.902.387,000	100	801.392.626,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN TUAH MADANI
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	0	85	85	61.640.000,000	85	138.003.750,000	90	138.003.750,000	90	197.653.938,000	90	202.536.634,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN KULIM
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	85	100	50.000.000,000	100	90.000.000,000	100	105.000.000,000	100	150.000.000,000	100	400.000.000,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN RUMBAI TIMUR
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					38.008.158.063,000		43.481.755.519,000		54.756.730.076,000		52.463.366.071,000		56.199.770.402,000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	70	70	70	1.570.000.000,000	70	2.140.000.000,000	70	2.391.162.289,000	70	2.626.000.000,000	70	3.320.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEKANBARU KOTA





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.039.041.641,000	100	1.308.041.641,000	100	1.518.041.641,000	100	1.938.041.641,000	100	2.148.041.641,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SAIL
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	47,06	70	75	1.670.012.170,000	75	1.840.512.170,000	80	2.330.000.000,000	85	2.287.000.000,000	90	2.630.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN LIMAPULUH
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	80	90	80	1.971.577.000,000	90	2.209.378.125,000	90	2.447.179.250,000	90	2.684.980.374,000	90	2.921.781.498,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SENAPELAN
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	70	73	75	1.469.044.854,000	78	1.897.884.419,000	80	2.490.522.408,000	83	2.783.783.107,000	85	3.026.783.107,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN RUMBAI BARAT
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	90	95	96	2.960.581.050,000	97	3.293.371.560,000	98	3.893.371.560,000	99	3.293.371.560,000	100	3.793.371.560,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN BUKITRAYA
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	65	70	75	2.513.500.000,000	75	2.797.046.262,000	80	3.626.180.000,000	85	3.891.986.279,000	90	4.005.110.706,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BINAWIDYA
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	99,70	100	100	3.868.746.964,000	100	3.964.958.233,000	100	3.964.985.233,000	100	3.964.985.233,000	100	3.964.985.233,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN TENAYAN RAYA
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	98	100	100	2.339.062.050,000	100	2.906.015.153,000	100	3.771.762.153,000	100	3.049.844.195,000	100	3.182.124.571,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	3.814.135.924,000	100	4.319.135.924,000	100	5.706.135.924,000	100	4.974.135.924,000	100	5.259.135.924,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN RUMBAI
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	53	60	65	4.998.790.340,000	70	5.737.900.980,000	75	7.170.799.099,000	80	6.625.022.928,000	85	7.223.233.104,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN TUAH MADANI
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	99,74	80	80	2.258.255.174,000	80	2.428.255.174,000	80	3.178.255.174,000	80	2.673.255.174,000	80	2.775.000.000,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN KULIM
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	47,06	70	70	1.866.630.400,000	75	1.991.255.878,000	75	3.505.835.345,000	80	3.071.403.058,000	85	3.121.403.058,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN RUMBAI TIMUR
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	65	70	75	1.941.419.046,000	75	2.633.000.000,000	80	3.397.500.000,000	85	3.740.000.000,000	90	4.141.800.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SUKAJADI
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	90	90	100	3.727.361.450,000	100	4.015.000.000,000	100	5.365.000.000,000	100	4.859.556.598,000	100	4.687.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.479.999.948,000		2.676.083.489,000		2.945.531.898,000		3.158.090.682,000		3.359.205.204,000	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	25	30	0,000	30	150.000.000,000	35	240.000.000,000	35	240.000.000,000	40	240.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SUKAJADI
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	90	90	90	40.000.000,000	90	230.000.000,000	90	280.000.000,000	90	330.000.000,000	90	360.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEKANBARU KOTA
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	140.000.000,000	100	140.000.000,000	100	150.000.000,000	100	170.000.000,000	100	240.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SAIL
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	90	95	90	105.000.000,000	95	117.664.541,000	95	130.329.083,000	95	142.993.623,000	95	156.658.165,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SENAPELAN
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	75	78	80	100.000.000,000	83	170.000.000,000	85	200.000.000,000	87	200.000.000,000	90	200.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN RUMBAI BARAT
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	0,000	100	240.000.000,000	100	240.000.000,000	100	240.000.000,000	100	240.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN BUKITRAYA
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	25	30	125.000.000,000	30	137.500.000,000	35	110.000.000,000	35	121.000.000,000	40	133.100.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BINAWIDYA
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	100	100	100.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	240.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	30	30	100.000.000,000	30	124.919.000,000	35	130.602.815,000	35	136.267.059,000	40	142.725.539,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN TUAH MADANI
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	85	90	0,000	90	240.000.000,000	90	240.000.000,000	90	240.000.000,000	90	240.000.000,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN KULIM
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	75	80	110.000.000,000	75	130.000.000,000	80	130.000.000,000	80	190.000.000,000	80	200.000.000,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN RUMBAI TIMUR
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	99.999.948,000	100	159.999.948,000	100	165.000.000,000	100	170.000.000,000	100	175.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN RUMBAI
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	25	30	120.000.000,000	30	120.000.000,000	35	225.000.000,000	35	260.000.000,000	40	260.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN LIMAPULUH
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	100	100	200.000.000,000	100	240.000.000,000	100	240.000.000,000	100	240.000.000,000	100	240.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN TENAYAN RAYA
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	80,00	85,00	86,00	240.000.000,000	87,00	276.000.000,000	88,00	264.600.000,000	89,0	277.830.000,000	90,00	291.721.500,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					27.440.284.014,000		30.718.104.395,000		32.180.632.435,000		36.313.806.735,000		38.700.646.990,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	2.053.687.588,000	100	2.281.551.188,000	100	2.400.000.000,000	100	2.725.000.000,000	100	2.775.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SUKAJADI





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	85	85	85	1.778.600.000,000	85	2.028.178.623,000	85	2.310.000.000,000	85	2.460.000.000,000	85	2.780.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEKANBARU KOTA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	1.295.133.454,000	100	1.493.097.208,000	100	1.992.753.396,000	100	2.125.926.558,000	100	2.245.262.743,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SAIL
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	1.468.951.065,000	100	1.608.897.207,000	100	1.723.951.064,000	100	2.250.000.000,000	100	2.506.378.191,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN LIMAPULUH
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	90	95	90	1.997.550.000,000	95	2.238.483.848,000	95	2.479.417.694,000	95	2.720.351.544,000	95	2.961.285.392,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SENAPELAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	90	91	92	1.809.705.759,000	93	1.944.165.519,000	94	2.077.165.519,000	95	2.287.165.519,000	95	2.456.304.739,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN RUMBAI BARAT
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	90	95	96	1.741.449.808,000	97	2.281.551.188,000	98	2.281.551.188,000	99	2.281.551.188,000	100	2.281.551.188,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN BUKITRAYA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	1.630.000.000,000	100	1.807.000.000,000	100	2.145.000.000,000	100	2.358.500.000,000	100	2.593.350.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BINAWIDYA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	90	95	100	2.017.070.138,000	100	2.145.000.000,000	100	2.150.000.000,000	100	2.300.000.000,000	100	2.320.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	88,85	100	100	2.115.527.623,000	100	2.231.551.188,000	100	2.231.551.188,000	100	2.231.551.188,000	100	2.231.551.188,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN TENAYAN RAYA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	2.258.732.522,000	100	2.355.564.544,000	100	2.420.650.264,000	100	2.712.860.228,000	100	2.897.745.331,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN RUMBAI
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	90	95	95	1.530.552.736,000	100	1.905.840.625,000	100	1.678.906.374,000	100	2.372.211.408,000	100	2.483.594.937,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN TUAH MADANI
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	94,36	90	95	1.694.508.036,000	95	1.981.000.000,000	95	1.850.850.563,000	95	2.584.112.158,000	95	3.126.717.490,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN KULIM
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	90	90	95	2.286.551.188,000	95	2.395.628.747,000	95	2.408.835.185,000	95	2.704.576.944,000	95	2.841.905.791,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	60	90	95	1.762.264.097,000	90	2.020.594.510,000	95	2.030.000.000,000	95	2.200.000.000,000	95	2.200.000.000,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN RUMBAI TIMUR
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					23.737.266.056,000		24.937.125.335,000		26.136.984.614,000		56.737.266.056,000		87.237.266.056,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.205.021.461,000		8.543.733.736,000		8.792.257.066,000		8.883.424.566,000		8.406.808.466,000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	8.205.021.461,000	100	8.543.733.736,000	100	8.792.257.066,000	100	8.883.424.566,000	100	8.406.808.466,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					3.403.145.870,000		3.984.971.518,000		4.130.005.732,000		3.645.915.327,000		3.405.229.418,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan masyarakat (%)	100	100	100	3.403.145.870,000	100	3.984.971.518,000	100	4.130.005.732,000	100	3.645.915.327,000	100	3.405.229.418,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					5.732.544.575,000		5.948.152.341,000		6.908.271.076,000		38.941.087.089,000		70.408.561.975,000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (%)	100	100	100	5.732.544.575,000	100	5.948.152.341,000	100	6.908.271.076,000	100	38.941.087.089,000	100	70.408.561.975,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					818.730.000,000		832.914.000,000		840.000.000,000		386.098.334,000		386.098.667,000	
Meningkatnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina (%)	100	100	100	818.730.000,000	100	832.914.000,000	100	840.000.000,000	100	386.098.334,000	100	386.098.667,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.339.736.560,000		1.352.868.140,000		1.301.868.140,000		1.105.038.140,000		905.678.730,000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	84,23	85	85,5	1.339.736.560,000	86	1.352.868.140,000	86,5	1.301.868.140,000	87	1.105.038.140,000	87,5	905.678.730,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					4.238.087.590,000		4.274.485.600,000		4.164.582.600,000		3.775.702.600,000		3.724.888.800,000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase penanganan konflik di tengah masyarakat (%)	100	100	100	4.238.087.590,000	100	4.274.485.600,000	100	4.164.582.600,000	100	3.775.702.600,000	100	3.724.888.800,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					3.241.251.856.663,000		3.416.665.677.412,200		3.565.751.176.132,200		3.742.090.618.343,200		3.904.668.542.106,200	

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru merencanakan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada beberapa Perangkat Daerah strategis selama periode RPJMD. Penataan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan dalam menghadapi tuntutan regulasi terbaru, dinamika pembangunan perkotaan, serta perlunya integrasi urusan yang lebih baik antar Perangkat Daerah.

Salah satu perubahan penting yang direncanakan adalah penataan SOTK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). Berdasarkan evaluasi kelembagaan dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan,

dirumuskan rencana pemindahan Program Penataan Bangunan Gedung dari Dinas PUPR ke Dinas PRKP.

Pemindahan program ini bertujuan untuk memperkuat integrasi penyelenggaraan urusan perumahan, permukiman, dan penataan bangunan gedung dalam satu Perangkat Daerah, sehingga proses perencanaan, penerbitan izin teknis bangunan, pengawasan bangunan gedung, hingga pembinaan kawasan permukiman dapat dilaksanakan lebih terpadu dan efektif.

Dengan adanya pengalihan program ini, Dinas PRKP diharapkan memiliki mandat yang lebih komprehensif dalam mengatur pembangunan lingkungan permukiman dan tata bangunan secara berkelanjutan, sementara Dinas PUPR dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur strategis, pengelolaan jalan, sumber daya air, dan penataan ruang.

Selain penataan kelembagaan pada Dinas PUPR dan Dinas PRKP, Pemerintah Kota Pekanbaru juga merencanakan penataan pada beberapa Perangkat Daerah, rencana penataan SOTK ini diarahkan untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih adaptif, efektif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan kota yang berkembang pesat.

Rencana Penataan ini juga merupakan strategi penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan bagian integral dari kerangka evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah. Penetapan indikator-indikator ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur yang terukur dan obyektif atas pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, baik dari aspek hasil pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator terpilih yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025–2029. IKU merepresentasikan prioritas pembangunan yang bersifat strategis serta menjadi instrumen utama dalam mengukur akuntabilitas kinerja kepala daerah selama periode perencanaan. Mengingat tahun 2030 merupakan tahun transisi, maka pelaksanaan dan pencapaian target IKU tahun tersebut akan menjadi tanggung jawab kepala daerah pada periode pemerintahan selanjutnya.



Sementara itu, Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. IKD terdiri atas indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci yang merepresentasikan setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan IKU dan IKD dalam RPJMD Kota Pekanbaru dilakukan secara selektif, berbasis data yang valid dan dapat diukur, serta mempertimbangkan kesinambungan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah dapat berjalan secara terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan.:



Tabel IV.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	n/a	59,00	59,75	60,50	61,25	62,00	62,75
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Angka	n/a	71	71,75	72,5	73,25	74	74,75
3	Nilai Warisan Budaya	Angka	n/a	50	50,75	51,5	52,25	53	53,75
4	Nilai Ekspresi Budaya	Angka	n/a	39	39,75	40,5	41,25	42	42,75
5	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Angka	66,4	70,66 - 70,67	70,97	71,29	71,61	71,93	72,25
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	n/a	70,1	70,69	71,89	72,66	73,78	74,8
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	84,26	84,56	84,95	85,34	85,73	86,13	86,52
8	Indeks Pembangunan Gender	Angka	94,91	95,10	95,20	95,50	95,70	95,90	96,00
9	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	75,89	76,04	76,27	76,5	76,73	76,96	77,19
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	14,5	14,4	14,3	14,2	14	13,9	13,8
11	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	Tahun	11,96	12,08 - 12,13	12,11	12,13	12,16	12,19	12,22
12	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	15,84	15,85	15,88	15,91	15,95	15,98	16
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	74,90	75,00	75,10	75,20	75,30	75,40	75,50
14	Indeks Perlindungan Sosial	Angka	69	71	71,8	72,4	74	74,8	75
15	Nilai RB	Angka	78,29 (BB)	78,35 (BB)	78,95 (BB)	79 (BB)	79,25 (BB)	79,80 (BB)	80 (A)
16	Indeks Pelayanan Publik	Angka	91,95	92,2	92,6	93	93,4	93,8	94,2
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90,14	90,5	90,9	91,3	91,7	92,1	92,5
18	Nilai Sakip Kota	Nilai	67,16	67,8	68,3	68,9	69,4	69,8	70
19	Indeks Pemerintah Digital	Angka	n/a	n/a	3,7	3,85	4	4,2	4,4
20	Indeks Inovasi Daerah	Angka	68,38	70,09	71,84	73,64	75,48	76,61	77,76
21	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	n/a	83,83	84,93	85,20	86,31	87,50	88,00
22	Persentase kesesuaian tata ruang	%	n/a	40	60	70	80	85	95
23	Indeks kualitas layanan infrastruktur	Angka	n/a	65,02	69,17	72,5	73,8	75	78
24	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Transportasi Publik	angka	79,59	81,5	82,5	83,2	83,8	84,6	85
25	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	%	n/a	62,77	64,17	65,60	67,07	68,56	70,09
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	56,97	61,15	61,63	62,11	62,6	63,09	63,59
27	Indeks Risiko Bencana Daerah	angka	125,67	125,07	122,87	120,72	118,6	116,52	114,47
28	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41
29	PDRB Perkapita	Ribu Rp.	166.856	181.140	193.996	206.851	219.707	232.563	245.418
30	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,61	5,75 - 6,13	5,77 - 6,17	5,79 - 6,22	5,81 - 6,26	5,82 - 6,31	5,84 - 6,36
31	Indeks Daya Saing Daerah	angka	4,21	4,24	4,28	4,31	4,35	4,38	4,42

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
32	Kontribusi PDRB Kota (%)	%	15,4	15,51	15,62	15,73	15,84	15,95	16,06
33	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,07	4,7	4,87	5,04	5,22	5,41	5,6
34	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	76,05	76,28	76,52	76,75	76,98	77,22	77,45
35	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,63	4,52 - 4,45	4,47 - 4,3	4,29 - 4,02	3,97 - 3,6	3,54 - 3,25	3,25-2,98
36	Tingkat kemiskinan (%)	%	3,00 - 2,78	3,1-2,9	3,08-2,8	3,0-2,8	2,7-2,15	2,22 - 1,95	2,03 - 1,75
37	Rasio Gini	angka	0,353	0,345 - 0,342	0,337 - 0,333	0,330 - 0,325	0,323 - 0,317	0,316 - 0,31	0,310 - 0,303
38	Indeks ketahanan pangan	angka	92,2	92,25	92,43	92,67	92,9	93,14	93,38
39	Tingkat Inflasi (%)	%	1,24	1,22-2,30	1,20-2,26	1,18-2,20	1,15-2,15	1,10-2,08	1,68-2,00

Sumber: Hasil Analisis

Tabel IV.3. Indikator Kinerja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	92,2	92,25	92,43	92,67	92,9	93,14	93,38
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	10,08	9,35	8,63	7,9	7,17	6,45	5,72
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	99,65	99,68	99,71	99,75	99,78	99,81	99,84
4	Kapasitas Air Baku	(m3/detik)	0,285	0,66	1,03	1,40	1,77	2,14	2,46
5	Indeks pilar adopsi TIK	Angka	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
6	Persentase Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT)	%	0	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18
7	Konsumsi listrik per kapita	kWh	1.566,16	1.667,57	1.768,98	1.870,39	1.971,80	2.073,21	2174,62
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	56,97	61,15	61,63	62,11	62,6	63,09	63,59
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	1,15	2,3	2,44	2,6	2,76	2,93	3,11
10	Jumlah titik genangan	Angka	123	123	117	111	105	99	93
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	81,16	82,01	82,87	83,74	84,62	85,51	86,41

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	n/a	62,77	63,75	67,96	69,93	69,66	71,35
14	Indeks Risiko Bencana Daerah	Angka	125,67	125,07	122,87	120,72	118,6	116,52	114,47
15	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,23	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
17	Rasio Penduduk (jenis kelamin)	%	101,1	100,99	100,75	100,51	100,26	100,02	99,77
18	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	1.847	1.624	1.643	1.662	1.682	1.702	1.722
19	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	68	68,5	68,7	68,9	70	70,2	70,5
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,61	5,75 - 6,13	5,77 - 6,17	5,79 - 6,22	5,81 - 6,26	5,82 - 6,31	5,84 - 6,36
2	Tingkat kemiskinan	%	3,15	3,00 - 2,78	2,80 - 2,57	2,60 - 2,36	2,41 - 2,15	2,22 - 1,95	2,03 - 1,75
3	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	76,56	98	98	98	99	99	100
4	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak	%	100	100	100	100	100	100	100
6	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	166.856	181.140	193.996	206.851	219.707	232.563	245.418
7	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD :								
A	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,42	1,70	1,97	2,25	2,52	2,80	3,07
B	Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,96	2,07	2,18	2,29	2,40	2,51	2,62
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,38	53,92	54,12	54,31	54,51	54,70	54,90

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,63	4,52 - 4,45	4,47 - 4,3	4,29 - 4,02	3,97 - 3,6	3,54 - 3,25	2,98 - 2,56
10	Rasio Gini	Angka	0,353	0,345 - 0,342	0,337-0,333	0,330 - 0,325	0,323 - 0,317	0,316 - 0,31	0,310 - 0,303
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	84,26	84,54 - 84,62	84,91 - 85,17	85,38 - 85,73	85,86 - 86,29	86,34 - 86,86	86,83 - 87,44
12	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,89	76,04	76,27	76,5	76,73	76,96	77,19
13	Jumlah Kematian Ibu	Orang	14	14	13	11	10	9	7
14	Jumlah Kematian Balita	Orang	4	4	4	4	3	3	2
15	Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Layanan Standar	%	50,7	70	70	70	70	70	70
16	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	72	90	93	94	95	95	95
17	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	55	60	65	70	75	80	85
18	Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	N/A	40	60	70	80	90	90
29	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	Angka	70,76	86,64	87,14	87,65	88,15	88,66	89,03
20	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun / Age Spesific Fertility Rate (ASFR 15-19)	Angka	7,4	7,2	7,1	7,1	7	6,8	6,8
21	Penanganan Tuberkulosis:								
A	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	74,29	74,29	75,576	76,862	78,148	79,434	80,72
B	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	92,08	92,08	92,48	92,87	93,27	93,66	94,06
22	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,4	0,40	0,45	0,47	0,49	0,51	0,55
23	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,5	14,4	14,3	14,2	14	13,9	13,8
24	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	11,96	12,08 - 12,13	12,11	12,13	12,16	12,19	12,22

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,84	15,85	15,88	15,91	15,95	15,98	16
26	Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	37,53 - 47,42	38,71-48,60	39,88-49,77	41,06-50,95	42,23-52,12	43,41-53,30	44,58 - 54,47
27	Hasil pembelajaran								
A	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada Asesmen tingkat nasional untuk	%							
	• Literasi Membaca	%	80,00 - 82,936	80,54-83,48	81,08-83,98	81,63-84,48	82,17-84,98	82,71-85,49	83,25 - 85,95
	• Numerasi	%	70,01 - 72,01	70,64-72,64	71,26-73,26	71,89-73,89	72,51-74,51	73,14-75,14	83,25 - 85,95
B	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional								
	• Literasi Membaca	%	84,36	84,73	85,10	85,47	85,85	86,22	86,59
	• Numerasi	%	73,71	74,44	75,16	75,89	76,61	77,34	78,06
28	Skor Kemampuan Literasi/Numerasi								
A	Skor Kemampuan Literasi SD	%	67,54	70,04	72,54	75,04	77,54	80,04	82,54
B	Skor Kemampuan Literasi SMP	%	81,28	82,38	83,48	84,58	85,68	86,78	87,88
A	Skor Kemampuan Numerasi SD	%	55,85	58,75	61,65	64,55	67,45	70,35	73,25
B	Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	68,57	70,07	71,57	73,07	74,57	76,07	77,57
29	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	74,90	75,00	75,10	75,20	75,30	75,40	75,50
30	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Angka	72,01	72,01	73,31	74,61	75,91	77,21	78,51
31	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Angka	47,77	51,86	56,1	60,34	64,58	68,82	73,06
32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	65,18	66,12	67,07	68,01	68,95	69,9	70,84
33	Persentase Pemajuan Budaya Melayu	%	6,6	6,6	1,5	3	4,5	6	7,5
34	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	n/a	70,1	70,69	71,89	72,66	73,78	74,8

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Angka	66,4	70,66 - 70,67	70,97	71,29	71,61	71,93	72,25
36	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,22	0,21	0,21	0,2	0,19	0,19	0,18
37	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,3	0,32	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42
38	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	2,02	13,26	14,43	15,6	16,76	17,93	19,1
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	%	20,56	21,5 - 21,65	21,87	22,24	22,62	23	23,39
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,56	21,5 - 21,65	21,87	22,24	22,62	23	23,39
3	Rasio PAD terhadap PDRB	%	0,58	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63
4	Rasio PAD terhadap APBD	%	34,2	34,2	35,04	35,88	36,72	37,56	38,4
5	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,68	1,7	1,75	1,82	1,9	1,98	2,05
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu orang	0,441	0,508	0,575	0,643	0,710	0,777	0,844
7	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	-						
8	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota	%	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80
9	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota	%	32,87	33,11	33,35	33,59	33,82	34,06	34,30
10	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	30,92	30,92	31,048	31,176	31,304	31,432	31,56
11	Rasio PDRB Jasa	%	5,96	5,96	6	6,04	6,08	6,12	6,16
12	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,07	4,7	4,87	5,04	5,22	5,41	5,6
13	Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	%	60	60,37	60,74	61,12	61,49	61,86	62,23
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,2	66,04	66,68	67,32	67,97	68,62	69,28
15	Indeks kapabilitas inovasi	%	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
16	Indeks Inovasi Daerah	%	68,38	70,09	71,84	73,64	75,48	76,61	77,76
17	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	6,1	6,19	6,27	6,36	6,45	6,53	6,62

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	Koefisien Variasi Harga Antarwilyah Tingkat Provinsi	Angka	8,61	8,45	8,30	8,14	7,98	7,83	7,67
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	76,05	76,28	76,52	76,75	76,98	77,22	77,45
20	Ekspor Barang dan Jasa (PDRB)	%	34,82	35,16	35,50	35,85	36,19	36,53	36,87
21	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	n/a	83,83	84,93	85,2	86,31	87,5	88
22	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	80	80	80,9	81,81	82,72	83,65	84,59
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,62	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2
24	Tingkat Inflasi	%	1,24	2-2,5	2-2,5	2-2,5	2-2,5	2-2,5	2-2,5
25	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan								
A	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	42,94	43,65	44,36	45,08	45,79	46,50	47,21
B	Total Kredit/PDRB	%	33,44	34,21	34,99	35,76	36,53	37,31	38,08
26	Jumlah Kerjasama Provinsi / Kabupaten / KotaKembar / Bersaudara (Sister Province/SisterCity)	Angka	20	23	27	30	33	37	40
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	97,54	97,71	97,87	98,04	98,2	98,37	98,53
2	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	78,50	78,50	78,83	79,15	79,48	79,80	80,13
3	Indeks Pemerintah Digital	Angka	n/a	n/a	3,7	3,85	4	4,2	4,4
4	Indeks kualitas kebijakan	Angka	60-64	60 - 64	61,40 - 65,45	62,80 - 66,90	64,20 - 68,35	65,60 - 69,80	67 - 71,25
5	Indeks Pelayanan Publik	%	91,95	92,2	92,6	93	93,4	93,8	94,2
6	Indeks Integritas Nasional	Angka	68,09	71,36	72,39	73,43	74,49	75,56	76,65
7	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	%	81	81,58	82,17	82,75	83,33	83,92	84,5
9	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,21	4,24	4,28	4,31	4,35	4,38	4,42
10	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	n/a	7,06	7,09	7,12	7,15	7,17	7,19

Sumber: Hasil Analisis

Tabel IV.4. Indikator Kinerja Kunci Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Angka Partispasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	Nilai	-	61,92	61,97	62,02	62,07	62,12	62,17
2	Angka Partispasi Sekolah (APS) 07-12 Tahun	Nilai	-	99,68	99,74	99,79	99,84	99,89	99,95
3	Angkat Partispasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	Nilai	-	98,32	98,6	98,88	99,16	99,44	99,72
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
4	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	%	86	100	100	100	100	100	100
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
5	Tingkat Kemantapan Jalan	%	76	78	80	82	84	86	88
6	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	84	86	90	90	92	94	96
7	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	80	82	85	88	89	90	90
8	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	20	20	40	60	80	90	100
9	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	80	82	82	83	85	86	88
10	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	%	86	87	87	88	89	90	92
11	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	70	72	74	75	78	78	80
12	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	70	70	70	70	70	70	70
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
13	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	4	4	4	4,2	4,25	4,3	4,35
14	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	4	4	4	4,2	4,25	4,3	4,35
15	Persentase Kegiatan yang Mengacu Pada Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	-	3.000	4.000	5.500	7.500	10.000	13.000
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	46,33	80	80	85	90	95	100
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
18	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	39,7	39,7	41,7	43,7	45,7	47,7	49,7
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
19	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,08	2,04	2,02	2,02	2	2	2
20	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	70,76	71,06	72,05	73	73,03	74,02	75
21	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	12,98	13,05	14	14,65	15,5	16,02	16,55
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
22	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	25,44	25,65	25,85	26,05	26,25	26,45	26,65
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
23	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
24	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	65	65	66	67	68	69	70
25	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	65	65	66	67	68	69	70
26	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	65	65	66	67	68	69	70
27	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	20	25	30	35	40	45	50
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
28	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	9.824,79	9.825	9.830	9.835	9.840	9.845	9.850
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
30	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	65	65	70	75	80	85	90
31	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	65	65	70	75	80	85	90
32	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	65	65	70	75	80	85	90
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
33	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	9.516,91	8.106,74	9.564,49	9.612,32	9.660,38	9.708,68	9.757,22
34	Persentase Status Kesehatan Hewan	%	91,07	94,02	94,21	94,3	94,41	94,5	94,59
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
35	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	0	0	29	57	86	100	100
36	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	0	75	75	75	75	75	75

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
37	Persentase UTP yang di tera atau tera ulang	%	0	86	88	90	92	94	94
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
38	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	0	20	20	20	20	20	20
39	Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang Diterbitkan	%	0	20	20	20	20	20	20
40	Jumlah Updating data Informasi Industri yang tersedia	%	0	20	20	20	20	20	20
5.02 - KEUANGAN									
41	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	29,4	41,34	34,21	34,14	34,2	34,34	34,55
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
42	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Pekanbaru	Level	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06
43	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06	3,07
44	Nilai Capaian Komponen Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru(AKIP)	Nilai	14,48	14,6	14,7	14,8	14,9	15	15,1
7.01 - KECAMATAN									
45	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)	Nilai	80,61	80,61	81,40	81,84	82,29	82,93	83,34
46	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	86,92	86,92	87,25	87,69	88,02	88,45	88,37
47	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	63,50	63,50	64,43	65,04	65,68	66,25	66,90

Sumber: Hasil Analisis



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dokumen ini berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan yang sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara partisipatif dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perencanaan yang berbasis bukti dan kebutuhan nyata masyarakat.

Visi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah “Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan daerah, yaitu: (1) Menjadikan nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri Kota Pekanbaru; (2) Mewujudkan sumber daya manusia unggul, berdaya saing, berakhlak, dan berbudaya; (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transformatif, bersih, melayani, dan amanah; (4) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur perkotaan dan konektivitas transportasi publik yang andal, aman, nyaman, dan ramah lingkungan; (5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana serta perubahan iklim; dan (6) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui ekonomi yang adil dan merata. Keenam misi tersebut menjadi arah strategis pembangunan Kota Pekanbaru selama periode perencanaan, dan dituangkan dalam bentuk program prioritas, indikator kinerja utama, serta target capaian pembangunan daerah.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, seluruh perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan turunan berupa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, yang secara konsisten mengacu pada sasaran dan target RPJMD. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan harus dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, dan berkelanjutan, guna memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Pekanbaru serta memperkuat identitas kota yang berbudaya.

5.2. Kaidah PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan pembangunan daerah dalam RPJMD ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Setiap perangkat daerah diamanatkan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan, di mana program prioritas harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup warga Kota Pekanbaru.

Selain itu, pelaksanaan RPJMD harus menjamin integrasi lintas sektor dan keterpaduan antarwilayah. Sinergi antara perangkat daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Pekanbaru juga berkewajiban mendorong inovasi pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Kaidah pelaksanaan RPJMD juga menekankan pentingnya responsivitas dan adaptabilitas terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, RPJMD disusun sebagai dokumen yang hidup dan fleksibel, namun tetap berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*). Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang solid, serta mekanisme evaluasi yang konsisten guna memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan secara efektif dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Dengan berlandaskan pada kaidah pelaksanaan tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kota Pekanbaru. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD akan sangat bergantung pada kualitas manajemen pembangunan, komitmen bersama, serta kesungguhan seluruh pihak dalam mewujudkan Pekanbaru yang berbudaya, maju, dan sejahtera.

5.3. PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan kualitas dokumen perencanaan yang baik:

1. Pengendalian Perencanaan:
 - a. Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari proses penyusunan hingga penetapan dokumen perencanaan
 - b. Memastikan integrasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah
 - c. Menjamin keterkaitan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
2. Evaluasi Perencanaan:

- a. Menilai kualitas dokumen perencanaan yang telah disusun
 - b. Mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dengan kebutuhan pembangunan
 - c. Menyediakan umpan balik untuk perbaikan proses dan substansi perencanaan
3. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan:
- a. Rapat koordinasi perencanaan pembangunan secara berkala
 - b. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
 - c. Konsultasi publik dengan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan sektor swasta

5.4. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini diperlukan perencanaan keuangan yang terukur dan realistis. Salah satu instrumen yang digunakan adalah pagu indikatif, yaitu perkiraan awal yang memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah. Pagu indikatif bukanlah pedoman utama dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan, melainkan merupakan perkiraan awal yang digunakan sebagai gambaran kemampuan keuangan daerah. Penyusunan pagu indikatif didasarkan pada asumsi pendapatan daerah pada tahun berjalan, seperti pendapatan asli daerah, dana transfer, dan sumber pendapatan lainnya. Asumsi ini dihitung dengan mempertimbangkan tren realisasi pendapatan serta proyeksi hingga akhir tahun, sehingga menghasilkan perkiraan yang lebih realistis. Proses penentuan asumsi pendapatan ini dilakukan melalui kesepakatan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru, guna memastikan adanya keselarasan pandangan antara eksekutif dan legislatif sejak tahap perencanaan awal. Dengan demikian, pagu indikatif berfungsi sebagai acuan awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, namun masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi keuangan dan kebijakan yang berlaku sebelum ditetapkan dalam APBD tahunan.

Dalam melaksanakan program prioritas Kota Pekanbaru, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, perluasan jaringan air bersih, pengembangan sistem transportasi massal, peningkatan kapasitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta digitalisasi layanan pemerintahan, membutuhkan proses berkelanjutan dengan tahapan yang saling terkait. Skema Pembangunan Tahun Jamak (*multi years*) merupakan salah satu alternatif dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sehingga Pemerintah Daerah dapat memastikan kesinambungan pendanaan, konsistensi target kerja, serta kepastian pelaksanaan proyek dari tahun ke tahun tanpa terhambat oleh siklus APBD tahunan. Selain itu, skema ini memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya

secara lebih efektif, meminimalkan risiko keterlambatan pembangunan, dan memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah. Melalui perencanaan berjangka panjang dan terintegrasi ini, setiap proyek strategis diharapkan dapat memberikan manfaat optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Kota Pekanbaru. Untuk menjamin terlaksananya program secara tepat waktu dan sesuai target, Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan mekanisme pengendalian yang ketat. Setiap triwulan, capaian kinerja pembangunan dipantau melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah dan tingkat pimpinan untuk mengevaluasi kemajuan serta mengidentifikasi hambatan di lapangan. Pengawasan melekat dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, didukung oleh sistem informasi terintegrasi yang memudahkan pelacakan realisasi kegiatan, alokasi anggaran, dan output yang dihasilkan.

Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan pada tiga tingkatan waktu: evaluasi tengah periode (mid-term) pada tahun 2027, evaluasi tahunan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan evaluasi akhir periode pada tahun 2030. Evaluasi-evaluasi ini menitikberatkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dapat memberikan gambaran objektif tentang efektivitas program dan menjadi dasar perbaikan kebijakan serta penyesuaian strategi pelaksanaan.

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi kepada publik, hasil pemantauan dan evaluasi disajikan dalam laporan berkala. Setiap triwulan disusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan pada akhir tahun diterbitkan laporan kinerja tahunan yang memuat capaian indikator utama. Selain itu, capaian pembangunan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi baik dari situs resmi pemerintah daerah, media cetak dan elektronik, hingga media sosial. Sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses informasi perkembangan pembangunan Kota Pekanbaru secara real time dan turut serta dalam proses pengawasan.

5.5. MANAJEMEN RESIKO

Dalam rangka menjamin ketercapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025–2029, diperlukan langkah manajemen risiko untuk mengantisipasi potensi ketidakmampuan dalam memenuhi target indikator kinerja utama. Beberapa indikator strategis yang berpotensi menghadapi kendala pencapaian antara lain penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Indeks Blue Economy (IBEI).

Target penurunan intensitas emisi GRK berpotensi tidak tercapai apabila laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan upaya mitigasi yang dilaksanakan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, ketergantungan pada energi berbasis fosil, serta keterbatasan pemanfaatan energi terbarukan di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga merupakan faktor utama penghambat. Kendala yang akan dihadapi adalah :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi konsumsi energi fosil.
2. Terbatasnya infrastruktur transportasi publik ramah lingkungan.
3. Keterbatasan anggaran daerah untuk investasi teknologi rendah karbon.
4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi program mitigasi perubahan iklim.

Strategi mitigasi yang dapat dilakukan adalah :

1. Penguatan regulasi dan pemberian insentif terhadap penggunaan energi bersih dan transportasi ramah lingkungan.
2. Peningkatan investasi pada energi terbarukan melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta.
3. Edukasi publik terkait penerapan gaya hidup rendah emisi.
4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan monitoring capaian penurunan emisi.

Selain target penurunan intensitas emisi GRK, target peningkatan IBEI berpotensi tidak tercapai juga akibat keterbatasan penerapan prinsip ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya perairan dan lingkungan perkotaan. Kota Pekanbaru, yang dilalui Sungai Siak, menghadapi tantangan serius terkait kualitas air, pencemaran limbah, serta praktik ekonomi yang belum sepenuhnya berbasis keberlanjutan. Kendala yang mungkin dihadapi adalah :

1. Tingginya pencemaran sungai akibat aktivitas rumah tangga, industri, dan perdagangan.
2. Rendahnya investasi pada sektor usaha yang berbasis prinsip ekonomi biru.
3. Lemahnya penegakan regulasi terhadap pencemaran lingkungan perairan.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas sungai dan ekosistem perairan.

Sehingga strategi mitigasi yang dapat dilakukan adalah :

1. Penguatan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mencemari lingkungan.



2. Peningkatan program pengendalian limbah cair dan pengolahan sampah berbasis masyarakat.
3. Penyusunan roadmap pengembangan ekonomi biru yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.
4. Pemberian insentif bagi sektor usaha yang menerapkan prinsip ekonomi biru.

Melalui identifikasi risiko, justifikasi kendala, dan penyusunan strategi mitigasi, Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk menjaga konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi hijau dan biru.

